

**SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 – 1949)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Direktorat
Kebudayaan

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945 – 1949) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

910 827
705
8

Penyusun:
Drs. Tashadi
Drs. Suratmin
Mulyono, B.A.
Poliman, B.A.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, September 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1986 sebagai cetakan pertama.

Buku ini di samping memuat uraian peristiwa-peristiwa penting dalam masa perjuangan kemerdekaan yang menggambarkan semangat heroisme dan patriotisme para pejuang, juga memuat uraian yang mencerminkan rasa kesetiakawanan sosial seluruh eksponen pejuang, yakni tentara dan rakyat, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instan-sional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk

melakukan penyempurnaan, perbanyak, dan penyebaran buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ke-sejarahan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, September 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ..	iii
PENGANTAR CETAKAN KEDUA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penelitian	3
B. Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Pertanggung Jawaban Ilmiah Prosedur Penelitian	8
BAB II KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)	10
A. Bidang Pemerintahan	10
B. Bidang Sosial Budaya	26
C. Bidang Kehidupan Ekonomi	31
D. Pengaruh Politik	36
E. Kegiatan Masyarakat	40
F. Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Politik/Sosial	45

BAB III	KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN	51
A.	Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan Ataupun yang Merupakan Awal dari Proses Revolusi Kemerdekaan	51
1.	Berita Proklamasi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	51
2.	Pengibaran Bendera Sang Merah Putih ..	61
3.	Pembentukan KNI Daerah	67
B.	Pembentukan Pemerintahan Republik In- donesia di Daerah Istimewa Yogyakarta	
1.	Sikap Pasukan Jepang	75
2.	Hambatan-hambatan	78
3.	Partisipasi Masyarakat	80
C.	Pembentukan Organisasi Kemiliteran (Per- juangan Bersenjata) di Daerah Istimewa Yogyakarta	86
1.	Perebutan Kekuasaan dari Jepang	86
2.	Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (BKR, Kelaskaran)	92
3.	Partisipasi Masyarakat (Dapur Umum, Palang Merah)	105
D.	Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara Nica di Daerah Istimewa Yogyakarta	107
BAB IV	PERJUANGAN DI DAERAH	114
A.	Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I	114
B.	Masa Aksi Militer Belanda I	122
C.	Masa Aksi Militer Belanda II dan Periode Perang Gerilya	135
D.	Interaksi di Daerah dengan Berbagai Ke- jadian Bersejarah Tingkat Nasional seperti	149
1.	Maklumat Pemerintah No. X	149
2.	Peristiwa 3 Juli 1946	153
3.	Perjanjian Linggarjati	155
4.	Perjanjian Renville	158

5. Pemberontakan PKI 1948	59
6. Politik Divide et Impera HJ-van Mook	162
E. Perjuangan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kegiatan/Kehidupan seperti	165
1. Tata Pemerintahan	165
2. Sosial Ekonomi	169
3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Agama dan Kepercayaan	173
4. Ilmu Pengetahuan	175
5. Pers	177
6. Kepemudaan	179
7. Kewanitaan	180
BAB V KEADAAN DI DAERAH DIY MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)	183
A. Situasi Menjelang Persetujuan KMB	183
B. Sikap Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terhadap Konperensi Antar Indonesia	193
C. Sikap Masyarakat dan Tokoh-tokoh Daerah terhadap Ide Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200
D. Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat setelah KMB dan Ide Pembentukan Negara Kesatuan	201
1. Ekonomi	201
2. Sosial	215
3. Pendidikan	216
4. Budaya	241
5. Agama	248
6. Pers	254
7. Kepemudaan	259
8. Wanita	264
9. Organisasi Profesional	266
E. Reaksi dan Pelaksanaan KMB di Daerah ...	267
BAB VI PENUTUP	

DAFTAR CATATAN	274
DAFTAR KATA (GLOSARIUM)	290
DAFTAR PUSTAKA	293
DAFTAR INFORMAN	298

BAB I PENDAHULUAN

Yogyakarta menjadi termashur oleh karena jiwa kemerdekaan-nya.

Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu! *)

*Soekarno *)*

Apabila motto tersebut kita perhatikan secara seksama, jelaslah bahwa di samping Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya juga terkenal sebagai kota perjuangan. ¹⁾ Dalam perkembangan sejarahnya, Yogyakarta senantiasa aktif mengikuti gerak dan arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Keterlibatan Yogyakarta dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tampak pada masa penjajahan, masa pergerakan, masa merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jauh sebelum datangnya masa penjajahan di Indonesia, Yogyakarta sudah muncul dalam panggung Sejarah Indonesia.

Dalam buku ini Yogyakarta yang kita maksudkan adalah Yogyakarta yang berstatus sebagai Daerah Tingkat I, yaitu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan:

1. Sebelah Utara : Karesidenan Semarang

2. Sebelah Timur : Karesidenan Surakarta
3. Sebelah Selatan: Samudra Hindia
4. Sebelah Barat : Karesidenan Kedu.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas empat Kabupaten dan satu Kotamadya (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogyakarta), dan 74 Kemantren Pamongpraja/Kecamatan; 556 Rukun Kampung/Kelurahan serta 6.656 Rukun Tetangga/Pedukuhan.²⁾

Struktur pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perkembangan sejarahnya, memiliki suatu keunikan. Sebelum kemerdekaan, Yogyakarta merupakan daerah Swapraja dengan pemerintahan Kerajaan, terbagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Masing-masing pada masa Revolusi Fisik itu diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Kekuasaan kedua pimpinan daerah ini sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda dengan melalui perjanjian yang tertuang di dalam *Politiek Contract* (dengan Kesultanan tanggal 18 Maret 1940, *Staatsblad* No. 74/1941 dan dengan Paku Alam *Staatsblad* No. 557/1941), di mana ditegaskan tentang kedudukan hukum Daerah Swapraja, tentang pembatasan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan alat kekuasaannya terhadap daerah Swapraja dan tentang tambahan kekuasaan kepada Kepala Daerah Swapraja dalam lapangan perundang-undangan.

Pada zaman pendudukan Jepang, semua peraturan dari *Saiko Sikikan* dan *Gunsaikan* berlaku pula di daerah Kesultanan/Pakualaman yang disebut Yogyakarta *Kooti* (Yogya *Koo* dan Pakualaman *Koo*). Walaupun demikian, Kesultanan/Pakualaman berhak mengeluarkan peraturan sendiri.

Sejak akhir tahun 1943 beberapa urusan yang pada zaman penjajahan Belanda diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, secara berangsur diserahkan kepada Pemerintah Kasultanan dan Pakualaman.

Dengan lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945, sebagai langkah pertama untuk melaksanakan pemerintahan demokratis di Yogyakarta, dibentuk Badan Pekerja oleh Komite Nasional Daerah pada tanggal 29 Oktober 1945 yang berfungsi sebagai badan legislatif.

Dengan dikeluarkannya peraturan No. 18/1946 yang mengatur pembentukan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta maka Komite Nasional Daerah tidak berfungsi lagi. Sementara itu pada waktu terjadi Aksi Militer Belanda I tahun 1947, terjadi perubahan terhadap pimpinan dan pemerintahan daerah, yaitu dibentuknya pemerintah militer yang dipimpin seorang Gubernur Militer dan Dewan Pertahanan Daerah. Pada waktu terjadi Aksi Militer Belanda II tahun 1948 membawa pula perubahan terhadap pemerintahan daerah, yaitu pembekuan DPRD dan DPD yang kemudian diangkat menjadi Penasehat Gubernur Militer. Selanjutnya dengan berlakunya PPRIS No. 11/1950, DPD kembali berfungsi menjalankan pemerintahan bersama-sama Kepala Daerah.

Berbeda dengan daerah lainnya, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat oleh Presiden dari keturunan yang berhak yaitu Sultan. Di samping itu terdapat Wakil Kepala Daerah DIY yang dipegang oleh Paku Alam. Sedangkan untuk Propinsi lainnya, jabatan Kepala Daerah atau Gubernur diangkat oleh Presiden dari calon-calon (paling banyak empat calon) yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.³⁾

A. TUJUAN PENELITIAN

Sejarah revolusi kemerdekaan atau revolusi fisik (1945-1949) merupakan suatu periode yang sangat penting dan menentukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode ini memberi makna dan arti yang penting bagi kelanjutan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan nasional.

Pada periode ini terjadi suatu peristiwa yang membuktikan

bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari cengkeraman penjajah. Peristiwa itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang merupakan suatu bukti sejarah bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Adapun bunyi teks Proklamasi itu sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45,
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta.⁴⁾

Bukti sejarah itu dipertegas lagi dengan pengukuhan dan pengakuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga yang berbunyi:

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."⁵⁾

Tetapi ini tidak berarti bahwa dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia itu perjuangan telah selesai. Sebab dalam mengarungi masa revolusi fisik atau revolusi kemerdekaan terbukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu masih melalui proses panjang dan penuh tantangan yang datang dari dalam dan dari luar.

Segala pengalaman yang berasal dari masa revolusi fisik itu mempunyai nilai yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan selanjutnya. Karena itu penelitian dan pengetahuan

tentang periode revolusi fisik atau masa revolusi kemerdekaan (1945 – 1949) mempunyai posisi penting dan merupakan syarat mutlak (*Conditio Sine qua non*) untuk dapat mengerti fenomena historis pada periode selanjutnya.

Penelitian dan pengetahuan tentang periode revolusi kemerdekaan yang terjadi di daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai peranan yang penting dalam menyusun sejarah Nasional, khususnya periode 1945 – 1949. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang tertuang dalam buku *Pola Penelitian, Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan* (khusus aspek Sejarah Daerah), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen P dan K tahun 1979/1980, yang antara lain berbunyi:

1. Tujuan Umum:

Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (sekarang, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

2. Tujuan khusus:

2.1. Mengumpulkan dan menyusun bahan Sejarah Daerah tentang Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah untuk melengkapi Sejarah Nasional.

2.2. Dan seterusnya. ⁶⁾

Di samping itu, mempelajari dan meneliti sejarah khususnya periode revolusi kemerdekaan, berhubungan erat dengan manfaat ilmu sejarah bagi kehidupan manusia. Selama manusia sebagai obyek dan subyek sejarah masih mempunyai keinginan untuk mengetahui perbuatan serta peristiwa masa lampau, selama itu akan terasa perlunya mempelajari sejarah. Manfaat yang dapat kita peroleh dari sejarah adalah bahwa kita dapat mengkaji, bercermin dan menilai perbuatan mana yang berkadar positif dan negatif. Juga kita dapat mengetahui perbuatan mana yang merupakan keberhasilan dan kegagalan. Dengan

demikian kita akan dapat bertindak berhati-hati dalam menentukan sikap dan langkah selanjutnya. Tepat apa yang dikatakan seorang sejarawan berkebangsaan Inggris yaitu Sir John Seeley dalam bukunya berjudul "*The Expansion of England*", yaitu "*We study history that we may be wise before the event*". Artinya, kita harus mempelajari sejarah, agar kita bijaksana lebih dahulu dan agar kita tahu ke mana harus berjalan. Selanjutnya John Seeley berkata, bahwa orang yang tidak mempelajari atau mengambil pengajaran dari sejarah sebetulnya orang yang tidak bijaksana.

Jelas, bahwa di samping tujuan yang telah tertuang dalam buku Pola Penelitian, maka di dalam penelitian dan penyusunan Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, secara tidak langsung diperoleh suatu manfaat yang besar berupa pelajaran sejarah yang mempunyai nilai positif dan konstruktif. Manfaat ini dapat pula kita jadikan tujuan penelitian, supaya dalam memberikan penilaian terhadap data dan fakta sejarah dapat diusahakan seobyektif mungkin.

B. MASALAH

Sejarah masa Revolusi Kemerdekaan merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang sangat penting, karena penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu (1945–1949). Kecuali itu dapat dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa pada zaman itu merupakan puncak perjuangan bangsa yang mempunyai nilai kesejarahan terpenting, karena dasar kenegaraan, sosial ekonomi, politik dan seni budaya bangsa Indonesia diwujudkan pada masa itu (1945–1949).

Perjuangan revolusi kemerdekaan itu sendiri, terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan berbagai corak dan ragamnya dan juga dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Hal ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian, karena itu diperlukan suatu penilaian tentang sejarah periode revolusi kemerdekaan di daerah-daerah secara lebih luas, terperinci dan mendalam untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat.

Dalam melaksanakan penelitian sejarah revolusi kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat juga masalah yang langsung dirasakan oleh tim, antara lain:

1. Sangat banyaknya sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, sehingga dalam seleksi data banyak memakan waktu, dan kadang-kadang menyulitkan karena adanya data yang saling berbeda/bertentangan.
2. Sumber lisan yang berasal dari informan yang merupakan pelaku pada masa revolusi kemerdekaan, kadang-kadang sukar diperoleh, karena informan tersebut sukar dihubungi, karena kedudukan atau jabatannya.
3. Pada umumnya beberapa peristiwa sama seperti peristiwa yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan beruang lingkup nasional. Sehingga mendaerahkan peristiwa nasional terasa kurang tepat. Tetapi dalam beberapa peristiwa tidak mungkin dihindari.
4. Sejarah daerah khususnya periode sejarah zaman Revolusi Kemerdekaan, yang beruang lingkup nasional ada yang tidak terjadi/terdapat di daerah.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan penelitian ini mempunyai ruang lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun obyek penelitiannya adalah Sejarah Daerah khususnya periode Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1945–1949 dan yang meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama/kepercayaan, organisasi masyarakat, kepe-

mudaan, kewanitaan, pers dan bentuk organisasi profesional lainnya.

Secara garis bsar, segi-segi yang menjadi ruang lingkup penelitian tersebut akan dicoba dibicarakan:

1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan yang antara lain berisi hal-hal: pertumbuhan negara, perkembangannya sehingga menjadi negara, susunan pemerintahannya, status dari pimpinan atau pemerintahan, pengaturan di dalam negara dan hubungannya dengan negara lain.
2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, khususnya akan diuraikan antara lain: pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, organisasi masyarakat, nilai-nilai sosial dan pola kehidupannya.
3. Kehidupan seni budaya. Salah satu aspek kebudayaan adalah kegiatan kesenian yang timbul dari impuls rasa indah yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam kehidupan pendidikan akan dibicarakan masalah pendidikan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangannya, khususnya dalam masa revolusi kemerdekaan (revolusi fisik).
4. Alam pikiran dan kepercayaan. Tentang masalah ini akan diuraikan latar belakang sejarahnya, sistem kepercayaannya termasuk pemuka agama/kepercayaan dan kegiatannya.
5. Dan lain-lain yang merupakan aktifitas sosial politik yang terjadi di daerah dalam masa revolusi kemerdekaan (revolusi fisik).

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian sejarah zaman Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - 1.1. Tahap kolekting data, ditempuh dengan cara:
 - 1.1.1. Penelitian kepustakaan, merupakan kegiatan pencatatan dan pengumpulan fakta dan data

yang berasal dari sumber pustaka (bibliografi).

- 1.1.2. Wawancara, ditujukan kepada para informan baik yang menghayati maupun yang merupakan pelaku dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Revolusi Kemerdekaan.
- 1.1.3. Penelitian lapangan, merupakan kegiatan pelengkap/tambahan dalam rangka menguji dan mengecek fakta dan data yang telah ada. Kecuali itu juga merupakan usaha kegiatan untuk mencoba menggali dan melengkapi fakta dan data yang baru.
- 1.2. Tahap pemilihan/penyeleksian fakta dan data.
- 1.3. Tahap pengolahan/penyusunan fakta dan data (draft I).
- 1.4. Tahap penelitian draft I.
- 1.5. Tahap editing naskah.
2. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh suatu tim terdiri dari:
 - 2.1. Ketua tim : Drs. Tashadi (Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, Yogyakarta/sekarang Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional).
 - 2.2. Anggota :
 - Drs. Suratmin
 - Mulyono BA
 - Poliman BASemuanya berasal dari Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, Yogyakarta/sekarang Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
3. Metode: Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan adalah:
 - Diskriptive eksplorasi literatur.
 - *Comparative method*/metode perbandingan. Analisa yang digunakan adalah deskriptif sejarah.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pada zaman pendudukan Jepang kebangkitan keprajuritan bangsa Indonesia jauh lebih luas dari pada sebelumnya. Menjelang pecahnya Perang Dunia II dan Perang Pasifik Jepang sudah memasukkan agen-agennya ke Indonesia untuk mempersiapkan *Field Preparations* Tindakan Jepang itu untuk membantu usaha invasinya. Untuk keperluan itu Jepang menghubungi beberapa tokoh Indonesia dari golongan nasionalis dan golongan agama, dengan harapan dapat membantu mereka setelah tiba saatnya.¹⁾

Jepang ingin menguasai Asia Tenggara yang kaya raya dan strategis itu dengan dalih membangun suatu daerah di lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mencapai maksudnya itu Jepang mengerahkan seluruh tenaga ke Asia Tenggara, (Indo Cina/Vietnam, Laos, Thailand, Burma, Malaya, Filipina, Indonesia) dan pulau-pulau Oceania.

Di dalam pergolakan dunia waktu itu jelas sekali kelihatan politik dan strategi Jepang itu mempunyai tujuan untuk merebut Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tujuan utama, karena Indonesia diharapkan dapat memberikan posisi yang

strategis dan sumber bahan baku untuk melanjutkan peperangan.

Di pihak lain, negara-negara penjajah (Barat) yang ada di Asia Tenggara tidak bersedia untuk berperang, karena mereka adalah negara-negara kolonial yang sedang berperang di Eropa, sehingga tidak cukup kekuatannya untuk menghadapi Jepang. Apalagi Belanda yang pada saat itu mula-mula menganut politik netral, artinya Belanda tidak mengikatkan diri kepada sesuatu persekutuan militer, tetapi akhirnya terseret juga dalam perang dunia.

Setelah menyerang Pearl Harbour yakni pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik, kemudian Jepang bergerak ke Selatan dan menyerang Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1942 tentara Jepang telah sampai di Tarakan, Kalimantan Timur, dan Komandan Belanda di pulau itu menyerah pada tanggal 13 Januari 1942. Seminggu kemudian, pada tanggal 20 Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak diduduki pula oleh Jepang. Setelah pada tanggal 2 Pebruari 1942 Pontianak jatuh, menyusullah pada tanggal 10 Pebruari 1942 Martapura. Dengan direbutnya lapangan terbang, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki pada malam hari itu juga.

Dalam gerakannya ke Indonesia, pada tanggal 14 Pebruari 1942 diturunkan pasukan payung di Palembang. Dua hari kemudian yakni pada tanggal 16 Pebruari 1942 Palembang dan sekitarnya diduduki. Dengan jatuhnya Palembang terbuka pula Jawa bagi balatentara Jepang. Kekuasaan yang khusus dipergunakan untuk merebut Jawa berada di bawah Komando Tentara keenambelas yang dipimpin oleh Letnan Jendral Hitosi Imamura. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentaranya mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah).²⁾

Tentara Jepang yang mendarat di Pulau Jawa jumlahnya tidak sebanyak tentara Belanda yang mempertahankan Jawa.

Tetapi mereka lebih bersemangat dan berani tempur. Kebanyakan tentara Belanda lari mundur setelah Jepang menduduki daerah pantai Utara. Tentara Jepang lebih mudah mematahkan perlawanan musuhnya, karena umumnya rakyat tidak mau menyokong tentara Belanda. Jepang melakukan taktik perang dengan baik, sedangkan tentara Belanda tidak mendapat dukungan dari rakyat, maka tentara Belanda kehilangan semangat tempur dan morilnya pun patah.

Pendaratan di Rembang berhasil dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dari Rembang bergerak satu kolone ke Jawa Tengah yang segera merebut Semarang, Magelang, Solo, Yogyakarta dan terus mengejar tenaga induk Divisi II KNIL ke jurusan Priangan. Dengan mudah Jepang mengambil alih kedudukan Belanda di seluruh wilayah Indonesia. Maka terjadilah perpindahan penjajah dari tangan Belanda ke tangan Balatentara Jepang.

Setelah pendaratan itu, Balatentara Jepang bergerak dari Solo masuk ke Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1942. Yogyakarta dinyatakan sebagai kota terbuka yang berarti bahwa kota Yogyakarta tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Dari pihak Belanda tidak ada perlawanan terhadap Balatentara Jepang, sebab tentara Belanda sudah melarikan diri ke jurusan Cilacap dengan tujuan meloloskan diri ke Australia. Tetapi malang nasib tentara Belanda yang lari ke Cilacap itu, karena sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka dapat disergap di Gombang dan banyak yang terbunuh. Sedangkan pegawai sipil Belanda yang masih berada di kota oleh Balatentara Jepang ditangkapi. Mereka ditawan dan dimasukkan internierungskamp di Sekolah Dasar Netral (= sekarang Toko Samijaya dan Hotel Mutiara).

Setelah Balatentara Jepang masuk kota, mereka lalu menyuruh penduduk kampung mengambil (merampok) isi rumah orang Belanda. Terjadilah kekacauan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang kampung mengambil barang milik orang

Belanda dari rumah dan gedung yang mereka masuki. Situasi yang mengacaukan ini kemudian digunakan oleh Jepang dengan berpura-pura marah terhadap rakyat karena terjadinya perampokan. Mereka mengeluarkan "Undang-undang" melarang perampasan. Mereka memerintahkan agar semua barang rampasan dikembalikan dan dikumpulkan di suatu tempat yang ditentukan.

Dengan demikian Jepang dapat cuci tangan dari noda, supaya kelihatan bahwa kedatangan Jepang betul-betul untuk maksud suci, yaitu menegakkan keadilan dan bukan untuk merampas hak milik penduduk. Dasar rakyat tidak ada niat jahat, meskipun sebagian kecil tentu ada yang berniat jahat, maka perintah pengembalian barang rampasan itu ditaati. Barang rampasan itu dikumpulkan pada suatu tempat atau diletakkan di pinggir jalan di bawah pohon asam. Tetapi barang yang dikembalikan itu tidak ada satu orang Belanda pun yang mengambilnya. Karena mereka sudah masuk interniran. Sedangkan pihak Jepang mulai membutuhkan rumah dan perabotnya. Jepang lalu menempati rumah yang kosong dan mengambil barang rampasan yang sudah dikembalikan rakyat untuk dipakainya sendiri.

Jadi sebenarnya perampasan itu dilakukan oleh Jepang yang sedang datang, tetapi dengan pinjam tangan rakyat kampung. Hal ini supaya kelihatan kalau Jepang benar-benar jujur, dan suci yang membawa keadilan, keamanan serta kemakmuran. Mula-mula Jepang datang untuk merampas hak milik orang Belanda dengan meminjam tangan rakyat Indonesia. Kemudian rakyat digedor habis-habisan yaitu diperas tenaga dan kekayaannya sampai tiga setengah tahun lamanya. Beberapa hari kemudian setelah Jepang menduduki kota Yogyakarta, mulailah Jepang melancarkan propaganda. Melalui siaran radio yang langsung dipancarkan dari Tokyo, setiap jam tujuh sore terdengar lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian disusul dengan salam sebagai pembuka kata. Setelah itu dilanjutkan dengan propaganda Jepang bahwa Jepang adalah saudara tua

orang Asia, ingin membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jendral H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jendral H. Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak saat itu berakhirlah Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang.³⁾

Mulai saat itu Jepang mengatur susunan pemerintahannya di Yogyakarta. Pemerintahan sipil yang telah ada sejak jaman Belanda diteruskan hanya orang-orangnya dan nama instansi yang diganti. Jabatan Gubernur pada masa pemerintahan Belanda diganti oleh Jepang menjadi *Syucokan*, dan berkediamaan di Gedung Agung yang sebelumnya juga tempat kediaman Gubernur pada jaman Belanda. Perkantoran untuk menjalankan pemerintahan atau kerja sehari-hari menggunakan Gedung Seminari di Kota Baru. Tidak ketinggalan setiap kantor mengibarkan bendera Hinomaru.

Keadaan ini berlaku setelah Jepang berkuasa di Indonesia dan menetapkan Undang-undang No. 1, tentang menjalankan pemerintahan balatentara Jepang. Dalam Undang-undang itu ditetapkan bahwa Balatentara Jepang untuk sementara melangsungkan pemerintahan militer di daerah yang telah diduduki. Selanjutnya ditentukan bahwa badan pemerintahan dengan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara waktu diakui sah, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Wilayah bekas Hindia Belanda yang semula hanya merupakan satu pemerintahan sipil, pada jaman Jepang menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan, yakni:

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat keenambelas di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat kedua puluh lima di

Pulau Sumatera dengan pusatnya Bukittinggi.

3. Pemerintahan militer Angkatan Laut di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat (sekarang, Irian Jaya) dengan pusatnya di Makasar (sekarang, Ujung Pandang).

Pemerintah militer tersebut terdiri atas *Gunseireikan* (Panglima Balatentara Jepang, yang disebut *Saiko Sikikan*) sebagai pucuk pimpinan. Di bawah pejabat ini terdapat *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang) dan kepala-kepala berbagai departemen, misalnya *Soomubutyoo* (Kepala Departemen Urusan Umum) *Gunseireikan* menetapkan peraturan yang dinamakan *Osamu Seirei*, sedang peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* disebut *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu* (Kantor *Gunseikan*) dan bernomor urut dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pemberitaan *Kan Po* yang diterbitkan oleh *Gunseikanbu* di Jakarta dapat diketahui tata pemerintahan daerah di Jawa/Madura pada masa pendudukan Jepang. Dalam bulan Agustus 1942 *Gunseireikan* menetapkan Undang-undang 1942/27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang ini di Jawa dibagi dalam daerah *syuu* = residentie jaman Hindia Belanda) dan *Si* (*Stadsgemeente*). Diadakan pula *Tokubetsu Si* (*Stadsgemeente* luar biasa), yaitu kota yang sangat penting dalam lapangan politik ekonomi, sosial dan kebudayaan yang khusus ditunjuk oleh *Gunseikan*. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta merupakan satu-satunya kota yang ditunjuk sebagai *Tokubetsu Si*.

Untuk *Syuu* dan *Tokubetsu Si* ditetapkan Undang-undang 1942/28 tentang aturan pemerintahan *Syuu* dan aturan pemerintahan *Tokubetsu*. Sedang untuk *Ken* dan *Si* ditetapkan *Osamu Seirei* 1943/12 tentang *Ken* dan *Si* serta *Osamu Seirei*, 1943/13 tentang peraturan daerah *Ken* dan *Si* serta peraturan *Zi-Sei-Bh* No. 1616 (Peraturan Keuangan *Ken* dan *Si*).

Dalam garis besarnya peraturan di atas menurut ketentuan pokok sebagai berikut:

1. *Syuu* merupakan daerah tingkat teratas yang mempunyai pemerintahan sebagai suatu kesatuan dalam masa pemerintahan militer Jepang. *Syuu* membawahkan *Ken* dan *Si* dalam lingkungan wilayahnya, *Tokubetsu Si* mempunyai kedudukan yang lebih kurang sama seperti *Syuu*, karena itu tidak berada di bawah sesuatu *Syuu*, melainkan langsung di bawah *Gunseikan*.
2. Untuk masing-masing daerah itu diangkat seorang kepala daerah (*Syuuityookan*, *Tokubetsu Sityoo* dan *Kentyoo* dan *Sityoo*).
3. Ketentuan-ketentuan dalam *regentschapsordonnantie* dan *stadsgemeente-ordonnantie* dulu tetap berlaku bagi *Ken* dan *Si* (termasuk *Tokubetsu Si*).
4. Wewenang yang dulu dijalankan oleh *Raad* dan *College* pemerintah harian daripada *regentschap* dan *stadsgemeente* kini semuanya dijalankan oleh *Kentyoo* dan *Sityoo*.
5. Sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan perwakilan rakyat dilaksanakan secara konsekuen sampai September 1943. Dalam bulan tersebut ditetapkan peraturan yang mengatur pembentukan dewan, baik di pusat maupun di daerah yang berfungsi sebagai badan penasehat bagi pejabat tunggal. Tetapi dalam lingkungan pemerintahan daerah, dewan ini hanya diadakan di *Syuu* dan *Tokubetsu Si*.
6. *Si* menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam lingkungan wilayahnya. Urusan pemerintahan umum (pangreh praja) yang dalam *Stadsgemeente* dulu diurus oleh *regent* dan pejabat bawahannya kini dipegang oleh *Sityoo*.
7. Pengawasan terhadap daerah otonom yang dulu dipegang oleh Gubernur Jendral dan aparaturnya pemerintah propinsi kini semuanya dilakukan oleh *Gunseikan*.⁴⁾

Tetapi usaha untuk membentuk pemerintahan setempat

ternyata tidak *berjalan lancar*, disebabkan Jepang kekurangan staf pegawainya, sehingga terpaksa diangkat pegawai bangsa Indonesia:

- Di samping itu, pemerintah militer Jepang mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Undang-undang No. 4, bahwa hanya bendera Jepang (kokki atau Hinomaru) yang boleh dipasang pada hari besar. Dan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan adalah lagu Kimigayo. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942, waktu Jepang yang dipakai. Waktu tersebut menggantikan waktu Jawa pada jaman Hindia Belanda, yang sama dengan WIB. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang dipakai ialah tarikh Sumera dan tahunnya adalah tahun 2602. Demikian pula sejak saat itu rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya *Tencosetsu* setiap tahunnya, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.

Mengenai persekutuan masyarakat adat dan *zelfsbesturende landschappen* di Jawa, pada umumnya tetap dipertahankan seperti keadaan pada jaman Hindia Belanda. Nama-namanya diubah, yaitu desa disebut *Ku* dan *landschap* dinamakan *Kooti*. Para raja *landschappen* itu dengan melalui pengambilan sumpah dan pelantikan baru untuk memutuskan hubungannya dengan Kerajaan Belanda disebut *Koo*, kedudukan *Koo* dianggap sebagai anggota keluarga dari raja Jepang.

Pemerintah balatentara Jepang yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945 pada umumnya tetap meneruskan politik desentralisasi Hindia Belanda. Tetapi pembentukan daerah dihubungkan dengan siasat militer untuk menghadapi pelbagai kemungkinan dalam masa perang itu. Sebagai daerah yang dianggap terpenting, ialah *Syuu* (termasuk *Tokubetsu Si* dan *Kooti*) yang diharapkan dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri terutama pangan. Pemerintah daerah *Syuu* dipegang oleh seorang pejabat tunggal supaya dapat bertindak cepat. Usaha *Syuu tyookan*, terutama ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerahnya. Semua peraturan, tindakan pemerintah Balatentara Jepang dan yang mengenai

pemerintahan Jepang ditujukan untuk kepentingan dan usaha perang.

Pada zaman pendudukan Jepang, Yogyakarta juga mengalami beberapa perubahan susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan, yaitu Kabupaten Yogyakarta yang dulunya mempunyai urusan meliputi daerah Kalasan, Sleman dan Godean. Sekarang dipecah menjadi 2 (dua) yakni: Kabupaten Kota dan Kabupaten Sleman, yang daerahnya meliputi Kawedanan-kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean.

Nama Kabupaten dalam bahasa Jepang disebut *Si*. Di Yogyakarta tidak mempunyai status *Gemeente*. Jadi masih tetap di bawah pemerintahan *Zelfbestuur* yang berpusat di Kepatihan Danurejan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dahulu disebut *Zelfsbestuur*, yaitu pemerintahan yang diatur sendiri, mempunyai adat peraturan sendiri dan tidak harus menurut peraturan pemerintah jajahan Belanda yang berpusat di Batavia. Meskipun demikian pemerintah Kasultanan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah Belanda.

Para Sultan selama itu berkedudukan sebagai Kepala Daerah/Kasultanan, tetapi tidak aktif memegang pemerintahan. Yang memegang pemerintahan adalah *Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)*, dengan sebutan *Radent Aria Adipati Danurejo*.

Pada zaman Belanda status Kasultanan Yogyakarta diatur dengan kontrak politik. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh *Rijksbestuurder* yang diangkat oleh raja, tetapi harus dengan persetujuan Belanda. Sebelum memangku jabatannya, *Rijksbestuurder* itu harus bersumpah pada Belanda bahwa jika ada konflik antara Belanda dan Raja, *Rijksbestuurder* harus memihak kepada Belanda. *Pepatih Dalem* bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sri Sultan, untuk itu *Pepatih Dalem* mendapat gaji dari Gubernur dan Kasultanan. Kontrak Politik yang terakhir adalah antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Jendral Belanda pada tanggal 18 Maret 1940

(Stb. tahun 1941 No. 47).

Dalam kontrak politik itu dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Hindia Belanda, sedang Hindia Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, karena itu Sri Sultan mengakui kekuasaan Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jendral.

Menurut Pasal 24 Kontrak Politik tersebut maka untuk kepentingan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan dapat mengeluarkan peraturan, tetapi menurut pasal 25, sebelum peraturan itu dapat berlaku terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur Belanda, dan untuk dapat mengikat penduduk, peraturan itu harus dicantumkan dalam *Rijksblad*. Sedangkan menurut pasal 13, dalam melakukan kekuasaan itu Sri Sultan dibantu oleh *Rijksbestuurder* atau Papatih Dalem yang diangkat atau diberhentikan oleh Gubernur Jendral setelah berunding dengan Sri Sultan. Dalam prakteknya yang menjalankan pemerintahan di Kasultanan sehari-hari tidak lain adalah Papatih Dalem. Mengingat kedudukan Papatih Dalem yang merupakan pegawai Kasultanan dan pegawai Gubernemen, maka semua yang dikerjakan oleh Papatih Dalem mesti harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Belanda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebenarnya yang memerintah Kasultanan adalah Papatih Dalem dengan persetujuan Gubernur.⁵⁾

Pada masa pendudukan Jepang Kemantren Panembahan dan Kemantren Kadipaten dijadikan satu menjadi satu Kemantren Kraton. Selanjutnya Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Karangwaru menjadi satu Kemantren Tegalrejo. Sedangkan Kelurahan Kuncen (ditambah dengan sebagian daerah Kemantren Mantrijeron yang terletak sebelah barat Sungai Winongo), menjadi Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan ini maka di dalam kota terdapat dua belas Kemantren dan dua orang Bupati. Bupati kota Kasultanan adalah KRT. Harjodiningrat dan daerah Kota Paku Alaman dipimpin langsung oleh Bupati Patih Paku Alaman KPA Suryoatmojo.

Wedana dan Asisten Wedana dalam kota dihapuskan dan sebutan Mantri Kepala Kampung telah lama diubah menjadi Mantri Pangreh Praja. Perubahan ini dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. sebelum Jepang menduduki Indonesia dan para Mantri Pangreh Praja berhubungan langsung dengan Bupati Kota tersebut.

Pada tanggal 1 Agustus 1945 jabatan Papatih Dalem (*Rijksbestuurder*) kosong dan tidak diisi lagi. Sultan Hamengku Buwono IX memegang pimpinan sendiri. Lalu diadakan *Wardiyapati*, sebagian pekerjaan yang terlalu besar dimasukkan dalam *Paniradyapati*. Tetapi pekerjaan yang kecil dijadikan *paniradyapati* sendiri. Tiga *Utaradya* yang diadakan ialah:

1. Urusan Pegawai
2. Pemeriksa Keuangan
3. *Sridarmyuki* (Pengadilan Darah Dalem).⁶⁾

Dengan adanya reorganisasi Kabupaten-Kabupaten pada zaman penjajahan Jepang di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Kabupaten Yogyakarta yang meliputi Kawedanan-Kawedanan kota Sleman dan Kalasan. Kemudian dijadikan Kabupaten yang berdiri sendiri, dikepalai seorang Bupati Kota dengan sebutan *Sityoo*. Dengan demikian, Kabupaten Kota tidak dinamakan *Yogyakarta Ken*, melainkan diberi nama *Yogyakarta Si*. Sekalipun *Si* dalam bahasa Jepang sebenarnya berarti *Stadsgemeente* atau Kota Otonom. Meskipun Yogyakarta telah mengalami perubahan nama, tetapi tetap merupakan daerah Kabupaten yang bersifat administratif yang tidak mempunyai kekuasaan otonomi sama sekali. Di samping itu Yogyakarta *Sityoo* hanya mempunyai kekuasaan di atas kota Yogyakarta, yang menjadi bagian dari Kasultanan. Bagian Kota Yogyakarta yang menjadi daerah Paku Alaman dipimpin sendiri oleh pemerintah Paku Alaman, dengan petugas seorang Bupati. Dengan demikian kota Yogyakarta pada saat itu mempunyai dua orang Bupati Kota, ialah Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman.

Sejak jaman pendudukan Jepang pekerjaan Mantri Pamong Praja menjadi makin berat. Di samping urusan administrasi terutama Mantri Pangreh Praja berkewajiban menggerakkan rakyat dalam berbagai lapangan untuk kepentingan peperangan.

Rukun Tetangga (*Tonari Gumi*) dan Rukun Kampung (*Aza*) dibentuk dinyatakan sebagai badan pemerintah yang ter-bawah serta turut aktif dalam lapangan pemerintahan. Sejak waktu itu bagi Mantri Pangreh Praja tidak mungkin lagi meng-adakan hubungan langsung dengan penduduk, melainkan harus melalui *Azatyo* dan *Tonari Gumityo*.

Dalam perkembangan sejarah, pada mulanya Rukun Kam-pung (jaman Belanda) adalah organisasi masyarakat, yang be-kerja dalam lapangan sosial (gotong royong dalam hal kematian, perkawinan dan lain-lain). Kemudian pada jaman Jepang ke-dudukan Rukun Kampung diperkuat. Karena pemerintah pen-dudukan Jepang mengerti benar, bahwa dalam susunan Rukun Kampung terdapat unsur yang dapat menjadi kekuatan untuk membantu peperangan.

Nama Rukun Kampung diganti *Aza*, ketuanya disebut *Azatyoo*, sedangkan Rukun Tetangga disebut *Tonari Gumi* yang semula sebenarnya belum terbentuk. Kedudukan Rukun Kampung di Yogyakarta, adalah badan pemerintah yang paling bawah. Setelah diaktifkan maka Rukun Kampung menjadi *verlengstuk* (perpanjangan) dari Kemantren Pangreh Praja. Tetapi pengurus Rukun Kampung adalah tenaga yang dipilih oleh rakyat dan tidak menerima gaji dari Pemerintah, jadi merupakan tenaga perjuangan dan sosial.

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang terjadi per-ubahan tidak hanya dalam aparatur pemerintahan, tetapi juga di segala bidang. Meskipun demikian perubahan pada bidang pemerintahan ini tidak banyak menyimpang seperti pada zaman Belanda.

Kalau pada kota besar lainnya perubahan itu sampai pada nama jalan, kantor atau jawatan, dan jembatan yang diganti

dengan istilah Jepang (pada jaman Belanda nama bangunan dan jalan di kota kebanyakan menggunakan istilah Belanda, tetapi tidak demikian halnya di Yogyakarta. Perubahan nama di Yogyakarta tidak dapat dijalankan, karena sebelum Jepang bertindak, nama-nama tersebut telah diganti dengan nama Jawa asli. Penggantian nama-nama tersebut tentu saja atas perintah Sultan Hamengku Buwono IX. Akibatnya Pemerintah Balatentara Jepang tidak mempunyai alasan lagi untuk menggantikan dengan nama (istilah) Jepang.

Setelah penjajahan Jepang berlaku di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, kedudukan daerah Kasultanan Yogyakarta diatur juga oleh Jepang, seperti di bawah ini. Perintah Balatentara Dai Nippon mengumumkan:

1. *Dai Nippon Gunseireikan* (Panglima Besar Balatentara Jepang mengangkat Hamengku Buwono IX menjadi *Ko* (Sultan) Yogyakarta.
2. *Ko* turut di bawah *Dai Nippon Gunseireikan* serta harus mengurus pemerintahan *Koti* (Kasultanan) menurut perintah *Dai Nippon Gunseireikan*.
3. Daerah *Koti* adalah daerah Kasultanan Yogyakarta dahulu.
4. Segala hak istimewa yang dahulu dipegang oleh *Ko* pada dasarnya diperkenankan seperti sedia kala.
5. Terhadap *Dai Nippon Gunseireikan* *Ko* berkewajiban mengurus segala pemerintahan *Koti*, supaya memajukan kemakmuran penduduk *Koti* umumnya.
6. Badan-badan pemerintahan *Koti* yang dahulu, buat sementara waktu harus meneruskan pekerjaannya seperti sedia kala, kecuali kalau menerima perintah yang ditetapkan teristimewa.
7. Untuk mengawasi dan memimpin pemerintahan *Koti* diadakan *Koti Zymukyoku* (Kantor Urusan Kasultanan) di *Koti* oleh *Dai Nippon Gunseireikan*. *Koti Zimukyokutyokan* (Pembesar Kantor Urusan Kasultanan) diangkat

oleh *Dai Nippon Gunseireikan*.

8. Selain itu, aturan-aturan untuk mengurus pemerintahan *Koti* ditunjukkan oleh *Gunseikan* (Pembesar Pemerintahan Urusan Kasultanan) diangkat oleh *Dai Nippon Gunseireikan*.

Betawi, tanggal 1, bulan 8, tahun Syowa
17 (Koki 2602)

Dai Nippon Gun Seireikan
Hitosi Imamura

Selain perintah dari Panglima Besar tentara penjajahan Jepang yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus di atas, maka juga dikeluarkan petunjuk dari *Gunseikan* seperti berikut:

Petunjuk:

Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang) yang berdasar atas perintah Balatentara Jepang kepada *Ko* (Sultan).

1. Kedudukan *Ko* diangkat atau dipecat oleh Dai Nippon Gunseireikan (Panglima Besar Balatentara Jepang).
2. Perhubungan antara Balatentara Jepang dan *Ko* serta *Koti* (Kasultanan) ditetapkan dengan Perintah *Gunseireikan* atau dengan petunjuk *Gunseikan*.
3. *Somutyokan* (Pembesar Urusan Umum) diadakan untuk membantu jabatan *Ko* dan *Somutyokan* itu diangkat oleh Gunseireikan dari antara pegawai penduduk asli *Koti* yang diurus oleh *Ko*. *Somutyokan* hendaklah selalu memperkuat perhubungan dengan *Koti Zimukyokutyokan* (Pembesar Kantor Urusan Kasultanan) tentang rencana dan urusan segala hal pemerintahan, sedangkan tentang perkara yang penting harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari *Koti Zimukyoku-tyokan*, sebelum ditetapkan.
4. Balatentara Kasultanan yang dahulu ada harus dibubarkan.

5. *Ko* diperkenankan mengadakan pegawai selaku prajurit untuk menjaga *Ko* dan Keraton.
6. Kekuasaan kepolisian di *Koti* dijalankan oleh *Koti Zimukyoku-tyokan*.
7. Undang-undang yang diumumkan oleh Balatentara Jepang semuanya berlaku juga pada *Koti*, kecuali kalau ada perintah istimewa.
8. *Ko* diperkenankan mengeluarkan *angger-angger* (peraturan) *Koti* yang perlu untuk mengurus pemerintahan *Koti*, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang yang diumumkan oleh Balatentara Jepang. Tetapi waktu *Ko* mengeluarkan *angger-angger Koti*, lebih dahulu harus mendapat izin dari *Koti Zimukyoku-tyokan* supaya *angger-angger* dapat diumumkan.

Betawi, tanggal 1. bulan 8, tahun Syowa
17 (Koki 2602)

Gunseikan
Leizabure Okazaki

Dari petunjuk *Gunseikan* tanggal 1 Agustus 1942 ini jelas, bahwa Papatih Dalem atau Somutyokan diangkat oleh *Gunseireikan* atas usul Sri Sultan atau *Yogya Ko* dan mengenai hal-hal yang penting, *Somutyokan* harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari *Koti Zimukyokutyokan* (Gubernur Jepang).

Jelas juga dari petunjuk ini, bahwa semua undang-undang dari penjajahan Jepang berlaku bagi daerah Kasultanan atau *Koti*, kecuali jika ditentukan lain.

Di samping itu Sri Sultan berhak mengeluarkan peraturan untuk mengatur daerah Kasultanan asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tentara penjajahan Jepang dan asal peraturan itu lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari *Koti Zimukyoku-tyokan*.⁷⁾

Pada zaman Jepang Sri Sultan Hamengku Buwono IX sedikit

demikian sedikit mengurangi peranan dan kekuasaan Papatih Dalem. Perubahan struktur pemerintahan Sri Sultan pada zaman Jepang dirasa perlu sekali, karena pada zaman penjajahan Belanda Papatih Dalem ini sebenarnya merupakan alat penjajahan Belanda untuk diadu domba dengan Sri Sultan. Hal ini supaya tidak terulang lagi, maka pada zaman Jepang, Papatih Dalem diperintahkan Sri Sultan untuk berkantor di Kraton. Dengan demikian pihak penjajah Jepang apabila ingin mengadakan hubungan dengan Sri Sultan tidak usah melalui Papatih Dalem, tetapi langsung dengan Sri Sultan.

Untuk lebih memperkecil peranan dan kekuasaan Papatih Dalem, maka Sri Sultan membagi pemerintahan Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang diberi nama *Paniradya* (*Pani* = tangan, *radya* = pemerintah atau negara), yang masing-masing dikepalai seorang kepala jawatan yang diberi nama *Paniradyapati* (*pati* = kepala). Pada mulanya Pemerintah Kasultanan dibagi dalam 6 *paniradya*, ialah:

1. *Paniradya Kapanitran* (Kantor Sekretariat).
2. *Paniradya Ayahan Umum* (Jawatan Urusan Umum).
3. *Paniradya Ekonomi* (Jawatan Perekonomian).
4. *Paniradya Wiyatapraja* (Jawatan P dan K).
5. *Paniradya Yayasan Umum* (Jawatan Pekerjaan Umum).
6. *Paniradya Racana-Pancawara* (Jawatan Urusan Rancangan dan Propaganda).

Kemudian *Paniradya Ayahan Umum* (Jawatan Urusan Umum) dipecah lagi menjadi dua, yang diberi nama *Paniradya Pariarta* (Jawatan Keuangan), yang juga dikepalai seorang *Paniradyapati* tersendiri.

Dahulu segala kekuasaan pemerintahan Kasultanan dipusatkan pada Papatih Dalem, setelah dibentuknya *paniradya-paniradya* segala kekuasaan ditangani oleh *paniradya-paniradya* tersebut. Segala kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Patih Dalem, beralih ke tangan para *Paniradyapati*. Secara formal Papatih Dalem itu masih ada, tetapi kenyataannya sudah tidak berkuasa lagi.

Kerja sehari-hari para Paniradyapati langsung dipimpin Sri Sultan, sehingga secara langsung tanggung jawab mereka kepada Sri Sultan bukan lagi kepada Papatih Dalem. Setelah Papatih Dalem yang terakhir yakni KPHH Danuredjo VIII dipensiun pada tanggal 1 Agustus 1945, maka Sri Sultan tidak mengangkat lagi Papatih Dalem. Sejak itu Sri Sultan sendiri yang menjalankan tugas dan kekuasaan Papatih Dalem sehari-hari dengan berkantor di Kepatihan dan dibantu oleh para Paniradyapati.

Politik Sri Sultan dengan jalan menghapuskan fungsi Papatih Dalem dan menggantinya dengan Paniradyapati tersebut, tidak hanya berhasil mematahkan politik adu domba penjajah antara Papatih Dalem dengan Sri Sultan demi kepentingan penjajah. Tetapi politik Sri Sultan itu secara psikologis merupakan langkah politik yang tepat untuk menghadapi saat-saat yang bersejarah yakni Proklamasi Kemerdekaan.

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, bidang pendidikan pada zaman pendudukan Jepang dapat dilihat menurun. Jumlah Sekolah Dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500. Sekolah Lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan Tinggi/Fakultas terdiri dari 4 buah, untuk beberapa lama belum dapat melakukan kegiatan, jumlah murid sekolah merosot 30%, murid Sekolah Menengah merosot 90%. Guru-guru Sekolah Dasar berkurang 35% guru, Sekolah Menengah yang aktif tinggal $\pm$ 5%. Angka buta huruf tinggi sekali.

Pada masa pemerintahan Jepang pendidikan tingkat dasar menjadi satu macam, yakni Sekolah Dasar 6 tahun. Maksud Jepang untuk menyeragamkan Sekolah Dasar tersebut supaya mempermudah dalam pengawasannya, baik isi maupun penyelenggaraannya. Ditinjau dari segi pendidikan, penyeragaman tersebut malahan menguntungkan bagi kita, yaitu dengan hapusnya diskriminasi. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum

ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya.

Pada dasarnya pendidikan melalui sekolah hendak di Jepang kan. Tindakan Jepang dalam menjepangkan Indonesia di bidang pendidikan dapat dilihat dengan diadakannya latihan bagi guru-guru di Jakarta untuk diindoktrinasi dalam *Hakko Iciu* (kemakmuran bersama). Guru-guru yang mengikuti latihan di Jakarta, kembali ke daerah masing-masing untuk selanjutnya memberikan infoktrinasi kepada guru-guru di daerah. Seperti halnya yang dilakukan di Yogyakarta, semua guru baik di sekolah negeri maupun swasta diharuskan mengikuti latihan (indoktrinasi). Lama latihan yang diadakan di Yogyakarta yakni 3 bulan (*cia Sa Ko*) ditambah 3 bulan lagi menjadi 6 bulan, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan. Sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang terdiri atas:

- a. Sekolah Umum, yaitu:
 - 1) Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokumin Gakko*)
 - 2) Sekolah Menengah 3 tahun (*Cu Gakko*)
 - 3) Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun (*Cu Gakko*).
- b. Sekolah Guru, yaitu:
 - 1) Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Syikan Gakko*)
 - 2) Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Syikan Gakko*)
 - 3) Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Syikan Gakko*)

Sekolah-sekolah guru diatur oleh Pemerintah Daerah hingga sekarang. Sedang Sekolah Rakyat Partikelir disamakan dengan Sekolah Rakyat Negeri. Persamaan ini berlaku pula terhadap gurunya. Guru-guru Indonesia di bawah pengawasan Jepang

Bahasa pengantar di semua sekolah adalah bahasa Indonesia yang juga dijadikan mata pelajaran pokok. Bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Di samping itu juga diberikan pelajaran bahasa daerah kepada murid-murid kelas 1 dan kelas 2.

Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diawali dengan *taiso* (gerak badan) kurang lebih setengah jam, diiringi dengan lagu yang disiarkan langsung dari Jakarta. *Taiso* pagi berlaku

pada setiap sekolah dan kantor.

Selain taisho, murid-murid juga diharuskan menyanyikan lagu Kebangsaan Jepang *Kimigayo* serta melakukan penghormatan *seikere* ke arah istana Kaisar di Tokyo. Murid-murid juga diharuskan melakukan kerja bakti (*kinrohosi*), yaitu mengumpulkan bahan keperluan perang, menanam, bahan makanan, membersihkan asrama dan memperbaiki jalan. Selain itu murid-murid juga mendapat latihan kemiliteran. Semua guru diwajibkan mengikuti kursus bahasa Jepang yang diakhiri dengan ujian. Semua itu diberikan kepada orang-orang Indonesia agar mempunyai semangat Jepang (*Nippon Seisyin*).

Sekolah dan perguruan pada masa pendudukan Jepang digunakan sebagai tempat pendidikan yang bersifat militer dan tempat indoktrinasi. Segala usaha Jepang yang telah ditanamkan di bumi Indonesia, seperti halnya di bidang pendidikan, hanya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

Pemerintah pendudukan Jepang, memperkenankan dibukanya kembali sekolah swasta, seperti Sekolah Taman Siswa, dan Sekolah Muhammadiyah. Juga sekolah yang diasuh oleh Misi dan Zending diperkenankan dibuka kembali, namun berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang.

2. Budaya

Di balik penderitaan akibat pemerintah pendudukan pasukan itu ada satu hal yang berharga untuk dipungut oleh bangsa kita yakni kesadaran akan kepribadian bangsa.

Di luar rencana pemerintah Jepang sendiri, alat-alat propagandanya dengan tidak disadari telah menumbuhkan kesadaran bangsa kita. Dengan tujuan untuk mendapatkan simpati, pada mulanya rakyat Indonesia diperkenankan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya pemerintah Jepang menjelang kekalahannya dalam perang Pasifik berjanji untuk memberikan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan "di kelak kemudian hari". Semua ini dengan hebatnya merangsang kesadaran kebangsaan Indonesia

yang sudah beratus-ratus tahun terbelenggu.⁸⁾

Keadaan hampir serupa dengan peristiwa lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908, yang antara lain mendapat dorongan dari kemenangan Jepang atas Rusia dalam peperangannya 1904–1905.

Di jaman Jepang kesadaran merupakan satu bangsa yang mempunyai watak serta kemauan kepribadian sendiri telah merata ke seluruh anggota masyarakat. Kesadaran kebangsaan itu terpupuk oleh propaganda Jepang dan hasil kemenangan Jepang yang memperlihatkan superioritet bangsa Asia di atas bangsa Eropa di dalam peperangan. Tetapi tidak sedikit pula terbit dari antipati terhadap penindasan pemerintah penduduk-an Jepang.

Zaman Jepang juga merupakan masa pematangan bagi pertumbuhan seni dan budaya setelah kemerdekaan nanti. Ketika bangsa Belanda diusir oleh Balatentara Dai Nippon, berarti lenyap pula kebudayaan Belanda yang selama 350 tahun mempengaruhi rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui dari propaganda Jepang, contohnya: "Saya belajar bahasa Nippon. Saya berbahasa Indonesia, saya tidak berbahasa Belanda. Musuh Nippon berarti juga musuh bangsa Indonesia. Musuh-musuh yang selekas mungkin harus dihancurkan, yakni Amerika dan Inggris. Kemenangan Balatentara Dai Nippon berarti kemenangan bangsa Indonesia pula. Oleh karena itu kita harus berani berkorban sebesar-besarnya di bawah pimpinan Dai Nippon, untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama dalam lingkungan Asia Timur Raya."⁹⁾

Kota Yogyakarta adalah pusat pengajaran, kesenian, kebudayaan dan adat istiadat Jawa. Pengakuan ini diucapkan oleh pembesar urusan umum *Yogyakarta Koti Zimu Kyoku*, Yoshikawa. Ucapan Yoshikawa ini menjadi kenyataan hingga saat ini. setiap orang yang ingin mempelajari kebudayaan Jawa, tidak akan melalaikan Yogyakarta.

Bangunan atau bekas bangunan yang masih ada di daerah Yogyakarta, memberikan bukti taraf kebudayaan nenek moyang kita, misalnya candi-candi Prambanan, Sari, Kalasan, Sewu, Plaosan, dan Borobudur. Makam raja di Imogiri dan Kotagede adalah tempat yang bernilai sejarah. Kesenian tari dalam kota dari Sri Paduka Yogyakarta Ko dan Sri Paduka Paku Alaman Ko, di Taman Siswa, akan menakjubkan siapa yang melihatnya. Perkumpulan "Krido Bekso Wiromo" selalu memper-tunjukkan kesenian tari yang indah dan luhur kepada dunia luar.

Museum Sono Budoyo tidak saja menjadi tempat pengumpulan barang kuno dan barang bersejarah, tetapi juga sebagai sumber studi kebudayaan dan sarana pendidikan. Pada zaman Jepang, pemuda-pemuda pelajar telah melemparkan mentalitet kolonial dan turut mengabdikan dalam lapangan seni lukis, seni sastra, seni musik dan seni drama. Seniman-seniman yang pada waktu itu, antara lain pelukis-pelukis Affandi, Sujoyono, komponis-komponis, Kusbini, Ismail, C. Simanjuntak, penulis: Chairil Anwar, dramawan: Usmar Ismail.

Seniman dan budayawan di zaman Jepang mempunyai tempat pertemuan dan sebagai pusat pertemuan ialah Pusat Siaran Radio dan Pusat Kebudayaan atau *Keimin Bunka Sidoshō* di Jakarta.

Pemerintah Jepang dalam menanggapi kehidupan seni dan budaya tidak mementingkan kedudukan sosial. Nilai seni dan budaya ditentukan oleh tinggi rendah kehidupan intelektual yang mendasari. Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan seni tampak lebih memasyarakat. Banyak pemuda pelajar mulai ikut aktif dalam bidang seni budaya.

Bidang olah raga pada zaman Jepang juga dimajukan, seperti sepak bola dan gerak jalan. Kepala Propaganda, Tuan Syuda, menyerukan agar di tiap karesidenan bidang olah raga juga harus dimajukan. Di Yogyakarta latihan olah raga diadakan di lapangan Kridosono dan ASRI.

C. BIDANG KEHIDUPAN EKONOMI

Barisan propaganda Jepang selalu menyatakan bahwa tujuan peperangan adalah untuk membentuk kemakmuran bersama di lingkungan Asia Timur Raya. Untuk mencapainya harus didasari dengan kekuatan rakyat. Berhubung rakyat Indonesia 80% terdiri dari kaum tani, maka kekuatan rakyat dapat dicapai dengan cara meningkatkan produksi pangan yang memerlukan perbaikan dalam pengolahan tanah. Pemerintah Jepang menyusun program penambahan bahan makan dan hasil bumi lainnya dalam jangka lima tahun. Rencana ini dibuat oleh *Gunseikan* di Jakarta.

Di Yogyakarta bahan makanan yang penting adalah beras, ketela, jagung, gaplek (ketela yang sudah dikeringkan) yaitu bahan makanan sehari-hari di Gunung Kidul. Sedangkan jagung menjadi makanan sehari-hari penduduk di lereng Gunung Merapi. Di dalam rencana lima tahun, tanaman padi, ketela (gaplek) dan jagung mendapat perhatian utama. Tanaman padi (sawah + gogo) cukup banyak di daerah Yogyakarta, namun harus ditingkatkan lagi untuk mencukupi kebutuhan daerah.

Penduduk Yogyakarta yang pada masa itu ada $\pm 1.800.000$ jiwa dan mempunyai sawah 65.000 ha dan tanah kering (terhitung pekarangan) 180.000 ha maka sudah selayaknya Yogyakarta digunakan sebagai proyek peningkatan hasil pertanian. Rencana peningkatan produksi pangan ini dilaksanakan oleh *Noji Shorei Kyoku* yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Ekonomi dan Tyokan Kakka. Direncanakan hasil padi di Yogyakarta akan bertambah sedikitnya 30%. Dengan tidak adanya tambahan luas tanah Pemerintah Jepang selalu menganjurkan kepada para petani untuk bekerja lebih giat, jangan bercocok tanam untuk keperluan sendiri saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kenyataannya semua hasil usaha para petani itu, hanya untuk memenuhi keperluan perang. Kualitas gaplek lebih ditingkatkan, karena dengan kualitas yang baik berarti di

samping tahan lama untuk disimpan juga harganya dapat lebih tinggi. Gaplek tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di daerah sendiri, tetapi juga dijual di luar daerah Yogyakarta syu. Selain peningkatan kualitas gaplek juga diadakan peningkatan bibit jagung. Biasanya jagung dari Yogyakarta dikirim ke lain syu, yang berarti rakyat Yogyakarta mendapat tambahan pendapatan. Dengan memperbaiki bibit ditaksir hasil panen jagung dapat bertambah 20%.

Pemerintah Jepang juga menganjurkan untuk menanam kacang tanah. Pada waktu itu dikenal dengan tanaman kacang No. 21 atau kacang Kantor Pertanian. Kacang ini tidak mudah kena penyakit "liyer". Juga dianjurkan untuk menanam kedelai putih yang sangat banyak hasilnya. Penanaman kacang dan kedelai dimaksudkan untuk menambah keuangan daerah Yogyakarta, karena kedua hasil tanaman tersebut akan dijual ke daerah lain. Sebagai lahan penanaman kedua jenis tanaman tersebut dipilih Gunung Kidul.

Usaha pemerintah Jepang selain intensifikasi pertanian, juga di bidang perikanan. Anjuran *Noji Shorei Kyoku* kepada para petani agar juga memelihara ikan di sawah dan di kolam. Dalam daerah Yogyakarta hanya di tempat-tempat yang mendapat saluran dari kali Progo yaitu di Godean dan Pandak. Hasil pemeliharaan ikan rata-rata 60 kg dalam 1 ha tanah sawah selama 80 hari. Pemeliharaan ikan bersama-sama dengan penanaman padi, dengan kata lain di sawah. Penghasilan perikanan dapat menambah gizi makanan rakyat. Kyokan Kakka memerintahkan kepada para Pangreh Praja supaya memperhatikan dan membantu usaha pemerintah Jepang meningkatkan produksi pangan.

Di Yogyakarta, tanaman yang memberikan hasil banyak kepada penduduk adalah pohon kelapa. Hasil kelapa dan gula kelapa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lagi pula dapat dijual ke luar daerah. Penghasilan dari pohon kelapa di Yogyakarta Syu sebagai berikut:

minyak kampung ± f. 1.750,— tiap hari.

gula kelapa ± f. 2.000,— tiap hari.

Menurut penyelidikan Kantor Makanan (*Voedings Instituut*) pada zaman Hindia Belanda di Jakarta pemakaian kelapa di Yogyakarta lebih banyak dibanding dengan daerah lain.¹⁰⁾

Yogyakarta juga mempunyai perusahaan gula, rami, tembakau, batik, mas, perak dan logam lain yang memberikan penghasilan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan perangnya pemerintah Jepang melancarkan propaganda, seperti yang dikatakan oleh Menteri Asia Timur Raya, Kazuo Hoki, bahwa pembangunan ekonomi Asia Timur Raya tidak hanya ditujukan untuk melaksanakan susunan ekonomi baru, tetapi juga dapat membantu terciptanya susunan Dunia Baru.

Bermacam usaha sudah dilakukan agar Asia Timur Raya dapat memenuhi keperluannya dengan jalan memperkokoh kekuatan ekonomi, kekuatan tenaga dan sumber bahan di seluruh Asia Timur Raya.

Masyarakat daerah Yogyakarta turut pula menyerahkan tenaga produksi dari perusahaan dan kerajinan rakyatnya guna kepentingan peperangan. Kegiatan ini dapat kita lihat pada rakyat di sekitar Pengasih (Kulon Progo, Yogyakarta) dan di sekitar Brosot (Adikarto, Paku Alaman) yang banyak memproduksi benang, tampar, dadung, dan tali sauh/tali jangkar dari serat kelapa dan sisal. Perusahaan serat kelapa dan pabrik tali di Pengasih membutuhkan pekerja sebanyak ± 1.000 orang, sedangkan di Brosot 500 — 650 orang.

Kerajinan rakyat di sekitar Sentolo (Kulon Progo) menghasilkan tikar dan karung dari bagor agel (*corypha Uta*). Tikar-tikar tersebut digunakan untuk alat pembungkus pada perusahaan atau pun pabrik. Kerajinan tikar tersebut dapat menghasilkan Rp. 14.000,— bagor agel, juga dihasilkan tikar lulub dari serat waru (pohon waru = *Hibiscus tiliaceus*). Tikar lulub ini dapat digunakan untuk pengganti layar perahu. Banyak permintaan

datang dari luar daerah Yogyakarta, misalnya dari nelayan-nelayan Jawa Timur. Tikar lulub dihasilkan oleh pengrajin dari Sanden (Bantul) dan Lendah (Kulon Progo). Berhubung banyak permintaan tikar lulub ini dari Jawa Timur, maka dari Yogyakarta mengirimkan orangnya ke Jawa Timur untuk memberikan pelajaran cara pembuatan tikar. Hasil kerajinan tikar mendong dan pandan yang dihasilkan Godean (Bantul) diperuntukkan keperluan Balatentara Jepang.

Usaha pertenunan desa di Moyudan (Godean) di bawah pimpinan Aburisman selaku pemimpin bagian tenun dari Yogyakarta *Kigyō-Sodan-Dyo* berhasil membuat perban gaas. Dari Jawatan Kesehatan Kota Jakarta, perban gaas ciptaan Yogyakarta itu dapat perhatian besar. Perban gaas tersebut sempat dipamerkan dalam Pasar Malam *Rakutenei* Jakarta di Gedung Putra.

Pembikinan karung goni dari sisal yang berpusat di Demak Ijo diusahakan oleh *Nanyo Saji Kabushiki Kaisha* dan mendapat bantuan dari Yogyakarta *Koti Zimu Kyoku Keizaibu*. Pembuatan karung ini dikerjakan dengan alat tenun di pabrik Demak Ijo dan di perusahaan tenun yang ditunjuk pemintalan. Benang sisal yang diperlukan dikerjakan tenaga tangan dengan mempergunakan alat pemintalan sederhana di beberapa perusahaan pemintalan benang di dalam kota di desa-desa di Godean, Moyudan, Pedes, Pengasih, Gamping. Tali serat hasil kerajinan Yogyakarta ini juga mendapat pasaran di luar daerah. Oleh *Kaiyo Gyogyo Kenkyusho Tyo* (Pembesar Jawatan Penyelidikan Perikanan Laut), tali serat kelapa hasil kerajinan Yogyakarta tersebut dinilai baik, rapi dan kuat, serta banyak dipakai sebagai tali sauh dan tali pengikat perahu.

Masih ada banyak hasil perusahaan kerajinan yang diproduksi di daerah Yogyakarta, di antaranya kertas gosok. Pada jaman Jepang, penduduk Yogyakarta menggunakan alat transport, seperti gerobak, sepeda yang memakai ban karet mati dan kuda untuk mengangkut hasil bumi, misalnya beras dan minyak kelapa. Kendaraan mesin seperti mobil (truk) dan kereta api,

digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan bahan lainnya guna keperluan perang.

Dengan dalih untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, pemerintah Jepang mengadakan peningkatan produksi. Tetapi dalam prakteknya hasil peningkatan produksi tidak untuk mencukupi kebutuhan rakyat sendiri, melainkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Rakyat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya tidak ikut menikmati hasil kerjanya.

Sementara itu tekanan penghidupan rakyat semakin keras. Pihak tentara Jepang mengangkut beras dan jagung untuk dikirim ke medan perang. Kewajiban memasukkan padi kepada pemerintah, yang lazim disebut "jatah padi" sangat menekan rakyat tani di desa. Pasar-pasar sepi tidak ada orang menjual beras secara terang-terangan, karena kalau dijual melebihi penetapan harga resmi akan disita. Padahal harga resmi sangat rendah.

Kesukaran bahan makanan disusul dengan kesukaran bahan pakaian dengan harga yang membubung tinggi. Meskipun toko buka tetapi tidak ada barang, semuanya lari ke pasar gelap. Kemudian dibentuk polisi ekonomi untuk mengawasi harga barang. Tetapi pengawasan itu menyebabkan timbulnya suap menyuap, dan korupsi. Jepang tidak ada waktu lagi untuk mengurus soal distribusi barang, maka semuanya itu diserahkan kepada Pamong Projo dan *Tonari Gumi*. Karena tak ada barang maka sistem distribusi juga tidak berjalan. Pada saat itu terjadi inflasi, yang berarti merosotnya nilai uang Jepang.

Harga bahan makanan dan pakaian membubung tinggi. Banyak terjadi penyelundupan, antar daerah. Kemelaratan timbul di kalangan rakyat jelata yang mengakibatkan banyaknya pengemis dan penyakit hongerudim (busung lapar) karena kurang makan. Banyak rakyat terpaksa bercelana bagor dan makan bekicot. Keadaan yang menyedihkan ini masih ditambah lagi rakyat diharuskan menanam pohon jarak dan kapas. Karena minyak jarak sangat dibutuhkan untuk pesawat terbang Jepang yang sedang bertempur di Lautan Pasifik, dan kapas lebih

penting daripada singkong atau jagung, karena kapas juga dibutuhkan untuk ditenun sebagai keperluan bahan pakaian tentara Jepang.

Rakyat mulai kritis kepada Pemerintah Balatentara Jepang. PUTERA kemudian diganti dengan *Hookokai* atau Badan Kebaktian Rakyat, tetapi badan ini tidak mendapat sambutan dari rakyat. Mereka sudah tahu akibatnya kalau Hookokai ditaati, tentu akan menimbulkan kesukaran dan penderitaan saja, karena pemerintah Balatentara Jepang tiada henti-hentinya meminta pengorbanan rakyat yang sudah hampir kehabisan segalanya.¹¹⁾

D. PENGARUH POLITIK

Akibat penjajahan dan sedikit sekali kesempatan yang diberikan pemerintah jajahan untuk mencari pengetahuan serta mengembangkan bakatnya, maka masyarakat Indonesia buta politik. Mereka tidak mengenal apa arti faseisme dan bagaimana kekejaman yang telah dijalankan.

Akibatnya, fascisme dan militerisme Jepang yang lebih kejam daripada kolonialisme Belanda, sedikitpun tak diinsyafi oleh rakyat. Ditambah lagi propaganda Jepang yang bekerja dengan sempurna, dapat mengelabui rakyat Indonesia. Sebelum Jepang mendarat setiap malam terdengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dari radio Tokyo, ditambah dengan semboyan: "Saudara Tua! Asia untuk bangsa Asia! Dai Nippon pelindung Asia!". Kata-kata yang enak didengar, tetapi di dalamnya mengandung bencana. Rejim Jepang mempunyai rencana dalam segala lapangan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan. Tiada luput pula, gerakan pemuda mendapat perhatian. Jepang mengerti akan potensi pemuda. Juga perguruan tidak terhindar dari godaan fascisme.

Arah tujuan Indonesia merdeka, yang sebelumnya dipompakan oleh radio Tokyo, mulai dibelokkan. Tiada bedanya keadaan bangsa Indonesia, dijajah kolonialisme Belanda dan diperas

fascis Jepang.^{1 2)}

Ketika Jepang menyerbu Indonesia, kekuatan tentara Belanda hanya dapat bertahan selama 7 hari dan pemerintah Belanda berantakan. Rakyat Indonesia menyambut tentara Jepang sebagai tentara pembebas dari kekuasaan kolonial Belanda. Propaganda Jepang waktu permulaan itu berusaha mengambil hati rakyat Indonesia.

Pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia banyak yang tertarik pada propaganda Jepang. Banyak pula yang bersedia bekerja sama dengan pihak Jepang karena kebenciannya pada penjajahan Belanda. Tetapi ada pula yang ragu akan politik Jepang, yang dikenal fasistis.

Pada zaman pemerintahan Belanda golongan nasionalis banyak yang dicurigai. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Jepang. Golongan nasionalis Indonesia malahan diajak bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda golongan nasionalis Indonesia mengambil sikap non-kooperatif, tetapi pada zaman Jepang tidak demikian halnya, mereka bekerja sama dengan pihak Jepang. Kerja sama itu diawali dengan pembebasan pemimpin nasionalis Indonesia oleh pemerintah militer Jepang, yang sebelumnya dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia yang mendapatkan kebebasannya pada jaman pemerintah Jepang antara lain: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Syahrir.

Pemerintah militer Jepang menganggap golongan nasionalis Indonesia sebagai golongan yang berpengaruh pada masyarakat, sehingga perlu untuk diajak kerja sama. Dengan titik pangkal pembicaraan antara Wakil Kepala Staf Tentara Keenam belas di Pulau Jawa, Jenderal Harada dengan Moh. Hatta, yang pada intinya Jepang tidak bermaksud menjajah Indonesia, melainkan akan membebaskan bangsa Asia dari penjajah negara Barat, maka Drs. Hatta menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang.

Kemudian kerja sama itu dijalankan dengan memberikan

kedudukan kepada Drs. Moh. Hatta dalam kantor penasehat umum selaku penasehat pemerintah militer. Dalam menjalankan tugasnya Drs. Moh. Hatta dibantu oleh anggota staf pembantuannya, antara lain AK. Pringgogidgo, Suwirjo, Sujitno Mangunkusumo dan Mr. Hardjono Kerja Sama dengan pemerintah Jepang juga dilakukan dengan Ir. Sukarno, Mr. Moh. Yamin, Mr. Sartono, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Dr. Ratu Langie, Oto Iskandardinata dan lain-lain. Kerja sama dengan pihak Jepang itu memberikan suatu harapan bagi golongan nasionalis untuk dapat meneruskan perjuangan nasional.¹³⁾

Di Yogyakarta, politik militer Jepang sangat terasa sekali pengaruhnya terhadap jiwa pemuda dan masyarakat. Pengaruh militerisme Jepang ditanamkan melalui pendidikan. Semua sekolah umum baik negeri maupun swasta ada di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Para siswa di samping mendapat mata pelajaran juga tenaganya banyak digunakan kerja bakti. Melalui sekolah ditanamkan pula semangat kebaktian.

Dasar pengertian berasal dari *hokoseisyin* (semangat kebaktian). Kebaktian ini memiliki tiga dasar: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Ketiga hal ini yang dituntut dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhubung makin gawatnya perang. Pemerintah Jepang berusaha untuk menggabungkan semua kekuatan sosio-ekonomi, kultural dan politik untuk menyelesaikan perang dengan menggunakan tenaga dan materiil yang ada.¹⁴⁾

Semangat kebaktian ini sebenarnya tidak ditujukan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, tetapi untuk pemerintah Jepang. Seolah-olah Jepang membawa misi suci bahwa Asia untuk Asia. Karena Indonesia sebagai saudara muda wajib menyatakan kepada yang membawa misi suci tersebut.¹⁵⁾

Jepang juga mengadakan latihan pemuda di *Seinen Kuurensyo*. Mereka dididik selama 1½ bulan. Yang masuk dalam latihan kebanyakan adalah para pemuda yang berasal dari pelbagai kepanduan dan tujuannya adalah untuk menghidupkan se-

mangat satria. Pendidikan pemuda diadakan atas prakarsa H. Wakabeysyi Syimizu. Pada tahap pertama dilatih sejumlah 250 pemuda. Latihan semacam ini juga diadakan di Yogyakarta.¹⁶⁾

Pada bulan April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, diumumkan secara resmi berdirinya dua organisasi pemuda yang diberi nama *Jawa Seinendan* dan *Keibodan*. Kedua organisasi ini langsung di bawah pimpinan *Gunseikan*. Persyaratan menjadi anggota *Seinendan* adalah pemuda berusia 15–25 tahun. Pembina *Seinendan* adalah *Naimubu Bunkyo-kyoku* (Departemen Urusan Dalam Negeri bagian pengajaran, olah raga dan *Seinendan*).

Pimpinan eksekutif di daerah *Syu* adalah *Syucokan*, demikian pula pada daerah yang tingkatnya di bawah *syu*. Kepala daerah menjadi pimpinan langsung dari *Seinendan* itu. *Seinendan* dibentuk di sekolah di pabrik dan di desa-desa.

Pada bulan Oktober 1944 dibentuk *Josyi Seinendan* (*Seinendan* putri). Pemerintah Jepang juga memperluas *Seinen-Kuurensyo* (pusat latihan pemuda). Di pusat latihan ini para kader pimpinan *Seinendan* daerah dilatih kemiliteran dengan menggunakan senjata tiruan. Dalam peperangan, *Seinendan* ini bertugas di garis belakang. Berbeda dengan *Seinendan*, *Keibodan* anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda yang berumur 20 – 35 tahun. Tugasnya sebagai pembantu polisi yaitu mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Sebagai pembina *Keibodan* adalah *Keimubu* (departemen Kepolisian) dan di daerah *Syu* dibina oleh *Keisatsulen* (bahagian Kepolisian). *Keibodan* ini masuk di dalam organisasi kepolisian, sehingga kepala polisi daerah bertanggung jawab atas *Keibodan* yang ada di daerahnya. Seperti halnya *Seinendan*, *Keibodan* juga mengadakan pusat latihan untuk para kader *Keibodan* daerah yang diselenggarakan di Sukabumi.

Pada dasarnya semua kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang tidak lain hanya untuk kepentingan perangnya.

Pada pokoknya pemuda/masyarakat supaya membantu Dai Nippon dalam melaksanakan perangnya di Asia Timur Raya pada umumnya, khususnya para pemuda/masyarakat supaya ikut membantu menenangkan suasana, agar jangan timbul pemberontakan. Usaha untuk menciptakan ketenangan di daerah Yogyakarta berhasil baik, terbukti dengan tidak adanya pemberontakan.

E. KEGIATAN MASYARAKAT

Sejak partai politik yang dianggap membahayakan pemerintahan dibubarkan, kaum pergerakan baik dari golongan kanan maupun kiri mempunyai satu pandangan. Golongan kanan PKN (= Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta) di bawah pimpinan Suryodiningrat, mendidik semangat nasionalisme guna menuntut kesempurnaan otonomi yang luas di Yogyakarta. Golongan kiri Parkindo, Perindo dan Gerindo juga menuntut adanya kemerdekaan.

Setelah partai dibubarkan kaum pergerakan terpukul, namun mereka tetap bergerak dan tidak patah semangat. Keadaan ini dapat menolong masyarakat agar tidak menjadi pasif dan tetap bertekad bulat akan melepaskan diri dari kolonialisme.

Pergerakan kebangsaan Indonesia sudah direncanakan, untuk membawa rakyat Indonesia agar cepat menjadi suatu bangsa merdeka. Dengan pecahnya Perang Pasifik, pemimpin-pemimpin nasional sudah memperhitungkan, bahwa peristiwa itu akan membawa masa yang sangat menentukan bagi perjuangan bangsa untuk mencapai Indonesia Merdeka.¹⁷⁾

Tanggal 18 Juni 1944 pasukan Amerika bergerak menuju kepulauan Marianen untuk merebut Guam dan Saipan. Pada tanggal 7 Juli 1944 Amerika dapat menduduki Saipan dan seminggu kemudian, tanggal 21 Juli Guam dan Tinian direbut Amerika.

Jatuhnya benteng Saipan dan Guam menimbulkan keresahan masyarakat Jepang. Mereka tidak percaya lagi pada Kabinet

Tojo. Akhirnya Kabinet Tojo dibubarkan dan diganti Kabinet Jenderal Kuniaki Koiso.

Jatuhnya Saipan dan Guam tahun 1944, berarti dikuasainya Lautan Pasifik oleh armada Amerika. Maka kekalahan Jepang telah terbayang. Ofensi Jepang telah buntu setelah mengalami kekalahan di Lautan Koral atau Pulau Solomon.

Dalam keadaan terdesak dan menderita kekalahan di semua front, Jepang terpaksa mengubah politiknya. Untuk pertahanan dalam Perang Pasifik itu, Jepang memerlukan dukungan rakyat. Jepang pada waktu itu terpaksa membatasi diri pada kekuatan defensif saja. Pertahanan regional, harus dibangun dengan kekuatan di daerah itu sendiri. Maka dibentuklah PETA oleh Balatentara Jepang sebagai pertahanan regional.

Setelah itu lahir pula sebagai pertahanan rakyat yang disebut *Seinen Korensyo* dan *Seinendan* bagi pemuda, *Keibodan* bagi angkatan tua dan *Gakutotai* bagi para pelajar Sekolah Menengah. Dalam waktu singkat disebar-luaskan gerakan tersebut ke pelosok-pelosok. Dengan diikuti-sertakannya rakyat Indonesia dalam bidang kemiliteran itu, lalu timbul pengalaman yang sangat berguna bagi kebangkitan keprajuritan nasional dan sekaligus merupakan pengembangan di bidang pertahanan.

Secara keseluruhan rakyat Indonesia mulai dari susunan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) telah tersusun unit-unit militer dan kesatuan-kesatuan pemuda. Semua diorganisasi menjadi suatu pertahanan sipil yang kuat. Masa inilah kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam usaha pertahanan/keamanan wilayah Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia.¹⁸⁾

Walaupun tekanan pihak *Kenpetai* begitu keras, tetapi berkat ketabahan dan keuletan pemuda yang terlatih dapatlah mereka menyusun kekuatan. Sekalipun segala macam organisasi dibentuk untuk kepentingan Jepang, tetapi dapat memberi jiwa dan isi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan *Saiko Syikikan* Kumahici Harada pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan suatu Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Jumbi Cosakai*). Tindakan itu merupakan langkah konkrit pertama bagi terpenuhinya Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari". Tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang penting dalam segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lainnya, yang diperlukan untuk membentuk Negara Indonesia Merdeka. Ketua Badan itu ialah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat. *Dokuritsu Jumbi Cosakai* beranggotakan 62 orang.

Berita kekalahan Jepang di Laut Pasifik dan berita perang di medan pertempuran di Eropa dapat diketahui berkat pemuda-pemuda pergerakan yang bekerja dalam kantor berita "Domei" atau lewat radio di bawah tanah. Dalam saat-saat yang krisis itu sebelum Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dibentuk, Angkatan Muda Indonesia mengadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung pada tanggal 16 Mei 1945.

Pada pertengahan tahun 1944 dibentuk Angkatan Muda Indonesia oleh Jepang. Tetapi akhirnya Angkatan Muda Indonesia bentukan Jepang tersebut, ternyata menjadi gerakan pemuda yang anti Jepang. Kongres Pemuda di Bandung itu dihadiri lebih dari 100 pemuda, terdiri dari utusan-utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa, antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroaminoto dan Harsono Tjokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa *Ika Daigaku* (Fakultas Kedokteran) Jakarta. Dalam kongres tersebut para pemuda dianjurkan agar bersatu dan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan bukan sebagai hadiah Jepang. Pertemuan diselenggarakan dalam suasana militan dan nasionalistis, dengan dilagukannya lagu Indonesia Raya tanpa lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dan pengibaran bendera Merah Putih, tanpa didampingi bendera Jepang.¹⁹⁾

Janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, tak dapat dipercaya lagi oleh pihak pemuda. Maka berkumpul para pemuda revolusioner pada tanggal 3 Juni 1945 di Gambir Selatan No. 6 (Pusat dari *Hookokai*) di bawah pimpinan BM Diah. Dalam pertemuan pemuda itu dikeluarkan suatu pernyataan sebagai berikut: "Kami pemuda Indonesia, menghendaki Indonesia merdeka, sekarang juga atas kesanggupan dan kekuatan sendiri. Barang siapa menghalangi perjuangan kami adalah penghalang dan/pengkhianat".²⁰⁾

Jepang yang sudah payah menghadapi berbagai soal makin bingung menghadapi perkembangan baru di kalangan rakyat. Kaum revolusioner bangsa Indonesia yang terdiri dari golongan tua dan golongan muda tampak bekerja sama guna berjuang menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Meskipun cara pelaksanaan berbeda pendapat, tetapi kedua-duanya sependapat untuk secepat mungkin Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Tanggal 7 Agustus Jenderal Terauci selaku penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara, menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, maka pada saat itu pula *Dokuritsu Jumbi Cosakai* dibubarkan. Bersamaan disetujuinya pembentukan PPKI, Jenderal Terauci memanggil Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat untuk datang ke Saigon. Pada tanggal 9 Agustus 1945 ketiga tokoh pergerakan Nasional tersebut berangkat ke Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Terauci menyampaikan "Amanatnya" kepada ketiga pemimpin tersebut mengenai rencana kemerdekaan Indonesia menurut konsepsi Tokyo, bahwa untuk pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat kembali menuju Jakarta.

Berita itu oleh Domei dan Balatentara tidak disiarkan.

Meskipun demikian pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja di Kantor Radio Jakarta sudah biasa mendengarkan siaran radio Serikat dengan sembunyi-sembunyi, sehingga mereka mengetahui pula kalau pada hari itu Jepang telah menyerah kalah. Tetapi sampai pada saat Jepang menyerah kalah, Indonesia belum juga dimerdekakan. Janji yang diberikan bahwa Indonesia akan dimerdekakan tahun 1945 oleh Jepang hanya diulur-ulur terus. Sebagai ganti janjinya itu, malahan rakyat Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda yang membongceng tentara Serikat.

Pengalaman pahit selama tiga setengah tahun (sampai 15 Agustus 1945) di bawah penjajahan Jepang menyadarkan segenap pemimpin Indonesia. Berdasarkan pengalaman itu, pemuda-pemuda pergerakan insyaf. Kalau saat-saat terluang itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya akan celakalah kita. Sejarah lama akan terulang kembali.

Pada saat-saat kekosongan (*vacum*) itulah digunakan kaum revolusioner untuk melakukan perjuangan hebat guna melaksanakan hari-hari besar bersejarah yaitu Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Proklamasi Kemerdekaan harus secepatnya dilaksanakan.

Di saat-saat yang memuncak itu, timbul pertentangan di kalangan para pemimpin Indonesia di Jakarta. Golongan tua hanya ingin pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan melalui rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sikap golongan tua ini tidak sepaham dengan golongan muda. Golongan muda menghendaki agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia langsung diumumkan tanpa diadakan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 15 Agustus 1945 ada pembicaraan antara para pemuda dengan Bung Karno dan Bung Hatta tetapi belum juga membawa kata sepakat. Karena tidak ada kata sepakat golongan pemuda bertindak untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, jam 4.30 pagi Bung Karno Bung Hatta dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok dengan diantar oleh Sukarni dan Jusuf Kunto. Rengasdengklok waktu itu telah dikuasai golongan pemuda yang ingin memberontak kepada Jepang. Di Rengasdengklok diadakan pembicaraan untuk segera memproklamirkan Indonesia Merdeka. Pada petang hari Mr. Ahmad Sukardjo datang di Rengasdengklok menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dan meyakinkan para pemuda, bahwa Proklamasi Kemerdekaan pasti dapat diumumkan pada esok hari (17 Agustus 1945). Kemudian pada malam hari jam 23.00 diadakan rapat di rumah Laksamana Muda Maeda yang membela perjuangan Kemerdekaan Indonesia hingga dini hari. di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Di tempat tersebut berkumpul segenap pemimpin Indonesia dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai perumus teks Proklamasi adalah Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo.

Teks Proklamasi tersebut dapat disetujui. Setelah itu teks Proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB teks Proklamasi dibacakan oleh Ir. Sukarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang jalan Proklamasi) No. 56, Jakarta. Dengan Proklamasi itu tercapailah Indonesia merdeka yang susunan negaranya diatur dengan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.²¹⁾

F. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN POLITIK/SOSIAL

Setelah kurang lebih sebulan Jepang berkuasa di seluruh kepulauan Indonesia, di Jakarta didirikan suatu organisasi baru

dengan nama Tiga A, singkatan dari: Nippon Pembela Asia; Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pahlawan Asia. Facis Jepang tidak senang adanya perkembangan demokrasi, oleh sebab itu semua partai politik dan perkumpulan sosial harus dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk gerakan Tiga A. Dalam sekejap mata *Sendenbu* (barisan propaganda) meluaskan gerakan itu ke seluruh Pulau Jawa. Tetapi gerakan Tiga A tidak mendapat dukungan dari massa gerakan pemuda dan gerakannya hanya terbatas di Jawa Barat. Gerakan ini tidak lama umurnya. Karena gerakan Tiga A di bawah pimpinan Mr. Samsuddin tidak membawa hasil bagi pemerintah militer, maka pemerintah militer mendekati Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan KH Mansur (yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai) untuk mendirikan gerakan baru dengan nama PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) Tiga A di daerah Yogyakarta tidak pernah terbentuk.

Baru setelah Putera (Pusat Tenaga Rakyat) diresmikan pada tanggal 9 Maret 1943 di Jakarta dan di bawah pimpinan Empat Serangkai yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan KH Mansur, kemudian disusul pembentukan cabang-cabangnya di daerah-daerah, antara lain di Yogyakarta. Putera di Yogyakarta diketuai oleh BPH Suryodiningrat, Sekretaris Mr. Ronces Suryodiningrat (= putera BPH Suryodiningrat), dan berkantor di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan (sekarang Kantor Penerangan).

Keimin Bunka Svidosyo merupakan salah satu bagian dari tugas Putera, termasuk di dalamnya adalah kesenian, pidato radio, sandiwara dan lain-lain. Tugasnya adalah mengadakan kampanye dalam bentuk kesenian. Misalnya dalam kampanye penanaman jarak dilaksanakan dengan mengadakan pertunjukan *Kamisibai* atau wayang beber sebagai dalangnya pada waktu itu adalah S. Wardoyo (Pak Besut) ²²⁾ Sebelum *Kamisibai* dimulai, terlebih dahulu diawali dengan pidato yang dilanjutkan dengan dagelan kemudian diakhiri dengan pertunjukan *Kamisibai*. Tujuan lembaga tersebut adalah ikut mengadakan propaganda

untuk kemenangan perang Asia Timur Raya.

Pada waktu itu karena rakyat sedang dalam rasa ketakutan, maka segala perintah yang diberikan dari pemerintah militer Jepang selalu diturutinya. Tokoh-tokoh daerah yang ikut aktif dalam lembaga tersebut antara lain Rush.^{2 3)} Kemudian Putera dibubarkan dan dibentuk Badan Jawa Hookokai.

Jawa Hookokai, pembentukannya diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Pemimpin tertinggi adalah Gunseikan sedangkan Ir. Sukarno Hookokai menjabat sebagai *Komon* (penasehat).

Hookokai atau Kebaktian Rakyat dibentuk karena pemerintah balatentara menghendaki kebaktian yang lebih besar lagi berhubung makin sukarnya kedudukan tentara Jepang di berbagai front, karena itu semua badan yang ada berbakti kepada Jepang dilebur menjadi satu ke dalam *Jawa Hookokai*. Badan-badan yang dilebur ke dalam *Jawa Hookokai* ialah *Fujinkai* (Perkumpulan wanita), *Masyumi*, *Kakyo Sokai* (Perkumpulan Cina), *Tai Iku Kai* (Perkumpulan Olah Raga), dan *Keimin Bunka Syidosyo* (Himpunan budaya).

Meskipun Putera gerakannya terbatas di kalangan pemimpin-pemimpin saja, tetapi dasar rencananya yang bersifat "nasionalisme" dapat menarik perhatian rakyat banyak. Sedangkan Jepang tidak suka adanya nasionalisme, dan bukan itu yang dikehendaki dirubah dan disusun dalam bentuk yang lebih "luas" ialah Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa atau *Jawa Hookokai*. Dengan demikian *Hookokai* tinggal meneruskan apa yang telah dirintis oleh Putera di daerah. *Hookokai* dibentuk untuk seluruh daerah antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta ditambah di Kabupaten-kabupaten.

Dalam melaksanakan pembentukan *Hookokai* di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat (Jakarta) menginstruksikan kepada beberapa tokoh di DIY kemudian membentuk di tingkat dua atau Kabupaten. *Jawa Hookokai* bersifat terpimpin dan diawasi oleh pemerintah Jepang. Struktur organisasi *Jawa Hookokai* di daerah:

Ketua: Bupati

Wakil Ketua: Organisasi gerakan/Ketua Harian.

Staf: orang-orang pergerakan.

Hookokai yang telah dibentuk di Kabupaten-kabupaten antara lain: *Hookokai* di daerah Sleman, diketuai oleh Hucono, wakilnya Honggowongso. *Hookokai* di daerah Bantul diketuai oleh Asar dan wakilnya Jadi.²⁵⁾

Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat) adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal politik dan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah balatentara.

Cuo Sangi In tidak bergerak sampai di daerah, demikian pula di Yogyakarta tidak ada *Cuo Sangi In*. Tetapi Yogyakarta mengirimkan utusannya ke pusat sebagai anggota *Cuo Sangi In*. Wakil tersebut adalah BPH Purboyo, Dr. Sukiman dan Ki Hadjar Dewantara. *Dokuritzu Jumbi Cusakai* sebagai badan persiapan kemerdekaan, secara formal di Yogyakarta tidak pernah ada, tetapi dari Yogyakarta ada yang menjadi anggota, yakni: Dr. Sukiman, Ki Hadjar Dewantara dan BPH Purboyo.

Setelah balatentara Jepang menguasai Indonesia sepenuhnya, media komunikasi massa, seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwarat dan sebagainya dapat dikendalikan, sehingga dapat memperlancar propagandanya.

Semua surat kabar dan majalah yang tidak mendapat izin dilarang terbit, pers dikenakan sensor preventif. Jawa *Syimbun Kai* adalah suatu badan yang mengawasi pers.

Surat kabar Indonesia, Tionghoa-Melayu dan Belanda dihentikan penerbitannya. Koran berbahasa Jawa seperti *Sedya Tama* yang terbit di Yogyakarta diperkenankan terbit, tetapi harus memakai bahasa Indonesia.

Untuk melayani keperluan Jawa Tengah bagian Selatan, di Yogyakarta diterbitkan surat kabar *Sinar Matahari* dengan Pemimpin Redaksinya Raden Mas Gondojuwono.²⁶⁾ Tiap beri-

ta dari Jakarta, sebelum disampaikan kepada *Sinar Matahari*, harus diperiksa oleh Badan Sensor yang terdiri dari Madikin Wonohito, G. Nobels (bekas Redaktur *Yogya Bode*) dan Sie. Nobels selain bekerja untuk Badan Sensor juga bertugas menyalin berita serta tajuk rencana dari *Sinar Matahari* ke dalam bahasa Inggris untuk keperluan pembesar Jepang setempat.

Harian *Sinar Matahari* mengundang minat pembaca yang besar, terbukti dari jumlah oplag pada tahun 1943 mencapai 5.000.²⁷⁾

Pemerintah pendudukan Jepang menginginkan, agar semua Kantor Berita yang ada di daerah pendudukan dilikuidir untuk kemudian berganti nama menjadi *Domei*. Tanggal 29 Mei Antara dipaksa mengganti nama dengan nama baru *Yashima*. Setelah tiga bulan *Yashima* beroperasi, akhirnya dilikuidir dan menggunakan nama *Domei*.

Di Yogyakarta yang menjadi juru warta *Domei* adalah Soetomo, yang sebelum perang sudah bekerja membantu *Antara*, *Kebangunan* (Jakarta), *Sedia Tama* (Yogya) dan *Pewarta Umum*. Setelah Antara menjadi *Domei*, Sutomo ditetapkan sebagai koresponden tetap di Yogyakarta, dengan mendapat bantuan dari Soegijono dan Abdul Karim DP. (Daeng Patombong).

Setahun kemudian, diresmikan berdirinya *Domei* cabang Yogyakarta dengan kepala seorang Jepang. Semua kantor *Domei* Yogyakarta berkantor di Jalan Ngabean, kemudian pindah ke Malioboro (sekarang Perpustakaan Negara) dengan menempati lantai 2 sedang lantai satu digunakan untuk kantor Barisan propaganda. Sebagai kepala bagian radio ditetapkan: Warsono, dengan dibantu Soeparto, Soetjipto, Abdullah dan Umar Sanusi.

Berita yang diterima per *morse-cast* ialah berbahasa Indonesia, sedangkan bulletin *Domei* berbahasa Jepang diterima dengan perantaraan kereta api. Berita berbahasa Indonesia dibuat rangkap lima, selembat untuk *Sinar Matahari*, satu untuk

arsip, untuk Barisan propaganda dan selemba lagi untuk *Chookan Kakka* (Gubernur Jepang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta). Di Yogyakarta tidak ada organisasi kewanitaan lain, selain *Fujinkai* yakni gerakan kewanitaan di bidang sosial untuk membantu peperangan. Gerakan Kewanitaan tersebut banyak bergerak dalam dapur umum yang pekerjaannya masak-memasak. Selain itu juga mengumpulkan dan membuat serta membagi-bagikan pakaian (pakaian goni) untuk keperluan rakyat.

Organisasi Kewanitaan tersebut (*Fujinkai*) dibentuk tidak hanya di kota tetapi sampai ke pelosok desa. Tiap kelurahan harus dibentuk *Fujinkai*, wanita-wanita yang ikut aktif dalam organisasi tersebut, antara lain: ibu dr. Sutoto, ibu Sukemi dan ibu DD Susanto. Di samping masak-memasak, jahit-menjahit, mereka juga dilatih baris-berbaris.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEADAAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN AWAL DARI PROSES REVOLUSI KEMERDEKAAN

1. Berita Proklamasi Kemerdekaan di DIY.

Jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal: 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 mempercepat proses penyerahan Jepang kepada Sekutu. Berita penyerahan Jepang secara resmi diumumkan oleh PM Suzuki setelah selesai diadakan sidang kabinet darurat pada tanggal 15 Agustus 1945.¹⁾ Tetapi peresmian penyerahannya baru dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo. Dokumen penyerahan itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Sijemitsu atas nama Kaisar dan Pemerintah dan oleh Jenderal Umetsu atas nama Kaisar dan Markas Tertinggi Angkatan Perang.

Adapun bunyi dokumen penyerahan itu antara lain sebagai berikut:²⁾

Dokumen Penyerahan

Dengan ini kami atas perintah dan atas nama Kaisar Jepang, Pemerintah Jepang dan Markas Umum Kerajaan Jepang, menerima ketentuan-ketentuan termuat dalam keterangan kepala Pemerintahan Amerika Serikat, Cina dan Inggris tanggal 26 Juli 1945 di Postdam dan kemudian disetujui pula oleh Persatuan Republik-Republik Sosialis Sovyet

Dengan ini kami nyatakan penyerahan tak bersyarat dari Markas Umum Kerajaan Jepang beserta semua angkatan perang Jepang dan semua angkatan bersenjata yang di bawah kontrol Jepang di mana saja pun berada.

Dengan ini kami perintahkan kepada semua angkatan perang Jepang di mana saja berada dan kepada rakyat Jepang untuk segera menghentikan permusuhan, untuk memelihara dan menjamin keutuhan semua kapal, pesawat udara dan milik-milik militer dan sipil.

Dengan ini kami perintahkan semua pejabat sipil militer (darat dan laut) untuk menaati dan menjalankan semua proklamasi, perintah dan instruksi Panglima Tertinggi Serikat.

Maka untuk pelaksanaannya Kaisar Hirohito mengeluarkan perintah umum nomor 1:

- a. Panglima-panglima Jepang dari angkatan darat, laut dan udara serta tentara-tentara pembantunya di Cina dan sebagainya menyerahkan kepada Jenderalissimo Tsjang Kai Sjek.
- b. di Andaman, Nikobar, Birma, Muang Thai, Indo Cina sebelah Selatan garis lintang 16 derajat utara, Malaya, Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Buru, Seram, Ambon, Kei, Aru, Tanimbar dan pulau-pulau di Laut Arafuru, Sulawesi, Halmahera dan Irian Barat menyerah kepada Panglima Tertinggi Asia Tenggara (SEAC).
- c. di Mansyuria dan sebagainya kepada Panglima Besar Sovyet di Timur Jauh.

- d. di Kalimantan, Irian Timur, Kepulauan Bismarck dan Salomon kepada Panglima Besar Australia.
- e. Hanya panglima-panglima tersebutlah Wakil-wakil Sekutu yang berkuasa untuk menerima penyerahan

Dari bunyi dokumen penyerahan tersebut, jelaslah bahwa Indonesia juga harus diserahkan sebagai "inventaris yang utuh dan lengkap" kepada Laksamana Mountbatten dari SEAC (Inggris) dan kepada Jenderal Blamey dari Australia. Dan bagaimanakah kenyataan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu? Kenyataan menunjukkan bahwa menurut perintah Jenderal Mac Arthur, maka dari tanggal 15 Agustus 1945 sampai tanggal 2 September 1945 di Indonesia tidak boleh terjadi penyerahan.

Dengan demikian ini berarti bahwa di Indonesia pada waktu itu terjadi suatu "kefakuman".³⁾ Kesempatan yang amat baik dan berharga itu ternyata tidak disia-siakan begitu saja oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Ini terbukti bahwa tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia itu, membuktikan bahwa pada detik itu bangsa dan rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dan telah bebas dari cengkraman penjajah. Adapun bunyi pidato proklamasi kemerdekaan itu lengkapnya adalah sebagai berikut.⁴⁾

"Saudara-saudara sekalian!

Saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami:

Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama Bangsa Indonesia,

Soekarno – Hatta

Sesudah itu di kantor berita *Domei* terjadi kesibukan yang sangat rahasia dan hati-hati. Beberapa petugas sedang berusaha agar berita proklamasi dapat disiarkan melalui *Morsecast Domei*. Dan berkat kerja sama yang baik antara para pemuda yang bermarkas di Menteng 31 dengan beberapa petugas dari kantor berita *Domei* antara lain Pengulu Lubis, Syachrudin, Rachmad

Nasution, Asa Bafagih, Markonis Sugimin, Markonis Wua, dan lain-lain,⁵⁾ serta dengan dibekali semangat yang menyala-nyala keuletan, keberanian dan ketangkasan, akhirnya berita proklamasi itu berhasil disiarkan ke seluruh penjuru tanah air dan seluruh dunia.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disiarkan kantor berita *Domei* Jakarta itu, berhasil diterima oleh Kantor Berita *Domei* Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jum'at, jam 12.00 siang. Pada mulanya berita Proklamasi yang sangat menggembirakan dan sangat penting itu akan segera disiarkan. Tetapi tiba-tiba terdengar berita dari *Gunseikan Bu* yang melarang disiarkannya berita Proklamasi itu. Namun berita proklamasi itu sudah diterima oleh para petugas, markonis dan wartawan kantor berita *Domei* yang terdiri dari bangsa Indonesia. Secara sembunyi-sembunyi, dari mulut ke mulut akhirnya dapat disebar-luaskan. Lebih-lebih karena pada waktu itu adalah hari Jum'at di mana ummat Islam menunaikan ibadah sembahyang Jum'at di mesjid-mesjid, maka kesempatan yang baik itu dimanfaatkan oleh para wartawan *Domei* sebagai media penyebar luasan berita proklamasi. Para wartawan itu kemudian bergerak dan berhasil menyebarkan berita proklamasi itu ke Mesjid Besar (di alun-alun Utara) dan Mesjid Pakualaman.

Berita proklamasi itu dapat cepat tersebar luas di kalangan masyarakat, sampai di kampung dan di desa. Pada sore harinya (tanggal 17 Agustus 1945 sore) Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pergerakan dan pendiri Taman Siswa dengan berkendara sepeda memimpin arak-arakan murid Taman Siswa guna menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang baru saja dikumandangkan itu. Suasana Yogyakarta pada hari itu seketika menjadi cerah oleh adanya berita proklamasi. Rakyat menyambut hangat dan penuh dengan kegembiraan. Namun tak dapat pula diingkari bahwa masih ada pula orang yang belum mendengar atau masih ragu tentang berita proklamasi itu. Perasaan ragu akhirnya hilang setelah makin hari berita proklamasi makin menghangat di kalangan masyarakat dan selalu menjadi bahan

pembicaraan orang di jalan, warung dan sebagainya.

Tersebaranya berita Proklamasi di Yogyakarta makin bertambah luas dengan dimuatnya berita itu bersama Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Harian *Sinar Matahari* yang terbit di Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 1945.⁶⁾

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945 segera mengirim kawat kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pada pokoknya berisi ucapan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya mereka berdua menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 10.00, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengundang kelompok-kelompok pemuda di bangsal Kepatih-an, terdiri dari kalangan agama, nasionalis, kepanduan dan keturunan Tionghoa yang semuanya kira-kira baru berusia ± 30 tahun langsung berhadapan dengan Sultan. Pertemuan yang dihadiri oleh ± 100 orang pemimpin kelompok pemuda itu hanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Dalam pertemuan itu Sri Sultan mengenakan *Busana Kejawen*, dan antara lain berkata sebagai berikut:⁷⁾

"Saudara-saudara saya undang kemari karena di tanah air kita terjadi peristiwa penting. Sebelum saya menerangkan apa peristiwa penting itu, barangkali di antara Saudara sudah ada yang mengetahui? Salah seorang yang hadir, seorang pemuda menjawab pertanyaan Sri Sultan dengan singkat, Indonesia Merdeka, Sri Sultan kemudian membenarkan jawaban itu. Setelah Sri Sultan menguraikan secara singkat tentang arti kemerdekaan bagi sesuatu bangsa, maka kemudian berpesan: Kita sudah beratus tahun dijajah bangsa lain, maka selama itu perasaan tertekan dan sekarang kita merdeka, tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan sampai nyempet-nyempet yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut

sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang. pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran, Bintoro (adik Sri Sultan)."

Demikianlah pertemuan singkat yang terjadi antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan kelompok pemuda di bangsal Kepatihan pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 10.00 pagi.

Dalam pada itu sebagaimana termuat dalam harian *Sinar Matahari* yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX berkenan pula memberikan kata sambutan atas peringatan Kemerdekaan Indonesia itu yang antara lain berisi sebagai berikut:⁸⁾

"Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib Nusa dan Bangsa adalah di tangan kita pula, tergantung kepada kita sendiri.

Kita harus menginsyafi, bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada kecualinya harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing, untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela Kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan faham. Tiap-tiap golongan harus sanggup menyampaikan kepentingannya sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan Kemerdekaannya, buat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap angkatan-angkatan Bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang."

Sementara itu untuk menyambut adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 itu pula, Yogyakarta *Kooti Hookokai* segera mengadakan sidang istimewa bertempat di Gedung Sono Budoyo. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan rasa gembira dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia.
- b. Menyatakan dengan keyakinan seteguh-teguhnya kepada Pemerintah Indonesia akan mengikut dan taat pada tiap-tiap langkah dan perintahnya.
- c. Mohon kepada Ilahi agar Negara Indonesia berdiri kokoh, teguh dan abadi.

Apabila kita perhatikan fakta dan keadaan yang terjadi di Yogyakarta dalam rangka menyambut berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu, jelas menunjukkan bagaimana sikap kedua pimpinan daerah, sikap pemerintah Daerah Istimewa, bagaimana sikap penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pimpinan daerah Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII secara cepat dan tegas menyatakan sikap dan tekadnya untuk menyambut, memelihara dan membela Negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Di samping itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan tegas dan penuh semangat mengajak segenap penduduk di wilayah Yogyakarta agar meningkatkan kesatuan dan persatuan serta berjuang bersama-sama untuk membela menjaga dan memelihara kemerdekaan nusa dan bangsa. Demikian pula sikap dari Yogyakarta *Kooti Hookokai* dapat kita lihat secara jelas melalui keputusan yang diambilnya dalam sidang istimewa yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Sono Budoyo itu.

Untuk lebih mengkonkritkan sikap dan tindakan kedua pimpinan daerah Yogyakarta dalam menyambut dan mengisi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu maka berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat sebagai berikut:

Amanat
Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri-Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan:

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat
28 Puasa Ehe 1876
atau 5-9-1945

Hamengku Buwono IX

Amanat
Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati
Ario Paku Alam

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan:

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada daerah ini segala urusan Pemerintahan dalam Negara Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan amanat kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876,
atau 5-9-1945

Paku Alam VIII

Kedua plakat, amanat itu.¹⁰⁾ yang mengatakan bahwa daerahnya (Kasultanan dan Pakualaman) merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, kemudian dicetak dengan kertas merang di percetakan *Sinar Matahari*, sekarang Hotel Garuda. Plakat amanat kedua pimpinan daerah Yogyakarta ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan lebih mengobarkan dan membakar semangat perjuangan rakyat.

Apabila kedua amanat itu kita lihat dari sudut pandangan waktu itu di mana pemerintah pendudukan Jepang masih berkuasa dan masih lengkap persenjataannya, maka kedua amanat itu mempunyai nilai besar bagi rakyat, sebab dapat mengorbankan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dalam sejarah, ketegasan sikap kedua orang Kepala Daerah Yogyakarta itu memiliki bobot dan nilai yang tinggi. Kesultanan

Yogyakarta dan Pakualaman adalah 2 *Zelfbestuur* (Swapraja) yang kemudian menjadi Daerah Istimewa, yang pertama-tama secara tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta Republik Indonesia.

2. *Pengibaran Bendera Sang Merah Putih.*

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diku- mandangkan oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di jalan Pegang- saan Timur Nomor 56, Jakarta itu, pada hakekatnya merupa- kan perwujudan dari niat dan tekad rakyat Indonesia untuk mengakhiri penderitaan dan penjajahan.

Pada waktu itu di mana-mana rakyat Indonesia dengan cepat menanggapi makna dan arti kemerdekaan itu. Kecepatan tanggapan ini dimungkinkan karena kondisi dan situasi telah menjadi matang yang disebabkan adanya penderitaan yang memuncak sebagai akibat penjajahan Belanda yang berlangsung tiga setengah abad, dan yang kemudian dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Penderitaan itu menimbulkan perasaan ke- bangsaan dan kemerdekaan yang makin kuat tertanam di dalam dada rakyat Indonesia. Karena itu berita Proklamasi Kemer- dekaan 17 Agustus 1945 disambut dengan kegembiraan dan kelegaan yang meluap. Salah satu luapan dan curahan kegem- biraan rakyat adalah berkibarnya bendera Sang Saka Merah Putih di mana-mana di tiap rumah di Indonesia. Pada setiap dada putera Indonesia terpancang lambang Merah Putih terbuat dari kertas, kain dan logam. Maklumat Pemerintah tertanggal 31 Agustus 1945 antara lain memuat perintah agar mulai tanggal 1-9-1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih terus dikibarkan di seluruh persada tanah air. Diperintahkan pula bahwa mulai tanggal 1-9-1945 itu agar seluruh bangsa Indonesia apabila bertemu di mana saja hendaknya saling meng- hormati dan mengucapkan salam nasional: *Merdeka*. Maklumat ini mendapat sambutan yang hangat di mana-mana. Dalam hubungannya dengan masalah ini Dr. Abdul Haris Nasution¹⁾

berkata sebagai berikut: "Pengibaran Sang Merah Putih, pemakaian lencana Merah Putih, dan pekik "Merdeka" yang meluas dengan cepat itu pada hakekatnya merupakan suatu revolusi yang terutama bergerak di sektor psikologis. Dan sebagai penggeraknya adalah terutama karena kegiatan KNI (Komite Nasional Indonesia), BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan pemuda. Anak sekolah membagikan bendera di jalan raya kepada para pengendara mobil, sepeda, beca dan sebagainya. Bendera Merah Putih dan pekik "Merdeka" memenuhi udara di mana-mana yang menandakan tingginya semangat kebangsaan dan solidaritas seluruh rakyat."

Sementara itu pada tanggal 20 September 1945 di Jakarta dilangsungkan suatu konferensi antara pemuka, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang bertujuan untuk membulatkan pendirian sebagai pendukung Proklamasi dan pembela Republik Indonesia. Dalam konferensi itu antara lain ditegaskan bahwa pemasangan bendera "Sang Merah Putih" makin diperhebatkan, dari kantor pusat, kantor daerah sampai ke *post huis* kecil (Rumah penjagaan kecil). Juga tentang pemakaian lambang Merah Putih dianjurkan untuk menggiatkan.¹²⁾

Keputusan yang diambil oleh konferensi makin menambah hangat dan semaraknya suasana revolusi.

Demikian pula di daerah Yogyakarta. Segala langkah dan gerakan yang melancarkan jalannya revolusi selalu memperhatikan dan mengikuti aksi yang ada di Jakarta serta selalu mengikuti dan melaksanakan setiap instruksi yang datang dari Jakarta. Dengan demikian suasana revolusi yang terjadi di Yogyakarta pada masa awal proklamasi itu sejalan dengan gerak langkahnya revolusi yang terjadi di Jakarta.

Di Yogyakarta para pemuda pelajar tidak mau berpangku tangan saja, melainkan mereka juga aktif bergerak dan bahkan mempunyai andil dan peranan yang sangat penting. Sebagai contoh dalam rangka gerakan pengibaran bendera Merah Putih,

para pemuda pelajar dengan semangat yang menyala-nyala berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, di pabrik, di gedung instansi, dan sebagainya. Mereka sedikit pun tak ada perasaan takut terhadap tentara Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap. Dengan semangat yang tinggi dan menyala-nyala itu ternyata dapat melumpuhkan dan menghancurkan mental para serdadu Jepang. Demikianlah di mana-mana berkibar bendera Merah Putih dengan megahnya. Bentuk dan ukuran bendera Merah Putih yang berkibar itu berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Pendek kata ukuran dan bentuknya tidak seragam. Tetapi yang penting adalah bagaimana menggelorakan semangat proklamasi dan revolusi di kalangan masyarakat.

Dalam gerakan pengibaran bendera Merah Putih di gedung, dan rumah di daerah Yogyakarta ini, tokoh yang terkenal sebagai penggeraknya antara lain ialah Sukardi dan Sutan Ilyas. Di samping itu terjadi pula suatu gerakan pemasangan lencana Merah Putih yang digerakkan oleh para pemuda pelajar. Mereka melaksanakan pencegahan di jalan terhadap orang-orang yang sedang lewat, dan semuanya ditemplei lencana Merah Putih di dadanya. Kadang-kadang lencana itu dipasang di dada sebelah kiri atau kanan. Ada pula yang memasang di kopyah, sehingga kelihatan tidak seragam. Hal ini dapat terjadi karena waktu itu belum ada yang mengaturnya. Peraturan tentang cara memakai lencana, bendera nasional, cara menghormati pada waktu menaikkan bendera nasional, baru ke luar pada tanggal 3 Oktober 1945, berupa pengumuman yang dikeluarkan oleh Pusat Komite Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:^{1 3)}

Komite Nasional Indonesia

Lencana, bendera; hal ukuran bendera dan cara mengereknya serta pemakaian lencana.

PENGUMUMAN

Pemakaian lencana di dada kiri. Cara lain di kopyah atau

ikat kepala tepat di tengah lurus batang hidung.

Bentuk bendera ukuran 3 kali 2.

PENGHORMATAN BENDERA

Penghormatan mulai mengerek sampai berkibar tegak mengikuti dan mengawasi dengan khidmat.

Jakarta, 3 Oktober 1945

Pusat Komite Nasional

Dengan adanya pengumuman yang dikeluarkan Komite Nasional Pusat tertanggal 3 Oktober 1945, maka mulai tampak ada keseragaman dalam hal pemasangan lencana, bentuk dan ukuran bendera, dan cara pengibaran serta penghormatan bendera Merah Putih. Gerakan pemasangan lencana Merah Putih itu diikuti dengan gerakan pekikan "merdeka". Setiap orang senantiasa mengucapkan pekik "merdeka" apabila saling bertemu di jalan. Suasana di jalan, di kota, di kampung, dan di desa menjadi semarak oleh gemuruhnya pekik merdeka. Gerakan itu semua pada hakekatnya merupakan langkah dan usaha untuk menanam lebih dalam rasa kebangsaan dan untuk lebih meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mulai saat itu telah merdeka.

Sementara itu di daerah Yogyakarta pemuda dan rakyat makin bersemangat dan makin berani bergerak akibat digembleng semangatnya oleh amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan amanat Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945. Dengan modal semangat yang menyala-nyala itulah rakyat terus bergerak, khususnya gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang mencapai puncaknya pada waktu rakyat dan pemuda berusaha menurunkan bendera *Hinomaru* dan menaikkan bendera Merah Putih di Gedung *Cokan Kantai* (sekarang Gedung Agung) yang terletak di Jalan Malioboro. Gedung *Cokan Kantai* merupakan istana *Cokan* atau Gubernur dan sekarang digunakan sebagai Gedung Negara atau Gedung Agung.

Peristiwa ini terkenal dengan nama *Insiden Bendera di Cokan Kantai*. Kisahnya dapat dituturkan sebagai berikut:

"Pagi hari itu tanggal 21-9-1945. Pada hari itu terjadi peristiwa yang sangat mendirikan bulu roma, mengharukan dan mengandung kepahlawanan yang luar biasa.

Pada mulanya sekelompok pemuda hendak mengibarkan bendera Merah Putih di gedung Balai Mataram atau Kamar bola atau gedung Seni Sono (sekarang). Setelah bendera Merah Putih berkibar dengan megahnya, datang serdadu Jepang dari gedung *Cokan Kantai* (Gedung Agung) berusaha membubarkan kelompok pemuda tersebut. Massa pemuda itu dengan teratur meninggalkan tempat. Tetapi tidak antara lama kemudian, yaitu kira-kira pukul 12.00 tanggal 21-9-1945 datang secara berduyun-duyun massa rakyat dan pemuda ke gedung *Cokan Kantai*. Mereka bersenjatakan bambu runcing, golok, tombak, palu, pentung dan sebagainya datang berlari-lari dan berdesak-desakan menuju ke gedung *Cokan Kantai*. Mereka terdiri dari ribuan pemuda pelajar, pegawai kantor, kaum buruh, pedagang, lelaki dan perempuan. Dengan meneriakkan kata "Siap" dan pekikan "Merdeka" yang saling bersautan dari segala penjuru membuat suasana menjadi hangat dan panas. Massa rakyat dan pemuda yang ratusan ribu jumlahnya itu benar-benar telah dibakar semangatnya oleh api proklamasi dan revolusi. Mereka datang dengan tekad dan tujuan yang sama, yakni menurunkan bendera *Hinomaru* yang masih berkibar di gedung *Cokan Kantai* dan kemudian menggantikannya dengan menaikkan bendera Merah Putih. Sementara itu serdadu-serdadu Jepang bersenjata lengkap telah siap sedia menjaga gedung *Cokan Kantai*. Apa yang terjadi selanjutnya? Massa rakyat dan pemuda yang ratusan ribu jumlahnya itu dengan semangat yang menyala-nyala mendesak dan menerobos penjaga-penjaga Jepang yang bersenjata. Akhirnya dengan tidak memperdulikan bahaya maut di ujung-ujung senjata tajam yang telah siap mengancam itu, lima orang pemuda (laki-laki dan wanita)¹⁴⁾ menerobos penjaga Jepang dan naik di atas atap Gedung *Cokan Kantai* (Gedung Agung) untuk

menurunkan bendera *Hinomaru* serta menggantinya dengan bendera Sang Merah Putih. Kelima pemuda itu antara lain ialah Kapten (Polisi) Slamet C¹⁵⁾, Siti Ngaisah¹⁶⁾, Sultan Ijas, Supardi¹⁷⁾ dan Rusli¹⁸⁾. Tentang peristiwa "pengerekan" bendera Merah Putih di Gedung Cokan Kantai ini, Bapak H. Samawi (Pemimpin Umum Harian *Kedaulatan Rakyat*) dan Ibu memberikan keterangan sebagai berikut:¹⁹⁾

"Memang pada mulanya Sang Merah Putih sudah berhasil dikibarkan di Gedung Negara atau Gedung Agung. Tapi kemudian diturunkan lagi oleh Jepang, diganti *Hinomaru*. Pemuda-pemuda menyerbu ke Gedung Negara. Pak Samawi dan Pak Sumantoro ikut serta dan datang dari arah jembatan Sayidan.

Pak Sam berteriak, "Turunkan bendera Jepang".

Melihat serdadu-serdadu Jepang menghadapkan mulut mitralyurnya kepada massa pemuda kita. Pak Sam berteriak lagi, "Peluru Jepang tidak cukup menembak kita semua!" demikianlah penuturan Bu Samawi. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa melihat *Hinomaru* masih berkibar di atap gedung, Samawi bersama lima pemuda lainnya naik ke atap, *Hinomaru* kemudian diturunkan dan Merah Putih dikibarkan. Sementara Jepang diam saja di dalam gedung. Jadi bukan berarti hanya Siti Ngaisah dan seorang pemuda lainnya yang mengerek Merah Putih ketika itu, melainkan sebanyak 6 (enam) pemuda!"

Setelah bendera *Hinomaru* diturunkan dan bendera Merah putih dinaikkan dan dikibarkan di atas atap Gedung Agung, maka massa rakyat dan pemuda spontan berteriak: "Merdeka!" "Merdeka!" "Merdeka!"

Bunyi pekik Merdeka yang bersaut-sautan itu menggentar dan meluluhkan semangat serdadu Jepang. Selanjutnya lagu Indonesia Raya menggema mengarungi suasana hari itu dan ikut menyemarakkan peristiwa yang bersejarah itu.

Kemenangan yang dialami pada hari itu sangat membesar-

kan hati setiap pemuda, sehingga seakan-akan derita sengsara yang harus dipikul akibat menegakkan kemerdekaan tanah air itu, terlupakan sama sekali. Mereka dengan ikhlas dan rela sekali berkorban, dengan menaruhkan jiwa dan raganya.

3. *Pembentukan KNI Daerah.*

Sehari sesudah Proklamasi yakni tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat di bawah pimpinan Ir. Sukarno di Gedung Kesenian Jakarta dan mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. memilih Presiden dan Wakil Presiden yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta.
- c. pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.²⁰⁾

Pada hari berikutnya (19 Agustus 1945) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melanjutkan sidangnya dan menghasilkan keputusan yakni:

- a. menetapkan hal kementerian negara yaitu membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk para pemimpin departemen (menteri).²¹⁾
- b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia yang dibagi atas delapan propinsi dan sekaligus ditunjuk gubernurnya.²²⁾

Selanjutnya dalam rapatnya tertanggal 22 Agustus 1945 PPKI berhasil pula menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komite Nasional
- b. Partai Nasional Indonesia dan
- c. Badan Keamanan Rakyat.

Khususnya tentang Komite Nasional, ditetapkan sebagai berikut.²³⁾

- a. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.
- b. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia, yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
- c. Usaha Komite Nasional ialah:
 - 1) Menyatakan keinginan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
 - 2) Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
 - 3) Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
 - 4) Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia, dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.
- d. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite nasional di daerah. Di mana perlu di daerah didirikan pusat daerah, yaitu untuk: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil.
- e. Komite Nasional di pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus, yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional. Buat pertama kali ketua pusat daerah ditetapkan oleh pemimpin besar Ir. Sukarno.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan tentang berdirinya tiga badan baru, yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Khususnya tentang pembentukan KNI dikatakan bahwa:

"Didirikanlah Komite Nasional di Jakarta dan seluruh tempat-tempat di Indonesia di atas dasar kebangsaan yang se-

lebar-lebarnya. Komite Nasional di pusat dan di daerah-daerah ini adalah penjelmaan kebulatan tujuan cita-cita bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Karenanya Komite Nasional itu harus diliputi semua aliran dan semua lapisan rakyat. Pemimpin-pemimpin rakyat dari segala golongan, segala aliran, segala lapisan kini harus bersatu dalam Komite Nasional itu. Pangreh praja, alim-ulama, kaum pergerakan, pemuda-pemuda, kaum dagang dan perniagaan dan lain-lain harus bekerja bersama-sama dalam Komite Nasional. Komite Nasional harus sekeras-kerasnya dan segiat-giatnya berusaha:

- a. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
- b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
- c. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
- d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum.

Bangsaku! Demikianlah usaha-usaha Komite Nasional! Berkumpullah di dalam Komite Nasional! Bantulah Komite Nasional! Bekerjalah untuk ketenteraman, keselamatan, kesejahteraan dan cita-cita bersama! Janganlah ada perselisihan di antara penduduk sekalian, bersatulah, bekerjalah semuanya untuk negara Indonesia Merdeka! Sekianlah tentang Komite Nasional yang harus dengan lekas diadakan di tiap-tiap daerah.”²⁴⁾

Dengan adanya penetapan PPKI tentang pembentukan Komite Nasional dan kemudian diikuti dengan seruan Presiden Sukarno dalam pidato radionya tertanggal 23 Agustus 1945, maka segera dibentuk Komite Nasional Pusat yang kemudian lebih terkenal dengan nama KNIP (Komite Nasional Indonesia

Pusat). KNIP ini dilantik secara resmi oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi di jalan Pos, Jakarta. Adapun yang dilantik menjadi pimpinan KNIP itu ialah:

- a. Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua;
- b. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua I;
- c. Mr. Johannes Latuharhary sebagai Wakil Ketua II;
- d. Adam Malik sebagai Wakil Ketua III.²⁵⁾

Bagaimanakah halnya dengan pembentukan KNI di daerah Yogyakarta?

Dengan adanya instruksi dari pusat tentang pembentukan KNI-KNI daerah, maka satu minggu setelah proklamasi atau kira-kira pada akhir Agustus 1945²⁶⁾ dibentuk Komite Nasional Daerah di Yogyakarta. Yang duduk dalam KNI daerah Yogyakarta semuanya berjumlah 87 terdiri dari: Penasehat: BPH Purubojo, Ki Bagus Hadikusumo dan Dr. Sukiman. Ketua: Moh. Saleh. Anggota-anggota: KRT Hardjodiningrat, Mr. Tandiono-Manu, KRT Josodiningrat, Wiwoho, BRM. Sukadari, Marlan, KPH Mr. Sudarisman Purwokusumo, H. Faried Ma'ruf, Siswoharsojo, DD Susanto, R. Atmodarminto, Adisumarto, K. Werdojo, Asror, Soebani, S. Parman, Mochtar, Hertog, R.M. Sosrosudirdjo, Ngatidjo, Sumantoro, Mr. Surjotjokro, Lagiono, Djajengskarso, R. Roedjito, H. Abdulhamid, Ir. KRT Dipokusumo, BPH Surjodiningrat., RP Sudarsono, Sudarto, Sukiman, Oemar Slamet, Mawardi, Reksosiswojo, RH Hadjid, KPH Noto-taruno, Ramelan, R. Iskandar, Tehaya, Mr. KRT Brotokusumo, R. Mawai Hardjosubroto, RM Sumarmadi, KRT Notojudo, Wijono, Ny. Sutomo, Ny. Susanto, RL Sastroseputro, Ki Sudarminto, R. Sugardo, R. Darmosugito, Wali Alfatah, Sulamir, Wignjosuwarno, Sutomo (Antara), Ismullah, KRT Honggowongso, Gondojuwono, Hadisumarto, Daruman, Mr. Kasmat, PBH Hadinegoro, Bedjo, Adham Basjori, RL Himodigdojo, Zarkasi, M. Latjuba, Moh. Tauchid, Dr. Suwardi, KRT Martohusodo, KRMT Surjaningrat, Djalaludin Nasution, Oemar Djoy, Dr. Sutjipto, Sardjono, Mr. Sjamsudin, Sudiro.²⁷⁾

Apabila dilihat dari susunan dan jumlah anggotanya sudah mencerminkan instruksi dari pusat bahwa KNI daerah harus terdiri dari tokoh masyarakat dan berasal dari semua lapisan dari kalangan masyarakat.

KNI daerah Yogyakarta pada mulanya berkantor di *Hooko Kai* yaitu di Jalan KHA Dahlan, sekarang digunakan Kanwil Departemen Penerangan DIY. Dengan terbentuknya KNI daerah Yogyakarta, kemudian segera diatur dan direncanakan langkah untuk ikut mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Sesuai dengan usaha yang telah digariskan oleh KNI Pusat maka jelas bahwa badan ini bertugas menyalurkan dan memperjuangkan segala keinginan atau kehendak rakyat, di samping itu juga bertugas mendampingi pekerjaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah. Badan inilah yang menjadi kemudi segala gerakan untuk melancarkan jalannya revolusi dan yang akhirnya menjadi badan setaraf dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memang pada awal Revolusi Fisik itu, KNI pada hakekatnya berfungsi sebagai badan perjuangan.²⁸⁾ Sebagai bukti dapat dilihat dari langkah dan kegiatan yang dilakukannya. Misalnya di Yogyakarta, dalam masa awal Proklamasi itu KNI daerah Yogyakarta itu KNI daerah Yogyakarta aktif bergerak mengkoordinasi dan menggerakkan massa rakyat dan pemuda untuk melakukan gerakan pengibaran bendera Merah Putih, gerakan pemasangan lencana Merah Putih dan gerakan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang.

Sementara itu dengan ke luarnya "Maklumat Wakil Presiden Nomor X" tertanggal Jakarta, 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat, maka dengan tegas diputuskan bahwa sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Nasional Pusat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang

bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.²⁹⁾

Sehubungan dengan adanya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tersebut, maka di Yogyakarta segera pula dibentuk Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Pembentukannya dilakukan pada tanggal 29-10-1945. Adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:³⁰⁾ Ketua: Moh. Saleh; Wakil Ketua: S. Jojodiningrat dan Ki Bagus H. Hadikusumo dengan dibantu 16 orang yaitu: KRT Honggowongso, Marlan, H. Faried Ma'ruf, H. Hadjid, Mr. Manu, Mr. Surjotjokro, Wijono, S. Parman, Sardjono, Ir. Dipokusumo, Djalaludin, Mr. S. Purwokusumo, Dr. Samsudin, Murdjodo, Umar dan Dr. Sutjipto.

Dengan terbentuknya Badan Pekerja KNI daerah Yogyakarta itu, maka pada tanggal 30 Oktober 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII berkenan memberikan amanatnya. Isi lengkap amanat itu adalah sebagai berikut:³¹⁾

Amanat

Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
2. Amanat kami berdua pada tanggal 28 Puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945.
3. Bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah jajahan (dalam zaman Belanda dijalankan oleh Gubernur dengan kantornya, dalam zaman Jepang oleh Koti Zimu Kyoku Cokan dengan kantornya), telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada kami berdua.

4. Bahwa Paduka Tuan Komisaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan Yogyakarta di hadapan kami berdua dengan disaksikan oleh para pembesar dan para pemimpin telah menyatakan tidak perlunya akan adanya Subcommisariat dalam daerah kami berdua.
 5. Bahwa pada tanggal 29-10-1945 oleh Komite Nasional Daerah Yogyakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari antara anggota-anggotanya, atas kehendak rakyat dan panggilan massa, yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-Undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta, maka kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, dengan ini menyatakan: Supaya jalannya pemerintahan dalam daerah kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerja tersebut adalah suatu Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-Undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam daerah kami berdua untuk membikin Undang-undang dan menentukan haluan jalannya Pemerintahan dalam daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat..
- Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dari segala bangsa dalam daerah kami berdua mengindahkan amanat kami ini.

Yogyakarta, 24 Dulkaidah, Ehe 1876
atau 30 Oktober 1945

Hamengku Buwono IX
Paku Alam VIII

Amanat itu dikeluarkan dan ditandatangani bersama-sama antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Sejak dikeluarkannya amanat itu untuk amanat yang ke luar selanjutnya senantiasa ditandatangani bersama. Ini mewujudkan adanya persatuan di antara keduanya. Sejak itu Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sudah menjadi satu daerah ialah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila kita perhatikan isi amanat tersebut khususnya diktum ke 5 maka jelas adanya usaha menuju demokratisering dalam pemerintahan yang secara tegas dinyatakan bahwa supaya jalannya pemerintahan dalam Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman dapat selaras dengan UUD RI, maka Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta yang *dapat dianggap sebagai wakil rakyat*, dinyatakan sebagai *badan legislatif* atau *badan pembuat undang-undang* untuk mengatur Daerah Istimewa Yogyakarta *atas nama rakyat itu*.

Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil rakyat, juga diberi kekuasaan untuk menentukan haluan jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kehendak rakyat.

Bagi Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman, pemberian kekuasaan pada rakyat atau demokratisering itu, merupakan suatu revolusi yang besar. Sebab sepanjang sejarah di daerah ini, belum pernah mengenyam kekuasaan semacam itu. Artinya sepanjang sejarah rakyat di Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman belum pernah mengenal dan memiliki sebuah lembaga perwakilan rakyat yang ikut berkuasa dalam urusan pemerintahan.

Jelaslah bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai arti yang penting bagi rakyat di Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman, karena dapat menimbulkan perubahan baru di mana rakyat dapat ikut serta memerintah daerahnya bersama Sri Sultan dan Sri Paku Alam. Dan sejak terbentuknya Badan Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta itu, maka segala macam amanat atau maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan dan Paku Alam, dengan persetujuan Badan

Pekerja KNI Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya ditandatangani bersama oleh Sri Sultan dan Paku Alam, tetapi juga ikut ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja yang juga menjadi Ketua KNI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu dengan dikeluarkannya "Maklumat Nomor 18 Tahun 1946", tertanggal Yogyakarta, 18 Mei 1946, yang mengatur tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sejak terbentuknya DPRD itu, KNID di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dihapus dan pekerjaannya dilanjutkan oleh DPRD yang bersangkutan. Hal ini adalah selaras dengan bunyi Maklumat Nomor 18 Tahun 1946 khususnya diktum VII yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan terbentuknya Dewan-Dewan Perwakilan, seluruh susunan Komite Nasional Indonesia di daerah Yogyakarta dihapuskan dan pekerjaannya yang selaras dengan pekerjaan Dewan Perwakilan dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan yang bersangkutan."³²⁾

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK DI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Sikap Pasukan Jepang

Datangnya berita tentang penyerahan Jepang kepada tentara Sekutu sangat mengejutkan. Tidak hanya rakyat Jepang sendiri yang terkejut tetapi juga rakyat yang menjadi jajahannya, termasuk rakyat Indonesia. Mereka tidak mengira akan demikian cepat Jepang menyerah. Bala tentara Dai Nippon yang gagah berani dan terkenal dengan semangat harakirinya itu sangat terharu mendengar berita penyerahan Jepang kepada pihak Sekutu. Lebih-lebih prajurit Jepang yang berada di Indonesia yang merasa belum pernah kalah perang melawan Sekutu dan masih segar bugar serta masih memiliki persenjataan

yang lengkap, sangat tertekan jiwanya. Hati dan perasaan para prajurit Jepang di Indonesia terasa hancur dan menderita mental *breakdown*. Namun, karena pandainya pihak Jepang, mereka dapat bertindak, berbuat dan bersikap wajar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka dapat menyembunyikan rahasia dan menekan perasaannya, sehingga secara sepintas tidak kelihatan adanya perubahan di wajah mereka. Sikap dan tindakan mereka tidak tampak adanya perubahan. Bahkan tampak mereka makin meningkatkan kesiap-siagaannya. Walaupun sebenarnya hati mereka telah hancur luluh. Mereka harus taat dan setia kepada setiap perintah Kaisar Jepang.

Sementara itu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti bahwa belenggu penjajahan di Indonesia telah diputuskan. Indonesia telah merdeka dan bebas dari cengkeraman penjajah. Adanya kenyataan yang demikian itu tidak dihiraukan oleh pihak Jepang. Mereka tidak mau mengakui adanya kemerdekaan Indonesia dan lebih-lebih untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada Republik. Mereka hanya patuh dan taat pada perintah Kaisar yaitu menyerahkan Indonesia sebagai inventaris yang utuh dan lengkap kepada Laksamana Mounbatten dari SEAC (Inggris), dan kepada Jenderal Blamey dari Australia. Sejalan dengan itu maka sekalipun para pembesar Jepang yang berkuasa di Yogyakarta sudah mengetahui adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan juga mengetahui bahwa rakyat Yogyakarta yang bagaikan tertekan kini meloncat bersemangat merdeka, namun mereka enggan memberikan segala kekuasaan kepada rakyat Indonesia. Mereka tetap bersitegang untuk mempertahankan kekuasaannya dan akan melaksanakan perintah sesuai dengan instruksi Kaisar Jepang. Untuk itulah mereka semakin memperkeras penjagaan dan masih tetap berusaha mempertahankan kantor, perusahaan, pabrik dan sebagainya. Para penguasa Jepang masih tetap memberikan perintah, seolah-olah mereka yang berkuasa. Karena sikap Jepang yang demikian itu yang tidak mau mengakui ke-

nyataan yang terjadi pada waktu itu, maka timbul ketegangan. Di daerah Yogyakarta, baik di kantor pemerintahan, pabrik maupun perusahaan di mana orang Jepang masih memegang kekuasaan ketegangan makin memuncak, karena para penguasa Jepang itu tidak mau begitu saja menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Republik. Lebih-lebih bagi para prajurit Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap, mereka tidak mau begitu saja menyerahkan perlengkapan dan persenjataannya kepada pihak Republik. Hal yang demikian itu jelas menunjukkan adanya sikap tidak simpati dan toleransinya tentara pendudukan Jepang terhadap aspirasi bangsa Indonesia dan kenyataan yang ada. Bahkan secara tegas para penguasa Jepang itu masih berani berkata dan memperingatkan kepada semua instansi pemerintahan, bahwa "Jepang diberi kuasa oleh Sekutu untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum sampai tentara pendudukan Sekutu (Inggris dan Australia) datang." Tindak-lanjut dari sikapnya itu, maka salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pemberontakan bersenjata adalah membubarkan PETA, *Heiho* dan sebagainya serta melucuti persenjataan mereka yang dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Tindakan ini sebenarnya melanggar perintah Jenderal Mac Arthur yang telah diumumkan sebagai salah satu syarat kapitulasi Jepang, yakni menyerahkan segala inventaris secara utuh dan lengkap, termasuk barisan bersenjata seperti PETA. Hal ini diperbuat Jepang, karena takut akan pecahnya suatu pemberontakan, dan juga untuk membela diri.³³⁾ Jepang sadar bahwa bila kesatuan PETA, *Heiho* dan sebagainya itu masih utuh, maka mereka pasti akan membalikkan senjata dan berontak melawan Jepang.

Demikianlah di Yogyakarta, pembubaran kesatuan-kesatuan Peta, *Heiho* dan sebagainya itu berlangsung pula. Tetapi tatkala dilakukan perlucutan senjata, maka mendapat reaksi dan tantangan yang hebat dari pemuda dan rakyat. Bentrokan fisik sering terjadi dan tak dapat dihindarkan lagi. Lebih-lebih untuk daerah Yogyakarta di mana semangat revolusi yang sudah

demikian tertanam dalam kalbu pemuda dan rakyat. maka dengan tegas berontak dan melawan terhadap sikap Jepang yang masih kaku dan keras kepala itu. Karena itu di daerah Yogyakarta dalam rangka menegakkan dan melaksanakan pemerintahan di daerahnya pada masa awal revolusi itu kadang-kadang harus menggunakan kekerasan, ketegasan dan kekuatan senjata.

2. Hambatan-hambatan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah berhasil diku- mandangkan di seluruh penjuru Tanah Air dan di dunia. Rakyat sudah mengetahui bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan. dan negara Indonesia secara resmi telah berdiri di atas puing-puing reruntuhan pemerintahan kolonial. Namun demikian, negara Indonesia yang masih baru dan berusia muda belia itu sudah tentu banyak mengalami tantangan dan hambatan. Jalannya roda pemerintahan belum dapat digerakkan secara lancar. Kadang-kadang tersandung batu kerikil dan pada saat yang lain tertumbuk batu karang. Demikianlah gerak dinamikanya roda pemerintahan negara Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan.

Hal yang demikian ini tidak mengherankan. Lebih-lebih pada masa awal revolusi kemerdekaan, hambatan yang mengganggu jalannya roda pemerintahan masih berserakan di mana-mana serta merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan tekad, keberanian dan semangat yang menyala-nyala.

Pada masa awal revolusi kemerdekaan itu, bala tentara pendudukan Jepang masih memegang jalannya roda pemerintahan. Ini berarti bahwa roda pemerintahan masih berada di tangan Jawa *Gunseikanbu* dan demikian pula alat-alat kekuasaan masih berada di tangan *Kenpeitai* dan pasukan Jepang. Dan atas kepandaian, kelicikan, kecermatan dan kecepatan bertindak pihak Jepang, maka barisan Peta dan *Heiho* segera dibubarkan serta persenjataan mereka dilucuti. Dengan penipumannya yang

licin itu maka senjata bekas tentara Peta dan *Heiho* dapat dikumpulkan oleh Jepang. Praktis pada saat itu bangsa Indonesia tidak memiliki senjata, kecuali yang dari Kepolisian, dalam jumlah yang sangat terbatas. Bahkan di Yogyakarta senjata yang dimiliki oleh Polisi Istimewa juga dilucuti untuk kemudian dikumpulkan di Markas Polisi Istimewa di Nggayam. Tindakan Jepang itu menimbulkan kemarahan pemuda dan rakyat. Tetapi akhirnya dengan tindakan yang tegas dan keras senjata itu dapat direbut dan selanjutnya dapat digunakan sebagai modal perjuangan yang sangat berharga.

Kenyataan tersebut jelas merupakan tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah Republik yang masih berusia muda belia. Apa akal? Bagaimana hendak menegakkan dan mengisi kemerdekaan itu? Jelas bahwa Proklamasi saja tidak cukup! Pernyataan kemerdekaan harus ditindak-lanjuti. Hal yang terpenting adalah mengisi dan menegakkan kemerdekaan itu. Segala macam cara dan usaha dilakukan. Apakah itu berupa diplomasi ataukah kekerasan atau kekuatan senjata, semuanya dijalankan untuk mengisi dan menegakkan kemerdekaan.

Seirama dengan keadaan di ibukota, di mana *Gunseikanbu* masih tegak berkuasa, bendera Jepang di sana-sini masih berkibar, tentara Jepang masih bersenjata lengkap dan menguasai markas dan benteng, jalannya roda pemerintahan masih berada di tangan *Saiko Sikikan*, maka demikian pula keadaannya di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Kantor, dan perusahaan masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Di gedung *Cokan Kantai* (istana *Cokan*, Gubernur) yang kemudian berganti nama Gedung Negara, masih dijaga ketat oleh serdadu Jepang yang bersenjata lengkap. Situasi yang demikian itu jelas merupakan hambatan dan tantangan bagi pemerintahan daerah dalam usahanya untuk menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

Kecuali itu timbul pula hambatan lain karena adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak militer Jepang yang tidak memenuhi tugasnya dengan semestinya. Yaitu tawanan Belanda dan kawan-kawannya dibebaskan dari kamp tawanan sehingga

mereka itu merupakan kekuatan liar yang reaksioner terhadap Republik Indonesia.³⁴⁾ Sebenarnya tindakan Jepang itu menyalahi dan melanggar instruksi dari markas Serikat di Australia, bahwa sebelum tentara pendudukan Serikat datang di Jawa, maka orang-orang tawanan itu dilarang dikeluarkan dan harus menantikan hingga datangnya tentara Serikat. Tetapi karena Jepang merasa takut akan adanya pembalasan dari Belanda, maka mereka kemudian melepaskan para tawanan itu. Demikianlah tawanan-tawanan yang terdiri dari orang Belanda itu kemudian menjadi kekuatan liar yang reaksioner dan selalu mengganggu, merintangi, dan menghambat jalannya roda pemerintahan Republik.

Pemerintahan daerah yang baru dibentuk itu dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya, sudah tentu banyak pula kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Alat perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan sangat terbatas dan sangat kurang. Lebih-lebih alat perlengkapan senjata, dapat dikatakan tidak ada dan masih dikuasai oleh pihak Jepang. Karena itu langkah pertama yang diambil adalah melakukan perebutan kekuasaan senjata dari tangan Jepang.

3. *Partisipasi Masyarakat.*

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pada hakekatnya merupakan perwujudan dari niat dan tekad rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada umumnya sebagian besar dari rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi apa arti dan maksud kemerdekaan itu. Kecepatan tanggapan rakyat terhadap kemerdekaan itu dapat dilihat dan timbulnya gerakan rakyat yang menyongsong proklamasi kemerdekaan. Datangnya kemerdekaan itu disambut oleh seluruh rakyat di kota dan di desa dengan kegembiraan dan kelegaan yang meluap. Semangat para pemuda dan rakyat menggelora, menggerakkan roda revolusi. Rakyat dengan cepat dan serentak bergerak secara spontan mengambil inisiatif untuk memberi arti dan isi kepada

kemerdekaan. Tokoh dan pemimpin-pemimpin di daerah tampil ke muka untuk memberi bimbingan kepada gerakan rakyat yang spontan itu. Pada umumnya gerakan rakyat itu bertujuan hendak mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, di tingkat pusat dan daerah. Pada hakekatnya gerakan rakyat itu mengarah kepada dua bentuk yaitu merebut kekuasaan dan merebut senjata dari tangan Jepang. Di sini partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang terkenal dengan sebutan kota perjuangan dan kota revolusi, tidak luput pula dari keadaan seperti tersebut di atas. Rakyat bersiap, menyesuaikan diri dengan suasana baru, alam kemerdekaan. Berita Proklamasi Kemerdekaan yang diterima oleh Radio *Domei* Cabang Yogyakarta secara rahasia dan sembunyi-sembunyi disebar-luaskan. Lebih-lebih dengan dimuatnya berita Proklamasi bersama Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada harian *Sinar Matahari* yang terbit di Yogyakarta tanggal 19 Agustus 1945, makin menyemarakkan situasi di Yogyakarta. Setelah tersiarnya berita tentang kemerdekaan Indonesia itu, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 19 Agustus 1945 segera mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya kedua beliau itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta atas berdirinya Negara Republik Indonesia. Tindakan pimpinan daerah Yogyakarta yang cepat dan tegas itu menunjukkan bagaimana sikapnya terhadap Republik dan lebih nyata lagi terlihat dalam amanat yang dikeluarkannya pada tanggal 5-9-1945.³⁵⁾ Amanat itu ditujukan kepada penduduk daerah Yogyakarta dan daerah Paku Alaman, yang isinya menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman, yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Dan dinyatakan pula bahwa daerah-daerah tersebut berhubungan dengan keadaan pada waktu itu, segala urusan Pemerintahan mulai saat itu juga berada di tangan beliau masing-masing (Sri

Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dipegang juga seluruhnya. Perhubungan dua daerah tersebut masing-masing bersifat langsung dengan Pemerintah Pusat dan tanggung jawab atas daerah-daerah tersebut langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Demikianlah kurang lebih isi dari amanat tersebut.

Amanat dari kedua pimpinan daerah itu merupakan kekuatan moral yang dapat menggerakkan massa rakyat di daerahnya.

Menanggapi adanya sikap dan tindakan yang cepat, cermat dan tegas dari kedua pimpinan daerah Yogyakarta itu, Presiden Republik Indonesia segera mengirim utusan ke Yogyakarta untuk menyampaikan "Piagam Kedudukan kedua Sri Paduka". Utusan itu ialah Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis yang tiba di Yogyakarta pada tanggal 6-9-1945. Bunyi piagam kedudukan itu ialah sebagai berikut:

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalogo, Abdulrachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya, dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari-pada Republik Indonesia.

Yogyakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

ttd.

Ir. Soekarno

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam ingkang kaping VIII pada kedudukannya, dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

ttd.

Ir. Soekarno

Dalam pada itu Yogyakarta *Kooti Hookokai* yang merupakan suatu badan "Dewan Perwakilan Rakyat" pada waktu itu segera mengadakan sidang istimewa untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang ini diadakan di gedung Sono Budoyo pada tanggal 19-8-1945 dan mengambil keputusan yang isinya antara lain, ikut bergembira dan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berdirinya Negara Republik Indonesia. Menyatakan sikap yang taat dan patuh pada setiap perintah dan langkah yang diambil dan yang menjadi keputusan Pemerintah Indonesia. Akhirnya dimohonkan agar Negara Indonesia yang baru lahir itu dapat berdiri dengan kokoh teguh dan abadi.

Selanjutnya masyarakat di daerah Yogyakarta, massa pemuda, pelajar, petani, buruh dan pegawai, mulai bergerak menyambut gemanya proklamasi kemerdekaan. Di samping itu segera mengalir pernyataan taat dari rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Untuk daerah Yogyakarta pernyataan taat seperti itu antara lain diajukan oleh *Pemuda Kita Kasultan-*

an (*PEKIK*) berupa mosi yang diajukan pada tanggal 27-9-1945 yang berisi:

MOSI PEKIK

Dipermaklumkan ke hadapan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan:

Rapat dari Angkatan Muda Pegawai Kasultanan, dengan singkat dinamakan PEKIK (Pemuda Kita Kasultanan) telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27-9-1945 di Bale Harsono Kepatihan yang dikunjungi oleh segenap pegawai Kasultanan tua muda ± 400 orang.

Dengan suara bulat telah memutuskan Mosi tertunjuk kepada Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan, sebagai Kepala Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Angkatan Muda dari pegawai Kasultanan selalu berdiri di belakang Sri Paduka Kangjeng Sultan, siap sedia menjalankan segala perintah dan petunjuknya.
2. Berjanji, jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah dan menjajah Indonesia atas titah Sri Paduka hamba sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan.
3. Berjanji akan memelihara dan mempertahankan tetapnya kemerdekaan Indonesia sampai di akhir zaman.³⁶⁾

Kecuali itu para pegawai dari Paku Alaman juga mengirimkan Mosi yang isinya sebagai berikut:

Mosi para abdi dalem praja Paku Alaman Yogyakarta.³⁷⁾

Kami, para abdi dalem praja Paku Alaman Yogyakarta, Daerah Istimewa Republik Indonesia, pada rapatnya yang dilaksanakan pada hari bulan tanggal 13-10-1945 telah memutuskan:

Mendirikan Persatuan para Abdi Dalem Praja Paku Alaman seluruhnya dan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan berdirinya Negara Republik Indonesia "Merdeka", akan memberi keadilan; kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya.
2. Bahwa dengan kembalinya pemerintah Belanda, berarti penjajahan yang akan membawa penindasan kesengsaraan penduduk Indonesia..
3. Bahwa sekarang makin nyata gentingnya suasana, yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian yang sangat menghina negara Republik Indonesia.
4. Bahwa Praja Paku Alaman telah diakui oleh PYM Presiden Republik Indonesia sebagai Daerah Istimewa, yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari PYM Presiden Republik Indonesia.

Memutuskan:

1. Bahwa para abdi dalem Praja Paku Alaman harus teguh bersatu padu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Merdeka, tetap mencurahkan segala tenaga, jiwa dan raga membela Indonesia merdeka.
2. Tetap setia dan berdiri di belakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII yang telah mendapat penuh kepercayaan dari PYM Presiden Republik Indonesia.
3. Serentak meletakkan jabatannya, jika bangsa lain memerintah Indonesia.

Demikianlah mosi ini ditanda-tangani oleh ketuanya yaitu Gondodiprodjo.

Dari kenyataan tersebut di atas membuktikan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta antara pimpinan daerah dengan rakyat terdapat satu jalinan kerja sama yang erat, kompak dan bahu membahu dalam mengisi dan menegakkan kemerdekaan demi kelancaran jalannya pemerintahan di daerahnya. Keadaan seperti ini tetap dapat dipertahankan dalam memasuki masa perjuangan selanjutnya.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN BERSENJATA) DI DAERAH

1. Perebutan Kekuasaan dari Jepang.

Kumandanganya Proklamasi Kemerdekaan telah didengar oleh para pemuda dan rakyat di daerah Yogyakarta. Pihak Jepang yang pada waktu itu masih berkuasa tentu juga ikut mendengarnya. Namun tampaknya pihak Jepang tenang-tenang saja dan pura-pura tidak mengetahuinya. Memang, pihak Jepang itu tidak dapat menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa sebabnya? Karena Jepang telah terikat oleh piagam penyerahan yang memaksanya agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan keutuhan Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada pihak Sekutu sebagai inventaris.

Sikap keras kepala, angkuh, sombong dan tindakan yang menyakitkan hati yang dilakukan oleh pihak Jepang, tentu menimbulkan kemarahan rakyat. Dalam keadaan yang demikian itu, masa rakyat segera berkumpul dan berduyun-duyun mengepung kantor-kantor yang masih dikuasai Jepang. Dengan bersenjatakan bambu runcing, pedang, keris dan sebagainya mereka bergerak melakukan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata dari tangan Jepang.

Di daerah Yogyakarta, tak luput pula dari gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata.

Di Yogyakarta, pengambilalihan kekuasaan itu secara *de jure* telah dimulai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, melalui amanat yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945. Setelah itu, para pejuang pers di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro membongkar segel percetakan *Sinar Matahari* yang berada di Hotel Garuda. Gerakan ini berhasil dengan baik dan alat-alat percetakan itu kemudian digunakan sebagai modal untuk menerbitkan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*.³⁸⁾ Sumarmadi berhasil pula mengambil alih radio Jepang dan membuat berkumandang Radio Republik Indonesia untuk pertama kalinya di Yogyakarta.³⁹⁾ Dengan melalui

kedua media massa itu pekik perjuangan "Merdeka" dan komando menyusun kekuatan untuk menghadapi penjajah dapat disebar-luaskan. Sementara itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, BPU, KNI, Polisi dan BKR menjalin kerja sama yang baik dengan para pemuda dan rakyat untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan senjata. Organisasi-organisasi itu mempunyai peranan yang besar dalam gerakan pengoperan kantor sipil, gedung resmi, perusahaan, pabrik, pengibaran Sang Merah Putih dan perlucutan senjata Jepang dengan cara kekerasan ataupun perundingan.

Pada tanggal 21-9-1945 bergeraklah secara bergelombang massa rakyat dan para pemuda, petani, pelajar, buruh, pedagang anggota BPU, Polisi, BKR dan sebagainya, menuju gedung *Cokan Kantai* di Jalan Malioboro, Yogyakarta untuk menurunkan bendera *Hinomaru* dan kemudian menaikkan bendera Sang Merah Putih. Sebagai gambaran situasi peristiwa pada waktu itu dapat diketahui dari selebaran⁴⁰⁾ yang berbunyi sebagai berikut:

"Perjuangan Rakyat"

"Lihatlah perjuangan rakyat jelata. Dengan kekuatan pemuda-pemuda kita hari tanggal 21-9-1945 di atas rumah Cokan Yogyakarta dinaikkan bendera "Sang Merah Putih" Ratusan ribu rakyat jelata berkumpul dan mengadakan upacara tersebut.

Indonesia merdeka oleh rakyat untuk rakyat! Merdeka! Merdeka! Merdeka!"

Pada tanggal 23 September 1945 pihak Jepang melucuti senjata kesatuan Polisi Istimewa di Gayam yang kemudian dikumpulkan di gudang mereka.⁴¹⁾ Oni Sastroatmodjo, selaku komandan Kompi Polisi Istimewa segera melaporkan kejadian ini kepada Komisaris Polisi Sudarsono. Selanjutnya, karena Komisaris Polisi Sudarsono gagal dalam perundingan dengan pihak Jepang untuk meminta kembali senjata Polisi Istimewa, maka pada tanggal 23-9-1945 jam 21.00 bergeraklah massa

rakyat, pemuda dan Polisi mengepung markas Jepang. Akhirnya senjata Polisi Istimewa itu dapat direbut kembali dan segera dibagikan untuk digunakan sebagai modal perjuangan. Gambaran peristiwa perlucutan senjata dan perebutan kembali senjata dari tangan Jepang di Gayam itu dapat kita baca dari selebaran kilat⁴²⁾ yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua Penduduk di Yogyakarta tetap mempertahankan kehormatannya.”

Polisi Istimewa bersama-sama rakyat mempertahankan kehormatannya.

“Persatuan Rakyat Indonesia segala lapisan dan golongan dapat dibuktikan lagi semalam ketika Polisi Istimewa akan diperlucuti senjatanya. Dengan sekejap mata beribu-ribu pemuda bekas Peta, Heiho, Keibodan, Seinendan, Barisan Pelopor dan gerombolan penduduk dari kampung-kampung seluruh kota berkumpul di sekitar asrama Polisi Istimewa untuk menjaga jangan sampai peristiwa perlucutan senjata itu dilanjutkan, oleh karena dengan demikian polisi tidak dapat bertindak lagi dalam usahanya menjaga ketenteraman umum.

Dengan secara damai permintaan rakyat dan pemuda yang puluhan ribu jumlahnya itu dapat dikabulkan dan senjata dikembalikan kepada Polisi Istimewa”.

Dengan berhasilnya perebutan kembali senjata Polisi di Gayam itu, maka gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang di Yogyakarta semakin meningkat. Suasana kota Yogyakarta terasa mulai makin panas. Setiap kendaraan Jepang yang lewat disoraki, dicaci maki atau dilempari batu. Di sana-sini mulai timbul insiden dan bentrokan.

Sementara itu pada tanggal 26-9-1945 mulai jam 10 pagi segenap pegawai kantor dan partikelir, perusahaan dan pabrik di seluruh Yogyakarta menjalankan aksi serentak untuk mengambil oper kekuasaan akan pimpinan yang masih berada di tangan bangsa lain.

Dengan kekuatan yang teratur dan pimpinan KNI daerah

Yogyakarta, maka mereka berhasil mendesak dengan keras supaya pimpinan dan kekuasaan diserahkan kepada pegawai Indonesia. Akhirnya pada jam 8 malam semua pimpinan kantor, perusahaan dan pabrik sudah berada di tangan bangsa Indonesia. Hasilnya memuaskan, walaupun di beberapa tempat terjadi bentrokan agak keras, tetapi kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Kantor, perusahaan dan pabrik yang berhasil dikuasai dan yang kemudian dilaporkan kepada KNI Daerah Yogyakarta, ialah: Pusat *Nanyo Kohatsu* Yogyakarta dan cabang-cabangnya, Jawatan Kehutanan, *Daikan Sangyo*, pabrik-pabrik gula Tanjungtirta, Padokan, Beran, Cebongan, Gondanglipuro, Plered, Gesikan, Rewulu, Medari, Pundong, Sewugalur dan pabrik Salakan.⁴³⁾

Sehari setelah kejadian itu, pada tanggal 27-9-1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta (KNID) mengeluarkan pengumuman kepada segenap penduduk Yogyakarta bahwa pada tanggal 26-9-1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah ada di tangan bangsa Indonesia. Selanjutnya diberitahukan pula bahwa mulai saat itu kekuasaan Pemerintah Daerah telah ada di tangan kedua Sri Paduka dan Komite Nasional. Demikianlah perebutan kekuasaan berjalan terus. Selanjutnya untuk menjaga jangan sampai terjadi kegelisahan di kalangan penduduk bangsa asing dan untuk menjamin keselamatan penduduk bangsa asing di Yogyakarta, Komite Nasional Daerah mengeluarkan pengumuman, yang isi lengkapnya sebagai berikut: "Dipermaklumkan kepada segenap penduduk Yogyakarta, bahwa Komite Nasional bersama-sama rakyat Indonesia menjamin keselamatan penduduk bangsa-bangsa lain yang ada di sini. Pertanggungjawaban atas jaminan itu tidak lain ialah jika bangsa-bangsa lain yang bertempat tinggal di sini mengindahkan, menghormati dan tunduk pada segala peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia serta merasa pula bahwa mereka berada di negeri bangsa lain yang sudah merdeka. Juga dengan jalan saling hormat menghormati antara bangsa-bangsa dapatlah keselamatan terjamin serta keamanan umum terjaga".⁴⁴⁾

Selanjutnya guna menyempurnakan penjagaan keamanan, pada tanggal 28-9-1945 atas perkenan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan maksud untuk lebih tertib dan kuatnya penjagaan keamanan di bawah satu pimpinan, maka Pusat Pimpinan Keamanan yang berkantor di Kepatihan diserahkan kepada KNI, dan di bawah pimpinan Sri Sultan.

Sementara itu pada tanggal 5-10-1945 terjadi perebutan gedung *Cokan Kantai* yang masih diduduki pihak Jepang oleh massa pemuda dan rakyat yang terdiri dari Barisan Penjaga Umum (BPU), BKR, Polisi, pemuda, pelajar, buruh, pedagang dan sebagainya. Mereka datang berduyun-duyun sambil meneriakkan pekik merdeka. Akhirnya gedung *Cokan Kantai* dapat diduduki dan kemudian ditempati sebagai gedung KNI Daerah (semula menempati bekas gedung Hoo Ko Kai, sekarang Kanwil Departemen Penerangan, Jalan KHA Dahlan), dan selanjutnya diberi nama *Gedung Nasional* atau *Gedung Agung*.

Satu hari setelah peristiwa itu, tanggal 6-10-1945 terjadi usaha perlucutan senjata Jepang di Kota Baru (gudang senjata dan markas tentara Jepang) yang didahului dengan perundingan antara Mohammad Saleh (Ketua KNI), RP Soedarsono, Sundjojo dan Bardosono atas nama BKR dengan Mayor Otzuka, *Kenpeitaico Sasaki*, Kapten Ito dan Kianbuco (dari pihak tentara Jepang),⁴⁵⁾ dan yang berlangsung di rumah *Butaico* (sebelah Barat SMA Negeri III, sekarang gedung Dana Pensiunan) mulai jam 19.00 hingga jam 03.00 pagi. Dalam perundingan itu RP Soedarsono meminta agar Butaico Mayor Otzuka menyerahkan senjata Jepang kepada pihak Indonesia. Sementara perundingan sedang berjalan, ribuan rakyat dan pemuda yang digerakkan oleh KNI, BPU, BKR dan Polisi menuju ke Kota Baru. Mereka membawa bambu runcing, golok, tombak, palu, keris, pentung dan sebagainya berusaha mengepung Kota Baru. Ternyata Jepang tidak mau menyerahkan senjata dan perundingan mengalami kegagalan. Rakyat yang telah siap sedia itu tidak sabar lagi. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Pada jam 03.00 pagi terdengar letusan granat, tanda dimulainya penyerbuan. Dengan penuh keberanian dan semangat yang menyalala-

nyala rakyat menyerbu sambil berteriak siap, gempur. . . !! Pihak Jepang mengadakan perlawanan dengan memuntahkan tembakan mitraliur dari tempat persembunyiannya, di atas atap rumah, pohon dan di kubu-kubu. Pertempuran berlangsung sangat seru: Makin lama pertempuran makin mengendor dan tembakan makin berkurang. Akhirnya, pada jam 10.30 tanggal 7-10-1945 berkibarlah bendera putih di atas markas tentara Jepang, tentara Jepang menyerah. Beratus-ratus tentara Jepang ditawan dan senjatanya dirampas.

Dalam pertempuran itu pihak kita gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka.⁴⁶⁾ Di antara yang gugur itu terdapat 2 pegawai Polisi, yaitu I Dewa Nyoman Oka dan Supardi. Dari 21 orang yang gugur itu, 18 jenazah dibawa ke Gedung KNI (Gedung Negara, sekarang) dan selanjutnya pada sore harinya jam 16.00 dimakamkan di Taman Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta. Sedang tiga jenazah lainnya diminta keluarga untuk dimakamkan di Karangjaten, Kauman. Mereka yang luka-luka segera dibawa ke RS Bethesda. Sedang pihak Jepang yang tewas 9 orang dan yang luka-luka ada 15 orang. Perebutan senjata Jepang di Kota Baru, Yogyakarta yang menimbulkan pertempuran sengit dan gugurnya pemuda-pemuda pejuang merupakan bukti tekad bangsa kita untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan.

Pada waktu *Butaico* Pingit mendengar adanya pertempuran Kota Baru segera menyatakan bersedia menyerahkan senjatanya dan mengajukan permintaan agar anak buahnya tidak diganggu. Permintaan ini segera dipenuhi dan markas Jepang di Pingit menyerah tanpa syarat.

Pada tanggal 7-10-1945, setelah pertempuran Kota Baru, RP Soedarsono berhasil pula memimpin perlucutan senjata *Kaigun* di Meguwo melalui perundingan. Hasilnya berupa senjata dari Penerbangan sejumlah 15 truk seberat 25 ton dan beratus peti granat tangan.⁴⁷⁾

Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dilucutinya senjata *Kaigun* di Meguwo, berarti Yogyakarta telah berada

dalam kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak. Pemerintah daerah dapat bekerja tanpa halangan. Semuanya berjalan baik di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang didampingi Sri Paku Alam VIII dan dibantu oleh para pejabat lainnya.

2. *Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (BKR, Kelaskaran).*

Sebelum BKR atau Badan Keamanan Rakyat didirikan di Yogyakarta telah berdiri suatu organisasi pemuda yang militan dan bersifat militer, bernama *Barisan Penjagaan Umum* atau *Badan Penjaga Umum* atau disingkat *BPU*. Organisasi pemuda ini dipimpin oleh tiga orang yakni: Umar Slamet, bekas *Cudanco* di Bantul, S. Parman (Pahlawan Revolusi) yang pada waktu itu menjabat dalam *Kenpeitai* Jepang, dan Sudharto yang pada waktu itu memimpin pasukan pemuda pelajar. Dalam struktur organisasinya, BPU tidak mempergunakan nama pengurus, melainkan memakai istilah "staf", yang terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian Penyusun Tenaga, bagian Tata Usaha dan Perawatan, dan yang terpenting adalah bagian Aksi Umum. Tenaga-tenaganya terdiri dari para pelajar Sekolah Menengah, sedangkan stafnya adalah ex perwira PETA dan bintang dari *Kenpeitai*, yang telah menjalin hubungan dan kerja sama pada masa Jepang. Organisasi ini melakukan gerakan secara rahasia dari illegal serta berhasil memiliki 16 pucuk karabijn dan beberapa peti granat tangan untuk modal perjuangan.

Sementara itu dalam rapatnya tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil menetapkan soal-soal tentang: Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Khususnya mengenai Badan Keamanan Rakyat, soal-soal yang ditetapkan adalah sebagai berikut:⁴⁸⁾

Pendahuluan

Di masa sekarang ini maka sangatlah perlu mengadakan satu Badan yang dapat menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan, pertolongan dan bantuan.

Pertolongan dan bantuan ini hendaknya secara lahir dan batin, maka itu pada tanggal 20 Agustus 1945 berdirilah di Kota Jakarta suatu badan yang diberi nama "Badan Penolong Keluarga Korban Perang" atau disingkat "BPKKP".

Dalam garis-garis besarnya khususnya akan ditetapkan anggaran dasar, akan tetapi yang penting harus didahulukan, oleh karena itu ada satu bagian yang sekarang juga sudah dapat dengan segera bekerja yaitu: "Badan Keamanan Rakyat" atau disingkat "BKR".

Nama

Pasal 1

Sebagai ibu organisasi yang harus mengerjakan dan memelihara keselamatan masyarakat, maka didirikan satu badan yang diberi nama "Badan Penolong Keluarga Korban Perang".

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itu adalah satu, maka itu di Badan Penolong Keluarga Korban Perang diadakan satu bagian yang bernama: Badan Keamanan Rakyat.

Pengurus Badan Keamanan Rakyat

Pasal 3

Kepala-kepala "Badan Keamanan Rakyat" dari pusat sampai ke daerah-daerah menjadi anggota Pengurus Harian dari "Badan Penolong Keluarga Korban Perang".

Dasar Pembentukan

Pasal 4

Yang mengepalai "Badan Keamanan Rakyat" harus menjalankan pekerjaannya dengan "sukarela".

Panggilan

Pasal 5

Mereka yang mau dan ingin membantu pekerjaan "Badan Keamanan Rakyat" akan dipanggil pada tanggal 24 Agustus 2605 (1945).

Di *Ken-ken* panggilan ini akan diselenggarakan oleh "Badan Penolong Keluarga Korban Perang".

Susunan Pimpinan

Pasal 6

1. Di *Syu-syu* pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat *Syu*.
2. Di *Ken* atau *Shi* pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat *Ken* atau *Shi*.
3. Di *Son* pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat *Son*.
4. Di *Ku* pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat *Ku*.
5. Seterusnya di *Tonari-gumi* pekerjaan dilakukan oleh 5 pemuda yang cakap.

Pengangkatan

Pasal 7

1. Kepala Badan Keamanan Rakyat di pusat diangkat oleh pengurus besar Harian Badan Penolong Keluarga Korban Perang.
2. Kepala Badan Keamanan Rakyat di *Syu* ditetapkan dan disahkan oleh ketua pengurus besar Badan Penolong Keluarga Korman Perang atas usul Pengurus Harian Badan Penolong Keluarga Korban Perang di *Syu*.

Tugas Kewajiban

Pasal 8

Badan Keamanan Rakyat harus memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat ada di bawah pengawasan dan pimpinan Komite Nasional.

Keesokan harinya yaitu tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

"Di saat-saat yang maha genting ini satu-satunya sikap yang dapat menyelamatkan negara ialah persatuan, persatuan, dan sekali lagi: persatuan! Kerjakanlah dengan giat apa yang telah kami perintahkan dan yang akan kami perintahkan! Karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas Peta, Heiho dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia!"⁴⁹⁾

Dengan adanya penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang Pembentukan BKR dan kemudian diikuti dengan seruan atau instruksi Presiden Soekarno agar para bekas prajurit Peta, Heiho, Pelaut dan pemuda-pemuda lain memasuki BKR, maka di Yogyakarta seminggu sesudah Proklamasi, dibentuklah suatu organisasi yang disebut BKR. Anggota-anggota yang duduk di dalamnya adalah bekas prajurit-prajurit Peta, Heiho, *Seinen Kurenscho*, *Seinendan*, *Keibodan*, Barisan Berani Mati, Hisbullah, Sabillillah, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi⁵⁰⁾. Adapun yang menjadi tugasnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 8, dikatakan bahwa BKR bertugas memelihara ke-

amanan rakyat. Tetapi dalam tindakan-tindakannya, terbukti bahwa BKR tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan rakyat, melainkan mempunyai peranan yang sangat besar dalam perebutan kekuasaan dan senjata dari Jepang. Karena itu sudah wajarlah apabila dalam perkembangannya setelah melalui proses menjadi TKR, TRI, akhirnya menjelma menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BKR adalah merupakan embryonya TNI.⁵¹⁾

Tokoh-tokoh BKR di daerah Yogyakarta antara lain ialah Umar Slamet, S. Parman, Sukardi, Umar Djoy (kemudian menjadi Kepala Staf Divisi IV/Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pangkat Letnan (Kolonel) dan lain-lain, di samping itu juga RP Sudarsono (Komandan Polisi Istimewa) yang karena jasa dan pengalamannya kemudian dipilih menjadi Panglima Divisi IV/Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pangkat Jenderal Mayor. Tentang bentuk dan struktur BKR di daerah Yogyakarta dapat dilihat pada bagan seperti pada halaman berikutnya.

Di samping BKR, di daerah Yogyakarta berdiri pula banyak barisan kelaskaran yang merupakan badan perjuangan. Barisan kelaskaran itu antara lain ialah Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) yang bermarkas di Jalan Gondomanan 13, Yogyakarta, yang dipimpin oleh Sutardjo, Sujitno, Turmudzi, Sundjoto, H. Zain, Salim, Wimbohandoko, Indartono dan lain-lain. Di samping itu tak lama kemudian berdiri pula Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) yang dipimpin oleh H. Mastur, Daim dan Tunggono yang bermarkas di Jalan Ngabean 4, Yogyakarta. Lebih lanjut berdiri juga Gabungan Laskar yang dipimpin oleh Indartono, Suwandi dan lain-lain yang bermarkas di Jalan Gondomanan 17, Yogyakarta.

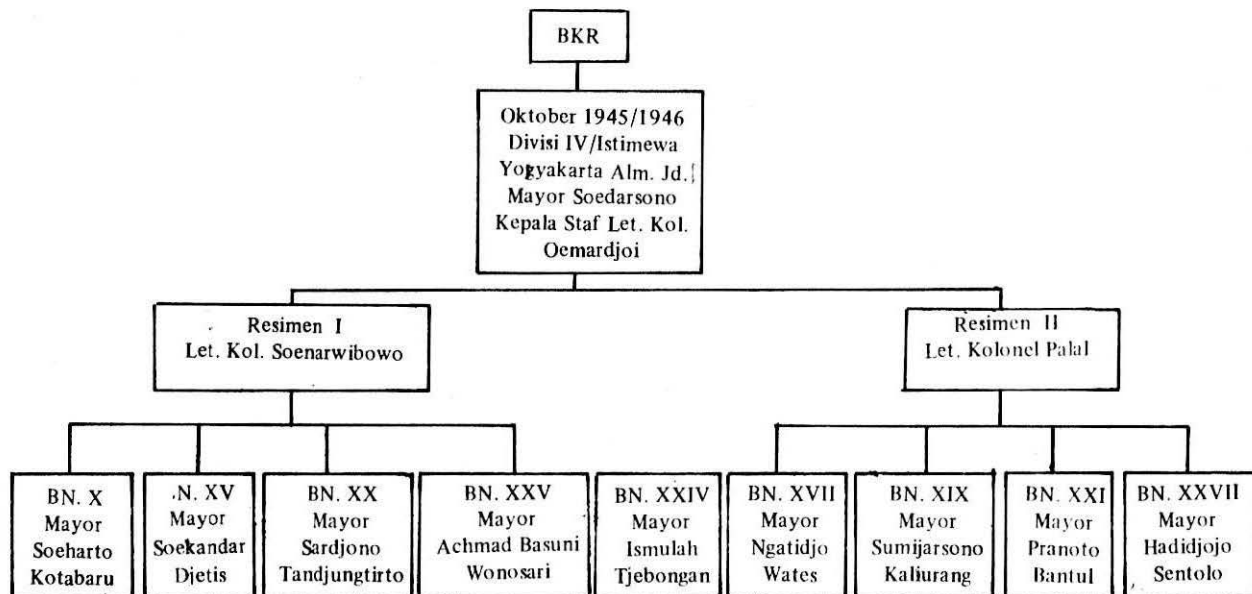
Dalam perkembangan BKR ini kemudian menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan ke luarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Bunyi Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober itu sebagai berikut:

BKR/TKR Tahun 1945 s.d. 24 Juni 1945 menjadi TRI.

Sumber: Sejarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro.
Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu.

Oleh SEMDAM VII/Diponegoro

Yayasan Penerbit Diponegoro, Semarang, 1968.



“Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”.

Jakarta, 5 Oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
Soekarno^{5 2)}

Di samping itu disusul ke luarnya Maklumat Pemerintah tanggal 6 Oktober 1945 tentang pengangkatan Suprijadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Suprijadi adalah seorang perwira Peta yang memimpin pemberontakan Peta Blitar pada bulan Pebruari 1945.

Urip Sumohardjo seorang pensiunan Mayor KNIL, oleh Pemerintah diberi tugas menyusun TKR dengan intinya BKR. Ia kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR. Markas Tertinggi TKR pada mulanya berkedudukan di Purwokerto, kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, menempati markas KOREM 072 Pamungkas, sekarang Museum Angkatan Darat, di Jalan Jenderal Sudirman.

Demikianlah langkah pertama yang dilakukan Pemerintah dalam membentuk tentara yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena adanya situasi yang sangat mendesak yaitu menghadapi Sekutu dan Belanda dan sebagai usaha untuk mempersatukan segenap kekuatan perjuangan.

Sementara itu gelora semangat pemuda-pemuda pejuang untuk ikut membela negara begitu meluap-luap, sehingga timbul pasukan-pasukan bersenjata dalam masyarakat berupa barisan kelaskaran. Lebih-lebih dengan adanya maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang anjuran pembentukan partai-partai politik^{5 6)}, maka partai-partai pun kemudian membentuk pasukan bersenjatanya sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan itu untuk menghimpun dan mengkoordinasikan pasukan-pasukan kelaskaran sebagai suatu kekuatan untuk membantu TKR, maka para pimpinan di daerah Yogya-

karta mengambil kebijaksanaan sebagaimana tercermin dalam Maklumat Nomor 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 1945, dan kemudian disusul dengan Maklumat Nomor 8, tanggal 7 Desember 1945, yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁷⁾

Maklumat Nomor 5

Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang pembentukan Laskar-laskar Rakyat sebagai pembantu Tentara Keamanan Rakyat.

1. Mengingat tingkatan perjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dari dunia internasional, sebagai usaha untuk mencapai perdamaian dunia, maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Komite Nasional Daerah Yogyakarta, memerintahkan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia dalam daerah kami berdua supaya dengan segera di tiap kampung/desa membentuk Laskar Rakyat sebagai Pembantu Tentara Keamanan Rakyat.
2. Maksud pembentukan Laskar Rakyat ini:
 - a. membantu mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.
 - b. mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh.
 - c. menjaga keamanan daerah kampung/desa.
 - d. membantu kepada segala kepentingan rakyat yang membutuhkan tenaga banyak yang teratur.
3. a. Yang harus masuk menjadi anggota Laskar Rakyat ialah semua penduduk bangsa Indonesia laki-laki yang masih kuat badannya dan belum menjadi anggota Tentara

Keamanan Rakyat.

- b. Dalam pemberfutan Laskar Rakyat ini penduduk laki-laki yang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
 - c. Segenap Kepala Barisan di tiap Kapanewon, Kemantren Pangreh Praja merupakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama panewu atau Mantri Pangreh Praja, Wakil KNI dan Wakil TKR turut duduk dalam Dewan Pimpinan itu. Pemimpin Barisan dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota Laskar Rakyat Pemilihan Pemimpin Barisan harus merdeka. Pangreh Praja, KNI, Lurah Desa dan pegawai-pegawai lain-lainnya tidak boleh turut campur dan mempengaruhi pemilihan itu.
4. Biaya Laskar Rakyat dicukupkan dari Kas Rukun Kampung/Rukun Desa. Untuk keperluan ini Rukun Kampung/Rukun Desa diperbolehkan mencari jalan istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, akan tetapi senantiasa dengan mengingat kekuatan ekonomi rakyat.
5.
 - a. Laskar Rakyat hendaklah bersenjata dengan segala macam senjata yang dapat diadakan sendiri (termasuk juga senjata api).
 - b. Semua latihan militer diserahkan kepada anggota TKR di masing-masing daerah.
 - c. Jikalau ada tanda mobilisasi semua anggota Laskar Rakyat harus tunduk kepada perintah pimpinan TKR di daerahnya masing-masing.
6.
 - a. Dalam menjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukun Desa dan Pangreh Praja.
 - b. Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta harus bekerja aktif dalam Laskar di Kampung/Desanya masing-masing.

- c. Usaha-usaha Laskar Rakyat supaya selalu diatur hingga tidak mengganggu mata pencaharian masing-masing anggota.
7. Kepala Daerah Pangreh Praja dan Ketua Rukun Kampung/ Rukun Desa menjadi pelindung dan turut bertanggung jawab atas segala perihal yang berhubungan dengan Laskar Rakyat.
8. Instruksi-instruksi lain-lainnya tentang pembentukan Laskar Rakyat ini akan segera menyusul.
9. Maklumat ini berlaku semenjak diumumkan.

Yogyakarta, 20 Dulkaidah Ehe
1876 atau 26-10-1945
Hamengku Buwono IX
Paku Alam VIII
Moh. Saleh

Maklumat Nomor 8

Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang perubahan maklumat Nomor 5 tentang pembentukan Laskar Rakyat.

1. Untuk menyempurnakan dan menjalankan peraturan tentang Laskar Rakyat, maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan perubahan maklumat Nomor 5 tentang pembentukan Laskar Rakyat seperti di bawah ini.
2. Pasal 3 Maklumar Nomor 5 dirubah seluruhnya dan selanjutnya berbunyi seperti berikut:

- a. Yang harus masuk menjadi anggota Laskar Rakyat ialah semua penduduk laki-laki bangsa Indonesia yang masih kuat badannya, kecuali:
 - 1) Prajurit Tentara Keamanan Rakyat, Polisi dan His-bullah.
 - 2) Kepala Daerah Pamong Praja dengan paling banyak 3 orang pegawainya yang ditunjuk olehnya.
 - 3) Lurah dan Carik Desa.
 - 4) Ketua dan Panitera Rukun Kampung/Rukun Desa.
 - 5) Pegawai jawatan dan perusahaan penting yang telah ditunjuk dengan surat keterangan oleh Kepala Jawatan atau perusahaan untuk menjaga dan menjalankan pekerjaan di kantor, pabrik dan sebagainya pada waktu ada perintah "siap"
 - 6) Badan-badan perjuangan dan orang-orang yang berhubungan dengan kewajibannya turut dikecualikan menurut keputusan Badan Pimpinan Pusat Laskar Rakyat.
- b. Dalam pembentukan Laskar Rakyat ini penduduk laki-laki yang berumur kurang dari 15 tahun dimasukkan dalam kependuan.
- c. Laskar Rakyat di tiap-tiap Kapanewon/Kemantren Pamong Praja mengadakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat untuk merundingkan terdiri dari:
 - 1) Kepala Resimen
 - 2) Kepala-kepala Batalion
 - 3) Kepala-kepala Kumpeni
 - 4) Wakil Tentara Keamanan Rakyat
 - 5) Panewu/Mantri Pamong Praja
 - 6) Wakil Komite Nasional Indonesia
 - 7) Wakil Palang Merah Indonesia (di mana ada)
 - 8) Wakil Perwani
 - 9) Kepala Ketua RK/RD (dulu di luar kota dinamakan

Son Azatyo dan di dalam kota *Ku Azatyo*).

- d. Di tiap-tiap kabupaten di luar kota Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Laskar Rakyat Kabupaten yang terdiri dari:

2 orang wakil Dewan Pimpinan Kapanewon

2 orang wakil Tentara Keamanan Rakyat

1 orang wakil Pamong Praja

1 orang wakil KNI

1 orang wakil Palang Merah Indonesia

1 orang wakil Perwani.

Jumlah 8 orang

- e. Di kota Yogyakarta disusun Badan Pimpinan Pusat oleh dan dari badan-badan perjuangan untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama dan memimpin Laskar Rakyat di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pula menjadi badan pimpinan Laskar Rakyat.
- f. Kepala Barisan dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota Laskar Rakyat pemilihan Kepala Barisan harus merdeka, Pamong Praja, KNI, Lurah Desa dan Pegawai-pegawai lainnya tidak boleh turut campur dan mempengaruhi pemilihan itu.
3. Pasal 6 ayat c tetap, ayat a, b dirubah dan ditambah satu ayat d seperti berikut:
- a. Dalam menjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukun Desa, Pamong Praja dan KNI.
- b. Semua pegawai Republik Indonesia di daerah Istimewa Yogyakarta harus bekerja aktif dalam Laskar Rakyat di kampung atau desanya masing-masing, kecuali yang tersebut dalam ayat 2a di atas.
- c. Anggota Kepala Barisan Laskar Rakyat diperbolehkan memakai tanda yang rupanya akan ditetapkan oleh

Badan Pimpinan Pusat.

4. Pasal 7 dirubah seperti berikut:
Kepala Daerah Pamong Praja, Ketua Rukun Kampung, Rukun Desa dan Wakil KNI menjadi pelindung dan turut bertanggung jawab atas segala perihal yang berhubungan dengan Laskar Rakyat.
5. a. Pasal-pasal lainnya dalam maklumat Nomor 5 yang tidak dirubah dalam maklumat ini masih tetap berlaku terus.
b. Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan instruksi akan segera menyusul.
6. Maklumat ini berlaku sejak diumumkan.

Yogyakarta, 2 Sura Jumawal 1877,
atau 7-12-1945
Hamengku Buwono IX
Paku Alam VIII
Moh. Saleh

Demikianlah dua inacam tindakan pemerintah yakni pertama membentuk TKR dan kedua memberikan kesempatan untuk membentuk kelaskaran dengan maksud untuk memperkuat perjuangan, tetapi ternyata dalam perkembangannya ada kalanya justru menimbulkan konflik dan bentrokan senjata yang dapat memperlemah perjuangan.⁵⁸⁾

Untuk menghadapi adanya pertumbuhan pasukan bersenjata di luar TKR itu, maka Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MTTKR) yang ditandatangani oleh KSU Letjen. Urip Sumohardjo mengeluarkan Maklumat tanggal 6 Desember 1945.⁵⁹⁾ Dari maklumat ini dapat kita ketahui bagaimana ketegasan pendirian TKR terhadap pertumbuhan pasukan bersenjata di luar TKR tersebut.

3. *Partisipasi Masyarakat (Dapur Umum, PMI)*

Pada waktu di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang terjadi perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang, maka kaum ibu tidak tinggal diam. Mereka ikut berbuat jasa dan ber-darma bakti terhadap nusa dan bangsanya. Jasa-jasa yang telah diabdikan oleh kaum ibu di antaranya bergiat menyelenggara-kan dapur umum. Apakah arti dapur umum itu? Secara harafiah dapur berarti bagian rumah tempat masak-memasak; dan *dapur umum* artinya tempat menyediakan makanan untuk umum.⁶⁰⁾ Kaum ibu dalam arusnya revolusi itu dengan penuh keikhlasan dan sukarela ikut menyediakan makanan dan minuman untuk kepentingan para pejuang. Jasa kaum ibu itu, tidak dapat kita abaikan. Tanpa ada yang memerintah dengan kesadaran sendiri dan ke luar dari inisiatif mereka sendiri, menyediakan makanan dan minuman secara sukarela kepada para pejuang. Di mana-mana dengan tidak memperhitungkan modal dan dari mana bahan makanan itu didapat, dapur umum didirikan. Ini menunjukkan bahwa semua penduduk dengan sangat rela meng-orbankan baik harta benda maupun jiwa raganya.

Sebenarnya, munculnya kegiatan dapur umum, di samping merupakan bentuk partisipasi di kalangan kaum ibu, juga merupakan realisasi dari kebiasaan gotong royong, sifat ringan tangan dan saling menolong yang merupakan kepribadian bangsa kita. Timbulnya dapur umum di tengah suasana perjuangan itu merupakan suatu rahmat bagi para pejuang yang sedang menunaikan tugasnya. Para pejuang itu mendapatkan bantuan makan dan minum secara cuma-cuma dan dengan mudah. Untuk daerah Yogyakarta, di samping dapur umum itu terdapat di mana-mana yang timbul secara spontan, ada juga yang diorganisasi dan dikoordinasi, misalnya oleh Ibu Ruswo.

Di samping itu partisipasi yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI selama masa revolusi kemerdekaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Peranan PMI sangat besar, misalnya dalam memberikan pertolongan dan pengobatan terhadap para pejuang yang luka-luka atau sakit, dan sebagainya. Di daerah

Yogyakarta, pada masa revolusi kemerdekaan para remaja puteri khususnya dan pemuda pemudi, pelajar umumnya dengan sukarela menyediakan diri sebagai tenaga Palang Merah Indonesia. Bagi mereka yang telah cukup, trampil dan cukup umur dikirim di front untuk memberikan pertolongan dan perawatan terhadap para pejuang yang sakit dan luka. Tetapi bagi para muda-mudi yang masih belum cukup umur dan belum memiliki kecakapan khusus diperbantukan di garis belakang.

Sehubungan dengan ke luarnya maklumat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6, tanggal 27-10-1945 tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan, maka Palang Merah Indonesia khususnya, rumah sakit, dokter dan sebagainya pada umumnya makin meningkatkan pengabdian dan partisipasinya terhadap perjuangan pada waktu itu. Adapun bunyi maklumat itu adalah sebagai berikut:

Maklumat Nomor 6

Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Paku Alaman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Negara Republik Indonesia tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan anggota Tentara Keamanan Rakyat:

1. Berhubung dengan terbentuknya TKR, maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ariyo Paku Alam VIII, sebagai Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Komite Nasional Daerah Yogyakarta memerintahkan kepada segenap dokter, juru rawat dan lain-lain tenaga, rumah sakit, laboratoria dan lain-lain bangunan yang bersangkutan dengan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang berada dalam daerah kami berdua, supaya di samping pekerjaannya sendiri memberi bantuan sepenuhnya kepada Tentara Keamanan Rakyat dengan segala usaha dan tenaganya.
2. Segenap dokter, ahli obat-obatan, juru rawat dan sebagainya

dari segala bangsa, baik pegawai negeri maupun partikelir, dalam daerah kami berdua harus membantu perjuangan TKR dengan sepenuh-penuhnya bilamana diperlukan.

3. Semua rumah sakit, laboratoria dan lain-lain bangunan yang bersangkutan dengan kesehatan, pengobatan dan perawatan supaya mengadakan tempat dan tenaga untuk mengobati dan (atau) merawat anggota TKR yang membutuhkannya.
4. Jawatan Kesehatan, Palang Merah Indonesia dan Badan serta ahli-ahli kesehatan lainnya dalam daerah kami berdua supaya dengan segera membentuk gerombolan pertolongan (dekat) tempat pertempuran. Adapun bentuk dan corak serta jumlah *mobiele-kolone* itu kami serahkan pada jawatan dan badan-badan kesehatan yang bersangkutan, dengan mengingat jumlahnya tenaga yang ada dalam daerah kami berdua.
5. Maklumat ini berlaku sejak diumumkan.

Yogyakarta, 21 Dulkaidah Ehe 1876
atau 27-10-1945
Hamengku Buwono IX
Paku Alam VIII
Moh. Saleh⁶¹⁾

Demikianlah gerak langkah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan partisipasinya baik melalui bentuk dapur umum maupun melalui Palang Merah Indonesia selama masa-masa revolusi kemerdekaan.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA

Pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu yang membawa pasukan Belanda dan yang kebanyakan terdiri atas KNIL mendarat di Jakarta. Mereka mulai beraksi dengan mengibarkan

bendera Belanda, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Belanda di *Nederlands Indie* sudah dikembalikan.

Dengan kendaraan jeep dan truck serdadu-serdadu KNIL itu berkeliling di Jakarta dan kadang-kadang sambil melepaskan tembakan. Bahkan apabila mereka berjumpa dengan mobil-mobil pembesar Indonesia yang kebanyakan memakai bendera Merah Putih kemudian ditembakinya. Perbuatan, tindakan dan tingkah yang demikian itu benar-benar menyakitkan hati, sehingga tidak mengherankan apabila sering terjadi perkelahian, karena dilawan dan diserang oleh rakyat.

Namun demikian pemerintah Indonesia beserta alat-alat kekuasaannya di dalam menanggapi pendaratan pasukan Sekutu itu senantiasa berpegang teguh kepada tanggapan yang tulus terhadap Siaran Radio SEAC di Singapura yang mengumumkan tentang maksud pendaratan itu sebagai berikut:

1. Melindungi dan mengungsikan tawanan perang dan tawanan biasa.
2. Melucuti dan mengembalikan tentara Jepang.
3. Menjaga keamanan dan ketenteraman agar kedua maksud itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.⁶²⁾

Karena itu pada waktu pasukan Sekutu mendaratkan serdadu-serdadunya, pada mulanya tidak diganggu dan sekedar diawasi oleh pasukan kita.

Pada tanggal 20-10-1945 pasukan Sekutu mendarat di Semarang, dan kemudian menuju ke Ambarawa serta tiba di Magelang pada tanggal 26-10-1945. Sebenarnya dari Magelang pasukan Sekutu itu akan menuju ke Yogyakarta dan menurut rencana pasukannya akan ditempatkan di daerah Kota Baru.⁶³⁾ Tetapi maksud dan rencana ini gagal, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tentara Sekutu tidak pernah dapat menginjakkan kakinya di Yogyakarta. Bahkan akhirnya tentara Sekutu di Magelang itu pada tanggal 21 Nopember 1945 dapat dipukul mundur oleh pasukan kita yang terdiri dari dua Batalyon TKR Yogyakarta yakni Batalyon X pimpinan Let. Kol.

Suharto dan Batalyon VIII pimpinan Mayor Sardjono; pasukan kelaskaran antara lain Tentara Rakyat Mataram (TRM) di bawah pimpinan Soetardjo, Polisi Istimewa pimpinan Oni Sastroatmodjo dan TKR dari Purwokerto yang berkekuatan dua batalyon yaitu Batalyon I pimpinan Imam Hadrongi dan Batalyon gabungan Wijayakusuma pimpinan Mayor Sugeng Tirtosewoyo, serta TKR dan kelaskaran dari Kedu.

Sementara itu revolusi berjalan terus. Peranan radio sangat penting dalam penyiaran dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat. Di Daerah Yogyakarta di samping Radio Republik Indonesia yang berada di Jalan Ngabean I, sekarang digunakan BNI 46 (Jalan KHA Dahlan) terdapat juga siaran radio yang menanamkan diri sebagai Radio Pemberontakan Mataram.

Alat-alat dan tempat studio penyiarannya ada di kampung Kadipaten, dan setiap malam di bawah pimpinan Soetardjo (Bung Tardjo) senantiasa membakar semangat untuk menghancurkan musuh.

Tentara Inggris yang melihat semangat dan keberanian pasukan-pasukan kita menjadi khawatir dan kecil hatinya. Karena itu dengan dalih akan membungkam suaranya dari radio kaum "ekstremis" "teroris" (sebelum yang digunakan oleh Sekutu/Nica Belanda bagi para pejuang kita), dan sebagainya, maka pada tanggal 25 dan 27 Nopember 1945 tentara Sekutu membom kota Yogyakarta. Mula-mula dua pesawat, kemudian empat pesawat terbang RAF Inggris melayang-layang di atas kota Yogyakarta dan memuntahkan peluru-peluru mitraliur, bom rocket dan torpedo besar kecil di atas stasiun Radio Republik Indonesia di Jalan Ngabean I, Balai Mataram, Sonobudoyo dan sekitarnya. Bangunan-bangunan tersebut mengalami kerusakan berat, sedang Balai Mataram (sekarang gedung Seni Sono) hancur lebur menjadi puing. Dengan adanya kejadian seperti itu, maka pada tanggal 25-11-1945 saat itu juga, KNI Daerah Yogyakarta dengan ditandatangani oleh Moh. Saleh atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dan rakyat Yogyakarta, mengirim kawat kepada Presiden

Soekarno dan PM Sjahrir, yang berbunyi sebagai berikut:

"Jam 8.15 pagi ini, ada kapal terbang musuh menjatuhkan surat-surat selebaran, tidak diteken, bermaksud akan membom setasiun radio, di gedung Nilmy Yogyakarta dan Balapan Solo, karena siaran Radio itu dituduh telah menghasut rakyat supaya berontak. Mulai jam 8.30 hingga jam 9 lebih, datang dua bombers Inggris dan menjatuhkan bom-bom enam kali mengenai gedung Nilmy dan Sonobudoyo dan menembak dengan mitraliur di sekitar pabrik Watson, hingga menimbulkan korban 7 orang tewas dan puluhan luka-luka. Di antara korban-korban itu terdapat banyak perempuan dan anak-anak. Penduduk tidak sempat berlindung dan tidak ada persediaan perlindungan, tentara dan rakyat kita sengaja tidak mengadakan perlawanan. Rakyat memprotes keras terhadap perbuatan musuh yang melanggar peri kemanusiaan dan membabi buta berkedok alasan-alasan kosong. Hal ini diharapkan Presiden dan Perdana Menteri meneruskan kepada dunia Internasional terutama Rusia dan Cina supaya mengetahui bahwa Inggris tidak dapat menjalankan kewajibannya dan supaya segera datang Rusia, Cina dan Amerika."⁶⁴⁾

Pada tanggal 27-11-1945 jam 13.00 pesawat-pesawat terbang Inggris mulai lagi membom kota Yogyakarta. Sebelum pemboman ini dilakukan, terlebih dahulu mereka menyebarkan pamflet-pamflet yang antara lain berisi:

"Pengeboman kami terhadap setasiun radio Yogyakarta pada pagi hari tanggal 25 Nopember yang baru lalu ini, kami tidak menghancurkan setasiun radio dengan secukupnya."
"Berhubung dengan alasan-alasan yang telah kami siarkan lebih dulu, maka kami akan menghancurkan setasiun itu kembali". "Kami tidak akan mencilakakan tuan-tuan sama sekali, kami hanya akan menyempurnakan penghancuran setasiun itu saja". "Tuan-tuan sudah diperingatkan adanya".
Demikianlah antara lain isi pamflet itu dan selanjutnya tidak

lama kemudian, pada jam 13.30 datanglah 4 buah bomber dan sebuah pemburu mengadakan pemboman dan memitraliur dengan membabi buta selama satu jam. Akibatnya Balai Mataram (Seni Sono sekarang) hancur dan banyak korban jatuh. Berhubung dengan kejadian itu maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX, segera mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno, yang berbunyi sebagai berikut:

"PYM Presiden Republik Indonesia Jakarta.

Selasa 27-11-1945 jam 13.00-14.40 siang beberapa kapal terbang Inggris membom kota Yogyakarta, Balai Mataram dan Sonobudoyo hancur, kantor telepon dan gedung CHTH dan beberapa rumah penduduk rusak sehingga menimbulkan korban di antara mereka. Memakai bom rocket dan torpedo, menyenjata dengan kanon dan mitraliur di mana-mana. Harapan kami memrotes sekeras-kerasnya dengan mengambil tindakan seperlunya.

M e r d e k a

Hamengku Buwono IX⁶⁵)

Sementara itu situasi makin bertambah panas dan tegang. Tindakan infiltrasi Belanda dengan NICA-nya makin merajalela. Keadaan dan kedudukan para pemimpin dan pembesar kita di Jakarta makin hari makin terancam.

Demikianlah pada tanggal 26-12-1945 terjadi percobaan pembunuhan terhadap PM Sutan Syahrir oleh NICA (beberapa orang serdadu Belanda). Usaha pembunuhan ini gagal sehingga PM Sutan Syahrir selamat.

Berhubung dengan kejadian itu, maka kedua Sri Paduka kemudian mengirimkan kawat kepada PM Sutan Syahrir, yang berbunyi sebagai berikut:

"Paduka Perdana Menteri Sutan Syahrir Jakarta.

Berhubung dengan terhindarnya Paduka Tuan dari bahaya yang mengancam, kami menghaturkan turut bergirang dan

mendoa Paduka Tuan selamat sejahtera seterusnya.”

Hamengku Buwono IX”.

”PYM PM Sutan Syahrir.

Sangat terharu akan perbuatan-perbuatan yang keji terhadap Paduka, syukur alhamdulillah selamat.

Paku Alam VIII”.⁶⁶⁾

Di samping itu KNI Daerah Yogyakarta juga mengirim kawat yang isinya sebagai berikut:

”Pemerintah Republik Indonesia Jakarta.

KNI Daerah Yogyakarta mendesak kepada Pemerintah supaya mengambil tindakan yang tegas dan tepat atas pembunuhan pada dirinya PM Sutan Syahrir. Kejahatan itu sangat menimbulkan kemarahan rakyat, yang hingga kini ternyata dapat menahan hawa nafsunya, walaupun rakyat mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk berbuat semacam itu misalnya terhadap van Mook, van der Plas dan lain-lainnya.

KNI Yogyakarta”⁶⁷⁾

Demikianlah dengan makin bertambah gentingnya situasi di Jakarta, dan semakin terancamnya jiwa para pemimpin kita, maka pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota pemerintah Republik Indonesia untuk sementara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Adapun mengenai alasan pemindahan sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo SH. adalah sebagai berikut:

”Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk merubah pendirian pemerintah terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan sementara ini beralasan dalam hal:

1. Keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta.

2. Untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri. Bahwa kota Jakarta pada masa ini makin lama makin tidak aman buat rakyat Indonesia umumnya buat pemimpin-pemimpin negara khususnya. Tidak perlu kami ceritakan panjang lebar lagi. Cukupilah kiranya kami peringatkan tentang percobaan pembunuhan atas diri PM Syahrir dan terhadap saudara Amir Syarifudin SH. yang saudara-saudara tentu sudah maklum.

Siapalah yang menyebabkan tidak aman itu, tidak perlu kami terangkan lagi, meskipun dari pihak serikat katanya telah mengambil tindakan untuk mengendalikan terorisme Belanda. Nyatalah bahwa keamanan pemimpin-pemimpin kita tidak dapat dijamin lagi. Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakekatnya mengenai bagian yang penting daripada perhubungan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa ini.

Sebab pemerintah agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah. "68)

Dengan pindahnya Pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, maka segenap potensi perjuangan kita dapat terpusatkan. Sejak itu Yogyakarta merupakan ibukota Republik Indonesia dan dari sinilah disusun dan dihimpun segenap kekuatan untuk menanggulangi musuh.

BAB IV

PERJUANGAN DI DAERAH

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I

Setelah naskah Persetujuan Linggarjati ditanda-tangani, pertentangan antara Indonesia dan Belanda makin lama makin keras. Berbagai masalah yang sudah dilupakan muncul kembali. Di mata Republik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda secara sepihak di Bogor, Mojokerto dan tempat lain sangat mencurigakan. Republik merasa jengkel, karena Belanda memperhebat blokade dengan angkatan lautnya dan terus menembaki pantai kita.¹⁾

Pada waktu itu tentara Belanda terus mengalir ke Indonesia. Tersiar berita bahwa setiap minggu Belanda mendaratkan tentaranya dalam jumlah puluhan ribu. Seluruh tentara Belanda di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang itu dipersenjatai dengan senjata Inggris dan Amerika yang modern, sehingga sifatnya tidak lagi defensif, tetapi ofensif. Jadi berbeda dengan Republik yang politiknya masih bersumber pada pelaksanaan naskah Perjanjian Linggarjati, pihak Belanda sudah melakukan politik yang bersumbu pada penekanan Republik. Dengan kata lain, Belanda ketika itu melaksanakan politik diplomasi yang disertai ancaman penyerbuan secara besar-besaran.²⁾

Lebih dari itu, pihak Belanda malahan membakar sentimen anti Persetujuan Linggarjati dengan jalan membentuk daerah otonom baru, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Bangka-Belitung dan Riau. Belanda juga mengajukan tuntutan agar diadakan plebisit di Jawa Barat, padahal menurut Persetujuan Linggarjati daerah tersebut diakui sebagai daerah Republik. Berkaitan dengan tuntutan Belanda tersebut Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaannya untuk mengadakan plebisit di seluruh Indonesia, asalkan dilaksanakan di bawah pengawasan wasit internasional.³⁾

Sementara itu pada tanggal 5 Mei 1947 ke luarlah Penetapan Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan Tentara Republik Indonesia dan Laskar-laskar menjadi satu organisasi Tentara. Kemudian disusul dengan Penetapan Presiden tanggal 3 Juni 1947, menetapkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia secara resmi.⁴⁾

Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal atau delegasi Belanda mengirimkan nota yang bersifat ancaman yang berisi tuntutan lima pasal sebagai berikut:

1. Membentuk bersama suatu pemerintahan peralihan.
2. Mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga devisa bersama.
3. Republik supaya mengirimkan beras untuk rakyat di daerah pendudukan Belanda.
4. Menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan seluruh Indonesia, termasuk daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda.
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.⁵⁾

Atas nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei 1947 itu pada tanggal 8 Juni 1947 delegasi Republik Indonesia menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Setuju membentuk Pemerintahan Peralihan yang mempunyai kewajiban membuat persiapan sidang Konstituante dan mempersiapkan penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada Pemerintah Federal Nasional. Selama masa peralihan itu kedudukan *de facto* Republik tidak boleh dan tidak akan dikurangi.
2. Setuju mendirikan lembaga devisa untuk seluruh Indonesia, sesudahnya terbentuk Pemerintahan Peralihan tersebut.
3. Hendaknya disusun Badan Pusat Pembagian makanan untuk seluruh Indonesia, sesudah terbentuk Pemerintah Peralihan oleh Pemerintah Peralihan tersebut.
4. Kewajiban mengurus ketertiban dan keamanan di daerah Republik adalah urusan Polisi Republik Indonesia sendiri.
5. Perdagangan Ekspor dan Impor dijalankan menurut petunjuk dari Pemerintah Peralihan tersebut.
6. Soal-soal besar yang mengenai penyelenggaraan Persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua delegasi. Keputusan-keputusan kedua delegasi tersebut dijalankan oleh Pemerintah Peralihan.⁶⁾

Jawaban atas nota Komisi Jenderal itu ternyata untuk Belanda tidak memuaskan dan Belanda mengirimkan *aide memoire* yang isinya menekan Republik Indonesia untuk menerima nota Komisi Jenderal tersebut. Sementara itu Pemerintah Republik mengalami krisis kabinet akibat pertentangan pro dan kontra yang semakin tegang. Pada tanggal 26 Juni 1947 Kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden, karena beleid politik kabinetnya tidak disetujui oleh sebagian besar para pemimpin rakyat.⁷⁾

Keesokan harinya Presiden mengambil kekuasaan pemerintahan dengan Maklumat Presiden Nomor 6 Tahun 1947 yang berbunyi sebagai berikut:

**Maklumat Presiden Nomor 6
Tahun 1947**

Berhubung dengan gentingnya keadaan pada waktu sekarang

maka kami Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 1947 mengambil kekuasaan pemerintahan sepenuhnya untuk sementara waktu.”

Yogyakarta, jam 03.30
tanggal 27-6-1947
Presiden Republik Indonesia
Soekarno⁸⁾

Dengan demikian Presiden atas nama Republik Indonesia segera membalas *aide memoire* Belanda. Jawaban Republik Indonesia tidak memuaskan Belanda, malahan kenyataannya ia telah membuat persiapan untuk menghancurkan Republik Indonesia.⁹⁾

Sementara itu pemerintah Amerika Serikat merasa jengkel karena tidak adanya langkah ke arah pelaksanaan naskah Perjanjian Linggajati. Pemerintah Australia menghendaki agar hubungan dagang Australia — Indonesia segera dimulai, sebab Australia memerlukan karet, teh, gula dan sebagainya, sedang Indonesia dipandang perlu mengimpor hasil Australia. Sedangkan Perdana Menteri India, mengirimkan seorang pengusaha, yaitu Patnaik ke Yogyakarta untuk mempererat tali persahabatan India—Indonesia dengan jalan mengadakan pembicaraan tidak resmi. Salah satu hasil pembicaraan tersebut adalah, bahwa Patnaik akan menyediakan pesawatnya untuk melaksanakan hubungan antara Republik Indonesia dengan dunia luar. Hasil yang lain adalah bahwa Pemerintah India akan menjalankan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan bahwa Pemerintah India akan membuka beberapa konsulat di Indonesia.¹⁰⁾

Berbeda dengan pendapat di luar negeri yang menghendaki perdamaian, hubungan antara Republik Indonesia dengan Belanda tetap tegang. Sebenarnya pihak Republik menghendaki penyelesaian secara damai, tetapi pihak Belanda selalu saja berbuat yang sebaliknya. Malahan ketika itu tampak tanda-tanda

bahwa pihak Belanda akan mempercepat proses perundingan dengan serangan mendadak. Dalam situasi yang sedemikian itu Republik mengirimkan nota kepada Belanda yang diterima oleh Dr. Van Mook, pemimpin pemerintahan Belanda di Indonesia pada masa itu. Oleh Van Mook surat itu diteruskan ke negeri Belanda.¹¹⁾

Dalam nota tersebut pemerintah kita menegaskan, bahwa kita tetap pada pendirian, yaitu bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, jadi tidak begitu saja dapat menuruti kemauan Belanda.¹²⁾

Pihak Belanda tidak menanggapi nota kita dengan baik, tetapi Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda, malah mengeluarkan perintah harian yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Hari Minggu 29 Juni 1947 dimulai dengan pengoperan semua kendaraan oleh militer Belanda.
2. Minggu petang dimulai dengan konsolidasi semua pasukan yang akan ikut dalam aksi.
3. Senen 30 Juni pukul 03.30 dimulai dengan *ofleidingsactie van uit aanvalspunten*.
4. Senin pukul 06.00 dimulai dengan serangan umum di seluruh front.
5. Di daerah yang telah diduduki oleh tentara Belanda harus diadakan penangkapan besar-besaran.
6. Semua rumah milik bangsa apapun juga harus digeledah.
7. Perintah ini telah berlaku jika pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 1947 pukul 14.00 tidak dicabut kembali.¹³⁾

Perintah harian Jenderal Spoor tersebut sebenarnya dirahasiakan, tetapi bocor dan dapat kita ketahui. Untuk menanggapi perintah harian tersebut, Letnan Jenderal Sudirman segera mengeluarkan perintah harian yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Angkatan Perang Republik Indonesia dan rakyat seluruhnya harus tetap tegas, awas, waspada dan siap sedia.

2. Jika di salah satu tempat tentara Belanda telah mengadakan serangan, maka pihak Indonesia harus segera mengadakan perlawanan sebaik-baiknya, tidak usah menunggu komando lagi dari pucuk pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia.
3. Gerakan umum yang meliputi seluruh Indonesia untuk mempertahankan negara dijalankan dengan perintah dari Pucuk Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia.
4. Jika pertempuran besar-besaran yang sesungguhnya di dahului (dilakukan) oleh tentara Belanda, maka diadakan perlawanan serentak (total) yang sebaik-baiknya.
5. Mulai dari saat tersebut dalam ayat 4 maka sudah tidak berlaku lagi garis demarkasi, gencatan senjata dan perjanjian lain-lainnya.
6. Pertempuran dilakukan serentak terus sampai Negara Indonesia Merdeka dapat kita miliki dalam keadaan aman, adil dan makmur.
7. Pegang teguh persatuan, lenyapkan paham golongan. Negara Indonesia dalam keadaan bahaya. Rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya yang wajib menyelamatkan.¹⁴⁾

Meskipun pihak Belanda telah membantah keras bahwa Jenderal Spoor telah mengeluarkan perintah harian, kenyataannya Belanda telah siap. Mereka terus meningkatkan kegiatannya baik dalam penambahan jumlah tentaranya maupun dalam persiapan perangnya.¹⁵⁾

Pasukan "7 Desember Divisie" mendarat di Tanjung Priok sesudah menumpang kapal "Boessevain", "Ruys", "Slaterdijk", "Tegelberg", "Bloemfontain", "Volender", Johan de Witt, "Nieuw Holland", "Zuiderland", Johan Van Oldenbarnevelt, "Waterman", "Kota Intan", "Sibayak", "Tabinta", "Asturias", "Osheshire" dan "Empire Brent".¹⁶⁾

Jelaslah bahwa pendaratan pasukan Belanda yang terus berlangsung itu merupakan ancaman besar terhadap keamanan dan kedaulatan Republik. Karena itu pihak Republik telah meng-

ambil langkah persiapan dalam menghadapi serangan Belanda.¹⁷⁾

Panglima Besar bersama dengan Panglima Divisi Jawa Tengah dan Komandan MPP segera mengatur siasat dalam suatu rapat rahasia. Dalam rapat itu segala sesuatunya diatur: Apabila Belanda menyerap dan dapat menduduki Salatiga, Komando Pertempuran akan dipimpin sendiri oleh panglima divisi masing-masing. Satu batalyon dari Resimen 23 dengan komandannya Let. Kol. Sutejo Haryoko diperintahkan membuat pertahanan di sekitar Klepu (Girisonta). Untuk memperkuat pertahanan di Ungaran, Satu batalyon dari Resimen 2 Brigade XXIV dengan komandannya Let. Kol. Anwar Santosa diperintahkan berada di Delik (Tuntang) sebagai pasukan cadangan.¹⁸⁾

Jauh di belakang garis pertahanan diadakan persiapan seperlunya. Rakyat diharuskan membuat perlindungan dan selanjutnya peraturan PBO (Perlindungan Bahaya Udara) dilaksanakan. Di jalan-jalan di dalam maupun di luar kota dibuat perangkap-perangkap tank di lapangan terbuka ditancapkan bambu-bambu runcing perangkap pasukan payung.

Lapangan Meguwo diberi rintangan kawat berduri dan lain-lainnya.

Dalam pada itu pada tanggal 3 Juli 1947 berhasillah dibentuk kabinet dengan Mr. Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Ketika itu terjadi "perang nota" antara Republik Indonesia dan Belanda di mana usul dibalas usul, kontra usul dibalas kontra usul. Kemudian pihak Belanda mengajukan tuntutan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 1947 pukul 23.59 Republik memerintahkan penghentian permusuhan yang bersenjata dan yang tidak bersenjata, menghentikan tindakan yang merusak, blokade makanan dan aksi terhadap daerah di luar Republik.
2. Selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 1947 dilakukan aturan-

aturan untuk menghentikan semua propaganda anti Belanda.

3. Selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 1947 pukul 18.00 harus dimulai usaha mengundurkan tentara Republik sampai 10 km dari batas daerah-daerah yang diduduki Belanda, di mana pemeliharaan keamanan sementara dioper oleh polisi biasa sampai terbentuknya polisi bersama.
4. Selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 1947 usaha pengunduran tentara dari perbatasan itu harus selesai.
5. Sesudah itu barulah oleh pihak Belanda dilakukan usaha pergantian tentara di daerah perbatasan dengan polisi sampai dibentuknya polisi bersama.¹⁹⁾

Jelaslah bahwa dengan tuntutan tersebut Belanda hanya mencari-cari alasan untuk melakukan agresi terhadap Republik Indonesia. Sudah tentu Republik Indonesia menolak tuntutan Belanda tersebut. Karena itu Perdana Menteri Amir Syarifudin mengucapkan pidato radio pada tanggal 17 Juli 1947 antara lain sebagai berikut:

"Dengan penuh rasa tanggung jawab Pemerintah menolak tuntutan Belanda itu. Kita mengetahui apa yang akan terjadi sebagai akibatnya. Tetapi Pemerintah Republik beranggapan bahwa kebenaran dalam hal ini adalah di pihaknya.

Kita suka damai, tetapi damai dengan kebenaran. Kita mencari penyelesaian politik dengan damai, tetapi dalam usaha ini dipersukar oleh pihak Belanda dengan tuntutan yang tidak berarti penyelesaian politik dan yang tidak menurut adat pula, seolah-olah hanya pihak Republik yang bersalah."²⁰⁾

Dalam pada itu Kabinet menyampaikan surat tertulis kepada Dr. Van Mook yang diteruskan kepada pemerintah Belanda di Nederland untuk menentukan sikap. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1947. Dr. Van Mook mendapat kuasa penuh dari Pemerintah Belanda untuk mengadakan apa yang disebut "Aksi polisionil" dan melakukan tindakan lain yang dipandang perlu.²¹⁾

B. AKSI MILITER BELANDA I

Apa yang disebut Aksi Militer Belanda I mulaiberlangsung pada tanggal 19 Juli 1947 pukul 17.00. Tetapi pemberian kekuasaan oleh Perdana Menteri Beel kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook untuk melancarkan apa yang disebut oleh pihak Belanda "aksi polisionil" baru berlangsung pada tanggal 20 Juli 1947 lewat tengah malam, dengan sebuah pidato radio.²²⁾

Adapun alasan yang dipakai oleh pihak Belanda untuk melancarkan agresinya itu adalah, pertama: sudah berkali-kali diadakan pembicaraan yang berlangsung lama dengan pihak Republik tetapi tidak ada hasilnya; kedua, pihak Republik bersikeras memegang teguh pengertiannya sendiri yang bertentangan dengan Persetujuan Linggarjati; ketiga, pihak Republik menolak kedaulatan Belanda dan memperkosa milik Belanda; keempat, pemerintah Republik tidak kuasa lagi menjamin keamanan dan keadilan; dan kelima, sampai tanggal 15 Juli 1947 pemerintah Belanda sudah berusaha mencapai persetujuan dengan Perdana Menteri Amir tetapi ditolak oleh pihak Yogyakarta.²³⁾

Alasan yang dipakai oleh pihak Belanda itu sebenarnya hanya alasan yang dicari-cari saja. Dalam pidato radio Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juli 1947 sudah terdapat penjelasan, bahwa Republik Indonesia dapat menyetujui pembentukan Badan Urusan untuk seluruh Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal yang sulit. Kecuali itu Presiden Soekarno juga menjelaskan, bahwa apa yang diminta oleh Belanda sudah banyak yang dipenuhi oleh Republik Indonesia. Berkaitan dengan masalah keamanan, Republik bersedia bekerja sama dengan negara lain termasuk Belanda, tetapi pihak Republik berpendapat, bahwa penjagaan keamanan di daerah Republik adalah alat Republik sendiri.

Sementara itu Presiden Soekarno juga mengingatkan pihak Belanda, bahwa pihak Republik telah memberi bantuan meng-

angkat APWI, tawanan perang pada akhir tahun 1945, yang sudah dibuktikan oleh sejarah. Dalam masalah tersebut ternyata bahwa kepercayaan yang diberikan oleh dunia kepada Republik tidak sia-sia. Republik Indonesia juga menjamin, bahwa segala bangsa dapat bekerja, berusaha, mencari nafkah, mena'nam modalnya di Republik Indonesia dengan aman dan damai.²⁴⁾

Pada tanggal 17 Juli 1947 Perdana Menteri Amir Syarifudin juga menyatakan dalam pidato radionya, bahwa keadaan damai akan tercipta, kalau penyelesaian politik sudah dapat dibereskan, dan segera akan dijalankan penghentian permusuhan umum. Tetapi, penghentian permusuhan baru dapat dijalankan, kalau pihak Belanda dapat menerima bahwa penghentian itu dijalankan oleh kedua belah pihak.²⁵⁾

Tujuan pertama agresi Belanda adalah menduduki beberapa daerah yang dilihat dari segi politik maupun ekonomi mempunyai arti yang penting, yakni:

1. Daerah perkebunan Sumatera Timur
2. Daerah perminyakan Palembang
3. Jawa Barat kecuali Banten
4. Daerah perkebunan di Jawa Timur (Oosthoek)
5. Daerah yang cukup luas di sekitar Padang dan Semarang.²⁶⁾

Karena tujuan tersebut maka Belanda mempergunakan masing-masing satu brigade untuk Sumatera Timur, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah, yakni Brigade "Z", "U", "Y" dan "T". Untuk Jawa Barat dipergunakan dua divisi, yakni Divisi "7 Desember" dan Divisi "B" KNIL, yang semuanya berjumlah lima brigade. Untuk Jawa Timur dipergunakan dua brigade, yakni Brigade "X" dan Mariniers Brigade, yang digabung menjadi Divisi "A".²⁷⁾

Tentara Belanda itu berhadapan dengan TNI, yang terdiri dari divisi-divisi. Tiap divisi TNI terdiri dari beberapa Brigade, tiap Brigade terdiri dari beberapa resimen infanteri, sedang tiap resimen infanteri terdiri dari tiga atau empat batalyon infanteri. TNI ini boleh dikatakan tidak mempunyai senjata bantuan. Hanya Divisi X (Aceh), Divisi III (Magelang), Divisi IV (Solo)

Divisi VI (Kediri) dan Divisi VII (Malang) yang mempunyai senjata bantuan berupa artileri dan beberapa buah kendaraan berlapis baja.²⁸⁾

Persenjataan yang ada pada batalyon kita pada waktu itu tidak sama. Sebagai contoh, di Malang persenjataan boleh dikatakan lengkap sekali, sedang di Jawa Barat tiap batalyon rata-rata mempunyai seratus pucuk senapan.²⁹⁾

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa, pada waktu Agresi Belanda I berlangsung, yang berhadapan adalah tentara Belanda yang modern menurut organisasi perang dunia yang baru lalu, dengan TNI, yang pada masa itu masih primitif dan yang hanya terdiri dari pasukan infanteri saja.³⁰⁾

Adapun situasi pada awal perang adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menyerang dengan segala alat perangnya di darat, laut dan udara, tidak hanya di sekitar pertahanan mereka yang terkemuka, tetapi juga di daerah pedalaman. Yang menjadi sasaran serangan adalah: daerah pertahanan Republik, pantai di Jawa Timur, lapangan terbang di Jawa dan Sumatera, kereta api, kota dan desa. Serangan ini dijalankan secara mendadak, sedang yang menjadi korbannya adalah para anggota pertahanan dan penduduk yang tak dapat mempertahankan diri.³¹⁾

Pada tanggal 22 Juli 1947 tentara Belanda berusaha untuk menduduki kota-kota Cirebon, Karawang, Salatiga, Malang, dan beberapa kota lagi di sepanjang pantai Jawa Timur. Meskipun kekuatannya sangat besar, hasil yang dicapai oleh tentara Belanda tidak seberapa, di antaranya: Tambun, Tanjungsari, Ungaran, Pandaan, Kraksaan dan Banyuwangi. Tentara Belanda juga melakukan serangan membabi buta dari udara terhadap beberapa lapangan udara dan kota-kota. Pada hari itu kita berhasil menembak jatuh dua buah pesawat musuh, sebuah di Jawa Timur dan sebuah lagi di Jawa Barat.³²⁾

Pada tanggal 23 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan serangan udara terhadap Sumedang, Cirebon, Garut, Tasikmalaya,

Salatiga, Magelang, dan Malang, yang mengakibatkan terjadinya korban rakyat tak berdosa. Hasil lain yang dicapai musuh dengan serangannya itu adalah pelebaran daerah pendudukan-nya. Tetapi pada hari itu juga mulailah perlawanan kita di mana kita berhasil menahan gerakan musuh dan menyerbu ke daerah pedudukan musuh yang lama. Terutama di Sumatera hasil serbuan kita boleh dikatakan lumayan.³³⁾

Pada tanggal 24 Juli 1947 rakyat Indonesia mulai bangkit dan memperhebat perlawanan, sehingga Mojokerto dan Cerme di Jawa Timur begitu pula sebagian dari daerah pendudukan di Semarang dan Medan dapat direbut dari tangan musuh. Kecuali itu kita berhasil pula merebut kembali beberapa tempat yang sudah diduduki oleh musuh sejak tanggal 22 dan 23 Juli 1947. Malahan pada tanggal 24 Juli 1947 itu pula kita telah berhasil menembak jatuh dua buah pesawat terbang musuh di Jawa Tengah.³⁴⁾

Pada tanggal 25 Juli 1947 musuh mendapat kemajuan, tetapi juga mendapat pukulan-pukulan hebat dari pihak kita. Terjadi pertempuran sengit di mana-mana. Kita berhasil menembak jatuh sebuah pesawat terbang yang menyerang lapangan terbang Muguwo. Di Medan dan Padang kita maju pesat, sedang di Jawa Barat kita berhasil merebut kembali Cimahi.³⁵⁾

Pada tanggal 26 Juli 1947 musuh mengadakan serangan udara secara membabi-butakan di beberapa kota dan desa. Di Jawa tidak ada perubahan yang penting, sedang di Medan dan Padang, Sumatera, kita lebih maju lagi.³⁶⁾

Demikianlah situasi yang ada di negara kita. Pada masa itu Yogyakarta seolah-olah tenang-tenang saja, tidak mengalami kejadian yang penting, tidak mengalami perubahan apapun. Tetapi Yogyakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, sudah tentu mengalami kesibukan yang luar biasa.

Sekitar pukul 07.00 pagi tanggal 21 Juli 1947 lapangan terbang Muguwo diserang dari udara. Sekitar empat buah pe-

sawat terbang jenis pemburu Belanda melayang-layang di atas ibukota Yogyakarta. Pesawat-pesawat itu terbang rendah mengadakan pameran kekuatan selama lima belas menit, lalu melancarkan pemboman dan tembakan gencar terhadap lapangan terbang Meguwo. Sekitar pukul 15.00 tengah hari pesawat terbang muncul kembali dan menyerang Maguwo untuk kedua kalinya.³⁷⁾

Pada tanggal 21 Juli 1947, pukul 10.00 Panglima Besar Sudirman memberi keterangan di hadapan pers sebagai berikut:

"Pemerintah Belanda telah memberi kuasa kepada Dr. Van Mook untuk mengambil kekerasan terhadap Indonesia. Dan pagi tadi Van Mook telah memberikan perintah kepada serdadunya untuk memulai serangannya. Serangan Belanda telah dimulai pagi ini dan walaupun pernyataan perang tidak diperintahkan secara resmi, tetapi nyata bahwa pihak Belanda telah menyatakan perang kepada pihak Republik.

Serangan pihak Belanda tadi nyata dilakukan dengan membabi buta, sebab serangan itu tidak dilakukan di daerah pertempuran saja, pun juga di daerah-daerah pedalaman. Menurut laporan yang telah diterima oleh Panglima Besar hingga pagi ini, tempat-tempat yang diserang ialah lapangan terbang Panasan (Solo) dibom dan dimitraliyur, Malang, lapangan terbang Maguwo (Yogyakarta), Kedung Banteng, Maospati (Madiun).

Kini pertempuran sengit telah dimulai di daerah Semarang, disebabkan pendahuluan dari pihak Belanda dengan bombardemen.

Kini telah tiba waktunya bagi pihak Indonesia untuk mengadakan perlawanan sebaik-baiknya di semua tempat untuk mempertahankan dan menyelamatkan negara. Gerakan kita semata-mata bersifat pembelaan nasional (*nationale verdediging*).

Menurut kawat-kawat dari seluruh Angkatan Perang kepada Panglima Besar Sudirman, dinyatakan bahwa pen-

dahuluhan serangan ini diterima dengan tenang, berdisiplin dan taat kepada perintah atasan.”³⁸⁾

Sesudah itu berlangsung sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Pucuk Pimpinan TNI dan pihak oposisi, yaitu Masjumi. Selesai sidang maka Dr. Sukiman sebagai Ketua Pengurus Besar Masjumi berpidato di muka corong radio Yogyakarta, menyarankan agar rakyat Indonesia seluruhnya mempertahankan kemerdekaan tanah air dan menjalankan kewajiban terhadap negara.³⁹⁾

Pada tanggal 21 Juli 1947 Jenderal Sudirman berpidato pula sebagai berikut:

”Berhubung dengan sikap pemerintah RI yang telah tegas tidak akan memberikan tambahan konsesi lagi, tidak akan menelan usul-usul Belanda, maka pemerintah Belanda telah memutuskan memberi kuasa penuh pada Dr. Van Mook, untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan dengan mempergunakan seluruh kekuatan militer. Pagi hari ini serangan umum dengan mempergunakan pesawat udara telah dimulai oleh tentara Belanda. Serangan-serangan dilakukan secara membabi-buta, karena mereka tidak hanya mengadakan serangan di medan-medan pertempuran tetapi juga di beberapa daerah pedalaman.

Dengan adanya sikap Belanda yang semacam itu, telah terang dan nyata baik bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, maupun bagi dunia seluruhnya, bahwa Belanda telah memperkosa perdamaian dan memperkosa pula kemerdekaan salah satu bangsa di atas bumi ini.

Sekarang telah tiba saatnya bagi segenap lapisan rakyat Indonesia untuk menunaikan sumpahnya terhadap Tuhan dan Ibu Pertiwi, mengatakan dengan sungguh-sungguh cinta kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan dan kita pertahankan 22 bulan lebih, wajib kita lindungi dan kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan.

Insaf dan ingatlah, korban telah banyak, penderitaan

tidak sedikit, maka jangan sekali-kali kemerdekaan yang telah kita miliki dan kita pertahankan itu, kita lepaskan dan kita serahkan kepada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita.

Segala macam tindakan dari pihak Belanda wajib kita lawan dengan sekuat-kuatnya.

Seluruh rakyat wajib bersatu.

Seluruh lapisan rakyat wajib berjuang.

Segala macam alat wajib kita gunakan.

Seluruh lapisan rakyat wajib mempertahankan dan menyelamatkan kemerdekaan nusa dan bangsa.

Akhirnya, kami yang disertai tugas kewajiban mengatur dan memimpin pertahanan negara memerintahkan:

Segenap anggota Angkatan Perang, rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya: sialaaaaaap !! Maju jalan!!!”⁴⁰⁾

Pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 19.00 Presiden Soekarno berpidato yang ditujukan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Dalam pidato tersebut Presiden antara lain menyatakan bahwa:

1. Pihak Belanda telah dengan terang-terangan menyerang dengan senjata dari darat dan udara.
2. Serangan Belanda itu adalah serangan terhadap kemerdekaan dan keadilan, merupakan tindakan sewenang-wenang yang didorong oleh nafsu kebuasan serta penjajahan dan berdasar pada kepercayaan kepada kekerasan serta paksaan.
3. Apa yang dituduhkan oleh Belanda kepada Republik sebagai kekurangan-kekurangan dan pelanggaran-pelanggaran di dalam penyelenggaraan perdamaian, bagi orang yang masih mempunyai perasaan keadilan serta kebenaran tidak berarti sama sekali, sebab Republik Indonesia baru dua tahun berdiri, meliputi daerah yang amat luas, dan berpenduduk banyak sekali, apa lagi masih dalam kurungan militer, politik dan ekonomi.

4. Kemerdekaan yang telah kita capai dan kita beri bentuk Republik ini telah tumbuh baik dan bertambah sempurna; hal ini diakui oleh bangsa-bangsa yang besar dan oleh bangsa Belanda sendiri.
5. Pemungkiran Belanda terhadap perjanjiannya dengan kita adalah pemungkiran penghargaannya pada kemerdekaan, keadilan serta kebenaran.
6. Karena kita yakin bahwa kebenaran dan keadilan ada di pihak kita, maka dengan penuh kepercayaan kita bersedia menyerahkan soal perselisihan Indonesia-Belanda kepada UNO, dan kita mengharap agar negara-negara yang cinta kemerdekaan serta keadilan bersedia membawa perselisihan tersebut ke dalam sidang UNO.
7. Kita harus tetap teguh dalam iman kita bahwa kita akan dan pasti dapat menolak segala serangan terhadap Republik kita.⁴¹⁾

Masih pada tanggal 21 Juli 1947, malam, Perdana Menteri Amir berpidato pula yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Belanda telah mengumumkan, bahwa kekuatan militernya telah mulai bertindak, dan tindakan tersebut oleh pihak Belanda disebut "aksi polisionil".
2. Dengan tindakan tersebut berarti bahwa Belanda telah meninggalkan jalan damai, meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meninggalkan Pengadilan Internasional.
3. Pihak Indonesia menyadari bahwa dunia internasional menanti-nanti adanya penyelesaian secara damai persengketaan Indonesia dan Belanda, agar perdagangan dapat berkembang kembali dan produksi berjalan lagi.
4. Naskah Persetujuan Linggarjati baru ditanda-tangani 4 bulan sesudah diparaf, sebab sebelumnya pihak Belanda main tafsir seenaknya sendiri.
5. Pihak Belanda selalu melanggar garis demokrasi dan gencat-

an senjata.

6. Menurut Persetujuan Linggarjati, tentara Belanda harus dikurangi jumlahnya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, jumlah tentara Belanda ditambah hingga mencapai jumlah yang melebihi apa yang sudah disetujui dalam perjanjian gencatan senjata.
7. Kita adalah rakyat yang merdeka dan bersatu, kecuali itu kita adalah rakyat yang bernegara dan berperintah, sehingga kita tidak mengakui tindakan polisional di daerah kita.⁴²⁾

Pada malam itu juga, tanggal 21 Juli 1947, Panglima Besar Sudirman berpidato pula yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Karena Pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas, tidak akan memberi tambahan konsesi kepada Belanda, tidak mau menelan semua usul Belanda, maka Pemerintah Belanda telah mengambil putusan untuk memberi kuasa penuh kepada Dr. Van Mook untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan terhadap Republik Indonesia dengan mempergunakan seluruh kekuatan militer.
2. Tadi pagi serangan umum dengan mempergunakan pesawat udara telah dimulai membabi buta di mana daerah pedalaman juga dijadikan sasaran.
3. Serangan itu berarti bahwa Belanda telah memperkosa perdamaian dan kemerdekaan salah satu bangsa di muka bumi ini.
4. Sekarang telah tiba saat bagi semua lapisan rakyat Indonesia untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh sumpah Tuhan dan Ibu Pertiwi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semboyan cinta kemerdekaan.
5. Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan dan kita pertahankan 22 bulan lebih wajib kita lindungi dan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan.
6. Kita harus insaf dan ingat bahwa korban telah banyak pen-

deritaan tidak sedikit, karena itu jangan sekali-kali kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia kita lepaskan dan kita serahkan kepada siapapun yang akan menjajah dan menindas kita.⁴⁴⁾

Pada tanggal 21 Juli 1947 itu pula Sutan Syahrir meninggalkan Yogyakarta dan berangkat ke luar negeri dengan membawa pesan istimewa dari Pemerintah Republik untuk memberi penerangan tentang sikap Republik. Negara-negara yang akan dikunjungi oleh Sutan Syahrir adalah Amerika Serikat, Inggris dan India.⁴⁴⁾

Kepergian Sutan Syahrir tersebut dengan pesawat terbang Patnaik dan dilakukan secara rahasia agar Belanda tidak mengetahuinya. Karena akibatnya ternyata sangat menguntungkan Republik dan merugikan Belanda, maka kepergian Sutan Syahrir ke luar negeri yang tidak diketahui Belanda itu sangat menyesalkan Belanda selama-lamanya.⁴⁵⁾

Sesampai di lapangan terbang Singapura, Sutan Syahrir disambut oleh para wartawan luar negeri. Dalam sebuah wawancara, Sutan Syahrir membuka kebusukan pihak Belanda selama berunding dengan Republik. Sejak itu tahulah dunia internasional keadaan yang sebenarnya yang terdapat di Indonesia, yang sebelumnya selalu tertutup oleh kebohongan Belanda. Hal itulah rasanya yang menyebabkan dunia menjadi marah dan pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memaksa Belanda menghentikan penyerangannya.⁴⁶⁾

Kemudian dari Singapura Sutan Syahrir melanjutkan perjalanannya ke India. Sesampai di negeri yang dituju, ternyata Wakil Presiden Mohammad Hatta sudah berada lebih dulu di New Delhi.⁴⁷⁾

Di sini perlu pula diutarakan suatu peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di Yogyakarta ketika Sutan Syahrir sudah satu minggu meninggalkan tanah air. Pada tanggal 29 Juli 1947 ada sebuah pesawat Dakota milik Patnaik yang membawa obat-

obatan ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu Belanda di atas kota Yogyakarta. Yang ditembak Belanda itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Sutan Syahrir dari Indonesia sampai di Singapura.⁴⁸⁾

Sebenarnya pihak Belanda tahu bahwa pesawat yang menjadi sasaran tembakannya itu bukan pesawat militer dan kedatangannya dengan membawa obat-obatan bagi Republik. Tetapi tampaknya Belanda memang dengan sengaja mencegatnya dan kemudian menembaknya karena pesawat tersebut telah menguntungkan pihak Republik.⁴⁹⁾

Pesawat Dakota tersebut habis terbakar sedang korban manusia yang diakibatkannya adalah:

1. Ex Wing Commander Constantin dengan isterinya
2. Ex Squadronleader Haselharst
3. Seorang Inggris yang tidak diketahui namanya
4. Ahli pesawat yang berkebangsaan India, Bida Ram
5. Adi Sucipto
6. Dr. Abdulrahman Saleh
7. Hadisumarno
8. Arifin
9. Abdul Gani

Yang tersebut pada nomor 1 sampai 8 meninggal, sedang nomor 9, luka-luka.⁵⁰⁾

Pada waktu itu tentara yang bertugas di Yogyakarta terutama terdiri dari warga Divisi III.

Divisi III mempunyai 3 brigade dengan 9 resimen dan 36 batalyon infanteri dan senjata bantuan hanya 2 pucuk meriam. Brigade "Nusantara" dengan pimpinan Kolonel Iskandar Idris berkedudukan di Pekalongan, mengkoordinasi 3 resimen, yaitu Resimen 17, berkedudukan di Pekalongan dengan 4 batalyon, yakni di Pekalongan, Comal, Batang dan Kendal; Resimen 18, berkedudukan di Wonosobo dengan 4 batalyon, yakni 2 batalyon di Wonosobo, lainnya di Temanggung dan Sukorejo (Kabupaten Kendal); Resimen 19, berkedudukan di Magelang dengan

4 batalyon, yakni 3 batalyon di Magelang dan 1 batalyon di Muntilan Brigade Mataram pimpinan Kolonel Mukahar, berkedudukan di Purworejo, mengkoordinasi 3 resimen, yaitu: Resimen 20 berkedudukan di Purworejo dengan 4 batalyon, yakni 2 batalyon di Purworejo, 1 batalyon di Kebumen, dan 1 batalyon di Gombong; Resimen 21 berkedudukan di Yogyakarta dengan 4 batalyon, yakni masing-masing 1 batalyon di Cebongan; Wates, Sentolo dan di Bantul; Resimen 22 berkedudukan di Wiro dengan 4 batalyon, yakni masing-masing 1 batalyon di Yogyakarta, Kaliurang, Tanjungtiroto, dan di Wonosari. Brigade Yogyakarta, Kaliurang, Tanjungtiroto, dan di Wonosari. Brigade "Joko Untung" dari Biro Perjuangan berkedudukan di Yogyakarta dengan 3 resimen dalam pembentukan, ialah Resimen "Tidar" berkedudukan di Magelang, Resimen "Tenggong" berkedudukan di Purworejo, dan Resimen "Ontowiryo" berkedudukan di Yogyakarta.⁵¹⁾

Pihak Belanda terus saja menyerang. Tentaranya yang sudah menduduki Jawa Tengah bagian Barat tampak bergerak ke Timur menuju Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juli 1947 Wanduaji yang terletak di sebelah Selatan Bumiayu diduduki. Pada tanggal 31 Juli 1947 Gombong sudah diduduki pula.⁵²⁾

Pendudukan Gombong benar-benar dirasakan oleh ibukota Yogyakarta sebagai ancaman, sebab dari Gombong tersebut musuh dapat kapan saja menyerang ibukota. Karena ancaman itu, maka Pemerintah lalu mengangkat Gubernur Militer untuk memperkuat pertahanan Yogyakarta, yang diangkat adalah Sultan Hamengku Buwono IX dengan pangkat Letnan Jenderal. Sementara itu rakyat dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan.⁵³⁾

Dalam pada itu Aksi Militer Belanda I itu telah menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima dan pada tanggal 31 Juli dimasukkan sebagai acara pembicaraan Dewan

Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler, yang anggota-anggotanya terdiri dari para Konsul Jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler itu diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Dr. Walter Foate dan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Konsul Jenderal Belgia, Konsul Jenderal Perancis, Konsul Jenderal Inggris, dan Konsul Jenderal Australia. Komisi Konsuler ini kemudian diperkuat dengan personalia militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler mengatakan, bahwa sejak tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah penghentian tembak menembak tidak memuaskan. Belum ada tindakan yang praktis untuk menyelesaikan masalah penghentian tembak menembak untuk mengurangi jumlah korban yang jauh.⁵⁴⁾

Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan ini dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilakan masing-masing memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi penghentian tembak menembak. Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda dipersilakan memilih satu negara untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintah Indonesia memilih Australia, sedang Belanda memilih Belgia, kemudian dua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham.

Komisi PBB ini di Indonesia dikenal sebagai *Komisi Tiga Negara (KTN)*. Dalam masalah militer, KTN mengambil inisiatif tetapi dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan

usul, tidak mempunyai hak untuk memutuskan persoalan politik.. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah, akhirnya disepakati untuk kembali ke meja perundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa Jakarta tidak ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif, akibat aksi militer. Akhirnya kedua belah pihak bersepakat bahwa akan berunding di sebuah kapal yang disediakan oleh KTN.⁵⁵⁾

C. AKSI MILITER BELANDA II

Dalam perundingan, Belanda bermaksud memaksakan kehendaknya mengenai bentuk ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam kehendak Belanda itu terkandung janji yang menyatakan kesanggupan Belanda memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kelak kemudian tetapi janji tersebut akan dipenuhi sesudah berlangsung zaman peralihan yang tidak ada batas waktunya. Dalam zaman peralihan tersebut kedaulatan Indonesia tetap berada di tangan Belanda. Dan pada itu Belanda telah siap untuk mendirikan organisasi ketatanegaraan baru dengan negara-negara boneka di dalamnya. Terhadap konsepsi serta langkah Belanda yang merugikan itu Republik bersikap menolak dengan tegas. Karena itu maka pada tanggal 11 Desember 1948 delegasi Belanda yang dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo mengatakan tidak dapat melanjutkan perundingan. Itu berarti bahwa Persetujuan Renville mencapai kegagalan.⁵⁶⁾

Setelah perundingan mengalami kegagalan, Belanda mengirimkan sebuah misi yang diketuai oleh Stikker dengan maksud, agar pertikaian antara Indonesia dan Belanda tak diselesaikan melalui delegasi tetapi dengan pertemuan langsung antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik. Ini berarti bahwa UNCI yang selama itu selalu bertindak sebagai orang ketiga di dalam perundingan antara kedua belah pihak dike-

sampingkan. Semula misi tersebut mengusulkan agar perundingan antara Indonesia dan Belanda diadakan di Jakarta, tetapi pihak Republik yang waspada terhadap maksud Belanda berpendapat bahwa perundingan tersebut harus dilangsungkan di Yogyakarta dan hanya bersifat informal saja. Kenyataannya perundingan berlangsung di Kaliurang Yogyakarta. Dalam hal ini Republik Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.⁵⁷⁾

Seperti perundingan sebelumnya ternyata bahwa perundingan antara dua pemerintah ini tidak membawa hasil seperti yang diharapkan oleh pihak Belanda. Malahan selama perundingan masih berlangsung tampak adanya ketegangan yang makin lama makin terasa meningkat dan akhirnya para anggota misi Belanda terpaksa meninggalkan Yogyakarta kembali ke negeri Belanda tanpa membawa hasil apa pun. Perlu dicatat di sini bahwa sebelum misi Belanda meninggalkan Yogyakarta, karena paksaan untuk menerima konsepsi Belanda, maka di pihak Republik terdapat kesibukan yang luar biasa. Sebagai tanda adanya kesibukan itu adalah dipanggilnya para anggota Seksi Politik Badan Pekerja Komite Nasional Pusat oleh Perdana Menteri Hatta. Para anggota Seksi itu diajak membicarakan hasil perundingan di tempat kediaman Perdana Menteri Hatta.⁵⁸⁾

Keesokan harinya Perdana Menteri Hatta mengunjungi Menteri Stikker di tempat kediamannya di Kaliurang dan mengadakan pembicaraan selama satu jam. Dalam pertemuan tersebut Hatta menyatakan bahwa Republik menolak konsepsi Belanda. Petang harinya pukul 17.00 Stikker datang ke tempat kediaman Hatta dan mengadakan pembicaraan. Pembicaraan ini adalah pembicaraan terakhir, apa yang dibicarakan tidak jelas, tetapi sesudah pembicaraan itu air muka Perdana Menteri Hatta tidak berubah, malah tokoh kita ini tampak selalu tersenyum ketika diwawancarai para wartawan. Tetapi, ketika ia dikejar oleh para wartawan dengan berbagai pertanyaan, dari jawaban-jawabannya dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa perundingan antara Hatta dan Stikker menemui jalan buntu.⁵⁹⁾

Pada hari-hari sesudah selesainya perundingan Hatta-Stikker keadaan masih gelap. Apakah akan timbul lagi perang yang lebih hebat, atau sebaliknya, semuanya masih merupakan pertanyaan yang tidak berjawab. Apalagi karena pemerintah masih merahasiakan hasil perundingan Hatta-Stikker, peristiwa yang akan terjadi sukar diramalkan.⁶⁰⁾

Kemudian suasana menjadi bertambah genting. Hal ini telah berulang-ulang ditegaskan oleh Pemerintah yang selanjutnya juga oleh Panglima Tertinggi serta Panglima Besar Tentara dalam perintah hariannya pada tanggal 16 Desember 1948. Sementara itu, dalam konperensi pers yang diadakan pada tanggal 16 Desember 1948 Ketua Delegasi Mr. Moh. Roem menerangkan, bahwa dalam surat Wakil Presiden Hatta yang disampaikan pada Cochran pada tanggal 12 Desember telah dibantah tuduhan Belanda dengan menegaskan sekali lagi pendirian Republik yang mengenai pasal 1 Renville, yaitu soal pengakuan kedaulatan Belanda, dan yang mengenai pimpinan tentara di masa peralihan. Pendapat Republik mengenai kedua soal itu dalam garis besarnya sejalan dengan apa yang terdapat dalam usul Critchly/Dubois dan usul Cochran, sehingga diketahui benar-benar bahwa tuduhan Belanda tadi tidak benar.⁶¹⁾

Menurut pendapat para pemimpin dan rakyat Indonesia pada umumnya, masa peralihan itu berarti masa menuju kepada berakhirnya kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda di Indonesia, sehingga dapat cepat tercapai. Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat dan bukan kembalinya kekuasaan tertinggi untuk seluruh Indonesia kepada Belanda lagi. Tetapi Belanda tetap pada pendiriannya untuk minta hak penuh dalam masa interim berdasarkan kekuasaan *de jure* yang ada padanya. Dalam pada itu Belanda tidak dapat melihat apalagi mengakui, bahwa sudah selama 3 tahun Republik Indonesia menunjukkan dirinya sebagai pemerintah yang merdeka dan mempunyai kekuasaan *de facto* yang diakui oleh bangsa Indonesia. Malahan Belanda merasa mempunyai cukup alasan untuk menyerang dan menggunakan segala alat perangnya guna meng-

hapuskan Republik Indonesia yang menurut pendapatnya tidak ada.⁶²⁾

Kemudian pada tanggal 17 Desember 1948 Belanda menyampaikan nota yang bersifat ultimatif kepada Republik yang menyatakan bahwa dalam waktu 24 jam Republik harus sudah memberi jawaban. Tentu saja pihak Republik tidak dapat memaknai kesempatan yang terlalu sempit yang diberikan oleh pihak Belanda, sebab sebelum mengambil keputusan pemerintah harus berunding dengan BPKNIP dan partai-partai. Pada tanggal 18 Desember 1948 pemerintah menerima kabar bahwa Konsul Jenderal Inggris pada tanggal 19 Desember pagi akan datang ke Yogyakarta untuk mencari jalan bagaimana mengatasi ketegangan yang timbul di dalam perundingan di Kaliurang itu. Tetapi pada tanggal 19 Desember 1948 pagi yang datang bukan Konsul Jenderal Inggris, melainkan pesawat pembom dan pemburu Belanda yang mengadakan serangan secara mendadak dan membabi-buta.⁶³⁾

Karena adanya serangan tersebut, pagi-pagi, tanggal 19 Desember itu pula, para pemimpin pemerintahan berkumpul di istana dan bersidang di bawah pimpinan Presiden Soekarno untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan serangan Belanda. Sidang ini ternyata merupakan sidang yang penting dan menelurkan keputusan bersejarah. Salah satu keputusan menyatakan bahwa Mr. Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatera dengan perantara radio diberi kuasa untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, jika Pemerintah Pusat oleh karena keadaan, tidak mungkin menjalankan lagi kewajibannya. Perintah semacam itu diberikan juga kepada Mr. Maramis, Menteri Keuangan yang sedang berada di luar negeri dan Drs. Sudarsono di New Delhi untuk membentuk *Gouvernement in exile* di New Delhi jika usaha Mr. Syafruddin Prawiranegara gagal.⁶⁴⁾

Perintah-perintah tersebut dituangkan di dalam surat yang isinya secara lengkap sebagai berikut:

**MANDAT PRESIDEN KEPADA
MR. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA**

"Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19-12-1948, jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta.

Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera."

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden

Wakil Presiden

Soekarno

Moh. Hatta⁶⁵⁾

Pro: Dr. Sudarsono – Palar – Mr. Maramis, New Delhi.

"Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19-12-1948, jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika iKhtiar Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk *exile gouvernement* Republik Indonesia di India.

Harap dalam hal ini berhubungan dengan Syafruddin di Sumatera.

Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya."

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Wakil Presiden
Moh. Hatta

Menteri Luar Negeri
Agus Salim⁶⁶⁾

Setelah sidang tanggal 19 Desember 1948 itu selesai, Sekretaris Negara membagikan pengumuman pemerintah kepada para wartawan. Ketika para wartawan hendak ke luar dari ruangan istana tiba-tiba Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan pendek penuh harapan: "Saya minta pemberitaan ke luar negeri dibuat sebaik-baiknya."

Dengan perbuatan ini Pemerintah Belanda menginjak-injak perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatangani dengan persaksian Komisi Tiga Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan perbuatan ini ia mengatakan pula bahwa ia tiada memperhatikan kesopanan dan perasaan baik-buruk umum di dunia. Ia mengulangi cara yang berlaku seperti kaum Nazi dan militer Jepang ketika mulai peperangannya di Eropa Barat dan serangan Pearl Harbour.

Perbuatan itu bertentangan sama sekali dengan keadilan dan kesopanan dan semata-mata menyatakan kepercayaan kepada kekerasan dan paksaan. Bangsa Indonesia di dalam perjuangannya menuntut keadilan dan kebenaran mempertahankan kemerdekaan dan kehormatannya, berhadapan sekarang dengan kekerasan dan paksaan militer Belanda ini untuk kedua kalinya sejak pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam perjuangan yang adil dan benar ini, menghadapi paksaan, kekerasan dan ketidak-jujuran pihak Belanda, pasti seluruh dunia yang ber-perasaan sehat ada pada kita dan pasti pula, bahwa juga sekali ini pihak yang berdiri atas dasar adil dan benar akan menang terhadap paksaan kekerasan dan kelainan.

Seluruh bangsa kita harus menjadi satu di dalam "tekad" mempertahankan kemerdekaan serta kehormatannya untuk menggagalkan maksud keji pihak Belanda, untuk memaksakan kekuasaannya terhadap bangsa kita.

Kita benar, kita Insya Allah pasti akan menang".

Yogyakarta, 19 Desember 1946⁶⁸⁾

Pengumuman Pemerintah tersebut kemudian ditutup dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia baik yang ada di dalam maupun di luar daerah Republik Indonesia.

Adapun amanat Presiden sebagai berikut:

"Bangsaku yang tercinta!!

Pada hari ini tanggal 19 Desember 1948 pada jam 06.00 pagi Belanda telah mulai dengan serangan atas kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan tindakan ini nyata bahwa Belanda itu telah mulai lagi perang kolonialnya untuk menghancurkan pemerintah dan negara Republik".

Meskipun pernyataan tersebut pendek saja, para wartawan dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh Presiden pada saat-saat yang bersejarah itu.

Kemudian para wartawan segera pergi ke kantornya masing-masing untuk menyiarkan pengumuman tersebut baik dengan bulletin istimewa maupun dengan perantaraan radio. Tetapi sayang, surat-surat kabar yang bermaksud mencetak bulletin istimewa terpaksa membatalkan maksudnya, karena serangan udara oleh musuh makin dahsyat dan keadaan makin genting. Untunglah, kantor berita "Antara" yang sejak pagi sudah siap dengan pemancarnya, masih sempat menyiarkan berita-berita ke seluruh dunia. Demikian pula amanat Presiden dan Wakil Presiden yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagian besar masih dapat disiarkan oleh kantor berita tersebut. Di samping itu Radio Republik Indonesia masih sempat pula menyiarkan pengumuman Pemerintah dan amanat Presiden dan Wakil Presiden.

Pengumuman Pemerintah tersebut berisi antara lain mengenai pemberian mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Dr. Sudarsono dan Palar sesuai dengan keputusan sidang tersebut di atas. Kecuali itu, dalam pengumuman tersebut terdapat seruan Pemerintah, agar para anggota delegasi atau pembesar pemerintah tidak mengadakan perundingan sendiri-sendiri dengan

Belanda. Perundingan dengan Belanda atau dengan pihak mana pun hanya bisa dilakukan jika pembesar Republik (yang ditawan) dapat berkumpul satu sama lain serta bebas dari sesuatu tekanan. Selanjutnya dalam pengumuman itu pula Pemerintah mengatakan bahwa mulai tanggal 19 Desember 1948 Pemerintah Pusat di Jawa tidak berkuasa lagi dan kekuasaan dipindahkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Adapun anggota-anggota Pemerintah Darurat tersebut adalah: Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Teuku Hassan, Ir. M. Sitompul, Mr. Moh. St. Rasyid, Ir. Indera Cahya dan Mr. Lukman Hakim.⁶⁷⁾

Selanjutnya pengumuman Pemerintah yang lain adalah sebagai berikut:

MAKLUMAT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

"Hari ini tanggal 19 Desember 1948, Minggu pagi jam 06.00 waktu Yogyakarta. Angkatan Perang Belanda sekonyong-konyong memulai serangannya terhadap Republik Indonesia agar mereka dapat menjajah kembali seluruh tanah air bangsa Indonesia.

Setelah kita berbulan-bulan berusaha dengan ketulusan hati untuk menyelesaikan pertikaian dengan Belanda secara damai sekonyong-konyong mereka dengan tidak memberitahu lebih dahulu mempergunakan alat senjata yang ada pada mereka untuk melakukan kehendak mereka dengan paksaan dengan tidak mengindahkan adanya KTN di Yogyakarta, dengan tidak mempedulikan adanya perjanjian gencatan senjata mereka telah meniadakan segala kemungkinan untuk mencapai penyelesaian secara damai.

Kami percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia maupun yang berada di daerah Republik ataupun yang berada di daerah yang diduduki Belanda serentak akan berdiri di belakang Republik Indonesia untuk menentang dengan tenaga dan batin yang ada pada kita tindakan yang melanggar perikemanusiaan ini.

Kami mengetahui bahwa dengan perbuatan senjata mereka, Belanda mungkin akan dapat merebut dan menduduki beberapa tempat yang penting, akan tetapi tidak mungkin mereka dapat mematahkan semangat perjuangan kita atau menghancurkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah kita rebut dan kita pertahankan selama ini.

Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah meresapi pada jiwa kita mustahil dapat ditindas dengan kekerasan.

Marilah bangsaku, kita pertahankan tanah air dan kemerdekaan kita dengan kekerasan.

Marilah bangsaku, kita pertahankan tanah air dan kemerdekaan kita dengan segala tenaga yang ada pada kita.

Teruskanlah perjuangan kita dan percayalah kemenangan pasti ada pada kita, Insya Allah."

Yogyakarta, 19 Desember 1948
Presiden Republik Indonesia⁶⁹⁾

Soekarno

Kemudian ke luarlah amanat Wakil Presiden yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada rakyat seluruhnya!!

Belanda telah mulai menyerang setelah kita berbulan-bulan berunding dengan jalan damai untuk menyelesaikan soal Indonesia.

Dalam keadaan genting ini saya tidak akan berbicara panjang. Hanya sebagai kepala negara menyampaikan beberapa pesan kepada rakyat seluruhnya. Sebagai suatu bangsa yang berkehormatan kita wajib mempertahankan diri kita dan harus berjuang dengan tidak putus-putusnya untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia yang telah kita proklamirkan pada tanggal

17 Agustus 1945 dan kita perjuangkan dengan segala tenaga sampai sekarang ini.

Musuh mau mengepung Pemerintah tetapi Republik Indonesia tidak tergantung pada nasibnya orang-orang yang menjadi kepala negara atau yang duduk dalam pemerintahan. Rakyat harus berjuang terus dan saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia bersedia untuk meneruskan perjuangan kita ini.

Perjuangan kita adalah perjuangan untuk kemerdekaan dan jangan putus berjuang sebelum tercapai kemerdekaan kita itu, sebab kita berjuang dengan keyakinan bahwa perjuangan kita itu adalah perjuangan adil. Pemerintah tetap akan melakukan kewajibannya apapun juga terjadi dengan dirinya.

Hidup Republik Indonesia.

Hidup perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sekali merdeka tetap merdeka.”

Yogyakarta, 19 Desember 1948
Wakil Presiden,

(Moh. Hatta)⁷⁰⁾

Orang yang mendengar amanat, kedua pemimpin kita itu merasa terharu, dan mencucurkan air mata, karena kata-kata dalam kedua amanat tersebut seperti kata-kata perpisahan antara ayah dan anak yang hendak berpisah untuk sementara waktu. Mereka merasa terharu dan mencucurkan air mata, bukan karena putus asa, tetapi karena perpisahan yang mungkin sekali terjadi sama sekali tidak diduga sebelumnya.⁷¹⁾

Sementara itu serangan udara dari pihak Belanda belum juga reda. Seolah-olah Belanda belum puas dengan peluru yang telah dihambur. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dapat bekerja karena serangan-serangan yang makin dahsyat dan membabi-buta. Pemancar RRI terpaksa diangkat ke luar kota untuk meneruskan perjuangannya bersama-sama dengan para pejuang.

Dari daerah gerilya itulah RRI menyiarkan berita-berita pertempuran ke seluruh pelosok tanah'air.⁷²⁾

Ketika itu Panglima Besar Sudirman meninggalkan istana menuju ke sebuah gedung besar milik kraton. Di situlah beliau bermaksud tinggal untuk sementara waktu. Tetapi beberapa saat kemudian beliau terpaksa meninggalkan gedung tersebut dan ke luar dari kota dengan kendaraan mobil. Meskipun mobil itu selalu dikejar oleh pesawat pemburu Belanda, Panglima Besar dapat sampai di tempat yang dituju dengan selamat.⁷³⁾

Setelah menempuh perjalanan yang berat dengan menyusuri pantai Selatan sampailah Panglima Besar di daerah Gunung Lawu. Di sinilah Panglima Besar menyusun siasat dan memimpin perang gerilya hingga saat Republik kembali ke Yogyakarta.⁷⁴⁾

Kira-kira pukul 14.00 (masih tanggal 19 Desember 1948) beberapa pasukan pelopor Belanda telah memasuki kota dan mengepung kota dari semua penjuru. Di jalan-jalan tampak barisan yang agak teratur karena paksaan dan yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Mereka bukanlah orang-orang yang berbaris biasa tetapi berbaris karena memang digiring oleh tentara Belanda, dijadikan perisai terhadap serangan para pejuang Republik. Sementara orang yang digiring itu ada yang ditembak mati, karena mereka mencoba melepaskan diri dari paksaan tersebut.⁷⁵⁾

Kira-kira pukul 16.00 pasukan pelopor Belanda telah mengepung istana Presiden. Ketika menghadapi kepungan tersebut, pasukan pengawal istana memberi perlawanan yang hebat, meskipun sebenarnya mereka telah mendapat perintah dari atasan agar tidak memberi perlawanan. Sebab, mereka tidak suka melihat istana dan Presidennya dihina orang lain, dan mereka tidak rela istana Presiden diinjak-injak oleh serdadu-serdadu Belanda yang tidak mengenal kesopanan pada waktu itu. Tetapi, ketika sampai pada situasi yang benar-benar mewajibkan ketaatan kepada atasan secara mutlak, terpaksa mereka menghentikan perlawanan terhadap serangan musuh sambil meneteskan air mata.⁷⁶⁾

Sementara itu tampak kain putih dikembangkan orang di depan istana sebagai tanda bahwa pihak istana menghendaki pertempuran dihentikan.

Sesudah pertempuran berhenti, tentara Belanda segera memasuki istana. Dengan senyuman manis dan ramah tamah Presiden Soekarno menerima serdadu-serdadu Belanda itu sebagai tamu yang harus dihormati. Beliau maklum bahwa mereka hanya bertindak sebagai alat belaka, menurut apa yang diperintahkan oleh atasan mereka. Karena itu beliau tidak akan menyalahkan sikap serdadu-serdadu tersebut, meskipun beliau mendengar betapa kasarnya kata-kata serdadu-serdadu itu kepada diri beliau.

Tentara Belanda itu segera mengatakan bahwa Presiden dan pembesar-pembesar yang berada di dalam istana dilarang meninggalkan istana. Itu berarti bahwa mereka menjadi tawanan tentara Belanda. Para pembesar yang menjadi tawanan adalah: Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Mohammad Roem, Sutan Syahrir, Mr. AG Pringgodigdo, Komodor Suryadarma dan beberapa orang pembesar lainnya.⁷⁷⁾

Beberapa hari kemudian Presiden Soekarno dan pembesar-pembesar lainnya yang ditawan itu dipindahkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan lagi ke Manumbing (Bangka) sampai saat Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.⁷⁸⁾

Pada waktu Yogyakarta diduduki tentara Belanda, baik dalam hal kehidupan sehari-hari maupun dalam hal keamanan penduduk, lahir batin sangat buruk. Sebelum pendudukan, jumlah penduduk Yogyakarta lebih kurang 800.000 orang, tetapi sejak pendudukan, jumlah tersebut makin lama makin menurun. Di antara mereka yang meninggalkan Yogyakarta itu, sebagian pindah ke kota lain, dan yang sebagian lagi mengungsi ke luar kota atau turut berjuang bersama-sama dengan para pejuang yang lain. Pada umumnya penduduk tidak merasa aman dalam hal keselamatan jiwanya. Mereka merasa sangat menderita

karena siksaan batin yang dialami setiap hari sebagai akibat perbuatan kejam tentara Belanda.⁷⁹⁾

Pada waktu itu Belanda membuat bermacam-macam peraturan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh orang dilarang berkumpul lebih dari lima orang, jika orang berbicara di dalam atau di luar rumah harus dengan suara keras; jam malam berlaku mulai pukul enam petang hingga pukul 6 pagi.⁸⁰⁾

Selanjutnya baiklah kita bicarakan apa yang dilakukan oleh TNI terhadap tentara Belanda yang sudah malang melintang itu. Sebagai akibat serangan tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan-pasukan kita yang bertugas di dalam kota untuk sementara tercerai berai. Mereka banyak yang ke luar dari kota tanpa tujuan tertentu. Ada yang ke Utara, ada yang ke Selatan, ada yang ke Barat dan sebagainya. Hal yang demikian itu menyulitkan bagi pimpinan untuk memberi tugas. Perhubungan yang tidak baik menambah kesulitan pimpinan tersebut. Tetapi ketika itu pimpinan TNI tetap berpegang pada pendirian, bahwa perlawanan terhadap musuh harus tetap diadakan dengan teratur sesuai dengan rencana perlawanan sepanjang masa, dan bahwa kepercayaan rakyat di kota harus segera dikembalikan dengan jalan serangan pembalasan.⁸¹⁾

Berkat kesungguhan usaha pimpinan TNI itu maka daerah pertahanan segera dapat dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu: Sektor Timur. Tiap sektor mempunyai batas yang telah ditentukan serta pimpinan yang telah ditunjuk. Pimpinan sektor itu mempunyai tugas: (1) mengumpulkan kesatuan-kesatuan yang terpecah di daerah sektornya dan memberi pimpinan kepada kesatuan-kesatuan tersebut; (2) mengadakan perlawanan/serangan gerilya terhadap pos Belanda di dalam kota; dan (3) mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balasan.⁸²⁾

Pada akhir Desember 1948 TNI mengadakan serangan pembalasan pertama. Perintah dikeluarkan pada tanggal 26 Desember dan baru dikerjakan pada tanggal 30 Desember. Tetapi, ka-

rena situasi yang memaksa, perintah penyerangan diajukan pada tanggal 29 Desember 1948. Adapun isi perintah tersebut adalah: (1) mengadakan serangan malam, (2) menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya, (3) merampas senjata musuh sebanyak-banyaknya, (4) membunuh/menghancurkan tempat-tempat yang dianggap penting. Tanggal 19 Desember pukul 16.00 pasukan TNI mulai bergerak. Pukul 21.00 TNI mulai menyerang. Pertempuran berlangsung sampai pukul 04.00. Meskipun musuh menggerakkan tank-tank yang selalu menghamburkan peluru, kerugian di pihak mereka sangat besar berupa korban manusia dan kerusakan-kerusakan alat perang.⁸³⁾

TNI telah melakukan beberapa kali serangan umum, yang pada waktu itu disebut "SO" (Serangan Oemoem). Di antara serangan umum yang dilakukan oleh tentara kita pada waktu itu, yang paling besar adalah serangan umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949.⁸⁴⁾

Serangan Umum 1 Maret itu dipersiapkan dengan teliti. Sebelumnya telah diselundupkan prajurit-prajurit ke dalam kota; satu batalyon ditugaskan menduduki lapangan terbang Adisucipto sedang kesatuan lainnya menyerang kota dari empat jurusan dan dipasang ranjau-ranjau untuk mencegah atau menghambat kedatangan pasukan bantuan Belanda. Tetapi tampaknya semua persiapan seperti sia-sia belaka, salah seorang komandan batalyon telah menghitung hari-hari sebelum Hari-H dan melakukan serangan 24 jam lebih cepat. Diduga tindakan yang terlalu cepat ini akan menggagalkan hasil operasi itu. Tetapi, Belanda menganggap serangan umum itu adalah serangan yang biasa saja, sehingga mereka tidak menghadapinya secara sungguh-sungguh. Ketika menyadari keadaan yang sesungguhnya, mereka telah kehilangan beberapa jam yang berharga untuk menggerakkan pasukannya. Serangan yang terlalu cepat itu menyebabkan berhasilnya seluruh operasi sebagai suatu rahmat yang tersembunyi.

Pada tanggal 1 Maret 1949 tepat pada pukul 06.00, ketika sirine meraung-raung menandakan berakhirnya jam malam,

pasukan gerilya memasuki kota. Letkol Soeharto berada dalam pasukan yang akan memberikan pukulan, dengan senapan Owen yang berat di tangannya. Prajurit-prajurit menggunakan daun kelapa (janur) yang digantungkan di bahu sebagai tanda pengenal. Serangan itu berjalan lancar. Pusat kota dapat diduduki, dan pabrik amunisi Watson dapat direbut sehingga lima ton amunisi dan senjata-senjata ringan dapat dirampas dari tempat tersebut.

Petang harinya Letkol Soeharto mengeluarkan perintah agar tentara kita mundur. Serangan Umum 1 Maret 1949 membuka mata dunia internasional, bahwa Republik Indonesia dan TNI masih tetap kuat dan jaya.

Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah Persetujuan Roem-Royen sebagai pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1949. Pada tanggal 6 Juli 1949 kembalilah Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, setelah enam bulan lamanya ditawan Belanda. Presiden, Wakil Presiden dan para pembesar lainnya yang ditawan di Manumbing, Bangka, kembali ke Yogyakarta. Ketika sampai di kota Yogyakarta, rombongan pembesar tersebut disambut oleh rakyat. Para penyambut itu ingin menyaksikan wajah Presiden dan para pembesar lainnya yang sejak beberapa bulan telah terpisah dari rakyat oleh paksaan Belanda.⁸⁵⁾

D. INTERAKSI DI DAERAH

1. *Maklumat Nomor X*

Pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat, yang kemudian disebut: Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Bunyi selengkapnya maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

Maklumat Wakil Presiden
Nomor X
Komite Nasional Pusat
Pemberian kekuasaan legislatif kepada
Komite Nasional Pusat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah Pemerintah.

Memutuskan:

Bahwa, Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945
Wakil Presiden Republik Indonesia,

Mohammad Hatta⁸⁶⁾

Karena adanya putusan tersebut maka Badan Pekerja mempunyai kewajiban dan hak untuk turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Ini berarti bahwa Badan Pekerja bersamasama dengan Presiden menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Tetapi Badan Pekerja tidak berhak mencampuri Pemerintah dalam kebijaksanaan sehari-hari, sebab kebijaksanaan Pemerintah sehari-hari tetap di tangan Presiden. Di samping itu, Badan Pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban bersamasama dengan Presiden menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan segala urusan pemerintahan. Tetapi yang menjalankan Undang-Undang adalah Pemerintah, yaitu Presiden yang dibantu para Menteri dan para pegawai yang di bawahnya.

Karena adanya perubahan kedudukan serta kewajibannya, maka Komite Nasional Pusat termasuk di dalamnya Badan Pekerja, tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan pemerintahan.

Adapun kedudukan Komite Nasional Daerah, menurut penjelasan Pemerintah pada waktu itu, akan segera diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Selanjutnya, menurut penjelasan Pemerintah juga, kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja seperti yang diterangkan di atas hanya berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.⁸⁷⁾

Sesuai dengan fungsi Komite Nasional Pusat, maka pada tanggal 29 Oktober 1945 terbentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, yang susunannya adalah sebagai berikut:

K e t u a	:	Moh. Saleh
Wakil Ketua	:	S. Yosodiningrat Ki Bagus H. Hadikusumo
Para Pembantu	:	KRT. Honggowongso Marlan

H. Hadikusumo
H. Hajit
Mr. Manu
Mr. Suryocokro
Wiyono
S. Parman
Sarjono
Ir. Dipokusumo
Jalaludin
Mr. S. Purwokusumo
Dr. Samsudin
Murjodo
Umar Joy
Dr. Sucipto.⁸⁸⁾

Sesudah Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta terbentuk, pada tanggal 30 Oktober 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII memberi amanat seperti yang sudah diuraikan di bagian muka.

Berhubung dengan disahkannya Kabinet Syahrir I pada tanggal 14 Nopember 1945, dan mengingat situasi negara yang sedang sangat kritis, maka Komite Nasional Daerah Yogyakarta telah mengirimkan kawat kepada Perdana Menteri Syahrir yang bunyinya sebagai berikut:

Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, pada tanggal 14 bulan 11 memutuskan:

"Mendesak kepada kabinet baru, supaya Pemerintah jangan mengadakan perundingan dengan jalan apapun juga, dengan negara manapun juga yang berkehendak akan menjajah Indonesia. Boleh juga perundingan itu dilakukan asal saja pihak penyerang suka menghentikan serangannya dan menjamin, bahwa serangan macam apa dan di manapun juga di Indonesia ini, dan tentara pendudukan itu selekas mungkin harus meninggalkan Indonesia, sehingga serangan itu tak mungkin terulang lagi. Tegasnya kabinet baru sekali-kali jangan bersifat dan bersikap kompromistis."

Surat kawat tersebut ditandatangani Ketua Komite Nasional Daerah Yogyakarta Moh. Saleh.⁸⁹⁾

2. *Peristiwa 3 Juli*

Pada tanggal 10 Pebruari 1946 pihak Indonesia dan pihak Belanda memulai perundingan. Dalam awal perundingan itu Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri dari 6 pasal. Ketika pihak Indonesia belum memberikan usul balasannya, gabungan organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap Kabinet Syahrir. Pihak oposisi itu berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% kepada Republik Indonesia.⁹⁰⁾

Pada waktu Kabinet Syahrir 1 jatuh, Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur kabinet. Tetapi Presiden Soekarno menunjuk kembali Sutan Syahrir sebagai formatur kabinet. Persatuan Perjuangan melanjutkan oposisinya walaupun program kabinet merupakan kompromi haluan politik Pemerintah yang semula dengan pendapat Persatuan Perjuangan. Program kabinet baru itu tidak memuaskan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Karena itu maka Pemerintah lalu mencurigai Tan Malaka dan kawan-kawannya sebagai pihak yang menginginkan kedudukan pemimpin pemerintahan.

Pada akhir bulan Maret beberapa tokoh politik, khususnya tokoh politik dari golongan Persatuan Perjuangan ditangkap. Menurut keterangan Pemerintah tujuan penangkapan adalah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar yang diakibatkan oleh tindakan para pemimpin politik itu, karena terdapat bukti bahwa mereka akan mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan. Mereka tidak melakukan oposisi secara sehat dan layak melainkan hendak melemahkan Pemerintah. Terdapat indikasi kuat bahwa mereka akan mengubah susunan negara di luar Undang-Undang. Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Cokrosuyoso, Sayuti

Melik, Khairul Saleh dan Moh. Yamin.⁹¹⁾

Tokoh-tokoh tersebut ketika ditahan di Tawangmangu memperoleh kemerdekaan bergerak, sehingga mereka dapat berhubungan dengan komplotan mereka, misalnya Mr. Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan lain-lainnya dan merencanakan perebutan kekuasaan. Demikianlah penjelasan Pemerintah lebih lanjut.⁹²⁾

Mr. Subarjo dan Mr. Iwa Kusuma sūmantri mengadakan hubungan dengan tempat-tempat lain. Mereka juga mencari dukungan dari partai-partai, mencoba menanamkan pengaruh di kalangan tentara dan pasukan rakyat dengan jalan memberi gambaran yang negatif mengenai Kabinet Syahrir.⁹³⁾

Di antara perwira yang dapat dipengaruhi oleh Tan Malaka Cs adalah Mayor Jenderal. Sudarsono, yang pada waktu itu adalah Pariglma Divisi III di Yogyakarta.⁹⁴⁾

Pada tanggal 27 Juni 1946 di waktu malam, Perdana Menteri Syahrir bersama-sama Mayor Jenderal Sudibyo, Menteri Kemakmuran Dokter Darmasetiawan, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, dan Gaos diculik oleh pasukan pengikut Tan Malaka.⁹⁵⁾

Dalam situasi yang genting itu pada suatu hari Letnan Kolonel Soeharto dipanggil Presiden Soekarno agar datang ke Kraton Sri Sultan untuk mendapat perintah Presiden. Ketika Letnan Kolonel Soeharto sudah menghadap, Presiden Soekarno memerintahkan agar Letnan Kolonel Soeharto menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Perintah ini diterima Letnan Kolonel Soeharto dengan perasaan terkejut, sebab Mayor Jenderal Sudarsono adalah atasannya. Sesudah terjadi dialog singkat antara Presiden dan Letnan Kolonel Soeharto, dan sesudah terjadi timbang menimbang pada diri Letnan Kolonel Soeharto, maka akhirnya perwira menengah itu mengambil ketetapan dalam hatinya bahwa akan membela Pemerintah.⁹⁶⁾

Sesudah itu Letnan Kolonel Soeharto mengundang Mayor Jenderal Sudarsono agar datang ke Markas Resimen untuk ber-

musyawarah. Dalam pertemuan di antara kedua perwira tersebut Letnan Kolonel Soeharto menerangkan, bahwa Laskar Rakyat yang kuat sedang berkumpul dekat Yogyakarta dan siap membela Sutan Syahrir beserta politiknya. Kemudian didapat persetujuan akan melapor kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menunggu perintah selanjutnya dari Jenderal tersebut.⁹⁷⁾

Jenderal Sudirman memberi perintah agar Mayor Jenderal Sudarsono menghadap ke Markas Besar Tertinggi. Tetapi ternyata Mayor Jenderal Sudarsono tidak mematuhi perintah tersebut. Ia mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang radikal dan keesokan harinya mengadakan rapat yang dihadiri oleh para perwira yang dekat dengannya. Putusan yang diambil oleh rapat tersebut ialah bahwa kepada Presiden akan diajukan tuntutan supaya dibentuk "Dewan Pemimpin-pemimpin Politik" dan kabinet baru.⁹⁸⁾

Sejak itu sadarlah Letnan Kolonel Suharto, bahwa komplotan Mayor Jenderal Sudarsono adalah komplotan yang membahayakan persatuan di kalangan tentara, dan itu adalah komplotan pemberontak yang harus dicegah. Letnan Kolonel Soeharto lalu berkirim surat kepada Presiden yang isinya menyatakan bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono akan memaksakan rencananya terhadap Presiden, dan bahwa Letnan Kolonel Suharto menjamin keselamatan Presiden dan Pemerintah.⁹⁹⁾

Benarlah ketika Mayor Jenderal Sudarsono datang ke istana pada tanggal 3 Juli 1946 ia segera ditangkap oleh para penjaga keamanan Presiden Soekarno. Jadi berkat tindakan Letnan Kolonel Soeharto dengan resimen yang di bawah komandonya maka apa yang disebut "Peristiwa 3 Juli" dapat diatasi dengan bijaksana.¹⁰⁰⁾

3. Perjanjian Linggarjati

Pada tanggal 7 Oktober tahun 1946, di Jakarta berlangsung perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia.

Dalam perundingan ini pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal, dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dan beranggotakan Max Van Poll, F de Boer dan HJ. Van Mook.

Dalam perundingan tersebut pihak Belanda, mengajukan usul yang tidak dapat diterima oleh pihak Indonesia, di antaranya terdapat pernyataan, jika Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat menerima masa peralihan, Belanda minta agar Republik Indonesia mau menerima kedudukan sebagai negara bagian. Usul lain pihak Belanda merupakan tuntutan agar Republik Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban, sehingga Republik Indonesia benar-benar menguasai daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Ketika menerima usul dari pihak Belanda yang sedemikian itu pihak Republik Indonesia mengatakan, bahwa pihak Belanda masih diliputi *gagasan kesatuan kerajaan Belanda*, dan itulah yang menyebabkan lahirnya tuntutan agar Republik Indonesia tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda. Perbedaan pendapat di antara dua pihak tersebut telah menyebabkan perundingan mengalami penundaan. Tetapi kemudian pihak Republik Indonesia mengajukan usul lagi mengenai pengembalian hak milik swasta Belanda. Usul tersebut tampaknya oleh pihak Belanda dipandang menguntungkan, karena itu Komisi Jenderal lalu mengatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan pemerintahnya ¹⁰¹⁾

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan, bahwa pada tanggal 10 Nopember 1946 perundingan sudah dapat dimulai lagi dan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Nopember, hasilnya sudah dapat diumumkan. Hasil tersebut berupa sebuah naskah persetujuan yang terdiri dari 17 pasal. Naskah ini diparaf oleh delegasi dari kedua pihak dan kemudian diserahkan kepada pemerintah masing-masing. ¹⁰²⁾ *

Di antara ketentuan yang terpenting adalah, bahwa:

- 1) Pemerintau Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda akan bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara yang berbentuk federasi dan bernama Negara Indonesia Serikat.

- 2) Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang akan diselenggarakan bersama itu akan bekerja sama dengan Pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda.¹⁰³⁾

Setelah naskah diparaf, timbul berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia; ada yang pro dan ada yang kontra. Sutan Syahrir menyatakan harapannya agar rakyat Indonesia dapat menerima naskah tersebut. Menurut pendapatnya jika kita menerima naskah persetujuan itu, maka 75 juta tenaga rakyat Indonesia akan dapat dipergunakan dengan cara yang lebih rasional. Juga dinyatakan oleh tokoh tersebut, bahwa naskah persetujuan bukan sesuatu yang menentukan hidup mati dan tidak dapat diubah-ubah, tetapi hanya sekedar alat guna mencari jalan baru bagi perjuangan kita di masa yang akan datang.¹⁰⁴⁾

Pada masa itu yang menolak naskah persetujuan adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat dan Partai Rakyat Jelata. Yang mendukung adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik.

Yang tidak menentukan sikap pro atau kontra adalah Dewan Pusat Konggres Pemuda, sebab organisasi ini bersifat federatif, sehingga demi terpeliharanya persatuan di antara organisasi yang menjadi anggotanya dipandang perlu bersikap netral.¹⁰⁵⁾

Kemudian, karena pertentangan antara yang pro dan yang kontra sukar diatasi, dalam bulan Desember 1946 Pemerintah mengambil jalan tengah yaitu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6/1946. Peraturan ini berisi ketentuan yang membebaskan para pejabat negara untuk melakukan tugas sebagai anggota KNIP, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil daerah luar Jawa dan Madura.

Peraturan Presiden Nomor 6/1946 menimbulkan perdebatan yang sengit antara yang pro dan yang kontra. Tetapi akhirnya KNIP menerima peraturan tersebut pada tanggal 28 Pebruari 1947 anggota baru yang berjumlah 232 dilantik. Dengan penambahan suara itu Pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 25 Maret 1947 naskah ditandatangani oleh delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing. Tetapi setelah naskah ditandatangani persengketaan antara Indonesia dan Belanda timbul lagi.¹⁰⁶⁾

4. *Perjanjian Renville*

Pada tanggal 27 Juli 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk suatu komisi yang disebut Komisi Tiga Negara dengan singkatan KTN. Anggota komisi terdiri dari Wakil Australia: Kirby, wakil Belgia: Van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat: Graham. Duduknya wakil Australia di dalam komisi itu atas pilihan Indonesia sedang duduknya wakil Belgia atas pilihan Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota yang ketiga yaitu dari Amerika Serikat.¹⁰⁷⁾

Komisi tersebut mempunyai tugas pokok, yaitu mencari jalan agar perselisihan antara Indonesia dan Belanda dapat diselesaikan secara damai. Dalam tugasnya ini KTN berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengadakan kompromi di antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Dalam kaitan ini Amerika Serikat menawarkan terlaksananya perundingan di suatu tempat yang bebas dari pendudukan Belanda maupun Republik Indonesia. Tempat tersebut adalah sebuah kapal yang bernama Renville. Adapun hasil perundingan ini adalah naskah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.¹⁰⁸⁾

Isi Perjanjian Renville adalah 12 pasal prinsip dasar dan 6 pasal prinsip tambahan. Yang tersebut di muka ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 sedang yang tersebut kemudian ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948.

Apa yang disebutkan dalam 12 pasal prinsip dasar pada hakekatnya sama dengan isi perjanjian Linggarjati, tetapi *de facto* kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera tidak diakui sepenuhnya oleh Belanda. Yang diakui Belanda, kekuasaan Republik Indonesia adalah: di Jawa hanya tinggal $\frac{1}{2}$ dan di Sumatera hanya tinggal $\frac{4}{5}$ bagian saja.¹⁰⁹⁾

Yang menandatangani perjanjian tersebut, dari pihak Indonesia Amir Syarifuddin, sedang dari pihak Belanda Abdul Kadir Wijoyoatmojo.¹¹⁰⁾

Sesudah naskah perjanjian ditandatangani, dalam hal tafsiran tidak ada perbedaan pendapat, tetapi dalam hal pelaksanaannya timbul perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Perselisihan terutama terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembentukan pemerintahan sementara. Hal ini menyebabkan timbulnya ketegangan antara kedua belah pihak, bahkan sebelum PKI meletuskan pemberontakan di Madiun, Belanda telah siap untuk mengadakan penyerbuan ke Yogyakarta. Ketika itu tentara Belanda sudah berada di perbatasan antara daerah kekuasaan Belanda dan daerah kekuasaan Republik. Tetapi ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Belanda menarik tentaranya dari perbatasan. Kemudian terjadi lagi ketegangan politik, tetapi belum cukup memberi alasan bagi Belanda untuk menyerbu Yogyakarta. Dalam situasi yang sedemikian itu Sutan Syahrir memberi saran kepada Pemerintah, agar pemerintahan dipindahkan ke Sumatera. Tetapi karena ketika itu Pemerintah masih menaruh kepercayaan pada KTN, saran tersebut tidak diterima oleh Pemerintah.¹¹¹⁾

5. Pemberontakan PKP 1948

Sesudah Kabinet Amir jatuh, Presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Formaturnya berusaha membentuk kabinet yang mengikutsertakan semua partai untuk menggalang persatuan nasional. Dalam kaitan ini Sayap Kiri mendapat tawaran 3 kursi tanpa portofolio, tetapi

menuntut 4 kursi termasuk jabatan Menteri Pertahanan. Permintaan Sayap Kiri itu tidak dapat dipenuhi dan Hatta lalu membentuk kabinet tanpa Sayap Kiri. Pada tanggal 31 Januari 1948 kabinet baru diumumkan. Dalam kabinet baru ini Hatta adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan.¹¹²⁾

Program Kabinet Hatta adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Persetujuan Renville dan selanjutnya perundingan dengan dasar yang telah dicapai.
- b. Mempercepat dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
- c. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
- d. Pembangunan.¹¹³⁾

Kabinet Hatta didukung oleh Masyumi, PNI, Partai Katholik dan Parkindo.¹¹⁴⁾

Untuk meneruskan perundingan dengan Belanda mengenai pelaksanaan Perjanjian Renville, Kabinet Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi. Perundingan tersebut berkisar di sekitar empat masalah politik, yaitu masalah pemerintahan federal, Uni Indonesia — Belanda, pemerintah peralihan dan sidang Konstituante.¹¹⁵⁾

Ketika perundingan sedang berlangsung, Kabinet Hatta dirongrong oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir Syarifuddin. Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu. Lima hari kemudian terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Organisasi Tani Masyumi yang menentang pemogokan. Peristiwa tersebut menjalar menjadi pembicaraan di dalam sidang KNIP. Tiga mosi telah diajukan, namun tidak ada keputusan yang pasti apakah mengutuk atau mendukung.¹¹⁶⁾

Pada bulan Agustus 1948 Muso tokoh kawakan PKI yang tinggal di Moskwa sejak tahun 1926, tiba kembali di Indonesia. Kedatangan Muso ini membawa garis baru bagi kaum komunis. Pada akhir bulan Agustus 1948 Partai Sosialis, Partai Buruh dan PKI berfusi menjadi satu partai dengan nama PKI. Dalam bi-

dang politik PKI yang baru ini tidak dapat menyetujui perundingan dengan Belanda atau negara lain yang dapat menyebabkan RI menjadi anggota suatu Uni, yang berarti RI menjadi jajahan lagi. Kecuali itu PKI menganjurkan digalangnya persatuan yang kuat antara seluruh rakyat anti imperialis menuju ke arah kemenangan. Dengan kata lain PKI menganjurkan dibentuknya Front Nasional, yang disusun dari bawah dan disokong oleh semua partai, golongan serta perseorangan yang progresif. Mengenai kabinet, PKI berpendapat bahwa hal itu harus segera diubah menjadi kabinet Front Nasional.¹¹⁷⁾

Kebijaksanaan dan strategi perjuangan Pemerintah dikecam oleh Muso. Tokoh komunis itu mengatakan bahwa revolusi yang defensif seperti revolusi Indonesia selama itu akan mengalami kegagalan.¹¹⁸⁾

Sementara itu Kabinet Hatta meskipun mendapat serangan yang tajam dari kaum komunis, tetap melaksanakan programnya yang ketiga, yaitu rasionalisasi angkatan perang. Di depan sidang KNIP tanggal 1 September 1948 Hatta mengatakan bahwa selama 7 bulan beliau mengalami kesukaran psikologis untuk melaksanakan rasionalisasi. Tetapi rasionalisasi harus berjalan terus untuk memberantas inflasi yang membahayakan kehidupan rakyat.¹¹⁹⁾

Dalam pada itu, pada bulan Juni 1948, perundingan antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Belanda mengalami kegagalan. Berdasarkan persetujuan Renville, Anggota Komisi Tiga Negara yakni Critchley (Australia) dan Dubois (Amerika) membuat suatu nota untuk kedua delegasi, cara bagaimana mempercepat pelaksanaan pemilihan untuk menentukan daerah tiap-tiap negara bagian. Belanda menolak merundingkan nota itu dengan alasan bahwa anggota KTN tidak perlu ikut dalam masalah perundingan, apalagi anggota KTN yang ketiga (Belgia) tidak ikut serta. Akibatnya perundingan menjadi terhenti. Selama perundingan terhenti, PKI yang dibangun kembali oleh Muso mengadakan pemberontakan di Madiun, pada tanggal 18

September 1948. Di Madiun mereka mengadakan Sovyet sendiri. Pemberontakan ini tidak sempat meluas ke daerah Yogyakarta sebab sebelumnya di daerah ini telah dilakukan usaha preventif dengan menangkap tokoh-tokoh PKI untuk diamankan di Kentungan. Kebetulan pada bulan September itu pula Badan Pekerja sedang berapat di Yogyakarta. Pada penutupan rapat itu Presiden Soekarno mengadakan suatu pidato radio di mana beliau menganjurkan kepada rakyat untuk memilih sebagai pemimpin Negara Republik Indonesia antara Soekarno — Hatta dan Muso — Amir. Demikianlah akhirnya pemberontakan PKI Madiun, 1948 itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cepat.

6. *Politik Divide et Impera H.J. Van Mook*

Pada tanggal 14 Juli 1946 Sekutu menyerahkan tanggung jawab di daerah keamanan daerah luar Pulau Jawa dan Madura kepada Belanda. Pada tanggal 15–25 Juli 1946 berlangsung konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi dipimpin oleh Van Mook itu memutuskan sebagai berikut:

- a. Negara Indonesia yang akan didirikan harus berbentuk federasi.
- b. Sebelum negara federal terbentuk maka di dalam masa peralihan itu kedaulatan ada di tangan Belanda.
- c. Negara federal itu nanti berhubungan erat dengan Nederland.

Bentuk negara Indonesia yang dikehendaki oleh H.J. Van Mook adalah bentuk federasi. Dalam kehendak H.J. Van Mook itu tersirat maksud yang negatif yaitu agar persatuan di antara rakyat Indonesia tidak tergalang, dan dengan demikian mudah bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Bahwa H.J. Van Mook hendak memecah persatuan rakyat Indonesia dan kemudian menguasai kembali, dapat kita lihat dari butir ke 2. Dengan butir kedua itu Belanda bertujuan menghambat terbentuknya negara Indonesia merdeka agar kekuasaan atas Indonesia tetap di tangannya. Demikian juga dengan perumusan bahwa negara federal nanti harus berhubungan erat dengan Nederland.

menambah kejelasan bahwa Belanda berniat mencengkeram Indonesia untuk selama-lamanya.

Pada tanggal 1 Oktober 1946 Van Mook mengadakan Konferensi Minoritas di Pangkalpinang antara wakil-wakil dari golongan peranakan Cina, golongan peranakan Arab dan golongan Belanda (termasuk golongan Indo Belanda). Konferensi Pangkalpinang itu menyatakan setuju dengan keputusan-keputusan Konferensi Malino. Dalam konferensi itu untuk pertama kalinya disinggung masalah Irian Barat. Ir. Wermuth wakil golongan Indo: Belanda, *Indo Europees Verbond* (IEV) mengajukan saran supaya daerah Irian Barat disediakan bagi orang Indo-Belanda, dalam arti daerah itu tidak dimasukkan ke dalam wilayah Negara Federal Indonesia, tetapi mempunyai ikatan langsung dengan Nederland. Dalam kaitan dengan usul Ir. Wermuth tersebut konferensi tidak mengambil putusan.¹²⁰⁾

Kemudian pada tanggal 7 Desember 1946 di Denpasar Van Mook membuka konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari wilayah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara yang jumlahnya 55 orang ditambah dengan 15 orang wakil golongan minoritas. Berdasarkan keputusan konferensi tersebut maka dengan dekrit Van Mook tanggal 24 Desember 1946 dibentuklah Negara Indonesia Timur. Semua peserta konferensi dinyatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yaitu dewan yang kemudian memilih *Sukawati dari Bali menjadi Presiden*. Dalam *Undang-Undang Dasar NIT* terdapat ketentuan bahwa Presiden membentuk kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada DPR. Presiden Sukawati mengangkat Najamudin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri pertama NIT, tetapi kemudian dipecat karena korupsi.¹²¹⁾

Untuk lebih dapat mengepung Republik Indonesia, pada tanggal 25 Desember 1947 Van Mook mendirikan Negara Sumatera Timur. Dalam negara tersebut kabinet berbentuk presidensial dan Dr. Mansur menjadi wali negara.¹²²⁾

Pada tanggal 20 Pebruari 1948 Van Mook membentuk Nega-

ra Madura dengan sistem kabinet presidensial dan Cakraningrat sebagai kepala negara.

Pada tanggal 24 April 1948 Van Mook membentuk Negara Pasundan dengan sistem kabinet parlementer dan Wiranatakusuma sebagai wali negara.¹²³⁾

Pada tanggal 30 Agustus 1948 dibentuk Negara Sumatera Selatan dengan sistem kabinet presidensial dan Abdul Malik sebagai kepala negara.¹²⁴⁾

Pada tanggal 26 Nopember 1948 dibentuk Negara Jawa Timur dengan sistem kabinet presidensial dan Kusumonegoro sebagai kepala negara.¹²⁵⁾

Kecuali negara-negara boneka berturut-turut dibentuk daerah-daerah otonom (1) Kalimantan Barat, (2) Kalimantan Timur, (3) Dayak Besar, (4) Banjar, (5) Kalimantan Tenggara, (6) Bangka, (7) Belitung, (8) Riau, dan (9) Jawa Tengah.¹²⁶⁾

Sesudah ada Perjanjian Renville maka atas dasar prinsip bahwa sebelum tanggal 1 Januari 1949 di Indonesia harus sudah terbentuk negara serikat atau negara federal, maka Belanda memandang perlu dipersiapkannya pemerintahan prae-federal yang sejenis dengan pemerintahan peralihan. Republik Indonesia menolak rencana Belanda itu, sebab jiwa rencana tersebut tidak nasional tetapi kolonial. Karena RI tidak ikut, maka NIT semula tidak menyetujui pemerintahan semacam itu. Tetapi, setelah RI menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat menyetujui adanya pemerintahan federal (tetapi model yang disodorkan Belanda memang tidak disetujuinya), maka NIT mau juga ikut. Dengan demikian, muncullah di atas panggung sejarah apa yang disebut *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal, yang anggotanya adalah kepala-kepala daerah federal atau negara-negara buatan Belanda. Badan tersebut sebagai perantara mengoper tugas-tugas Hindia Belanda kepada Negara Indonesia Serikat yang akan terbentuk pada tanggal 1 Januari 1949. Yang menjadi ketuanya semula adalah Mr. Tengku Bakrim dari Negara Sumatera Timur tetapi

sejak Januari 1949 diganti oleh Sultan Hamid II.¹²⁷⁾

Dengan terbentuknya negara-negara buatan Belanda, daerah-daerah otonom dan BFO, maka RI yang berpusat di ibukota Yogyakarta seolah-olah terjepit dengan wilayahnya yang makin menyempit. Tetapi bangsa Indonesia yang tetap setia pada jiwa kemerdekaan (jiwa, semangat dan nilai 1945) yang jumlahnya puluhan juta dan tersebar di mana-mana termasuk di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, tetap mempertahankan eksistensi RI. Berkat kesetiaan, semangat dan perjuangan bangsa Indonesia itu, maka RI tetap bertahan, dapat mengatasi tantangan yang timbul satu demi satu, memperoleh dukungan internasional makin lama makin banyak sehingga akhirnya dapat lolos dari kepungan dan mencapai kemenangan terakhir.

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN

1. *Tata Pemerintahan*

Pada tanggal 5 September 1945 daerah kekuasaan Sultan dan Paku Alam di Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah Istimewa. Pemerintahan di Yogyakarta segera disesuaikan dengan Pasal 1 Bab 2 UUD, yaitu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Demokratisering dimulai dari bawah, yaitu dari kelurahan. Dengan dasar Maklumat tanggal 6-12-1945 Nomor 7 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat di Kelurahan di mana setiap seratus orang diwakili oleh seorang anggota. Hak pilih aktif didasarkan atas kewargaan penduduk di daerah bersangkutan.

Kemudian dengan dasar Maklumat tanggal 11-4-1946 Nomor 14 dibentuk Majelis Permusyawaratan Desa (dapat disingkat Majelis Desa), yaitu sebuah badan yang terdiri dari semua penduduk, kepala keluarga (*somah*), warga negara yang berumur 18 tahun ke atas. Kewajiban Majelis Desa yang terpenting adalah:

- a. Mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan yang dibuat oleh Dewan Kelurahan.

- b. Menyelesaikan perselisihan, antara Dewan Kelurahan dengan Pamong Kelurahan.
- c. Mengesahkan putusan Dewan Kelurahan tentang perselisihan tanah.

Sementara itu badan eksekutif Kelurahan atau Pamong Kelurahan juga disempurnakan jalannya dengan Maklumat tanggal 11-4-1946 Nomor 16. Menurut Maklumat tersebut Pamong Kelurahan terdiri dari 6 orang, yaitu:

- a. Lurah Desa
- b. Bagian Sosial (*Kamituwa*, wakil lurah)
- c. Bagian Kemakmuran (*Ulu-ulu*)
- d. Bagian Keamanan (*Jagabaya*)
- e. Bagian Agama (*Kaum*)
- f. Bagian Administrasi (*Carik Desa*).

Selanjutnya dalam Maklumat tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tiap kelurahan harus mencukupi kebutuhannya sendiri (7 : 1), dan jika ada kelurahan tak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri harus digabungkan dengan kelurahan lain (7 : 2).

Dari kenyataan tersebut kita memperoleh kesan adanya hasrat untuk membentuk kelurahan yang otonom. Tetapi kenyataannya masih terdapat banyak hambatan bagi pelaksanaan hasrat tersebut.

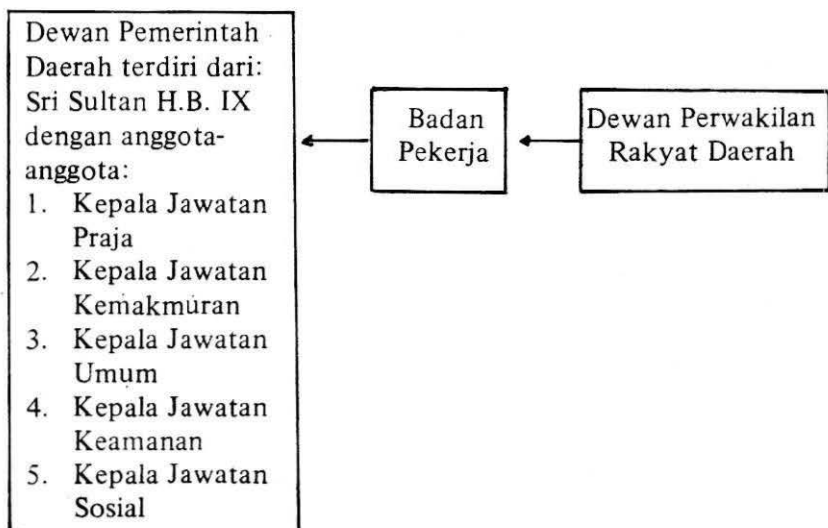
Pada tanggal 13 Mei 1946 ke luar sebuah maklumat, yaitu Maklumat Nomor 18, di mana seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta didemokratiskan sesuai dengan kehendak rakyat, artinya:

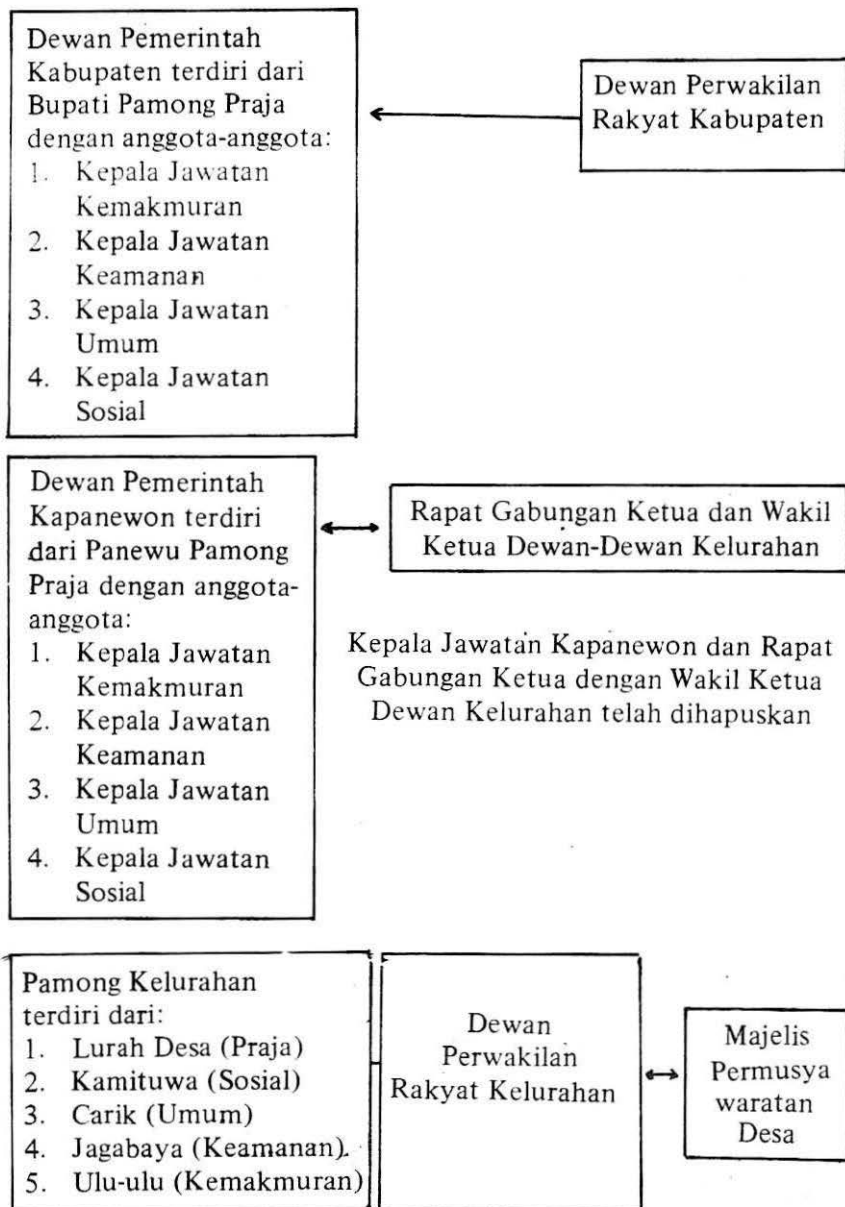
- a. Di tingkat daerah dibentuk Dewan Perwakilan Daerah
- b. Di kota (Yogyakarta) dibentuk Dewan Perwakilan Kota
- c. Di tingkat Kabupaten dibentuk Dewan Perwakilan Kabupaten
- d. Di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan Perwakilan Kelurahan.

Sesudah dewan perwakilan terbentuk, maka dari dan oleh

dewan tersebut dibentuk dewan pemerintah atau badan eksekutif yang terdiri dari beberapa anggota, yang bersama-sama dengan dan diketuai oleh kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sementara itu dirasakan para pegawai pamong praja yang menjalankan pekerjaannya secara teknis menjadi terdesak, sebab garis yang membedakan kebijaksanaan politik dan pelaksanaan teknis tidak jelas.

Akibatnya jalannya pemerintahan menjadi kurang lancar, bahkan sering terjadi tindakan saling mendaulat. Tetapi untunglah rasa curiga mencurigai itu sedikit demi sedikit berkurang dan suasana saling menghargai mulai tumbuh. Apalagi sesudah ada bahaya dari luar yang mengancam, yaitu aksi militer Belanda yang pertama pada bulan Juli 1947, maka mulai tampak fungsi para pegawai pamong praja sebagai alat Pemerintah untuk mengatasi kesukaran dan penderitaan rakyat. Karena pelaksanaan Maklumat Nomor 18 tersebut di atas, susunan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:¹²⁸⁾





2. *Sosial Ekonomi*

Sebagai akibat Perang Dunia II hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami kemerosotan dalam bidang perekonomian. Tetapi, berbeda dengan kebanyakan negara lain yang sesudah perang selesai dapat membangun ekonominya yang rusak, Indonesia tidak dapat berbuat demikian, sebab bangsa Indonesia masih harus melaksanakan perjuangan kemerdekaan.

Sebagaimana kita ketahui, setiap revolusi, termasuk revolusi yang dilaksanakan bangsa Indonesia, mempunyai dua sifat, yaitu merusak dan membangun. Yang dirusak adalah segala sistem yang bersifat penjajahan, termasuk sistem sosial ekonomi. Kemudian di atas reruntuhan kerusakan ialah bangsa yang sedang berevolusi, jadi termasuk bangsa kita, membangun segala sistem yang baru atas dasar kemerdekaan nasional.

Sebagai konsekuensi sifat merusak yang pasti terdapat dalam setiap revolusi itu, maka demi tercapainya kemerdekaan, bangsa kita terpaksa merusak beberapa obyek perekonomian dan bangunan yang mungkin dapat jatuh ke tangan musuh. Tetapi untunglah tindakan yang bersifat merusak itu pada awal masa revolusi belum pernah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab pada waktu itu daerah tersebut belum didatangi oleh musuh, yaitu tentara Belanda. Malahan sesudah Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia, segala kekayaan yang berada di bawah kekuasaan negara dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dijadikan modal untuk meneruskan perjuangan.

Pada awal masa kemerdekaan, di Daerah Istimewa Yogyakarta bahan keperluan hidup dari tekstil sampai pada beras, gula, garam dan sebagainya masih disimpan di gudang-gudang dan pabrik-pabrik yang dikuasai Jepang. Setelah dapat kita rebut, lalu dikumpulkan oleh Komite Nasional Daerah dan cabang-cabangnya. Selanjutnya barang tersebut sedikit demi sedikit dibagikan kepada rakyat melalui saluran kantor dan

organisasi. Tindakan dapat menyebabkan roda ekonomi mulai bergerak. Sementara itu distribusi bahan keperluan hidup rakyat yang biasanya disalurkan melalui organisasi rukun kampung dan kelurahan berjalan terus seperti pada jaman penjajahan Jepang.

Pada tahun 1946 Republik Indonesia yang sudah beribukotakan Yogyakarta mengeluarkan uang kertas yang disebut ORI, singkatan dari *Oeang Repoebliek Indonesia*. Tepatnya uang tersebut mulai berlaku pada tanggal 29 pukul 24.00, menjelang tanggal 30 Nopember 1946. Sejak berlakunya uang ORI harga barang cukup wajar, misalnya harga beras 15 sen satu kg, kelapa 3 @ 4 sen sebuah. Tetapi sayang harga yang murah itu tidak berlangsung lama, dan sedikit demi sedikit meningkat, sebab persediaan barang makin menipis dan pemasukan barang dari luar tidak ada sebagai akibat blokade Belanda.

Ketika perjuangan bersenjata makin hebat, blokade ekonomi Belanda juga makin ketat, sehingga hubungan ekonomi antara RI dengan dunia luar terputus. Pada gilirannya menimbulkan penderitaan rakyat, dan perdagangan gelap makin merajalela.

Pembangunan ekonomi mengalami kesukaran, sebab bahan baku yang diperlukan sangat langka. Tetapi di Yogyakarta kesukaran itu dapat diatasi dengan bahan-bahan yang diproduksi di daerah sendiri, misalnya bahan tekstil, bahan sofa wenter, paku, semen dan bahan yang lain.

Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Yogyakarta mengalami krisis yang hebat. Sebab, Yogyakarta memang daerah minus, penduduknya sangat padat sebagai akibat datangnya banyak pengungsi dan menjadi ibukota RI, musim paceklik sedang melanda, dan tambahan lagi terjadi perang akibat pemberontakan PKI. Pada masa itu sampai berbulan-bulan banyak orang tidak merasakan nasi sebagai bahan makanan yang pokok. Yang dimakan mereka adalah *gogik, tiwul, gaplek, atau jagung*. Tetapi, untunglah kesadaran rakyat cukup tinggi, sehingga

mereka tetap dapat bertahan meskipun ditimpa oleh penderitaan.

Penderitaan yang lebih hebat menimpa rakyat pada waktu Yogyakarta diduduki musuh sejak tanggal 19 Desember 1948. Ketika Belanda menyerbu, rakyat Yogyakarta banyak yang mengungsi, terutama ke daerah Selatan, yaitu ke Bantul, Imogiri, Kretek, Wonosari, Kulon Progo dan daerah-daerah pegunungan. Celakanya, mereka tidak membawa bekal yang cukup apalagi mereka yang pada dasarnya memang tidak mampu.

Beberapa hari sesudah kota Yogyakarta diserbu tentara Belanda, di jalan-jalan besar tidak tampak orang lewat. Hanya tentara Belanda yang tampak berpatroli atau mengadakan penjagaan di persimpangan jalan. Sebulan sesudah penyerbuan, Belanda mulai melakukan siasat menarik rakyat dari pengungsian. Belanda menyebarkan pamflet berisi janji yang manis dan pernyataan bahwa kedatangan tentara kerajaan ke sini untuk memberi ketenangan dan kemakmuran dan tidak akan mengganggu penduduk dalam mencari kehidupan sehari-hari. Siasat yang licin itu disertai dengan infiltrasi mata-mata Belanda yang menyelundup ke desa-desa dan menyebarkan kampanye, bahwa masuk kota adalah aman, tidak akan mendapat gangguan dari pihak Belanda. Ternyata Belanda berhasil dalam usahanya. Penduduk kota yang sudah sekian lama mengungsi dan kehabisan bekalnya, ditambah kerinduan kepada kampung halamannya, mula-mula sedikit demi sedikit, kemudian berbondong-bondong memasuki kota. Dengan demikian kota Yogyakarta yang tadinya sangat sunyi menjadi agak ramai kembali.

Beberapa hari dalam pengungsian, para pengungsi mendapat bantuan berupa makanan dan pemondokan dari penduduk desa melalui lurah masing-masing. Sedangkan pengungsi yang bertubuh kuat dan bersemangat menggabungkan diri ke dalam badan-badan perjuangan. Sementara itu, para pengungsi yang merasa tidak mampu berjuang, berusaha mencari makan sedapat-dapatnya. Pada masa itu pasar besar maupun pasar kecil di luar kota, misalnya pasar Srandakan, Turi, Kretek, Pundong,

Imogiri, Pakem, Kulom Progo, Wonosari sampai yang ada di gunung-gunung penuh dengan orang yang berjualan. Yang diperjualbelikan dalam pasar-pasar itu pada umumnya adalah: makanan (termasuk bahan makan), tembakau, klembak, rokok, barang rumah tangga, pakaian (termasuk pula) pakaian bekas dan sebagainya.

Keadaan penduduk di dalam kota, seminggu sesudah Belanda datang, lebih sengsara daripada mereka yang mengungsi, sebab persediaan bahan makan amat sedikit dan segera habis. Ketika itu mereka tidak berani ke luar kota, sebab Belanda bersikap keras sekali.

Beberapa waktu kemudian, Belanda lalu membuka kantor sosial. Kantor ini dengan cara teratur dan pada waktu yang sudah ditentukan membagikan bahan makan kepada penduduk, misalnya nasi, kentang, roti, dan kadang-kadang juga daging. Kantor tersebut juga membagikan bahan pakaian, sehingga orang-orang yang biasanya terlantar pun mendapat pakaian yang cukup bagus. Langkah Belanda yang demikian itu sudah tentu bukan tanpa maksud apa-apa, tetapi agar rakyat terpicat, dan di samping itu untuk mencari orang yang mau dijadikan mata-mata.

Setelah beberapa bulan dalam pendudukan Belanda keadaan kota Yogyakarta sudah agak ramai kembali, sebab para pengungsi sudah banyak yang pulang ke tempat masing-masing. Perusahaan tahu, tempe, kecap, teh, rokok, dan sebagainya sudah mulai bekerja kembali. Demikian pula perusahaan batik, wenter, perak dan sebagainya sudah berjalan lagi. Hal ini berarti, meskipun pertempuran selalu terjadi, baik pada waktu siang atau malam, tetapi ekonomi rakyat tidak pernah berhenti.

Pada masa itu mengalir terus bahan makanan seperti ketela, gaplek, jagung, buah dan sebagainya. Pasar-pasar, kecuali pasar besar Beringharjo, penuh dengan orang yang berjualan. Di antara barang dagangan yang dijual di pasar, terdapat pula buku loakan dan barang pecah belah.

Adapun alat pembayaran yang terpakai pada masa itu adalah uang federal dan uang ORI. Di daerah pendudukan yang berlaku terutama adalah uang federal, sedang di luar kota yang berlaku terutama adalah uang ORI.^{1,29)}

3. Pendidikan

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebuah jawatan, bernama *Paniradya Wiyata Praja*, yang berkewajiban mengurus:

- a. Taman Kanak-kanak
- b. Sekolah Rakyat dengan masa belajar 3 tahun (SR III)
- c. Sekolah Rakyat dengan masa belajar 5 tahun (SR V)
- d. Sekolah Rakyat dengan masa belajar 6 tahun (SR VI)
- e. Sekolah Lanjutan Umum
- f. Sekolah Lanjutan Vak (Kejuruan).

Di samping itu jawatan tersebut mengusahakan dan mengurus juga:

- a. Pemberantasan Buta Huruf atau *Pambrasta Wuta Sastra* (PWS).
- b. *Noroyuwono*, yaitu sebuah badan yang bertugas memberi pendidikan kepada para pemuda.
- c. Pemberian subsidi kepada sekolah partikelir (swasta).
- d. Kesejahteraan para pegawai.

Agar pekerjaan Paniradya Wiyata Praja berjalan lancar dan sempurna, maka dibentuk suatu Panitia Perencana, terdiri dari para pegawai dan para guru dalam lingkungan Wiyata Praja, yang dibagi menjadi:

- a. Seksi pindah memindah guru
- b. Seksi peraturan gaji
- c. Seksi pembentukan kursus-kursus guru
- d. Seksi kewajiban belajar
- e. Seksi reorganisasi SR.

Sesudah tahun 1946 terjadi perkembangan sebagai berikut:

- a. Semua SR V dijadikan SR VI, semua SR III dijadikan SR IV

dan beberapa SR VI dijadikan SR VII serta SR VIII (kelas VII–VIII dinamakan kelas masyarakat dan digabungkan pada induk SR VI).

- b. Diadakan kursus guru SR III untuk menutup kekurangan guru.
- c. Untuk menampung murid-murid yang sudah tamat SR VI dan ingin melanjutkan pelajaran dibukalah SMP III di kota Yogyakarta dan SMP di Wates. Kecuali itu diusahakan dibukanya SMP di kabupaten-kabupaten meskipun untuk sementara berstatus swasta.
- d. Untuk menampung lulusan SMP dibukalah SMA II.
- e. Untuk menampung lulusan SMA diusahakan berdirinya Perguruan Tinggi, yang semula berstatus swasta, dengan bantuan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah: Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada.”

Dalam pada itu, karena pindahnya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta, begitu juga karena adanya Aksi Militer Belanda I, maka terjadi perubahan besar dalam bidang pendidikan. Kecuali ada perluasan SR dan SM, berdirilah SR–SR darurat guna menampung anak-anak pengungsi.

Selanjutnya karena adanya keputusan Kementerian PP dan K mengenai SR menjadi SR VI dan SR III, maka dalam tahun 1947 Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan reorganisasi sebagai berikut:

- a. Mengubah SR IV menjadi SR III dengan jalan memindahkan kelas IV-nya ke SR VI yang berdekatan.
- b. Mengubah SR IV yang besar atau kuat menjadi SR VI.
- c. Menggabungkan SR IV dan SR VI yang bersifat sekolah sambungan menjadi SR VI yang lengkap (mempunyai kelas I sampai dengan kelas VI).

Sejalan dengan langkah seperti yang sudah diuraikan di atas, aparat inspeksi diatur kembali dan diperluas. Kecuali Kantor Inspeksi Kabupaten terdapat Kantor Inspeksi Daerah.

Agar kekurangan guru dapat diatasi di tiap Kabupaten dibuka sebuah SGO beserta asramanya. Penyelenggaraan SGO yang bermasa belajar 2 tahun ini termasuk dalam wewenang Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat, sejak tanggal 1 Januari 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengurus Sekolah Rakyat saja.

Demikian pula sesuai dengan rencana Kementerian PP dan K, Daerah Istimewa Yogyakarta mengusahakan pendidikan di luar sekolah yang disebut Pendidikan Masyarakat. Pendidikan ini mengarah kedua hal yaitu Pemberantasan Buta Huruf dan pengadaan kursus pengetahuan umum (KPU) tingkat A, B dan C.

Pengadaan kursus itu disusul dengan usaha mempergiat pendidikan jasmani di SR dengan mengadakan inspeksinya yang disebut Inspeksi Pendidikan Djasmani (IPD). Mula-mula inspeksi itu hanya terdapat di pusat daerah, kemudian juga di kabupaten.

Ketika Yogyakarta diduduki musuh, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memerintahkan agar sekolah tutup; tetapi Belanda berusaha membukanya itu kembali dengan tenaga guru yang bersedia bekerja pada Belanda. Berdirinya sekolah-sekolah tersebut diikuti pula oleh berdirinya sekolah swasta yang menerima bantuan dari pemerintah pendudukan Belanda.¹³⁰⁾

4. Ilmu Pengetahuan

Pada tanggal 24 Januari 1946 di gedung SMT Kotabaru Yogyakarta berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh para cerdik pandai untuk membicarakan pembukaan Balai Perguruan Tinggi (Universitas) swasta di Yogyakarta. Pertemuan ini dipromotori oleh Mr. Budiarjo, Ir. Marsito, Dr. Priyono dan Mr. Sunario.

Kemudian terbentuk panitia yang beranggotakan 32 orang dengan Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua dan Mr. Sunario sebagai penulis.

Sesudah itu berdiri Yayasan yang bertugas mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dengan Mr. Budiarto sebagai Ketua Dr. Sukiman sebagai wakil ketua. Dr. Buntaran sebagai penulis dan Dr. Suharto sebagai Bendahara, sedang BPH Bintoro. H. Farid Ma'ruf, Mr. Mangunyudo, KRT Notoyudo, KPH Nototaruno dan Prof. Ir. Rooseno sebagai anggota.

Demikian pula Dewan Kurator lalu dibentuk dengan Sri Sultan sebagai ketua dan Ki Hajar Dewantara sebagai wakil ketua.

Sesudah semua persiapan selesai, pada tanggal 3 Maret 1946 di gedung KNI di Malioboro Yogyakarta diadakan pertemuan resmi untuk mengumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada (Swasta) dengan dua Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastaan. Dalam perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 19 Desember 1949 Pemerintah mendirikan Universitas Negeri Gajah Mada dengan Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan.¹³¹⁾

Kecuali pertumbuhan Perguruan Tinggi, perlu pula kita utamakan penyelenggaraan perpustakaan, sebab perpustakaan adalah kumpulan berbagai buku tempat kita memperoleh informasi keilmuan.

Yogyakarta termasuk daerah yang beruntung, sebab di daerah ini terdapat Perpustakaan Negara, Perpustakaan *Hatta Foundation*, Perpustakaan Sono Budoyo, Perpustakaan Islam dan Perpustakaan Universitas (Gajah Mada, PTAIN). Di samping itu terdapat pula berbagai perpustakaan fakultas dan perpustakaan kecil, misalnya Perpustakaan Yayasan Pancasila, Perpustakaan Lembaga Pers dan Pendapat Umum dan Perpustakaan Jawatan Penerangan.¹³²⁾

5. *Pers*

Dalam pembicaraan mengenai pers di sini hanya diuraikan secara singkat riwayat pertumbuhan RRI Yogyakarta. Dengan berhasilnya perebutan senjata dari tangan tentara Jepang, maka seluruh Yogyakarta jatuh ke tangan bangsa Indonesia dan semua tentara Jepang ditahan di penjara Wirogunan. Tak lama sesudah peristiwa perebutan senjata tersebut, KNI memberi instruksi agar Radio Yogyakarta segera mengadakan siaran lagi yang segera dapat dilaksanakan dengan baik.

RRI Yogyakarta selalu meningkatkan siarannya dan sering menyiarkan pidato Bung Tomo dan Bung Tarjo yang menyebarkan dan mempertebal semangat sehingga pihak Sekutu mencari-cari alasan untuk menuduh RRI Yogya sebagai penghasut dan sarang ekstremis. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 1945 pagi-pagi jam 08.15 RRI Yogyakarta dijatuhi bom berulang-ulang oleh pesawat musuh.

Pengeboman tersebut tidak melemahkan semangat para pegawai RRI. Pada malam harinya mereka mengadaksiaran lagi. Kemudian karena merasa jengkel, pada tanggal 27 Oktober 1945 musuh menjatuhkan bom lagi di atas gedung RRI Yogyakarta. Pengeboman yang kedua ini lebih dahsyat dan berlangsung lebih lama sehingga kerusakan yang diderita oleh RRI Yogyakarta juga lebih parah. Meskipun demikian, para pegawai tidak patah semangat. Mereka segera menyelamatkan alat-alat yang masih dapat dipakai dan disingkirkan ke tempat lain, di antaranya ke Puro Paku Alaman, ke asrama CPM Gondolayu, ke rumah pemancar Terban Taman, dan Patangpuluhan serta disimpan di rumah Ngadinegaran. Di situ terdaat pemancar besar dengan kekuatan $3\frac{1}{2}$ KW yang dapat dipakai untuk siaran luar negeri.

Setelah suasana reda kembali, siaran dilakukan lagi dengan studio darurat di rumah pemancar Terban Taman 35 Sementara itu para pegawai mencari rumah yang sekiranya dapat dipakai sebagai studio dan sekaligus kantor. Berkat kerjasama dengan

pihak ketentaraan, akhirnya RRI Yogyakarta mendapat pinjaman rumah yang dapat dipakai sebagai studio dan kantor, yaitu rumah bernomor 6, 8 dan 10 di Jalan Secodiningratan. Rumah No. 6 dipakai sebagai kantor, rumah No. 8 dipakai sebagai tempat studio siaran, kamar *omroep* beserta kamar operator, sedang rumah No. 10 dipakai sebagai *mess* bagi para pegawai yang membutuhkan tempat tinggal dan kemudian juga untuk melaksanakan siaran luar negeri.

Sesudah konggres di Solo, di Purwokerto dan di Malang yang ketiga berlangsung pada tahun 1946, RRI makin mantap cara bekerjanya.

Mula-mula pusat penyiaran berada di Solo, tetapi untuk memudahkan hubungannya dengan Pemerintah, siaran-siaran ke dalam dan ke luar negeri dipusatkan di Yogyakarta. Ketika itu kekuatan pemancar RRI Yogyakarta untuk siaran dalam negeri hanya $\frac{1}{4}$ KW sedang untuk siaran luar negeri hanya $3\frac{1}{2}$ KW, tetapi tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk lebih melancarkan pekerjaan sehari-hari, Pusat RRI yang berkedudukan di Solo membuka Cabang di Yogyakarta yang terdiri dari Bagian Siaran dan Bagian Teknik. Bagian Siaran berkedudukan di Secondiningratan, sedang Bagian Teknik berkedudukan di Reksobayan 8.

Pada awal bulan Oktober 1948 RRI mengadakan reorganisasi. RRI Yogyakarta dipersatukan dengan Pusat Cabang Yogyakarta, sehingga siaran dalam dan luar negeri menjadi satu. Tetapi sayang, pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta sudah diserbu tentara Belanda.

Karena serbuan tersebut, RRI Yogyakarta jatuh ke tangan tentara Belanda. Sementara itu para pegawai masih berusaha mempertahankan RRI sebagai jawatan RI. Para pegawai itu segera ke Playen, di daerah Wonosari, untuk melanjutkan tugas mereka dengan mempergunakan sebuah pemancar lengkap dengan alat-alat radio dan agregat, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Tetapi Playen itu pun akhirnya men-

dapat serbuan dari pihak Belanda. Alat-alat yang dimiliki RRI Yogyakarta, kecuali pemancar, dapat dirampas atau dirusak oleh tentara Belanda. Sejak peristiwa tersebut, agar dapat melanjutkan tugas yaitu berjuang mempertahankan kemerdekaan, para pegawai RRI Yogyakarta menggabungkan diri ke dalam instansi militer, polisi dan pamong praja.¹³³⁾

6. *Kepemudaan*

Pada tanggal 9 – 11 November 1945 berlangsung Konggres Pemuda di Yogyakarta. Konggres ini dimaksudkan untuk menyatukan perjuangan para pemuda. Ketika itu para pemuda sudah memahami, bahwa tanpa persatuan perjuangan tidak akan dapat berjalan dan musuh akan dengan mudah menjajah bangsa Indonesia kembali.

Hadir dalam konggres tersebut adalah wakil-wakil dari organisasi pemuda. Jumlah wakil organisasi pemuda yang hadir pada waktu itu tidak kurang dari 400 orang, antara lain dari Sumatera 166 orang, dari Maluku 25 orang, dari Nusa Tenggara 18 orang, dari Kalimantan 11 orang, dan dari Sulawesi 9 orang.

Pada waktu pembukaan para pembesar yang hadir adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri PPU.

Salah satu keputusan yang diambil oleh konggres tersebut mengatakan bahwa konggres menghendaki terbentuknya badan federasi yang disebut *Badan Konggres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI)*.¹³⁴⁾

Pada tanggal 8 – 9 Juni 1946 berlangsung lagi Konggres Pemuda di Yogyakarta. Konggres ini mendapat perhatian besar dari Presiden, Menteri Pertahanan dan Menteri Pemuda. Keputusan dan resolusi yang diambil oleh konggres tersebut meliputi politik dan organisasi. Terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet pada waktu itu konggres tidak mengambil sikap yang tegas, tetapi berbagai keputusan yang diambil memberi kesan bahwa konggres merasa tidak puas terhadap politik Ka-

binet, khususnya politik Kabinet dalam menghadapi Belanda.

Kongres tersebut mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar bertindak tegas terhadap Belanda sesuai dengan tindakan Belanda terhadap kita. Sebagai penutup kongres, pada tanggal 9 Juni 1946 dilangsungkan rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta.¹³⁵⁾

7. *Kewanitaan*

Pada tanggal 26 Februari 1946 berdirilah di Yogyakarta sebuah organisasi yang bernama Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI) di bawah pimpinan Ny. Sri Mangunsarkoro. Tujuan organisasi tersebut membantu Pemerintah, memuaskan tenaga wanita dan menegakkan kemerdekaan RI.

Anggota PTPWI adalah badan-badan yang bersifat ketentaraan, misalnya Laskar Wanita Indonesia Bandung; badan-badan yang bersifat keagamaan, misalnya Muslimat Yogyakarta; badan yang bersifat perburuhan, yaitu Barisan Buruh Wanita Indonesia; badan-badan yang bersifat sosial, misalnya Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) Yogyakarta.¹³⁶⁾

Dalam bulan September 1946 dalam Kementerian Pertahanan dibentuk Biro Perjuangan sebagai suatu wadah bagi badan-badan kelaskaran dan badan-badan perjuangan. Dalam biro tersebut dibentuk inspektorat-inspektorat. Di Yogyakarta dibentuk Inspektorat Wanita di bawah pimpinan Nn. Supiyah. Adapun tugas Inspektorat Wanita antara lain adalah :

- a) Membantu memperhatikan kesejahteraan prajurit di garis depan dan mengurus makanan, obat, pakaian dan bingkisan untuk garis depan yang berasal dari organisasi-organisasi.
- b) Membantu menginterogasi tahanan-tahanan wanita yang dicurigai sebagai mata-mata.¹³⁷⁾

Pada tahun 1946, dalam sebuah gedung yang beralamat Bintaran Tengah No. 3 Yogyakarta, dibentuk sebuah organisasi, bernama Wanita Pembantu Perjuangan (WPP). Organisasi

ini bertujuan menyiapkan tenaga wanita muda untuk membantu perjuangan kemerdekaan di garis depan dan di garis belakang. Para anggotanya terdiri dari para siswa SD, SMP dan SMA.

Pimpinan WPP adalah :

K e t u a : Dr. Sulianti
Sekretaris : Ny. Puji Armyn Pane
Pembantu : Ny. Gusti Mayor
S t a f : Ny. Ali Sastroamijoyo (Bendahara) Ny. Joko Asmo (Usaha), Ny. Y Khairul Saleh (Kmandan Latihan), Ny. Puji Armyn Pane (Wakil Kmandan) .

WPP mengadakan latihan secara teratur, meliputi ilmu kemiliteran, PPPK, memasak, pemberantasan buta huruf, sejarah Indonesia, tata negara dan kesadaran nasional, budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mereka yang sudah mendapat latihan ditugaskan di garis depan untuk bekerja di Palang Merah dan Dapur Umum serta melakukan pemberantasan buta huruf. Sebagai contoh mengenai pemberantasan buta huruf ini, ialah yang dilakukan di daerah Mranggen, Mojokerto, Bekasi, dan Karawang. Selama bertugas para petugas WPP itu diawasi oleh Biro Perjuangan.

Setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, para anggota WPP menggabungkan diri pada Biro Perjuangan di luar Yogyakarta.¹³⁸⁾

Yang sudah diuraikan di atas itu adalah organisasi wanita yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebenarnya sesudah tercapai kemerdekaan di Yogyakarta lahir pula organisasi wanita yang bergerak dalam bidang sosial politik, misalnya :

- a. PERWANI di bawah pimpinan N.D.M. Hadiprabowo dan Ny. D.D. Sutanto.
- b. Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di bawah pimpinan Nn. Astuti. Dalam proses perkembangannya menjadi Pemuda

Putri Indonesia.

- c. Persatuan Pegawai Putri Indonesia (PPPI) dipimpin oleh Nn. Widayati Sugarda.

Tiga buah organisasi wanita itu bertujuan membantu perjuangan.

PPPI kemudian menggabungkan diri dengan Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan namanya berubah menjadi Barisan Buruh Wanita (BBW). Ternyata BBW ini berkembang dengan cepat, sehingga dalam waktu yang singkat saja sudah mempunyai 17 buah cabang. Organisasi ini dalam bidang perjuangan buruh merupakan tempat persemaian kader-kader buruh wanita dan berafiliasi pada BBI/PBI (Partai Buruh Indonesia).¹⁴⁰⁾

BAB V
KEADAAN DI DAERAH DIY MENJELANG
AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN
(REVOLUSI FISIK)

A. SITUASI MENJELANG PERSETUJUAN KMB

Pada tanggal 23 Agustus 1949 bertempat di *Ridderzaal*, Den Haag, Negeri Belanda, dibuka persidangan Konperensi Meja Bundar. Hadir dalam Konperensi tersebut kecuali Delegasi-delegasi dari Republik Indonesia, Belanda, dan BFO juga dari KPBBI (Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia).

Di dalam KMB ini dibahas berbagai persoalan yang harus dihadapi negara yang bersangkutan. Lain dari itu KMB ini hendak dijadikan penyelesaian terakhir pertikaian politik dengan negeri Belanda sejak persetujuan Linggajati dan persetujuan Renville yang belum mendapat penyelesaian secara baik.

Acara pokok KMB adalah pengakuan kedaulatan bagi Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda secara sungguh-sungguh, penuh dan tidak bersyarat. KMB merupakan proses dari persetujuan-persetujuan sebelumnya. Untuk mengetahui persiapan dan situasi menjelang persidangan KMB, di Indonesia umumnya, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, dapat dituturkan sebagai berikut :

Menurut laporan Jenderal Mayor T.B. Simatupang tentang persiapan menghadapi Perundingan KMB berdasarkan perjalanan kelilingnya selama empat puluh hari di daerah Yogyakarta dan Surakarta, dapat disimpulkan bahwa :

1. Front rakyat dan tentara umumnya baik.
2. Keuangandan peluru merupakan soal yang sulit.
3. Penerangan ke dalam masih perlu diperbaiki.
4. Harus diusahakan supaya perundingan yang akan datang jangan sampai melahirkan perpecahan, baik di antara para pemimpin di Bangka, Jakarta dan di Yogyakarta maupun di kalangan masyarakat.

Karena perundingan secara pasti akan dimulai, maka pada tanggal 23 Maret 1949 Dewan Keamanan memberikan tugas kepada Komisi PBB untuk Indonesia guna mengambil inisiatif dalam mengadakan konperensi pendahuluan antara Republik dan Belanda mengenai tiga hal, yakni :

1. Pengembalian Pemerintah Republik ke Yogyakarta
2. Penghentian permusuhan, dan
3. Kemungkinan diadakannya Konperensi Meja Bundar.

Persoalan yang dihadapi berhubungan dengan rencana perundingan ini tidak mudah. Berbagai hal yang menimbulkan kesulitan, menuju persidangan itu menurut pengamatan Jenderal Mayor T.B. Simatupang antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Republik Indonesia resminya memegang kekuasaan pemerinthan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pemimpin-pemimpin kita di Bangka resminya adalah tawanan Belanda.
3. Dewan Keamanan dan Komisi PBB untuk Indonesia jelas hendak berunding dengan pemimpin-pemimpin kita yang berada di Bangka dan Jakarta dan tidak ada tanda-tanda bahwa Komis itu akan mencari kontak dengan PDRI.
4. Pemimpin-pemimpin kita di Bangka dan Jakarta nampaknya tidak akan menolak untuk berunding dengan Belanda

dengan bantuan Komisi PBB untuk Indonesia.

5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak dapat meninggalkan pemimpin-pemimpin kita di Bangka, dan Jakarta dengan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak berhak untuk berbicara atas nama Republik. Pernyataan seperti itu akan merugikan kedudukan kita keluar dan dapat menimbulkan perpecahan ke dalam.
6. Apabila pemimpin-pemimpin kita yang berada di Bangka dan Jakarta mencapai persetujuan dengan Belanda dan Komisi PBB untuk Indonesia, maka akan lebih sulit lagi nanti bagi PDRI untuk meninggalkan mereka, sebaliknya apabila hasil-hasil yang dicapainya itu nanti tidak cukup memuaskan bagi kita, maka dapat pula timbul perpecahan antara yang pro dan kontra.¹⁾

Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini yang paling baik menurut Jenderal Mayor T.B. Simatupang adalah mempertemukan antara Presiden dan Wakil Presiden dan pemimpin-pemimpin yang berada di Bangka – Jakarta pada satu pihak dan PDRI bersama-sama dengan KPPD serta Pimpinan Angkatan Perang pada pihak lain sebelum perundingan dimulai.²⁾ Tetapi untuk mengadakan pertemuan ini harus diperoleh bantuan Belanda, sebab pemimpin-pemimpin di Bangka dan Jakarta tidak akan dapat bertemu dengan PDRI, KPPD dan Pimpinan Angkatan Perang tanpa izin dan bantuan Belanda dan izin serta bantuan itu jelas tidak akan mereka berikan.

PDRI dan Pimpinan Angkatan Perang tentu dapat juga mengirimkan wakil-wakilnya ke Jakarta, tetapi untuk itu pun harus diperoleh izin Belanda yang masih berkuasa di Jakarta. Hal ini secara psikologis sulit untuk diberikan izin karena PDRI dan Angkatan Perang yang sedang memimpin perang rakyat melawan Belanda untuk bertemu dengan orang-orang yang ada dalam tawanan Belanda guna berunding menghadapi Belanda.

Maka satu-satunya jalan ialah dengan mengirim surat melalui kurir kepada pemimpin-pemimpin kita yang berada di Ja-

karta dan Bangka. Kesempatan untuk itu ada, sebab Menteri Ir. Djuanda yang berada di Yogyakarta telah beberapa kali pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang Komisi PBB untuk Indonesia dalam hubungan persiapan untuk mengadakan perundingan. Demikian pula Sri Sultan, selaku acting Perdana Menteri di Jawa (Wakil P.M. Mr. Sjafrudin berada di Sumatra) sibuk, dan juga selaku Menteri Pertahanan berkeliling meninjau daerah-daerah dan untuk melaksanakan *cease fire* yang tidak mudah itu. Penarikan tentara Belanda dari daerah-daerah masih sukar dilaksanakan. Untuk kurir ke Yogyakarta dengan mudah dapat menyampaikan surat kepada Sri Sultan atau kepada Menteri Djuanda dan beliau-beliau itu dapat menyampaikan surat-surat itu kepada pemimpin-pemimpin yang berada di Jakarta dan Bangka.

Selain itu maka penerangan di kalangan barisan perang rakyat dalam menghadapi perundingan yang akan datang sangat perlu juga. Selama itu penerangan baru khusus bertujuan untuk membakar semangat perjuangan melawan Belanda. Sedang perundingan tentu akan menciptakan keadaan baru. Perlu dijelaskan pula kepada para pemimpin yang berada di Jakarta maupun Bangka, agar jangan sampai terjadi hasil perundingan yang mengejutkan dan menimbulkan kemarahan.

Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang T.B. Simatupang merasa berkewajiban untuk mengirim surat kepada para pimpinan di Jakarta dan Bangka lewat kurir Menteri Djuanda di Yogyakarta agar dapat mengambil sikap yang tidak jauh bedanya dengan alam pikiran dan alam perasaan yang terdapat di kalangan barisan perang rakyat.

Di pihak lain pula T.B. Simatupang merasa berkewajiban harus memberikan penerangan di kalangan barisan perang rakyat sendiri mengenai motif dan tujuan dari pemimpin-pemimpin kita di Bangka dan Jakarta dalam perundingan yang akan datang.

Kedudukan seperti itu bagi pimpinan yang berada di Jakarta

dan Bangsa di satu pihak dan barisan perang rakyat pada pihak lain, dalam menghadapi perundingan dengan Belanda bukanlah kedudukan yang enak. Sebab orang yang menempatkan kedudukannya itu dengan mudah dituduh sebagai orang-orang "ekstremis", sedangkan oleh barisan perang rakyat dia justru dapat dituduh "terlalu lunak". Dalam hal yang serba sulit itu, T.B. Simatupang tidak menempatkan dirinya dalam kedudukan tersebut, tetapi bertindak sebagai pimpinan Angkatan Perang yang tidak dapat mengelakkan tugas tersebut.

Maka pada tanggal 6 April 1949 ditulislah surat kepada Menteri Ir. Djuanda di Yogyakarta yang isinya antara lain.³⁾

1. Berbagai hal dalam melanjutkan perjuangan Republik umumnya, teristimewa tentang perundingan permulaan siasat dalam perundingan, perspektif perundingan, penghentian permusuhan, soal Konperensi Meja Bundar, soal pengembalian daerah-daerah Republik, soal BFO, dan siasat Republik terhadap Belanda, usaha mempersatukan semua golongan yang karena agresi Belanda telah terpisahkan dan masing-masing mengalami perkembangan sendiri dan memiliki pendirian yang berlain-lainan maupun mengenai prinsip atau mengenai perbedaan penghargaan terhadap beberapa faktor dalam perjuangan kita.
2. Belanda dalam pendiriannya di atas tentu akan mengemukakan alasan formal, yakni bahwa dalam putusan D.K. yang terakhir ditentukan akan diadakan pembicaraan mengenai penghentian permusuhan, pengembalian Pemerintah Republik ke Yogyakarta dan Konperensi di Den Haag, dan selanjutnya tentu akan mempunyai alasan politis yakni: apabila Pemerintah Republik kembali di Yogyakarta sebelum mengadakan janji-janji tentang penghentian permusuhan dan turut sertanya dalam Konperensi Meja Bundar maka setibanya di Yogyakarta Pemerintah akan berada di bawah pengaruh golongan-golongan yang ekstrem dan Angkatan Perang. Jadi mungkin pula bahwa Belanda akan

mencari penyelesaian ke arah ini, yakni Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, tetapi Pemerintah Belanda, merasa bertanggung jawab untuk menghindarkan bahwa mereka akan berada di bawah "tekanan" kaum ekstremis dan golongan bersenjata, yang berarti bahwa Belanda akan mengusulkan tentaranya tetap di Yogyakarta, setidaknya tentara kita jangan masuk di Yogyakarta. Dalam hal demikian akan tercapai jalan buntu.

3. Suatu persoalan sulit pula untuk menentukan sampai ke mana pemimpin-pemimpin di Bangka harus memperhatikan keinginan-keinginan golongan BFO untuk mencapai agar di kalangan BFO suara yang terbanyak bersedia membentuk satu front dengan kita. Tetapi sebaliknya bahwa golongan-golongan di luar Republik jangan sampai berat untuk membantu garis kebijaksanaan pemerintah kelak. Suatu hal yang sulit juga menurut pengakuan Jenderal T.B. Simatupang untuk mencari keseimbangan di antara aliran-aliran yang berlain-lainan, sedangkan setiap kesalahan tentu akan ditempa musuh menjadi keuntungannya. Perlu ditegaskan pula bahwa untuk menuju ke meja perundingan penghentian permusuhan tidak hanya dari sepihak saja, tetapi juga dari pihak Belanda. Untuk perundingan itu bagi Republik Indonesia perlu diajukan tenaga-tenaga teknis.
4. Suatu penyerahan kembali Yogyakarta yang selanjutnya baru diikuti dengan perundingan, inipun kiranya sulit pula. Namun demikian pengembalian Yogyakarta itupun sudah merupakan keuntungan baik di bidang organisasi, politis, dan psikologis.
5. Dalam menghadapi KMB itu pula Belanda masih berkampanye bahwa di Selatan Yogya golongan-golongan kiri sangat kuat sehingga akan timbul perang saudara apabila Pemerintah kembali. Ini adalah hal yang bohong, disebarkan oleh Belanda, karena pada waktu itu Angkatan Perang kita kuat untuk menguasai keadaan di dalam dan di luar kota

apabila Pemerintah kembali dan persiapan-persiapan telah selesai.

Memang diakui pula, bahwa pada waktu itu ada aliran-aliran politik yang sisematis berusaha pula untuk mengurangi prestise Pemerintah dan menganjurkan penggantian Pemerintah (dan Pimpinan Tentara), tetapi agaknya golongan ini tidak begitu kuat, tidak lebih kuat dari pada sebelum agresi Belanda. Soal yang penting ialah bahwa Angkatan Perang mengikuti politik Pemerintah. Bila hal ini dapat diusahakan, maka keadaan masih dapat dikuasai.

6. Sekiranya jalan buntu tercapai dalam perundingan-perundingan pendahuluan baik mengenai penetapan agenda, maupun dalam perundingan sendiri, maka selain daripada soal Indonesia dikembalikan ke D.K. di Indonesia apertempuran-pertempuran disertai kegiatan politik dari kedua pihak akan berjalan terus.

Surat di atas membayangkan "garis keluar" yang ditempuh pada waktu itu dari Banaran. Pemandangan lainnya dikirimkan "ke dalam" yakni kepada J.M. Panglima Besar, Tentara dan Territorium Jawa kepada para Gubernur Militer I sampai dengan V, kepada Kepala-kepala Jawatan dan kepala Bagian Penerangan dan Dokumentasi dari Staf Angkatan Perang, untuk disiarkan secara luas. Surat-surat ini dipusatkan pula di pos MBKD di Dekso. Dari Dekso (Kulon Progo) kurir-kurir membawanya kepada alamat yang bersangkutan. Pada waktu itu PTT gerilya kita berjalan cukup memuaskan, walaupun lebih lambat daripada PTT di daerah-daerah yang sedang dikuasai oleh Belanda.⁴⁾

Kolonel T.B. Simatupang dengan suratnya dari Banaran yang dibuat tertanggal 8 April 1949 memberikan gambaran umum sebagai berikut :⁵⁾

"Pekerjaan untuk mengkonsolidasi dan untuk menyempurnakan organisasi kita diteruskan di mana-mana. Penggerakan tenaga-tenaga pelajar guna konsolidasi dan penyempurnaan ini

belum begitu lancar. Usaha-usaha memberikan komando kepada rakyat terdiri dari penyusunan kepolisian (militer) pengadilan dan tindakan terhadap anasir-anasir yang mengacau diteruskan. Soal biaya pasukan-pasukan dan pegawai pegawai serta jaminan hidup bagi keluarga-keluarga, baik yang tinggal di kota-kota yang diduduki maupun yang berada di luar termasuk soal yang sangat berat tetapi penting. Sebaliknya supaya di kota-kota didirikan Panitia-panitia yang resmi bertindak atas nama keluarga-keluarga tersebut dan kalau dapat panitia-panitia itu disokong dari luar. Soal peluru dan bahan peledak sangat sulit, di samping menghemat peluru, yang dapat dilaksanakan ialah koordinasi di antara daerah-daerah sehingga dapat tercapai pembagian dan penukaran sesuai dengan kebutuhan dan merampas, mencuri atau membeli dari musuh". Usaha untuk meluaskan organisasi territorial ke daerah-daerah yang telah lama diduduki, dan gerakan-gerakan militer ke sana walaupun lambat kemajuannya diteruskan. Jumlah korban-korban musuh menunjukkan garis yang agak rata, berarti bahwa perjuangan di mana-mana terus berlangsung. Pengalaman membuktikan bahwa musuh tidak dapat mencapai hasil-hasil yang berarti, selama moril tentara kita masih kuat dan selama front rakyat membantunya. Oleh karena itu musuh berusaha mematahkan perlawanan secara tidak langsung yaitu kegiatan politik (Surakarta, Pasundan), menyiarkan kabar-kabar bohong supaya timbul curiga mencurigai, mematahkan semangat rakyat (bombardemen kampung-kampung, dan pasar-pasar, pembakaran rumah-rumah, kekejaman-kekejaman, mungkin dengan hasutan-hasutan terhadap pimpinan (Pemerintah dan Pimpinan Tentara). Ada pula tanda-tanda bahwa musuh menggiatkan usaha menghasut dan membujuk di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat (Jawa Barat), Jawa Timur. Oleh karena itu perhubungan pada '*persoonlijk contact*' dengan daerah-daerah yang agak terpencil letaknya harus diperhebat supaya mereka jangan gampang kena propokasi musuh. Hubungan dengan Sumatra dan Luar Negeri tetap terpelihara.

Negara-negara yang atas persetujuan Renville yang didirikan Belanda dengan tujuan secara mudah untuk digunakan menghadapi Republik, maka ternyata dengan penyerangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, dari negara-negara bagian itu mengutuk tindakan Belanda dan memberikan dukungan serta simpatinya akan perjuangan Republik. Dengan demikian pembentukan negara Boneka adalah senjata makan tuan.⁶⁾ Hal ini dimanfaatkan Republik Indonesia dalam menghadapi KMB yang bertemu dengan Belanda. Untuk menjaga adanya kekompakan di antara negara bagian yang tergabung dalam BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang didirikan oleh Van Mook dengan Republik, maka sebelum persidangan dimulai perlu diadakan persiapan-persiapan. Oleh karena itu lalu diadakan Konferensi Antar Indonesia di Yogyakarta. Dalam Konferensi ini diadakan perundingan-perundingan yang pokoknya dalam KMB nanti akan bertemu 3 negara. Republik Indonesia, Belanda dan BFO yang merupakan satu gabungan dari beberapa negara bagian yang mempunyai kesatuan Pengurusnya. Jadi dengan adanya BFO itu suatu keuntungan bagi Republik Indonesia dalam pertemuan KMB, sebab apabila BFO itu tidak merupakan satu suara, maka dapat diperhiungkan bahwa Belanda akan lebih mudah mempengaruhinya. Bahkan memang Belanda dengan direncanakan negara-negara bagian yang jumlahnya ada 15 negara itu akan masuk di pihaknya.⁷⁾ Dengan BFO hanya mempunyai satu suara dan padahal BFO sudah memihak kepada Republik, maka dengan demikian merupakan suatu kekuatan bagi Republik dalam menghadapi Belanda di KMB. Dalam hal ini Republik Indonesia tidak perlu harus berhadapan dengan negara-negara bagian, melainkan cukup satu suara dengan BFO di pihaknya.

Dengan adanya satu sikap BFO memberikan dukungan kepada Republik sulitlah bagi Belanda. Untuk menemukan politiknya, maka Belanda lalu mengadakan adu domba, mempergunakan golongan-golongan feodal, perasaan provinsialisme (antara lain di Sumatra dan Pasundan) untuk melemahkan kedudukan

kita.

Ternyata konperensi Antar Indonesia ini ada banyak manfaatnya. Sebab ternyata pada waktu dalam sidang KMB itu Belanda menghadapi kesulitan karena BFO yang semula diperhitungkan ada di pihaknya ternyata akhirnya meleset. Karena kegagalan itu Belanda masih mencari-cari akal untuk tetap menggagalkan keberhasilan KMB yaitu dengan melontarkan persoalan Irian Barat (sekarang, Irian Jaya) agar tidak ikut dibicarakan dalam keputusan itu. Dengan dikeluarkannya persoalan Irian Barat (sekarang, Irian Jaya) masuk ke dalam Republik Indonesia sudah barang tentu Negara Indonesia Timur yang tergabung dalam BFO menolak maksud tersebut. Maka dengan penolakan itu berarti gagalnya KMB. Namun suatu keuntungan bagi Republik Indonesia dan BFO yang telah setuju untuk menanggukahkan pembicaraan Irian Barat dalam waktu 1 tahun kemudian. Lagi pula dengan diterimanya bentuk Negara baru bukan kesatuan tetapi berbentuk Federal, hal ini hanya sebagai siasat saja.

Dengan mengikuti uraian di muka maka memang benar bahwa tidak semua yang dulu dibentuk Van Mook itu akan bersikap memihak kepadanya, bahkan hal ini hanya sebagian kecil negara bagian saja yang berhaluan moderat untuk mencita-citakan negara merdeka, tetapi tidak perlu segera terlepas dari Belanda. Mereka ini jiwa nasionalnya ada tetapi tidak secara tegas-tegas. Mereka beranggapan bahwa kita itu tidak mungkin dengan begitu saja berdiri dan hidup lepas dari Belanda.

Maka jauh sebelum dibukanya KMB Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang T.B. Simatupang telah membulatkan sikapnya dengan berpesan kepada pemimpin-pemimpin rakyat. Apabila di tengah-tengah segala kemungkinan yang kita hadapi dalam perundingan menemui jalan buntu, agar jangan sampai bangsa kita mengindahkan hasutan-hasutan, tetapi supaya terus bekerja untuk :

- a. Memelihara persatuan dan mempererat hubungan, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan.

- b. Memelihara semangat perjuangan.
- c. Menyempurnakan organisasi territorial dan memperluas cadangan kita sehingga seluruh rakyat turut mempertahankan dengan aktif kemerdekaan kita.
- d. Melebarkan medan pertempuran dengan membawa perjuangan ke daerah-daerah di mana sampai sekarang tidak ada pertempuran (daerah-daerah pendudukan yang lama).
- e. Mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita.

Demikianlah sikap tegas dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dalam KMB apabila mengalami jalan buntu. Pernyataan ini dikirim dari medan peperangan tertanggal 8 April 1949.⁸⁾

Meskipun situasi militer pada menjelang sidang KMB belum tenang, namun hal tersebut tidak menghalang-halangi jalannya persidangan itu. Sebagai konsekuensi adanya persetujuan Rum-Royen maka Mr. Susanto Tirtoprodjo dan demikian pula Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama persidangan berjalan, bekerja keras untuk menyelesaikan mengenai *cease fire* dan urusan daerah-daerah di luar Jawa.

B. SIKAP MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA

Konperensi Antar Indonesia telah didahului oleh berbagai persetujuan pendahuluan. Berhubung dengan tercapainya persetujuan pendahuluan antara Republik Indonesia dan Belanda, maka Wakil Tinggi Mahkota Dr. Beel telah mengajukan permintaan berhenti, dan permintaan tersebut oleh Pemerintah Belanda dikabulkan. Sebagai gantinya diangkat A.M.J. Lovink.

Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa karena adanya persetujuan tersebut, maka pada tanggal 5 Juni Wakil Presiden Hatta menuju ke Kotaraja bersama-sama dengan Dr. Sukiman, Moh. Natsir, Mr. Ali Satroamidjojo, Dr. Halim, Baharudin, Mr.

Nazir St. Pamuntjak, guna mengadakan kontak dengan Mr. Sjafrudin, Kepala PDRI. Rombongan ini tidak dapat berjumpa dengan beliau.

Dalam sidang formal antara delegasi-delegasi BFO, Belanda dan Republik Indonesia di bawah pengawasan KPBBi telah tercapai kecocokan tentang :

1. Penarikan Belanda dari Yogyakarta.
2. Syarat-syarat dan waktu diadakannya KMB.

Sebagai realisasi persetujuan tersebut, maka pada tanggal 24 Juni 1949 jam 4 pagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII bersama-sama Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia dengan naik pesawat terbang Komisi PBB menuju ke lapangan terbang Gading Gunung Kidul. Mulai hari itu pengunduran tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai berturut-turut hingga selesai pada tanggal 30 Juni 1949. Dalam keputusan penarikan Belanda itu sebetulnya hanya dari kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya dengan radius 5 km.⁹⁾ Dengan jarak itu agar dapat dijadikan daerah kerja pemerintah Republik Indonesia. Atas usaha Sri Sultan daerah yang dikosongkan bukan hanya kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik, tetapi seluruh Daerah Yogyakarta yang meliputi beberapa Kabupaten atau dari seluruh Karesidenan Yogyakarta yang pada waktu itu terdiri dari daerah Kasultanan, daerah Paku Alaman dan daerah Surakarta yang berada di Yogyakarta: misanya Ngawen, Imogiri. Jadi meliputi Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Kabupaten Adikarta dan Kabupaten Sleman.¹⁰⁾

Pada tanggal 29 Juni 1949 yang dikosongkan baru Kabupaten Gunung Kidul, Bantul bagian Selatan, Kabupaten Adikarta, dan kota Yogyakarta. Jadi belum seluruh wilayah Yogyakarta, sehingga pada tanggal 29 Juni malam 30 Juni 1949 Belanda masih berada di Kabupaten Sleman. Baru esok harinya tanggal 30 Juni 1949 pasukan Belanda ditarik seluruhnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengosongan daerah Yogyakarta ini dijadi-

kan modal bagi terbentuknya seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dengan telah selesainya penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan para pembesar Republik lainnya tiba kembali di Yogyakarta yang disambut dengan meriah oleh masyarakat di Yogyakarta.

Sementara itu rombongan Dr. Leimnena yang terdiri dari Moh. Natsir dan Dr. A. Halim yang pada tanggal 4 Juli menuju ke Bukit Tinggi untuk mengadakan hubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara, pada tanggal 10 Juli telah tiba di Yogyakarta bersama-sama dengan anggota-anggota PDRI.¹¹⁾

Selanjutnya dengan kedatangan Mr. Susanto Tirtoprodjo, Komisaris PDRI untuk Jawa, maka sidang Kabinet yang pertama sejak kembalinya Pemerintah Republik dapat dilangsungkan. Pada sidang tersebut Presiden menerima kembali mandatnya yang diberikan kepada Mr. Sjafrudin pada tanggal 19 Desember 1948 dengan ucapan terima kasih.

Selain itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Menteri Pembangunan Pemuda dan jabatannya yang lama sebagai Kordinator Keamanan Dalam Negeri.

Pada tanggal 16 Juli 1949 BFO telah menerima biak usul Konperensi dari Presiden Soekarno untuk melaksanakan permusyawaratan Inter Indonesia.¹²⁾ Sebagai ajang pertemuan untuk bagian pertama diadakan di kota Yogyakarta.

Dengan adanya kesepakatan bersama itu, kemudian dimulailah penyelenggaraan Konperensi Inter Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 19 – 22 Juli 1949. Konperensi ini merupakan titik pertemuan di antara bangsa sendiri untuk mengambil dan menentukan kebulatan pandangan dalam menghadapi sidang KMB.

Dalam sidang Konperensi Inter Indonesia antara delegasi-

delegasi dari negara-negara yang tergabung dalam BFO telah dapat diambil berbagai keputusan sebagai berikut :¹³⁾

1. Nama yang disetujui dari Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah "Republik Indonesia Serikat" didasarkan atas asas demokrasi dan federalisme.
Tentang bagaimana kedaulatan itu akan diatur selanjutnya sebuah Komisi Tehnis yang akan disusun nanti. akan mempelajari soal itu.
2. Di dalam Konstitusi sementara harus ada ketentuan yang nyata tentang Negara-negara Bagian yang akan dihimpun dalam RIS. Soal ini pun akan dipelajari oleh Komisi Tehnis. Daerah Republik akan berdiri dari daerah menurut *status quo* Renville dengan ketentuan bahwa tentang Asahan Selatan akan diadakan pembicaraan lebih lanjut.
Seterusnya harus diadakan kemungkinan tentang mengadakan perubahan yang mengenai batas-batas Negara berhubungan dengan *efficiency* dalam pemerintahan berdasar kepada persetujuan antara Republik dan negara yang bersangkutan, terutama mengenai daerah Sumatra Selatan pada saat pembentukan RIS. Pembagian kekuasaan antara Negara Bagian dan RIS dilangsungkan menurut peraturan yang telah disetujui, dengan ketentuan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah pusat dari RIS ditentukan limitatif di dalam konstitusi sementara, sedangkan tugas kekuasaan yang lain menjadi kekuasaan pemerintah Negara.
Perselisihan tentang kekuasaan antara Negara Bagian dan RIS akan diputuskan oleh sebuah Mahkamah.
3. Pembagian Negara dalam daerah-daerah otonom menurut sistem demokrasi diatur di dalam Konstitusi Negara Bagian.
4. RIS berkewajiban untuk memperhatikan sedapat-dapatnya kedudukan khusus dari daerah-daerah *zelfbestuur* sepanjang RIS -mempunyai campur tangan dalam hal itu.

5. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden. Presiden ini akan menjadi Kepala Pemerintah yang konstitusional. Menteri-menteri akan bertanggung jawab kepada Presiden dan para menteri bersama-sama merupakan pemerintah federal. Presiden akan dipilih oleh Negara-negara dan daerah-daerah Bagian (Republik dan BFO) menurut aturan yang akan dibicarakan lebih lanjut di Jakarta.
6. Susunan dan pembagian pekerja dalam Dewan Menteri harus ditujukan kepada :
 - a. Menjamin stabilitas Pemerintahan. Kabinet tidak dapat dijatuhkan sebelum Konstitusi dibentuk.
 - b. Supaya Pemerintah dapat disusun secepat mungkin.
 - c. Supaya Pemerintah mempunyai *efficiency* yang diperlukan, dan
 - d. Supaya ada "pembagian" yang patut, dan bahwa susunan itu harus sedemikian sehingga di dalam Dewan akan ada beberapa menteri yang mempunyai kedudukan khusus. Tentang caranya mengatur semuanya itu belum ada persetujuan.
7. Akan diadakan dua badan Perwakilan yaitu Badan Perwakilan Rakyat dan Badan Perwakilan Negara (dan Daerah Istimewa), yaitu Senat. Dewan Perwakilan Rakyat ikut menentukan Undang-undang. Kekuasaan Senat akan dibicarakan lebih lanjut.

Dewan Perwakilan Rakyat sementara tidak akan mempunyai jumlah anggota yang terlalu besar. Dipandang cukup kurang lebih 150 anggota.
8. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat sementara minoritet-minoritet akan mempunyai perwakilan sendiri.
9. Dewan Perwakilan Rakyat sementara tidak dapat dibubarkan sebelum Konstitusi dibentuk.
10. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara tidak dapat dituntut atas pendapat yang dilahirkan atau suara yang

diberikan dalam menjalankan jabatannya.

11. Tentang "kekuasaan membentuk Undang-Undang", kekuasaan eksekutif dan "pernyataan keadaan perang dan keadaan bahaya" terdapat persesuaian paham.
12. Tentang susunan kehakiman didapat persetujuan, bahwa Undang-Undang federal akan memberi petunjuk-petunjuk umum yang mengenai susunan Kehakiman daripada Negara Bagian, jika ini diperlukan untuk kebaikannya pengadilan. Kedudukan dan kewajiban Mahkamah Agung akan diatur oleh Undang-Undang federal.
13. Yang menjadi Warga Negara Indonesia ialah :
 - a. Semua orang bangsa Indonesia yang dulu menjadi "*Nederlands onderdaan*" atau Warga Negara Republik Indonesia".
 - b. Semua orang bangsa Tionghoa dan bangsa Arab yang dahulu menjadi "*Nederland onderdaan*" atau Warga Negara Republik Indonesia dan tidak menyatakan, bahwa mereka tidak suka menjadi warga negara Indonesia".
 - c. Semua orang bangsa Eropa yang dahulu menjadi "*Nederlands onderdaan*" dan berkedudukan di Indonesia, dan menyatakan, bahwa mereka ingin menjadi warga negara Indonesia.
Dalam melaksanakan soal di atas ini harus diadakan aturan, supaya pada saat penyerahan kedaulatan mereka yang ingin menjadi warga negara Indonesia dengan seketika mempunyai kedudukan itu.
14. Tentang hak-hak pokok negara dapat persetujuan yang bulat seperti yang dimuat dalam "*Universal Declaration of Human Rights*" (10 Desember 1948).
15. Selekas mungkin sesudah penyerahan kedaulatan Pemerintah Federal menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan rahasia guna membentuk Konstituante.
16. Tentang hal keuangan dan anggaran belanja terdapat kata-

persetujuan dalam garis-garis besar terhadap apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam *working papers* masing-masing.

17. Pembicaraan yang mengenai :

- a. Prosedur bagaimana Konstitusi sementara akan diwujudkan.
- b. Garis-garis besar dari politik keuangan dan perekonomian RIS.
- c. Kewajiban-kewajiban antara *Unipatners* (Belanda dan RIS).
- d. Kerja sama antara Negeri Belanda dan RIS dalam Uni. akan dibicarakan lebih lanjut di Jakarta.

18. Yang mengenai keamanan dipandang perlu mengusahakan supaya Delegasi BFO akan ikut di dalam suatu badan Sentral maupun lokal yang akan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan perhentian permusuhan antara pihak Belanda dan pihak Republik.

Sebagai kelanjutan Konferensi Inter Indonesia. babak kedua, diadakan di Jakarta dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus.¹⁴⁾

Untuk mengetahui bagaimana sambutan masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan adanya Konferensi Antar Indonesia itu dapat kita kemukakan sebagai berikut :

"Masyarakat kota Yogyakarta khususnya termasuk para pimpinan instansional menyambut dengan meriah adanya Konferensi Antar Indonesia itu. Pada saat itu pula diadakan pawai secara besar-besar. Sejak dari muka Hotel Tugu (KMK) pawai memenuhi jalan ke arah Utara dan Selatan. Pembukaannya dimulai di Hotel Tugu, sedang Konferensinya bertempat di Markas besar AURI. Dengan penuh kegembiraan, mereka mengadakan pawai di muka gedung persidangan. Kemudian diadakan pula suatu resepsi di Gedung Negara Yogyakarta. Pada upacara resepsi itu hadir pula Sultan Hamid, Bung Karno dan Ibu Fatmawati beserta para pejabat negara. Bahkan pada upa-

cara resepsi itu Sultan Hamid berkenan pula menyanyi-nyanyi yang menghilangkan kesan tidak terdapat sesuatu rasa berbeda di antara para peserta konperensi.¹⁵⁾ Demikian besar tanggapan baik di kalangan masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Meskipun dari para utusan Konperensi berasal dari berbagai negara bagian yang berbeda namun karena nasib yang sama timbullah kesan yang menggembirakan.”

C. SIKAP MASYARAKAT DAN TOKOH-TOKOH DAERAH TERHADAP IDE PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan keputusan KMB, maka pada tanggal 27 Desember 1949 itu secara *de jure* terjadi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda. Penyerahan akan adanya pengakuan itu dilakukan oleh Menteri Drees kepada Drs. Moh. Hatta atas nama Republik dan BFO Sedang secara *de facto* dari Hindia Belanda kepada Republik Indonesia diserahkan Lovink dan diterima Sultan Hamengku Buwono IX di Istana Jakarta. Jadi dalam saat yang bersamaan tanggalnya ada dua peristiwa penting, baik di Indonesia maupun di Nederland.

Republik Indonesia Serikat telah terbentuk dan Ir. Sukarno dipilih sebagai Presiden sedang Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Mr. Assaaf bertindak sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Dr. Halim sebagai Perdana Menteri.

Kemudian dalam perkembangannya sebenarnya Republik Indonesia dan BFO menerima keputusan sebagai Negara Federal (RIS) itu bukan hal yang prinsip, tetapi hanya sebagai taktik saja. Maka setelah RIS berdiri lalu bergeraklah rakyat dari negara-negara bagian itu dengan tujuan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada waktu itu massa rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing menyatakan dengan kesadaran betapa pentingnya membentuk satu kesatuan bulat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Massa rakyat itu bergerak dan menuntut agar Negara-negara Bagian segera bergabung

ke alam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada waktu itu masih ada dua negara bagian yang belum menggabungkan diri. Antara bulan Januari – Desember 1949 dan sampai bulan Agustus 1950 selama 8 bulan itu dari 15 negara bagian RIS ada 13 negara yang secara satu per satu menggabungkan diri ke dalam R.I. Yogyakarta. Dari 2 negara yang belum menyatukan masuk R.I. Yogya adalah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Namun kemudian semua negara bagian meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ber-Undang-Undang Dasar Sementara, dan bentuk Kabinetnya Parlementer. Atas keputusan itu Bung Karno dipilih sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Adapun sebagai Perdana Menteri dari Negara Kesatuan itu adalah Moh. Natsir yang bertanggung jawab kepada DPR.

D. BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT SETELAH KMB DAN IDE PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN

1. *Bidang Ekonomi*

Menurut falsaf-falsaf Persetujuan Konperensi Meja Bundar, Republik Indonesia diharuskan menyerahkan kembali segala milik konsesi asing kepada Belanda.

Di samping itu Republik Indonesia diharuskan membayar bunga dan hutang sejumlah 4 milyar gulden kepada Nederland.¹⁹⁾ Kecuali itu Republik Indonesia harus menerima ketentuan pembiayaan Misi Militer Belanda, yang akan membantu membangun tentara Republik Indonesia.

Dengan melihat sebagian falsaf ini dapat dimengerti bahwa setelah KMB perekonomian Indonesia belum berkembang.

Masalah perekonomian yang masih sulit juga akibat ada-

nya perang mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa perang banyak pabrik dihancurkan dan di bumi hanguskan. Padahal kesempatan untuk membangun memerlukan modal dan tenaga ahli. Pemerintah belum mempunyai cukup tenaga untuk membangun. Namun ada juga sebagian dari bentuk usaha rakyat telah mengalami perkembangan. Hal ini tampak dengan adanya bermacam-macam kerajinan dan perusahaan sebagai salah satu sektor pemenuhan kehidupan rakyat, di antaranya: perusahaan sepatu, sandal, sabun, penyamakan kulit, pabrik minyak kelapa, perusahaan teh, usaha pertenunan, perusahaan batik, kerajinan bagor, pabrik tegel, dan sebagainya. Keadaan kerajinan, pabrik dan perusahaan ini dapat kita ketahui dalam bentuk statistik, dari tahun 1950, 1951, dan 1952 sebagai berikut :

DATA STATISTIK

HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Macam Perusahaan	Banyaknya	Produksi tiap bulan	Berat kg	Keterangan
1.	Tenun :	66			
	a. Sarung/Slendang		14.000 m	789 kg	Barang-barang produksi ini rata-rata
	b. Kain baju		40.000 m	2.000 kg	
	c. Setagen/amben		40.000 m	2.000 kg	
2.	Batik	457	360.000 pt	84.000 kg	50% dikirimkan ke luar: antara lain ke Solo, Magelang, Banyumas, Jakarta, Surabaya, Semarang, Sumatera, dan lain-lain.
3.	Perak :				
	a. Barang perak	80	12.600 kg	10.000 kg	
4.	Genteng	300	1.200.000 bd	60.000 kg	
5.	Batu merah	150	5.000.000 bd	—	
6.	Bagor	300	23 08 kd	20.000 kg	
7.	Blok :				
	a. Ceret, soblok ember dll.	70	2.603 kd	3.600 kg	
8.	Tegel	3	50.000 bd		
9.	Timbangan	22	1.000 st	7.800 kg	

1	2	3	4	5	6
10.	Tinta cap :	1	60 kg	60 kg	Belum didaftar.
11.	Minyak	1			
	a. Bubut kesed dll.	2	350.000 kg	—	
	b. Bungkil		180.000 kg	—	
12.	Sabut Kelapa				
	a. Bubut kesed dll.	2	800 m2	3.200 kg	
13.	Wajan		18.500 bd	30.000 kg	
14.	Besi tua	12	50.000 kg	50.000 kg	
15.	Biskuit	2	50.000 kg	40.000 kg	
16.	Sabun :	6	30.000 kg	10.000 kg	
17.	Teh :	11	3.000.000 bk	9.000 kg	
18.	Emping :	—	—	—	
19.	Meabel :	70	700 m3	320.000 kg	
20.	Kapur tulis	1	40.000 ds	—	
21.	Kulit :	7	8.000 kg	4.000 kg	
22.	Tanduk/penyu:	—	—	—	
23.	Tikar mendong	700	4.200 m2	1.400 kg	
24.	Aluminium :				
	Alat alat rumah tangga	1	300 kg	250 kg	
25.	Kuningan :				
	Alat rumah tangga	6	750 kg	600 kg	
26.	Pande besi :				
	Alat pertanian.	500	450.000 kg	180.000 kg	
27.	Gula Jawa :	—	150.000 kg	100.000 kg	

PERUSAHAAN SEPATU/SANDAL (9 BUAH)

Tahun	Produksi pasang		Harga pasang	
	Sepatu	Sandal	Sepatu	Sandal
1950	3.995	3.175	22.50/75.00	15.00/40.00
1951	9.314	6.050	40.00/80.00	15.00/45.00
1952	13.66	7.295	35.00/85.00	15.00/50.00
Jumlah :	26.275	16.520	22.50/85.00	15.00/50.00

PABRIK WAJAN (2 BUAH)

Tahun	Jumlah Buruh			Jumlah Berat Kilo			
	Perbedi	Ganstown	Jumlah	Perbedi	Ganstown	Jumlah	Buruh
1950	Belum dibuka kembali						
1951	1184.31	14359	1323.90	265.791	23.119.90	288.910.90	360
1952	200.701	23.328	222.029	484.723	43.959.00	5283.82.00	368
Jumlah	319.032	37.687	354.719	750.514	67.078.90	817.592.90	368

N.B. : Keterangan penggilingan padi

Untuk : Gabah, beras tumbuk.

- a. Persediaan pada awal bulan.
- b. Pembelian/pendapatan dalam bulan repotan.
- c. Jumlah a + b.
- d. Dikerjakan dalam akhir bulan repotan.
- e. Persediaan pada akhir bulan repotan.

Untuk : Pecah kulit, Beras sosoh :

- a. Persediaan awal bulan.
- b. Hasil pembikinan dalam bulan repotan.
- c. Persediaan pada akhir bulan.

PERUSAHAAN SABUN (3 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Pemakaian bahan kg	94.300	70.500	96.369	261.169
a. Kaustik Soda	4.500	11.650	13.591	29.741
II. Produksi kg	1.003.000	280.342	355.529	1.638.871

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
III. Harga penjualan sebatang berat 320 gr.	0.65/0,85	—	—	—
IV. Harga minyak kelapa blek	38.—/60	—	—	—
V. Buruh:				
a. Lelaki		50	40	46
b. Perempuan		10	6	9

PERUSAHAAN PENYAMAK KULIT (5 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Macam yang di produksi				
a. Zool kg	6.050	40.202	48.240	94.492
b. Voering Voet	23.400	35.240	58.500	117.140
c. J. Box Voet	—	48.000	58.000	106.000
d. Kulit kering basah	6.750	2.260	—	9.010
e. Glaco kg	4.725	539	—	5.263
II Harga rata-rata				
a. Zool kg	14,—	12,—/19	15,—/21	12,—/21
b. Voering Voet	2,—	1,50/2,25	1,50/3,25	1,50/2,25
c. J. Box Zol	17,—	45 —/47	40,—/60	40,—/60
d. Kulit kering	17,—	15,—/23	—	15,—/23
e. Glaco	2,75	2,75	—	2,75

PERUSAHAAN TEH (3 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. d Hasil dalam:				
a. Bungkus				
1½ ons	10. 84.568	103 18. 44	103 98. 56	31.801.058
1¼ ons	10.484.568	10.618.044	10.698 456	31 801 058
II. Pemakaian bahan mentah:				
a. Daun teh	588 ton	608 ton	624 ton	1.820 ton
b. Kembang melati	5 ton	7 ton	8 ton	20 ton
c. Kertas	5 riem	6 riem	7 riem	18 riem
III. Buruh:				
a. Lelaki	30	30	32	—
b. Perempuan	120	130	135	—
IV. Jumlah penjualan	209.691 360	212.360 880	213.969 120	636.021.560

PABRIK MINYAK KELAPA (1 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Produksi dari Fabricage:				
a. Minyak kg	908.000	1.543.000	3.831 660	6.282.660
b. Bungkil kg	50.243	82.630	216.675,2	349.548,2
c. Ampas kg	25.100	40.250	116.364	181.714
II. Bahan kopra yang dipergunakan	1.580.000	2.832 040	6.515.020	10.927 060
III. Buruh:				
a. Lelaki	100	115	137	—
b. Perempuan	1	1	1	—

PERUSAHAAN PERTENUNAN

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Perusahaan yang jalan	42	14/41	12/20	12/42
II. Pemakaian alat:				
a. Mesin	—	52/65	5/17	5/65
b. Tangan	127/373	676/934	70/190	70/93
III. Banyaknya alat:				
a. Mesin	—	98/308	69	69/30
b. Tangan	—	—	750/819	750/81
IV. Buruh:	280/770	248/739	196/263	196/77
V. Produksi per- tunen dalam:				
a. Potong	—	41 179,50	45.188,05	86.367,55
b. Meter	426.605	284.055,15	231.243,31	941.903 46
c. Kilo	—	27.213.472	19 056.088	46.269.560
VI. Harga hasil Rp.	23 57.814	1.862.359,89	1.154 054,69	5.674.228,58
VII. Bahan-bahan:				
a. Benang kg	43 303.000	3.517 500	18.916 988	65.736.488
b. Cet dll. kg.	1.668.945	1.080.880	3.624.768	6 374.593
V II. Harga Benang:				
a. No. 20/s Gry	60/180 —	106/143 50	79/157 50	60/180,—
b. No. 30/s Gry.	60/160,—	118.50/147,50	98/157.50	60/160,—
c. No. 42/2 Gry.	102/225 —	175/280,—	102,50/182,50	102/280 —

PERUSAHAAN BATIK

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Banyaknya perusa- haan:				
a. Kecil	541	552	314	469
b. Samben	130	150	161	147
c. Besar	65	70	73	69

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
II. Penghasilan dalam kodi:				
a. Batik halus	8.679,50	8.679,50	4.425	21.784
b. Batik kasar	25.757	23.428	14.700	63.885
c. Lain-lain (taplak)	110,50	110	110	330,50
III. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam hitungan kg.				
a. Naptol AS	120	100	100	320
b. Garam Bor deans	300	150	100	550
c. Garam merah B	300	500	300	1.100
d. Obat ijo ganda	100	150	100	350
e. Hars	206.248,50	219.148,25	280.149,36	615.546,11
f. Indigoslm	7.610	6.500	6.450	20.560
g. Kopal Sog	600	550	600	1.750
h. Nilo 50%	3.000	3.250	3.500	9.750
IV. Pemakaian Greijs (M)	10.813	10.813	-	21.626
V. Pemakaian kambriks (meter)	1.708.389,56	1.823.107,82	1.643.244,50	5.174.741,88
VI. Buruh:				
a. Biasa	6.645	5.664	5.500	5.903
b. Ngecap	1.095	905	800	930

PABRIK TEGEL (3 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Hasil Produksi				
a. Tegel (biji)	559.810	600.910	612.045	1.880
b. Terasso	588	663	663	1.772.774
c. Beton	2.108.	2.374	2.673	7.155
II. Pemakaian bahan				
a. Semen (zak)	3.000	2.080	4.095	10.175
b. Klenrstof kg	646,60	860,30	875,50	2.382,40

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
III. Buruh:				
a. Lelaki	613	613	613	—
b. Perempuan	263	263	263	—

PABRIK LIMUN (2 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Produksi dalam hitungan botol				
a. Limun @ 400 cc	—	254.231	326.817	581.048
b. Limun @ 200 cc	—	20.819	29.928	50.747
c. Air Soda 400 cc	—	25.420	27.651	53.000
d. Air Soda 200 cc	—	1.000	1.991	2.991
e. Stroop 500 cc	—	2.810	3.032	5.842
II. Pemakaian gula kg	—	80.603	93.924	174.527
III Buruh:				
a. Lelaki	—	31	31	—
b. Perempuan	—	—	—	—

KERAJINAN SETAGEN

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Hasil Kodi	13.340	8.750	2.445	24.535
II. Jumlah harga	1.305.800	815.100	187.200	2.308.100
III. Pemakaian Benang Rp.	797.570	602.044,93	146.961	1.546.575,93
IV. Pemakaian bahan cat dll.	—	42.525	7.600	50.125
V. Harga rata-rata kodi	80/137	—	65/85	65/137
VI. Penenunan	—	1.467	727	1.194

KERAJINAN BAGOR

Keterangan	Tahun 1952	Jumlah	Tahun 1952	Jumlah
I. Hasil kodi	20.930	33.820	33.635	88 385
II. Harga penjualan	454.420	850 205	797.390	2.102 015
III. Pembelian pucuk	—	264.010	317.805	581.815
IV. Harga penjualan per kodi:				
a. Kwal. I.	23,-/25,50	28,-/35,-	29,-/30,-	23,-/35,-
b. Kwal. II.	22,-/25,-	24,-/30,-	25,50/27	22,-/30,-
c. Kwal. III.	20,-/23,-	20,-/27,-	22,-/24,-	20,-/27,-
d. Kwal. IV.	15,-/23,-	15,-/24,-	17,-/20,-	15,-/24,-

PABRIK BISKUIT (2 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Hasil biskuit kg	599.731,2	614.410,8	654.570,4	1.868.712,4
II. Bahan yang di-pergunakan dalam hitungan kg				
a. Tepung	405.692	408.800	411.768	1.226.260
b. Tapioka	130.271,88	130.370,73	132.341,40	392.988,01
c. Gula pasir	130.044,24	128.082,56	130.803,24	388.930,04
d. Telur biji	209.988	209.784	211.104	629.876
e. Mentega	60.995,88	63.008,28	65.708,60	189.712,76
f. Soda kue	8.103,12	8.125,20	8.197,20	24.425,52
g. Amoniak	10.876,36	10.907,88	11.042,04	32.826 28
h. Vanili	5,8	6	6	17,8
i. Kayu bakar	43.494,80	43.779	43.830,48	131.103,48
j. Essence	60	60	60	180
III. Buruh:				
a. Lelaki	132	132	144	
b. Perempuan	211	211	233	

JUMLAH KOPERASI DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN SAMPAI AKHIR TAHUN 1952

Daerah Kapanewon	Banyaknya Koperasi	Jumlah anggota	Banyaknya uang simpanan	Keterangan
1. Mlati	1 kp desa	451	R 4.610,-	Macamnya koperasi: a. Kop desa b. Kop kredit c. Kop lumbung d. Kop konsumsi e. Kop produksi
	1 kp kredit	36	1.661,-	
	2 kp desa	509	34.210,33	
2. Moyudan	3 kp kredit	695	9.386,85	
3. Sleman	1 kp desa	670	19.367,52	
	1 kp lumbung	75	+	
4. Minggir	1 kp desa	266	10.697,92	
5. Prambanan	1 kp desa	68	610,-	+) 11 kuintal padi
	1 kp produksi	575	17.145,95	
6. Seyegan	2 kp kredit	141	5.561,65	
	2 kp desa	327	6.335,88	
7. Pakem	2 kp desa	956	9.190,50	
8. Tempel	1 kp desa	282	6.815,-	
9. Ngemplak	1 kp desa	50	1.275,-	
	3 kp lumbung	240	++)	++) 39½ kuintal padi
10. Kalasan	4 kp desa	347	7.980,27	
	2 kp kredit	220	3.179,10	
11. Ngaglik	1 kp produksi	120	227.775,-	
	1 kp desa	37	1.476,05	
	1 kp kredit	55	1.768,20	
12. Godean	3 kp desa	496	6.324,45	
13. Brebah	2 kp desa	188	8.223,40	
14. Gamping	1 kp kredit	43	1.872,-	
	2 kp lumbung	23	+++)	+++ 492 Kg padi
Jumlah	39 koperasi	6.870	R 385.466,07	

NB. 2 buah koperasi produksi bekerja sebagai onderneming (perkebunan tembakau Virginia dan Vorstenlandsch) yaitu di Kapanewon Prambanan dan Ngaglik.

Yang telah mendapat kredit dari Pemerintah:

1) Kap. Moyudan	R	55.000,-
2) Kap. Prambanan	R	400.000,-
3) Kap. Ngaglik	R	250.000,-
4) Kap. Godean	R	100.000,-

5) Kap. Kalasan	R	100.000,—
6) Kap. Minggir	R	30.000,—
7) Kap. Pakem	R	100.000,—
	R	1.035.000,—

ANGKA-ANGKA PERINDUSTRIAN/KERAJINAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1950 – 1952
PERUSAHAAN PABRIK ES (2 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Produksi dan lain-lain:				
a. Pembikinan	1.697.925	2.838.082	3.607.668	8.143.675
b. Dikeluarkan	1.606.605	2.716.919	3.414.740	7.738.264
c. Hancur	114.766,50	208.374,75	190.353,25	513.494,50
II. Penjualan/penge-luaran es dalam kg				
a. Penjualan bebas	1.491.093,37	2.496.055,75	3.284.232,50	7.271.389,62
b. Sipil/Militer	55.377,12	81.645,50	91.885,50	228.908,12
c. Dengan cuma-cuma	40.438,75	79.395	74.265,50	194.099,25
d. Tidak terpakai	31.937	68.656,50	43.407,50	144.001
e. Jual keluar kota	102.385	468.936,50	606.050,25	1.177.371,75
Rp. :	376.742,97	525.923,94	527.115,07	1.429.781,98
III. Pemakaian bahan-bahan dan lain-lain				
a. Air m3	1.760.597	2.838.082	3.607.668	8.206.347
b. SO2 kg	14.750	917	790	2.457
c. Garam kg	14.218	14.038,50	12.068	30.324,50
d. Minyak semir ltr.	647	984,50	1.355	2.986,50
e. Tenaga listrik luar				
sper tijd Kwh	88.848	429.994	461.139	979.981
f. Tenaga listrik dalam sper tijd Kwh	24.175	8.833,8	1.441,36	34.450,4
g. Pembikinan per Kwh	175,12	206,29	183,59	565

PERUSAHAAN A

PERUSAHAAN PABRIK PENGGILINGAN PADI (6 buah)

Keterangan	Tahun 1950	Tahun 1951	Tahun 1952	Jumlah
I. Bahan pembelian Gabah	Belum dibuka			
a.	—	—	—	—
b.	—	729,18	1.210,81	1.939,99
c.	—	729,18	1.210,81	1.939,99
d.	—	729,18	1.210,81	1.939,99
e.	—	—	—	—
II. Dikerjakan dalam hitungan kuintal				
Beras tumbuh:				
a.	—	1.391,80	4.928,16	6.319,96
b.	—	42.447,68	89.236,19	131.683,87
c.	—	43.839,48	94.164,35	138.003,83
d.	—	41.793,96	194.863,10	136.657,66
e.	—	1.094,14	1.185,84	2.279,98
III. Bahan yang dihasilkan dalam kuintal. Pecah kulit:				
a.	—	—	—	—
b.	—	1.857	—	1.857
c.	—	—	—	—
IV. Bahan yang dihasilkan dalam kuintal. Beras sosoh				
a.	—	7.677,57	4.781,84	12.459,41
b.	—	45.510,05½	88.461,29	134.971,34½
c.	—	7.798,70	5.358,04	13.156,74
V. Penggilingan jalan				
Hari	—	1.346	1.568	2.914
Jam	—	7.661	9.628	17.289

Sebelum aksi militer II dari pihak Jawatan Kemakmuran telah mengeluarkan instruksi supaya di Gunung Kidul yang dikenal sebagai daerah tandus didirikan pabrik keramik untuk menolong rakyat. Selain itu diberikan juga tuntunan sebagai pekerjaan sambilan di rumah tangga yaitu kerajinan menganyam tikar, pertukangan kayu, pembuatan tepas, dan lain-lain. Cara-cara yang demikian ini baik sekali hasilnya, karena dapat menjadi salah satu cabang penghidupan. Eksposisi kemakmuran sering pula diadakan sehingga dapat menambah kemajuan rakyat di lapangan perkeonomian.

Pemerintah daerah juga mengadakan balai pameran bertempat di Jalan Danurejan, yang selalu mendapat kunjungan tamu dari dalam dan dari luar negeri. Pada waktu PJM Nehru Perdana Menteri India berkunjung ke Yogyakarta di Kepatihan Danurejan juga diadakan eksposisi ekonomi dan mendapat perhatian besar. Pada waktu itu beliau tertarik akan keindahan seni kerajinan perak, sehingga pemerintah membeli barang-barang tersebut untuk disampaikan kepada beliau.²⁰⁾

Sesudah aksi militer II perkembangan perusahaan batik maju pesat. Pembagian mori (*Cambrics*) diatur oleh Jawatan Kemakmuran. Pasar batik ramai sekali. Perusahaan tenun pun tidak ketinggalan, sehingga tiap kelurahan yang mempunyai penduduk perusahaan tenun banyak yang menitipkan barangnya di balai pameran untuk dicarikan pasar.

Usaha untuk menambah penghasilan daerah dan menaikkan ekonomi rakyat dalam daerah minus dengan penduduk yang padat seperti Yogyakarta, ditempuh dengan mengadakan transmigrasi umum dan industrialisasi.²¹⁾

Kota Yogyakarta berbeda dengan kota Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain-lain yang sebagai kota perdagangan, dan perindustrian dapat menghasilkan alat-alat dan industri kecil atau pabrik besar. Kota-kota industri tersebut mampu memproduksi barang jadi dan dapat menampung buruh yang beribu-ribu jumlahnya.

Perusahaan yang ada di Yogyakarta tidak ada yang dapat digolongkan besar, tetapi hanya merupakan industri kecil saja. Perusahaan yang ada di daerah Yogyakarta belum dapat menampung kaum pengangguran. Padahal penduduknya makin meningkat, sedang perusahaan itu sendiri keadaannya tidak stabil, sebentar naik dan sebentar turun dan kadang-kadang jatuh mengikuti gelombang ekonomi pada umumnya.

Maka hal ini merupakan suatu problema yang perlu mendapat perhatian pemecahannya, karena penduduknya bertambah padat.

2. *Sosial*

Setelah pengakuan kedaulatan, keadaan menuju ke arah yang tertib. Situasi yang makin baik ini memungkinkan para pengungsi untuk kembali. Para pegawai kantor pemerintahan mulai mengembalikan segala sesuatu yang terbengkelai akibat perang. Pemerintah mulai mengambil langkah untuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Dilakukan perbaikan jalan, pembaharuan kembali jembatan yang sudah dijebol. Selama perang kemerdekaan itu tidak kurang dari 200 jembatan telah dirusak.

Perbaikan itu harus ditunjang pengadaan sarana, seperti sarana pengangkutan agar barang kebutuhan pasar dengan mudah dibawa dan diterima pada tempat yang lain. Peranan Kereta Api (KA) amat penting, demikian pula kendaraan bermotor, misal: bus dan truk. Pemerintah melakukan perbaikan terhadap perusahaan angkutan KA, baik bidang administratif maupun bidang personalianya. Pengangkutan bus juga mendapat perhatian dan dikoordinasi melalui perusahaan: DAMRI. Juga banyak perusahaan swasta yang bergerak di bidang itu. Bertambahnya sarana pengangkutan dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, meskipun di sana-sini masih kurang lancar.

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, tergolong padat. Persawahan dan ladang tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan bertambahnya penduduk timbul kesulitan

bagi sebagian besar rakyat, dengan mata pencaharian bertani. Pemerintah mengambil langkah untuk mengadakan transmigrasi. Industrialisasi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat tercapai dalam waktu pendek, karena banyak sarana yang harus dipenuhi antara lain modal dan tenaga ahli.

Transmigrasi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu keuntungan pula, karena penduduk yang padat secara berangsur dikurangi untuk dipindahkan ke tempat lain dan nasib mereka akan lebih baik dari pada di tempat semula.

Pelaksanaan transmigrasi itu, bukan hanya pemindahan khusus petani, tetapi juga mereka yang memiliki kemampuan lain sehingga di tempat yang baru dapat bersama-sama membangun daerah tempat tinggalnya, yang berarti taraf sosial masyarakatpun akan naik pula.

Pemindahan penduduk ke luar daerah itu telah lama diadakan rencana persiapannya. Pada tahun 1947 semasa kabinet Amir Syarifuddin, oleh Pemerintah pernah dimasukkan di dalam rencana 3 tahun, dengan maksud apabila keadaan telah memungkinkan, maka tinggal menjalankan usaha tersebut dengan lancar.

Tetapi berhubung dengan timbulnya berbagai rintangan, rencana transmigrasi bagi daerah Yogyakarta baru terlaksana sesudah tahun 1950.

Perbaikan sosial lain telah pula dimulai misalnya sektor perburuhan, kesehatan, panti-panti asuhan dan lain-lain.

3. Pendidikan.

a. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gajah Mada

Pada tanggal 24 Januari 1946 di gedung SMT (Sekolah Menengah Tinggi) yang sekarang bernama SMA Kotabaru Yogyakarta diadakan pertemuan dari beberapa cerdik pandai yang bermaksud merundingkan kemungkinan mendirikan Balai Perguruan Tinggi (Universitas) di Yogyakarta. Promotor perte-

muan tersebut adalah Mr. Boediarto, Ir. Marsito, Dr. Prijono dan Mr. Sunario (Yogyakarta).

Pertemuan itu membentuk Panitia beranggota 32 orang. Ki Hadjar Dewantara ditunjuk sebagai Ketua dan Mr. Soenario sebagai penulis.

Kecuali itu didirikan Yayasan, yang bertugas "Mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada". Yayasan ini diurus oleh Mr. Boediarto sebagai Ketua, Dr. Soekirman sebagai Wakil Ketua, Dr. Buntaran sebagai Penulis dan Dr. Soeharto sebagai Bendahara.

Sedang anggota-anggotanya BPH Bintaran, H. Faried Ma'ruf, Mr. Mangkuyudo, KRT Notojudo, KHP Nototaruno dan Prof. Ir. Roeseno. Juga dibentuk Dewan Kurator, dengan Sri Sultan sebagai Ketua dan Ki Hadjar Dewantara sebagai Wakil Ketua.

Sesudah itu pada tanggal 3 Maret 1946 di Gedung KNI Malioboro diadakan pertemuan untuk mengumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang masih berstatus swasta, terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Sastera.

Pemberi sokongan terbesar untuk langsungnya pertumbuhan Balai Perguruan Tinggi itu adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Namun dibekukan karena penyerbuan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Barulah setahun kemudian, tanggal 19 Desember 1949 diadakan dan diresmikan perkuliahannya.

Tanggal 19 Desember 1949 merupakan hari jadi Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada yang diresmikan oleh Pemerintah, memiliki Fakultas-fakultas Sastera, Hukum, Teknik, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Pertanian, dan Kedokteran Hewan. Masing-masing Fakultas ini mempunyai riwayatnya sendiri-sendiri.

Pada hari itu pula ditetapkan Senat Universitas Negeri Gadjah Mad yang anggota-anaggotanya : Prof. Ir. Wredksodiningrat, Prof. Mr. Dr. Djokosutono, Prof. Dr. Prijono, Prof. Mr.

Soemarjokolopaking, Prof. Dr. Johanes, Prof. Mr. Pringgodigdo Prof. Soetopo, Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Abu-sari dan Drs. Suparwi, (Ketua).²²⁾

Susunan Dewan Kuator adalah Sri Paku Alam VIII (Ketua), Sutardjokartohadikoesoemo (Wakil Ketua), anggota-anggotanya : Dr. Kodijat, Ki Hadjar Dewantara, Prof. Ir. Wreksodiningrat, Mr. Hadi, Ir. Goenoeng Iskandar, kemudian ditambah dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Kehormatan, Mr. S. Poerwokoesoemo, Samadikoen dan Mustadjab sebagai anggota.

Pada *Dies Natalis* (Ulang Tahun) yang pertama dari Universitas Negeri Gajah Mada Yogyakarta, 19 Desember 1950 Prof. Dr. Sardjito mengucapkan pidatonya antara lain :

“Yang akan saya sajikan pada Dies Natalis, Hari Ulang Tahun yang pertama dari Universitas Negeri Gajah Mada Yogyakarta, ialah buah penyelidikan yang saya jalankan di waktu perjuangan pada tahun 1946—1947, di waktu saya memimpin Institut Pasteur dan Perguruan Tinggi Kedokteran Klaten. Penyelidikan dijalankan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembikinan vaccin-vaccin, obat-obat suntikan berhubung dengan kekurangan bahan-bahan penting yang disebabkan oleh blokade musuh”²³⁾

Sebelum berdirinya Universitas Gajah Mada itu telah didahului dengan berbagai persiapan. Karena Perguruan Tinggi bersangkutan dengan Kementerian lain-lain, maka diadakan rapat dari sebuah Panitia Perguruan Tinggi pada tanggal 2 Mei 1949 di bangsal Kepatihan Yogyakarta dipimpin oleh Dokter Soetopo yang dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Dr. Prijono, Prof. Dr. Sardjito, Prof. Ir. Wreksodiningrat, Ir. Harjono, Sugarda, Wakil Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Mr. Slamet Soetikno sebagai ahli kenegaraan.

Panitia Rapat menetapkan berhubung akan dibentuknya

Negara Federal Republik Indonesia, menyetujui adanya Perguruan Tinggi Federal, asal tidak mengurangi hak negara bagian untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi sendiri. Dan sebagai konsekuensi dari kembalinya Republik yang dimulai dengan seluruh daerah Yogyakarta, maka kemudian disanggupi menyusun kembali Perguruan Tinggi, khususnya oleh Prof. Dr. Prijono dan Ir. Harjono.

Prof. Dr. Srdjito juga turut sanggup, tetapi dengan meninjau kembali kemungkinannya, karena Perguruan Tinggi yang dipimpinnya terletak di luar daerah Republik yang telah dikembalikan, dan yang masih ada peperangan. Seandainya dapat memindahkannya, untuk pegawai-pegawai dan alat-alatnya harus ada pemikiran tempatnya pula.

Prof. Dr. Sardjito kembali ke Klaten membicarakan kemungkinan dengan dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang tempatnya berdekatan di situ, maka ditetapkan pemindahan ke Yogyakarta.

Dalam hal mendapatkan gedung maka atas kemurahan hati Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kegiatan Dr. Soetopo dapat dengan cepat dibahas dan mendapat jalan penyelesaian.

Meskipun *cease-fire-order* belum diperintahkan, pekerjaan pemindahan Perguruan Tinggi Klaten dimulai (perletakan senjata 3 Agustus 1949 jam 20.00).

Persiapan dapat berjalan baik, sehingga pada 1 Nopember 1949 Komplek Perguruan Tinggi di Kadipaten, ialah Fakultas Kedokteran Hewan dapat dibuka resmi, yang dihadiri juga oleh Presiden Soekarno; sedang pembukaan Fakultas Teknik, Akademi Ilmu, Politik dan Fakultas-Fakultas dari Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada jatuh pada tanggal 2 Nopember 1949.

Selanjutnya Sekolah Tinggi Hukum Negeri di Solo tersebut dalam sebuah Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Yogyakarta, yang persiapannya diserahkan kepada Prof. Mr. Drs. Notone-

goro dan pembukaannya di Yogyakarta dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 3 Desember 1949.

Pada waktu itu tiap Fakultas masih di bawah Kementerian yang bersangkutan, kecuali Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan yang ada di tangan Yayasan. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya dirasa akan lebih baik, bila Fakultas-Fakultas Negeri dipusatkan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Fakultas-Fakultas dari Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Penyerahan ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 1949, dan Fakultas Hukum dipersatukan dengan Sekolah Tinggi Hukum Negeri.

Pada tanggal 22 Mei 1950 atas nama Senat, dalam suatu pertemuan dengan orang-orang terkemuka dari masyarakat di mana hadir juga Acting Presiden R.I., dan Menteri-Menteri, Prof. Dr. Sardjito mempertahankan supaya Universitas Negeri Gadjah Mada tetap berada di Yogyakarta. Pendapat itu disetujui oleh Mr. Assaat, Acting Presiden R.I., dan Menteri P.P. dan K., Ki Mangunsarkoro dalam Kabinet Halim.

Untuk memperkuat kedudukan Universitas, maka diajukan juga dalam rapat Kabinet rencana Peraturan Pemerintah tentang Universitas Negeri Gadjah Mada dengan tujuan membentuk manusia susila yang cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila. Rencana ini disusun oleh Prof. Mr. Drs. Notonegoro dengan mengingat sepenuhnya resolusi dan pembicaraan khusus mengenai pendidikan dan pengajaran tinggi Republik Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta, dan akhirnya keputusan-keputusan pada Konperensi Antara Indonesia di Yogyakarta.²⁴⁾

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 dapat disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950, dan pada hari itu juga Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi dari Kementerian Kesehatan, Fakultas-Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan

dari Kementerian Pertanian diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.²⁵⁾

Senat Universitas pada hari itu juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa guru besar dan guru besar luar biasa ialah Prof. Ir. Reksohadiprodjo, Prof. Mr. Djojodiguno, Prof. Drs. Radiopoetro, Prof. Drs. Soewarwi, Prof. Ir. Harjono Danoesastro, Prof. Drs. Sardjono, Prof. Ir. Soenarjo, Prof. Ir. Poerbadinigrat dan Prof. Dr. Heubult.²⁶⁾

Pada tanggal 17 Agustus 1950 datanglah saat lahirnya kembali Negara Kesatuan R.I. dengan likuidasi dari Pemerintah R.I. di Yogyakarta dan pindahnya alat-alat negara ke Jakarta.

Perkembangan Universitas Negeri Gadjah Mada dari tanggal 1 Nopember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berjalan baik meskipun dengan banyak kesulitan. Namun dapat diatasi berkat kegiatan Kementerian yang bersangkutan, dan istimewa dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Hadi.²⁷⁾

Universitas Negeri Gadjah Mada berdasar atas kenyataan dan kebenaran Pancasila. DARI sebab itu Universitas Negeri Gadjah Mada mengandung tujuan :

- 1) Mendidik Mahasiswanya menjadi orang susila, budiman, berpekerti, cakap untuk mengabdikan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- 2) Memperkembangkan Ilmu pengetahuan, yang juga memberikan bahagia, seperti yang dikehendaki oleh Nusa dan Bangsa khususnya dan oleh dunia umumnya.
- 3) Ikut serta memperkembangkan hidup Kemasyarakatan, dan Kebudayaan dan juga mempertinggi budi luhur.²⁸⁾

Universitas Gadjah Mada mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah mahasiswa yang mendaftar pada tanggal 1 Nopember 1949 ada 463; pada penghabisan bulan Agustus 1950 ada 966; pada penghabisan bulan Agustus 1951 ada 1765, sedang pada penghabisan bulan Agustus

1952 ada 3.439, dan dari sebanyak itu mahasiswa yang baru ada 1.812.²⁹⁾

Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa itu sudah seharusnya semua alat-alat Universitas seperti gedung perkuliahan, kantor, laboratorium, perpustakaan, rumah sakit, bengkel, dan instrumen ditambah.

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan itu pada waktu Pemerintah R.I. masih di Yogyakarta sudah ada rencana akan mengadakan pembangunan pergedungan di Bulaksumur yang diperkirakan dapat menampung 10.000 mahasiswa. Cita-cita ini baru merupakan kenyataan pada *Dies Natalis* yang pertama tanggal 19 Desember 1950, yang dikunjungi oleh Wakil Presiden R.I., Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu Wakil Presiden membicarakan hal ini dengan Ketua Dewan Kurator dan Dewan Pengurus Senat. Hasil dari pembicaraan tersebut seperti tercantum dalam surat Wakil Presiden tanggal 30 Desember 1950, bahwa Universitas Negeri Gadjah Mada akan memperoleh uang Rp 15.000.000,— dibagi dua tahun, untuk pembelian tanah dan persiapan.³⁰⁾

Untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil para Mahasiswa yang sudah lulus ujiannya sampai tahun 1954 adalah sebagai berikut :³¹⁾

Dokter <i>Final Medical Exam</i> , Part II)	7 -
Drs. Ilmu Kedokteran (<i>Final Medical Exam</i> , Part I)	43
Dokter Gigi	4
Drs. Ilmu Kedokteran Gigi	3
Apotheker	2
Drs. Ilmu Hukum (Mr)	35
Baccala ureat Ilmu Hukum	38
Drs. Ilmu Sosial dan Politik	4
Baccalaureat Ilmu Sosial Politik	7
Drs. Ilmu Tehnik (Ir.)	37
Baccalaureat Ilmu Kimia	19
Drs. Ilmu Pertanian (Ir.)	5

Dengan berdirinya Perguruan Tinggi Negeri Gadjah Mada mempunyai pengaruh secara timbal balik antara Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat, antara lain menaikkan salah satu tugas menurut statusnya yaitu menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.³²⁾

Pengaruhnya terhadap masyarakat Yogyakarta khususnya seperti dalam lapangan sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik.

Universitas Gadjah Mada yang didirikan dalam masa revolusi kemerdekaan di kota Yogyakarta yang terkenal dalam segi perjuangan kemerdekaan, merupakan daya penarik terutama bagi pemuda luar Jawa.

Setelah masa revolusi itu selesai banyak sekolah menengah yang kekurangan tenaga guru dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga pengajar banyak mahasiswa yang sambil belajar, mengajar pada sekolah menengah. Di Yogyakarta terdapat puluhan sekolah menengah yang muridnya berasal dari dalam kota dan luar kota, bahkan banyak yang berasal dari luar Jawa. Mereka mulai datang di kota Yogyakarta sejak di sekolah menengah dengan maksud untuk persiapan mengikuti kuliah di Universitas Gadjah Mada.

Di samping itu ada pula mahasiswa yang memberikan pelajaran di luar Jawa dan untuk sementara berhenti dari kuliahnya.

Banyak mahasiswa tinggal di kampung bersama-sama masyarakat yang masih perlu bimbingan. Di situ para mahasiswa menjadi suluh bagi masyarakat di sekelilingnya. Mereka ikut membangkitkan minat rakyat untuk belajar. Ceramah dan isi majalah yang mereka tulis di desa itu kemudian disumbangkan pada harian untuk membantu pendidikan masyarakat.

Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang se-

luk beluk masyarakat untuk mempererat hubungan timbal balik, maka tiap bulan sekali diselenggarakan malam ceramah yang terbuka untuk umum. Juga diadakan kursus bagi guru-guru pada masa liburan untuk menambah kecakapan.

Usaha mempererat hubungan antara Universitas dengan masyarakat, ikut pula Persatuan Wanita Keluarga Universitas Gadjah Mada. Kecuali menggabungkan diri pada Permusyawaratan Organisasi-organisasi Wanita Yogya. Persatuan Wanita Universitas Gadjah Mada, juga melakukan tugas sosial. Anggota Persatuan itu selain isteri dosen, juga wanita lain yang mempunyai minat kepada usaha Universitas.

Beberapa rumah sakit yang diselenggarakan oleh Universitas dengan tenaga-tenaga ahli bersama mahasiswa-mahasiswanya ternyata telah memberikan pertolongan yang tidak ternilai bagi masyarakat Yogyakarta dalam lapangan kesehatan. Pengobatan dan pertolongan itu diberikan kepada mereka yang sakit hampir dengan cuma-cuma, dengan maksud untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Juga benih padi yang bermutu tinggi merupakan hasil penyelidikan Universitas Gadjah Mada untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

Yogyakarta sejak dahulu merupakan pusat kebudayaan para mahasiswa dari berbagai daerah dalam jumlah besar itu, juga mempelajari seni-tari, seni-gamelan, seni-musik, dan seni-seni yang lainnya. Kemudian timbul banyak perkumpulan kesenian yang menumbuhkan fikiran dan ciptaan baru. Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah yang masing-masing membawa kesenian daerahnya membuat Yogyakarta menjadi tempat tukar menukar dan pengaruh mempengaruhi antar-kesenian daerah dan dengan begitu terbentuk kesenian nasional. Mahasiswa berkali-kali mengadakan perlawatan ke daerah lain dan juga mengadakan pementasan yang dinikmati masyarakat.

Para mahasiswa dari berbagai daerah dalam jumlah ribuan itu, juga mendatangkan uang, di antaranya untuk membiayai keperluan hidup mereka, merupakan tambahan mata pencaharian

bagi penduduk Yogyakarta. Namun sebaliknya dengan makin bertambahnya konsumen, harga barang di kota Yogyakarta pada umumnya menjadi lebih mahal apabila dibandingkan dengan di kota-kota lainnya.

Universitas di Yogyakarta merupakan tempat pertemuan bagi ribuan pemuda dan pemudi dari berbagai suku bangsa Pergaulan dalam kampus Universitas, dalam asrama dalam perkumpulan mahasiswa, dalam perkumpulan seni dan olah raga, serta terjadinya perkawinan antar suku merupakan faktor penting dalam memperkuat persatuan bangsa.³³⁾

Peranan kota Yogyakarta selama masa revolusi kemerdekaan memberi pengaruh pada tiap individu mahasiswa untuk berbuat dan berjuang sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945. Mereka merupakan kader-kader bangsa. Hal ini adalah sumber potensi bangsa yang tidak dapat diabaikan.

b. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta merupakan pindahan dari Jakarta pada awal Proklamasi Kemerdekaan. Sekolah ini semula bernama Sekolah Tinggi Islam dan didirikan atas usaha Bung Hatta dengan dibantu oleh: Mr. Suwandi, Drs. Ramli, Farid Ma'ruf, K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Kahar Mudzakhir, dan K.H. Fathurrachman Kafrawi.

Karena Pemerintah membutuhkan sekali akan tenaga ahli Agama, maka dengan peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950 yang ditanda tangani oleh Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Assaat, Fakultas Agama dari Universitas Islam Indonesia dioper oleh Pemerintah.

Perguruan Tinggi Agama Islam ini semula mempunyai empat Fakultas yakni, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Agama.

Pada tanggal 26 September 1951 "Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 14 Agustus 1950 No. 34/1950 disertai dengan aturan

pelaksanaan yakni peraturan bersama, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 21 – 10 – 1951, No. K/1/14641. Agama dan pendidikan dibuka.³⁴⁾

c. *Universitas Islam Indonesia (UII)*

Universitas Islam Indonesia atau *Al Jami'ah Islamiyah al Indonesiyah* yang bertempat di Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan pada hari Mi'roj 27 Rejeb 1364/10 Mei 1948. Perguruan Tinggi Islam ini sebagai lanjutan dari Sekolah Tinggi Islam yang didirikan di Jakarta 27 Rejeb 1361/8 Juni 1945 dan merupakan penggabungan dengan Perguruan Tinggi Islam yang didirikan di Surakarta pada bulan Januari 150.

Universitas Islam Indonesia didirikan oleh suatu Badan Wakaf bernama Badan Wakaf U.I.I. dengan Akte Notaris Yogyakarta tanggal 22 Desember 1951 (Akte tersebut sebagai pembaharuan Akte Notaris Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, tahun 1945). Badan Wakaf tersebut mempunyai Dewan Kurator yang bertugas mengawasi Fakultas-fakultas pada U.I.I. ini ada dua :

- 1) Fakultas Hukum, di Yogyakarta dan Solo.
- 2) Fakultas Ekonomi.

Berdirinya Perguruan Tinggi Islam ini mendapat bantuan dari beberapa kementerian. Bentuk bantuan ini adalah pemberian Ikatan Dinas. Di antara beberapa Kementerian yang pernah mengadakan Ikatan Dinas dengan UII ialah: Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar (KUDP).³⁵⁾

d. *Sekolah Tinggi Agama Katolik*

Untuk mencukupi kebutuhan Imam (Pastur) bagi umat Katolik, maka pada tahun 1936 di Muntilan didirikan Perguruan

Tinggi Agama Katolik dengan nama Seminari Agung. Pada 2 tahun kemudian (1938), Seminar Agung ini dipindahkan dari Muntilan ke Mertoyudan, dan pada tahun 1940 dipindahkan lagi di Jalan Dode 2 Yogyakarta. Sampai tahun 1952 Seminar Agung telah menghasilkan 43 orang Pastur Indonesia.³⁶⁾

Banyak calon Imam (Pastur) dari tempat lain dikirim ke Yogyakarta untuk memperdalam pelajaran Agama.

Pelajaran dari Seminar Agung dibagi atas dua bagian :

- 1) Philosophia
- 2) Theologie.

Selanjutnya dalam philosophio diadakan pembagian lagi ialah: Kosmologi, Psychologi, Ethica, Theodica, Biologia dan Antropologia. Theologia dipelajari selama empat tahun, yaitu dengan mata pelajaran Theologia, Moral, Hukum, Kitab Suci, Sejarah Agama, Pengertian tentang Agama lain, Agama Islam, Hindu, Budha.

Pelajaran di Seminari Agung diselesaikan dalam waktu enam tahun. Sesudahnya seorang siswa dapat ditakbirkan menjadi Imam yang sama derajatnya dengan Pastur-Pastur yang lain.

e. Yayasan Sekolah-Sekolah Kristen BOPKRI (Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia)

Penyelenggaraan sekolah-sekolah BOPKRI di kota Yogyakarta dibagi menjadi tiga bagian :

- 1) Penyelenggaraan sekolah-sekolah sebelum Aksi Militer ke II (tahun 1945 sampai dengan tahun 1948)
- 2) Penyelenggaraan sekolah-sekolah pada waktu pendudukan tentara Belanda (tahun 1948 sampai dengan tahun 1949).
- 3) Penyelenggaraan sekolah-sekolah sesudah penarikan tentara Belanda hingga sekarang (tahun 1950 hingga sekarang).

Atas dasar pertimbangan politis dan juga untuk memberi kesempatan kepada anak-anak berjuang dengan senjata, BOP-

KRI menutu] semua sekolahnya pada waktu pendudukan tentara Belanda pada bulan Desember 1948 sampai dengan Desember 1949.

Berbagai Perintah Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1949 untuk membuka kembali semua sekolah dalam wilayah Republik Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kristen di Yogyakarta. BOPKRI segera membuka kembali sekolah sekolahnya yang antara lain :

- I. Taman Kanak-kanak :
 1. Gondokusuman
 2. Jalan Ungaran
 3. Bintaran Kulon
 4. Gondolayu.
- II. Sekolah Rakyat :
 1. S.R. Gondolayu
 2. S.R. Bintaran Kulon
 3. Jalan Ungaran (sekarang SD Jalan Ungaran)
 4. S.R. Demangan
 5. S.R. Klitren Lor
 6. S.R. Terban Taman.

Semua S.R. BOPKRI tersebut di atas mendapat subsidi/bantuan dari Pemerintah.
- III. Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMUP) :
 1. SMP BOPKRI I (Subsidi) Gemblakan
 2. SMP BOPKRI II (Subsidi) Bintaran Kulon
 3. SMP BOPKRI III (Subsidi) Gondokusuman 29
 4. SMP BOPKRI IV (Subsidi) Bintaran Kulon
 5. SMP BOPKRI V (Subsidi) Demangan
 6. SMP BOPKRI VI (Subsidi) Wirobrajan.
- IV. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) :
 1. SMA BOPKRI I (Subsidi) Gondokusuman 29
 2. SMA BOPKRI II (Subsidi) Gondolayu.
- V. Sekolah Guru tingkat B

1. SGB BOPKRI (Bantuan) Terban Taman.

VI. Sekolah Guru tingkat A

1. SGA BOPKRI (Bersubsidi) Gondokusuman 28

VII. Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (SGTK)

SGTK BOPKRI Gondokusuman 39.

VIII. Sekolah Kepandaian Putri (SKP)

SKP BOPKRI (bersubsidi) Bintaran Wetan.

f. Perguruan Islam

Di samping sekolah negeri dan yang didirikan Yayasan BOPKRI, dan Katolik maka tumbuh dan berkembang dengan suburnya perguruan yang dikelola oleh umat Islam, di antaranya Perguruan Islam Republik Indonesia (PIR), dan lebih-lebih dari Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini sejak jaman penjajahan Belanda Belanda telah tersebar ke berbagai daerah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagaimana pun kesulitan yang dihadapinya khusus pengalaman pahit dan penderitaan dalam masa pendudukan Belanda, maka di bawah ini merupakan petunjuk bahwa semangat juang untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang cerdas tetap terwujud dengan penyelenggaraan sekolah-sekolah sampai pada triwulan pertama tahun 1951, PIRI sudah berhasil mendirikan :

SGA 1 kelas

SMA 10 kelas

SMP 5 kelas

SGB 2 kelas

Pers. SGA 1 kelas

19 kelas, dengan murid 700 orang, gurunya 60 orang.

Pada akhir tahun 1952

SGA 6 kelas

SMA 13 kelas

SMP	11 kelas
SGB	11 kelas

41 kelas dengan murid 1.400 orang.

g. Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah

Setelah delapan tahun mengenyam kemerdekaan jumlah Sekolah Muhammadiyah dalam daerah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bustanul-Atfal (Taman Kanak-kanak)	7 buah
S.R. III	5 buah
S.R. VI (Bersubsidi)	10 buah
S.R. VI (Masih mendapat sokongan)	10 buah
S.M.P. Puteri dan Putera (Bersubsidi)	2 buah
S.M.P. Sore	3 buah
S.M.A. (Pagi) bagian A. dan B	1 buah
S.M.A. (Sore) bagian A B dan C	1 buah
S.G.A.	1 buah
Mualimat (Sekolah Guru Agama) Puteri	1 buah
Mualimin (Sekolah Guru Agama) Putera	1 buah
Darul Ulama (Sekolah Menengah Agama)	1 buah
Sekolah Pertukangan bagian kayu	1 buah
Sekolah Pertanian	1 buah

h. Sekolah-sekolah lainnya dalam Kotamadya Yogyakarta

SGPD

Dengan surat keputusan Menteri P.P. dan K pada bulan Agustus 1950 dibuka Sekolah Guru Pendidikan Jasmani. Adapun yang diterima menjadi murid, tamatan dari SMP bagian A dan ST. dengan syarat-syarat menempuh ujian. Dalam SGPD lama pelajaran 4 tahun, dan setelah lulus dari ujian penghabisan diperbolehkan mengajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Selain daripada itu mereka dapat juga menjalankan pekerjaan instruktur pendidikan jasmani untuk S R. perusahaan, kantor besar. Asrama perkumpulan olah raga, pusat latihan pemuda atau Angkatan Perang.

SGKP

Sekolah Guru Kepandaian Putri didirikan pada 1 Januari 1946 pindahan dari SGTP Jakarta. Sekolah ini dalam penjajahan Jepang pada bulan Nopember 1942 didirikan di Jakarta dengan nama Sekolah Guru Tinggi Putri (SGTP) di bawah Pimpinan Dr. Prijono. Setelah Proklamasi diumumkan pada guru SGTP berkumpul di Gedung Musium Jakarta untuk disumpah kesetiaannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia.³⁷⁾

Dalam perkembangannya, Kepala Sekolah itu mengalami pergantian pula. Pada tahun pelajaran 1950/1951 SGKP dipimpin oleh N. Kartini Prawirotenojo dan mulai tahun 1951 pimpinan dipegang oleh Nona Rukajah.

SGA Negeri (Sekolah Guru 6 tahun)

Sekolah Guru 6 tahun ini diperlukan sekali untuk mempertinggi mutu guru, serta dikandung maksud agar guru Sekolah Rakyat di Indonesia paling sedikit berpendidikan 6 tahun setelah Sekolah Rakyat. Maka sesuai dengan maksud Pemerintah, sejak bulan Nopember 1947 didirikan SGA yang pertama di Indonesia.

Pendidikan di SGA ini lamanya 3 (tiga) tahun, dan yang dapat diterima sebagai murid, mereka yang berijazah SMP atau murid SGB kelas III yang naik ke kelas IV dengan melalui seleksi.

SGB Puteri

Sekolah Guru B Puteri yang didirikan pada 7 Nopember 1942, dan kemudian pada 1 April 1943 dipindah dari tempat lama (Jetis) ke tempat baru di Gedung Jalan Jati 2 di bawah pimpinan Sri Umijati, adik almarhum Dr. Sutomo, Surabaya.

Pada waktu kota Yogyakarta diduduki Belanda SGP ditutup tanggal 18 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949. Sekolah tersebut mulai dibuka lagi pada 8 Agustus 1949. Dari tahun 1950 sampai dengan 1952 hasil SGP yang lulus dalam ujian peng-

habisan ada 142 orang, yang melanjutkan dari kelas 3 ke kelas 4 ada 19 orang, dan yang ke SGA ada 11 orang.³⁸⁾

Dalam masa perjuangan melawan Belanda selama Aksi Militer II baik guru maupun murid-murid telah memberikan andil yang besar pula yaitu dengan memberi bantuan bahan makanan kepada beberapa keluarga yang terlantar. Kepala Sekolahnya ialah Ibu Kamdiah yang pernah didatangi serdadu Belanda, supaya para murid yang pada waktu itu masih ada 50 orang tinggal di Asrama suka membantu mereka untuk mencuci pakaian-pakaiannya, maka permintaan ini ditolaknya dengan tegas.

Di samping itu para murid dan guru berperan sebagai penghubung yang penting dan utama dari tentara kita dalam kota ke daerah gerilya.

Sekolah Teknik Negeri I dan II Yogyakarta

Sekolah Teknik Negeri I yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1943 yaitu saat Pemerintahan pendudukan Jepang di-rasa masih belum dapat menampung animo para pelajar dan dipandang perlu sekali untuk ditambah, maka pada tanggal 10 April 1950 Pemerintah di Yogyakarta meresmikan berdirinya Sekolah Teknik Negeri II. Karena saat itu belum tersedia gedung berikut perlengkapannya, maka sementara masih menumpang pada STM Negeri Yogyakarta.

Sekolah Teknik Menengah (STM)

STM adalah penjelmaan dari SMTT (Sekolah Menengah Tinggi Teknik) didirikan sesudah Proklamasi Kemerdekaan, di bawah pimpinan Abidin. Sekolah ini didirikan di Bandung. Karena dalam tahun 1946 Bandung diduduki tentara Belanda maka SMTT pindah ke Yogyakarta, dan tetap dipimpin Abidin.

Dalam pendudukan Belanda STM ditutup dan seluruh arsip dan seluruh peralatannya hilang lenyap. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta, pada tanggal 17 Agustus 1949 Sekolah dibuka kembali di bawah pimpinan Stambul Kolopaking.

Sekolah yang hanya satu itu dianggap masih kurang 'an kemudian pada bulan Maret 1950 dibuka STM II. Kedua Sekolah ini dipegang satu tangan.

SMP Negeri

Sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka di kota Yogyakarta ada 5 buah Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Pertama I, II dan ke V didirikan dalam masa pendudukan Jepang, SMP III (1946), dan SMP IV didirikan pada 15 Pebruari 1950, di Jalan Payung.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Sri Sultan sebagai Koordinator Keamanan, memerintahkan agar sekolah-sekolah yang pada masa pendudukan ditutup, dapat dibuka kembali, dan SMA/A pun tidak ketinggalan pula. Adapun yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pembukaan sekolah-sekolah itu adalah Sugarda.

Kecuali guru-guru yang tetap, misalnya Djaelani Kuntjoro, Padmopuspito, Duliman, Subroto dan Bakri Siregar, juga mendapat bantuan tenaga-tenaga istimewa misalnya Mr. Ny. Prijono (Isteri Dr. Prijono), Ny. Suriadarma, Ny. Efendi Saleh, dan lain-lain.

Murid-muridnya selalu bertambah, karena dibanjiri murid-murid asal dari SMA/A Negeri atau Partikelir dari tempat lain. Suatu keuntungan pula SMA/A mendapat bantuan tenaga guru baru yakni Subagio Sastrosatomo, Maramis, Mr. Im. Supomo, Mr. Nitidipuro, Mr. Suhadi, Drs. Sutjipto, dan Prof. Dr. Prijono. Kemudian karena masyarakat sangat membutuhkan maka dibuka SMA/A II.

Sejak pertengahan tahun 1950 setelah keadaan agak normal diadakan pergantian pemimpin dari Mardowo, diganti Sunarso Haditjaroko.

i. Akademi Seni Rupa Indonesia

Pada tahun 1950 di Yogyakarta didirikan Akademi Seni Rupa oleh Menteri PPK. Guru-guru yang memberikan pelajaran pada Akademi ini sebagian terdiri dari pelukis yang berasal dari perkumpulan yang ada pada saat itu, antara lain perkumpulan Pelukis Indonesia, guru-guru gambar, dan beberapa dokter yang memberi pelajaran anatomi.

Dengan berdirinya perguruan ini, sebagian bibit seniman muda telah dapat tertolong, sedang sebagian pelukis yang hendak memberikan pikiran atau jalan bagi angkatan muda sudah terjawab, meskipun belum sempurna.

Siswa ASRI terbagi atas 5 bagian, yaitu jurusan pelukis, pematung, ahli ukir, ahli reklame dan guru gambar. Mereka merupakan generasi muda yang dapat diharapkan bagi cita-cita bangsa. Pada tahun 1951 dan 1952 diadakan eksposisi bertempat di pendopo Museum Sonobudoyo dengan mendapat perhatian besar.

PIM "Pelukis Indonesia", adalah perkumpulan-perkumpulan yang termuda di Yogyakarta didirikan oleh para siswa ASRI kelas tertua.

Sejak tanggal kelahirannya 15 Januari 1950 ASRI mengalami perkembangan, yaitu memiliki 5 bagian:

Bagian Seni Lukis (yang disebut Bagian I)

Bagian Seni Patung dan Pahat (Bagian II)

Bagian Seni Kerajinan dan Pertukangan (Bagian III)

Bagian Seni Reklame, Dekorasi, Ilustrasi dan Grafik (Bagian IV)

Bagian Seni untuk Guru Seni Rupa/Guru Gambar (Bagian V).

Kelima jurusan itu, yang berlainan sifat dan tujuannya, meskipun semuanya mempunyai dasar seni, secara kenyataannya tiap-tiap bagian itu berdiri sendiri, dan mempunyai susunan pelajaran sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan jurusannya.

Lama pendidikan semula bagi jurusan Seni Lukis, Seni Patung dan Pahat dan Seni Kerajinan dan Pertukangan diren-

canakan 3 tahun dengan mengambil tamatan dari SMP dan ST (3 tahun).

Berdirinya ASRI ini telah memberikan sumbangan besar bagi pendidikan kesenian di daerah Yogyakarta khususnya, dan bahkan bagi Indonesia. Siswa yang telah berhasil lulus, kemudian dapat berdiri hidup di tengah-tengah masyarakat.

j. Perguruan Taman Siswa

Bagi bangsa Indonesia nama Taman Siswa tidak asing lagi, karena sejak kelahirannya pada tanggal 22 Juli 1922, bersama-sama dengan Muhammadiyah berjuang menyediakan kader bangsa yang tangguh. Riak gelombang serta pahit getir dalam usaha melangsungkan cita-citanya dalam bidang pendidikan di alam penjajahan Belanda, telah menempatkan kota Yogyakarta dalam panggung sejarah bangsa Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Taman Siswa lebih giat lagi agar cita-citanya untuk pengikisan kebodohan rakyat dan membawa ke tingkat yang lebih tinggi lekas tercapai.

Dalam Konperensinya pada bulan Agustus 1946 diputuskan bahwa Taman Siswa dalam zaman kemerdekaan masih perlu ada. Demikian pula pada tanggal 1 hingga 5 Maret 1950 Taman Siswa mengadakan Rapat Besar Umum yang ke VI di Yogyakarta dengan mengambil beberapa keputusan:

- 1) Menerima Rencana Peraturan Dasar Taman Siswa keputusan RBU tahun 1947 dengan beberapa perubahannya.
- 2) Penggunaan bahasa asing di Taman Siswa, yakni bahasa Inggris; sedang di Taman Madya: bahasa Inggris, Perancis dan Jerman; Fakultatif: bahasa Tionghoa, Arab dan Hindustan.
- 3) Preadvis Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan dan Kebudayaan dasar-dasarnya ditanamkan.
- 4) Mendesak kepada Pemerintah agar keputusan Konperensi Antar Indonesia tentang sekolah umum 6 tahun dan me-

upakan bahan bagi Majelis Luhur dilaksanakan.

- 5) Penegasan tentang kepengurusan Majelis Luhur. Ki Hadjar Dewantara tetap diakui sebagai Bapak Taman Siswa.

Kecuali itu kongres memutuskan membuat resolusi menanggapi perjanjian KMB dalam lapangan kebudayaan yang isinya memutuskan mencegah dengan sekuat-kuatnya timbulnya bahaya penjajahan kebudayaan, yang disebabkan karena pelaksanaan persetujuan KMB. Pokok-pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama dengan seluruh rakyat umumnya dan badan-badan kebudayaan khususnya memelihara dan menjaga kebudayaan kebangsaan kita agar terlepas dari bahaya tersebut.
- 2) Menyokong politik Pengajaran Republik Indonesia.
- 3) Mendesak agar Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran RI yang sudah disetujui dan diterima oleh Badan Pekerja KNIP segera dilaksanakan untuk seluruh Indonesia.³⁹⁾

Selanjutnya Konsulat Majelis Luhur yang berkedudukan di Jakarta yang semula bertugas mengkoordinasi cabang-cabang di luar daerah Republik Indonesia, karena keadaannya sudah diganti, lalu dalam kongres itu dibubarkan.

k. Sekolah-sekolah Tionghoa

Tahun 1948 menjadi kenang-kenangan untuk sekolah *Kiauw Pao* di Yogyakarta karena pada tahun itu pendidikan Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta khususnya mengalami masa yang gemilang. Pada tahun itu didirikan sebuah rumah gedung Sekolah Rakyat Tionghoa ke 2 di Notoyudan yang makan biaya kurang lebih Rp. 4.000.000,— (empat juta Ori). Dari biaya sebesar itu yang dibayar oleh Ong Tiong Tjui Rp. 2.500.000,—. Dengan demikian Ong Tiong Tjui membiayai 70% dari ongkos semua.

Setelah tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta, maka ada beberapa orang anggota pengurus tanpa pemberitahuan meninggalkan kewajibannya. Pada masa itu perkumpulan Tionghoa di Yogyakarta membutuhkan bantuan moril maupun materiil sebanyak-banyaknya. Guru-gurunya banyak yang meninggalkan Yogyakarta. Berhubung datangnya keadaan yang demikian itu mendadak, maka perkumpulan menjadi setengah beku, segala sesuatu tidak dapat berjalan seperti biasa. Berkat kegiatan guru-guru yang masih tinggal di Yogyakarta serta kegiatan dari anggota pengurus maka dapat dibuka kembali dalam beberapa hari saja.

1. SMA/B II

Pada tanggal 16 Januari 1950 SMA/B II dibuka di Yogyakarta di bawah pimpinan Suwito Puspokusumo yang pada ketika itu merangkap menjadi Direktur SMA bagian C Yogyakarta.

Pada hakekatnya SMA/B II dibuka berhubung Pemerintah berhasrat menghargai jasa-jasa dari pejuang-pejuang yang pada waktu yang lalu dengan gagah berani ikut serta membela kemerdekaan Negara.

Pada bulan Oktober 1950 oleh karena SMA/B II dan SMA/C bertambah jumlah muridnya dan bertambah kelas, maka Suwito Puspokusumo menyerahkan pimpinan SMA/B II kepada Hartono.

SMA/B II bagi kebanyakan orang dinilai sebagai SMA peralihan. Hal ini tidak benar. SMA/B II Yogyakarta adalah SMA Negeri bagian B biasa atau umum (dapat menerima murid-murid kalau memenuhi syarat-syarat untuk bagian B, tetapi diistimewakan bagi murid-murid bekas pejuang yang memenuhi syarat-syarat untuk bagian B). Maka dengan demikian bahwa sebagian besar murid SMA/B II dari bekas-bekas pejuang. SMA/B II ini bertempat di Tamankrido No. 7 (bekas gedung AMS afd B). dibuka pada sore hari jam 13.30 sampai jam 19.00 karena

pada waktu pagi gedung itu dipakai oleh SMA/B I.

SMA/B II mulai pada 16 - 1 - 1950 menerima kelas 1-2 kelas, mempunyai 56 murid putera dan 4 puteri. Kelas II-2 kelas, mempunyai 47 orang putera dan 2 murid puteri. Kelas III-2 kelas, mempunyai 6 murid putera dan 7 murid puteri. Jadi jumlah 6 kelas dengan mempunyai 176 murid.

Pada saat itu SMA/B II mempunyai guru tetap 1, guru tidak tetap 28, pegawai administrasi 3 dan pekerja 4 orang.

Sesudah 2 bulan, yaitu pada 13 Maret 1950 kelas satu (I) menjadi 3 kelas dengan 60 murid putera dan 6 puteri. Kelas II menjadi 3 kelas dengan 79 murid putera dan 3 puteri. Kelas III menjadi 3 kelas dengan 85 murid putera, dan 12 puteri. Jumlah menjadi 9 kelas dengan 274 murid. Berarti sesudah 2 bulan bertambah 3 kelas dan tambahan murid 99 orang.

Kemudian SMA/B II mempunyai: Kelas I - 4 kelas dengan 101 murid putera dan 17 puteri. Jumlah 10 kelas. Kelas II - 4 kelas dengan 105 murid putera dan 2 puteri, dengan mempunyai kelas III - 2 kelas dengan 69 murid putera, dan 2 puteri/294 murid. Mempunyai guru tetap 9 orang, guru tidak tetap 29, pegawai administrasi 5 dan pekerja 5 orang.

Karena sekolah dibuka pada sore hari, maka timbul kesukaran antara lain:

- 1) Banyak murid pindah ke sekolah lain, terutama murid puteri.
- 2) Guru kebiasaannya pada pagi hari bekerja pada sekolah atau Jawatan lain, atau mengikuti kuliah. Mereka ini selalu tergesa-gesa dan mengejar waktu agar jangan terlambat; mungkin sampai lupa makan siang.
- 3) Direktur selalu berdiri dengan hati berdebar-debar bersedia akan menjalankan tugasnya apabila seorang guru terlambat atau tidak hadir.
- 4) Para pegawai tata usaha terpaksa bekerja 10 sampai 12 jam tiap hari karena mereka harus masuk pagi untuk ber-

hubungan dengan kantor-kantor atau jawatan-jawatan lain.

- 5) Soal listrik pun memegang peranan penting karena pelajaran selalu terganggu kalau lampu mati.
- 6) Air minum pun turut menyusahkan, karena mulai jam sekolah dibuka jam 13.30 air minum tidak mengalir lagi.

Walaupun ada berbagai kesukaran yang harus dihadapinya, namun dapat diatasi dengan hasil yang menggembirakan.

Pada bulan Agustus 1950, yaitu pada ujian penghabisan umum ketika itu SMA/B II baru berjalan 6 bulan, karena 2 bulan libur, telah lulus 4 orang dari 7 murid = 57%. Bulan Desember 1950 lulus 79 orang dari 114 murid = 73%. Jadi rata-rata dalam tahun pelajaran 1949/1950 ada 69% lulus. Kemudian bulan Agustus 1951 lulus 74 orang dari 88 murid = 84%. Nopember 1951 lulus 9 orang dari 14 murid = 64%. Jadi rata-rata dalam tahun pelajaran 1950/1951 lulus 81%. April/Mei 1952 lulus 39 orang dari 47 murid = 83%. Jadi tiap-tiap tahun SMA/B II turut mengadakan ujian penghabisan dua kali.

Dengan tidak mengingatkan payah atau kesukaran, putera-putera yang pada beberapa waktu yang lalu sebagai Pejuang turut bertempur di medan perang, dapat dididik dalam waktu yang singkat.

m. SMA/C

Pada tanggal 17 September 1949 di Yogyakarta telah dibuka Sekolah Menengah Umum bagian Atas bagian Yuridis Ekonomis (SMA/C). Sebelum pemulihan kedaulatan, masyarakat Yogyakarta belum memiliki SMA/C. Sebelum aksi militer II hanya beberapa kota saja yang mengenal SMA/C, antara lain Surakarta dan Magelang. Mengingat kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga menengah, maka sekitar tahun 1946 diciptakanlah sebuah SMA baru yaitu bagian Yuridis Ekonomis. Pada jaman Jepang di Surakarta terdapat sebuah Sekolah

Menengah Atas Pamong Praja, yang ditutup hampir bertepatan waktu dengan proklamasi kemerdekaan, karena sekolah semacam ini dirasakan tidak sesuai lagi dengan panggilan jaman. Tetapi lalu timbul persoalan ialah:

- 1) Bagaimana cara menampung pelajar SMA Pamong Praja yang belum selesai pelajarannya?
- 2) Bagaimana cara mengisi kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga dalam pelbagai lapangan, misalnya Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Perdagangan dan sebagainya.

Persoalan ini dipecahkan oleh para perencana, yang salah seorang anggotanya terkemuka adalah Mr. RM Widodo Sastrodiningrat dengan melahirkan SMA Yuridis Ekonomis. Dengan pendirian sekolah ini dikandung tujuan:

- 1) Memenuhi kebutuhan Negara akan tenaga menengah pada pelbagai jawatan, misalnya Pengadilan Negeri, Pamong Praja.
- 2) Memberi jalan kepada siswa-siswanya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Pelajaran yang diberikan antara lain: hukum negara, hukum pidana, hukum sipil dan dagang (bagian Yuridis) dan ekonomi umum, ekonomi perusahaan, urusan uang dan kredit, ilmu bumi perekonomian.

Di samping pelajaran umum, terdapat pula mata pelajaran hitung dagang dan memegang buku, hingga dengan demikian siswa-siswa SMA/C tidak akan canggung menghadapi pekerjaan pada jawatan Pemerintah, pula tidak akan asing apabila ditempatkan pada perusahaan swasta.

Dengan adanya penyerbuan Belanda ke kota Yogyakarta maka untuk sementara sekolah tersebut terhenti. Baru setelah Pemerintah melancarkan tugasnya, maka dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K Nomor 210/B tanggal 27/10 1949 yang mulai berlaku pada 27 - 9 - 1949 dibukalah SMA/C Yogyakarta di bawah pimpinan Hadiwidjono.⁴⁰⁾

Dalam tahap pertama tempat pelajaran bagi sekolah tersebut sangat memprihatinkan, karena tidak memiliki gedung sendiri dan hanya menumpang pada gedung SMA Puteri Stella Duce, kemudian menumpang pada gedung SMA Negeri B Atas usaha Hadiwidjono dengan bersusah payah, maka segala kesulitan dapat diatasi.

Setelah SMA/C agak menjadi besar dan Hadiwidjono sangat sibuk pula dengan tugasnya yang utama, ialah memimpin SMA Negeri bagian Sastera dan membantu Fakultas Sastera, maka datang penggantinya, yaitu RM Soewito Poespokoesoemo.

Di bawah pimpinan RM Soewito Poespokoesoemo dimulai penyempurnaan isi dan corak SMA/C, yang baru sama sekali. Dari angka-angka di bawah ini ternyata bahwa SMA/C mendapat perhatian lebih daripada memuaskan, baik dari anak maupun orang tua.

Tahun Pelajaran	Jumlah Murid	Tambahan dinyatakan dengan %
1949/1950	82	—
1950/1951	129	59
1951/1952	335	160
1952/1953	392	14

4. *B u d a y a*

Perkembangan Kebudayaan/Kesenian Daerah Istimewa Yogyakarta kelihatan pesat setelah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan suatu peraturan pemberian subsidi kepada Badan-badan Kebudayaan/Kesenian ter-tanggal Yogyakarta 1 Pebruari 1950 Nomor 89/K sewaktu Menteri PP dan K dijabat oleh S. Mangoensarkara.⁴¹⁾

Lebih-lebih sesudah ada usaha persiapan penyerahan tugas memimpin dan memajukan kesenian seperti yang dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 3 Pasal XII Sub lampiran serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 Pasal Sub f yang menyatakan bahwa urusan kesenian dari Kementerian PP dan K harus diserahkan kepada Pemerintah Otonom, maka menjadi lebih pesat lagi.⁴²⁾

Pada waktu itu di Ibukota Yogyakarta sendiri oleh Pemerintah Kotapraja sudah dibentuk suatu badan yang disebut Badan Kesenian Kotapraja yang diserahi mengurus hal ihwal perkembangan Kesenian di dalam kota.

Pada Jawatan PP dan K Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk pula Bagian Kebudayaan yang bertugas memperhatikan, mendorong dan memajukan kesenian di seluruh kota Yogyakarta.

Kemudian di tiap ibukota Kabupaten di seluruh Daerah Istimewa juga sudah didirikan sebuah badan yang disebut Balai Kesenian Kabupaten dengan tugas yang sama seperti tersebut di atas di dalam wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa di tiap Kapanewon, bahkan sampai di desa-desa yang di situ berdiam pendukung-pendukung seni budaya daerah, tentu dapat dipastikan ada perkumpulan karawitan, tarian, wayang, ketoprak dan sebagainya.

a. Perkumpulan-perkumpulan Karawitan

Semenjak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945, dunia karawitan Yogyakarta tampak benar-benar kemajuannya yaitu dengan adanya usaha para empu gending dan ahli musik karawitan untuk mengadakan pembaharuan dalam cara serta ramuannya baik vokal maupun instrumental.

Mulai tahun 1950 banyak percobaan dilakukan oleh para ahli ilmu karawitan untuk mendapatkan lagu, dan irama baru, karena kemungkinan-kemungkinan masih terbuka lebar bagi perkembangan karawitan daerah.

Pada pokoknya irama dan lagu-lagu gending itu berirama laku empat. Kalau dalam seni suara musik terdapat irama lagu tiga, maka lagu tiga pun dicoba dilakukan dalam gending Jawa. Setelah diadakan berbagai percobaan ternyata pada dasarnya semua irama laku empat itu dapat dilakukan dalam irama laku tiga, seperti dibuktikan oleh R. Ch. Hardjosubroto, Pegawai Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K dalam ciptaannya *Langen Sekar* dan lain-lain yang bagi masyarakat Yogyakarta tidak asing lagi.

Usaha untuk menciptakan suasana baru dalam alam karawitan, dengan sangat berani telah digalang dari studio RRI Yogyakarta di bawah bimbingan Ki Ng. Tjokrowarsito pada tiap-tiap siaran manasuka.

Penyesuaian untuk lagu tiga ini apabila dapat tersebar merata di kalangan masyarakat kesenian daerah, akan mendorong dan menggerakkan kepada para ahli seni tari untuk menciptakan tari-tarian baru.

b. Seni Tari

Perang Dunia I tahun 1914–1918 ternyata telah mempengaruhi keadaan seni tari di Yogyakarta. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berniat memberi pelajaran seni tari. Maka atas desakan dari Pergerakan Pemuda *Jong Java* yang menginginkan diberikan pelajaran tari dan gamelan, maka pada tanggal 17 Agustus 1918 berdirilah perkumpulan seni tari di Yogyakarta bernama *Krida Beksa Wirama*.

Dalam perkembangannya gerak langkah Krida Beksa Wirama (KBW) mengalami pasang surut. Dengan datangnya penyerbuan Belanda ke kota Yogyakarta latihan-latihan dari KBW pun mengalami gangguan dan kurang lancar. Meskipun dirintis adanya gagasan untuk mengaktifkan kembali kegiatan KBW namun hal tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 25 Desember 1949. Selanjutnya terbentuklah organisasi *Irama Tjitra*, dan sebagai ketua pertama Astuti Notojudo yang bertugas menerus-

kan latihan yang telah dirintis sebelumnya di Wiyata Praja.

Pada akhir tahun 1954 oleh Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K di Yogyakarta dikeluarkan uang subsidi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta guna usaha memelihara dan mengembangkan kesenian daerah. Maka dibentuklah Balai Kesenian Rakyat di masing-masing Kabupaten dan Kotapraja dari Jawatan PP dan K Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak pertengahan tahun 1955 subsidi telah berhenti, sehingga mengakibatkan terbengkelainya usaha di masing-masing Kabupaten/Kotapraja itu.

Suatu peristiwa yang penting bagi sejarah perkembangan seni tari gaya Yogyakarta, ialah dengan diselenggarakannya Konperensi Seni Tari Yogyakarta pada tanggal 7 sampai 12 Nopember 1955 dan selanjutnya menghasilkan terbentuknya sebuah organisasi bernama *Badan Kontak Seni Tari Corak Yogyakarta*.

Dengan usaha pembinaan seni di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tidak mengherankan apabila kemudian banyak putera-puteri yang memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tersebut. Telah banyak pula putera-puteri Yogyakarta menyumbangkan tenaganya kepada Pemerintah dalam lapangan kesenian untuk keperluan tukar menukar kesenian antar Indonesia yang dikirim ke luar negeri yang mendapat hasil gilang gemilang.

Dalam masa pembangunan mengisi kemerdekaan, maka mulai tahun 1950 masyarakat angkatan muda sibuk membuat percobaan-percobaan serta menciptakan tarian baru seperti *Sarira*, *Jayaprana*, *Kuda-kuda*, *Layang-layang*, *Langensekar* dan sebagainya.

Apabila perkembangan seni tari pada umumnya mengalami kemajuan, sebaliknya seni tari wanita kelihatan mundur. Hal ini karena adanya orang yang masih memandang rendah kepada seni tari Waranggana berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang kurang sedap dipandang.⁴³⁾ Pada hal seni tari wanita ini

dapat memberikan selingan dalam acara-acara khitanan, perkawinan dan sebagainya.

Dua peristiwa penting di Yogyakarta Hadiningrat yang perlu dicatat ialah adanya pertukaran kesenian tiga Daerah Yogyakarta, Surakarta dan Jawa Barat yang pertama diselenggarakan oleh Jawatan Kebudayaan pada tahun 1953 dan *last but not least*. Seminar Ilmu Kebudayaan diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada yang antara lain dikupas dan dibahas "Gamelan dan Tari Dipandang Secara Musiko grafis", pada tanggal 22 Juni 1956 yang diucapkan oleh Prof. Ir. Purbadiningrat serta Ki Sinduswarno, Guru pada Konservatori Karawitan Kementerian PP dan K.⁴⁴⁾

Adapun nama-nama Badan Kesenian khususnya bagian Seni Tari di daerah Yogyakarta yang melakukan kegiatannya, antara lain: Badan Kontak Seni Tari Yogyakarta, Irama Citra, Among Beksa, Krida Beksa Wirama, Marsudi Wirama, Siswa Budaya, Cipta Budaya, Paguyuban Setya Budaya dan Mudo Bekso Wirama.

c. Seni Kerajinan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai hasil kerajinan antara lain, kerajinan perak, kerajinan emas, perunggu, kuningan, kerajinan gongso, seni kerajinan aluminium, seni kerajinan pusaka, mengukir batu, mengukit kayu, baik, kerajinan penyu dan tanduk dan sebagainya.

Masing-masing cabang seni kerajinan ini memiliki corak serta perkembangan yang berbeda, seperti kerajinan emas yang tampak mundur sejak sebelum Perang Dunia II. Pada zaman dahulu banyak kemas (ahli seni kerajinan emas) yang membuat barang besar yang terakhir dan dihias dengan permata atau batu-batu dan rojowerdi untuk keperluan keraton, bangsawan dan hartawan-jutawan umpama; gendogo, angsa, ayam, naga, rusa, peten, pondok dan sebagainya. Tetapi pembuatan barang emas

itu makin lama makin berkurang, bahkan akhir-akhir ini orang hanya membuat perhiasan yang bersifat umum, misalnya gelang, kalung, subang, cincin dan sebagainya.

Dalam hal seni kerajinan perunggu terkenal seorang ahlinya bernama Ki Atmoredjoso yang telah meninggal pada zaman Jepang. Banyak karya yang dikerjakan dan diciptakannya. Anaknya meskipun mulai kecil juga telah dididik dan diberi bimbingan dalam hal tersebut, namun kepandaiannya belum dapat menyamai ayahnya, sehingga perkembangan seni kerajinan perunggu mengalami kemunduran.

Seni kerajinan kuningan karena dalam pengerjaannya tidak begitu berat dan sulit, meskipun sebelum perang mengalami kemunduran, tetapi kemunduran itu masih dapat diatasi untuk dipertahankannya. Kesulitan sebenarnya terletak pada modal dan pasar. Dari bahan kuningan ini oleh para ahli dibuat bermacam-macam barang, seperti standard lampu, alat meja tulis, klinting-klinting, bende dan sebagainya.

Seni kerajinan gongso adalah campuran bahan semacam perunggu, teristimewa dipergunakan untuk meniru barang perhiasan dari emas. Barang-barang tadi dinamakan imitasi. Berhubung dengan tingginya harga emas, maka barang yang dibuatnya mengalami kemajuan pesat terutama di luar Jawa.

Tentang seni kerajinan aluminium yang telah banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan ukiran yang menarik antara lain: tempat buah, tempat abu rokok, sendok, serta tempat dan tutup gelas.

Satu-satunya ahli seni kerajinan pusaka ialah Ki Empu Sopowinangun. Sebelum Perang Dunia II banyak membuat keris untuk para bangsawan, abdi dalem dan para peminat lainnya. Namun sampai dengan tahun 1949 pekerjaan Ki Soma-winangun tampak sepi.⁴⁵⁾

Setelah Belanda mengundurkan diri dari Yogyakarta, mulai tahun 1950 sedikit demi sedikit Ki Supo mendapat pekerjaan lagi, sehingga pada tahun 1952 pekerjaan itu cukup untuk

menggerakkan perapennya sehari-hari.

Sejak zaman dahulu kala Daerah Istimewa Yogyakarta telah terkenal juga sebagai pusat seni kerajinan mengukir kayu, tetapi karena titik berat seni kerajinan itu terletak pada pendidikan dan pemeliharaan, maka soalnya tak dapat disamakan dengan perusahaan pengukir kayu di tempat lain yang tujuannya terutama ke arah perdagangan, dan bahkan bila dipandang perlu dan keadaan memaksa, mereka menomor-duakan seni-ukirannya. Karena itu maka seni ukir kayu di Yogyakarta belum mengenal pasar seperti di Bali, Jepara dan sebagainya.⁴⁶⁾

Mengenai seni kerajinan baik semula menggambarkan ciri ketangkasan dan kebaktian seorang wanita terhadap kewajiban-kewajibannya. Tetapi karena dalam kemajuan jumlah pembatik makin berkurang sedangkan jumlah pemakainya makin banyak, maka seni batik lalu terpengaruh oleh perdagangan dan karena itu sebagian besar merosot nilainya. Hal ini berarti kemajuan bagi perekonomian, tetapi bagi keseniannya berarti kemunduran. Dalam perkembangan selanjutnya pembuatan kain batik bukan hanya untuk kepentingan masyarakatnya sendiri, melainkan untuk memenuhi juga kebutuhan lain, terutama pariwisata, misalnya celana tidur, taplak meja, perhiasan dinding, payung, kipas, tas, samak album, sapu tangan, dasi dan lain-lain, baik yang dari katun maupun dari sutera.

Seni kerajinan tatah-sungging juga berkembang di Yogyakarta. Dulu sebelum perang di dalam keraton, dan di luar keraton masih banyak tukang yang menatah dan menyungging wayang. Dalam perkembangannya seni tatah-sungging itu pernah mendapat lapangan dan kemajuan yang baik, misalnya membuat kipas, kap lampu, samak buku, dan lain-lain barang yang kecil-kecil yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan penduduk bangsa asing dan kaum turis.

Seni kerajinan penyu dan tanduk yang terukir semula ada, tetapi dalam beberapa tahun terakhir karena sesuatu faktor kerajinan itu jatuh. Suatu keuntungan karena kerajinan penyu

dan tanduk dapat dikombinasikan dengan kerajinan perak. Dengan kombinasi sifat dan gunanya mendapat tambahan nilai, dan penghargaan dari masyarakat sendiri maupun asing. Sebelum perang banyak bangsa asing yang membutuhkannya, misalnya macam-macam kebutuhan peralatan meja makan, dapur, kantor, perhiasan badan, bersihan (toilet) dan sebagainya. Tetapi keadaan yang demikian itu kemudian sepi pasarannya, maka pembuatan dari tanduk dan penyu sangat terbatas. Kebanyakan hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri (sisir, tusuk, konde dan lain-lain).

d. Keadaan Pedalangan

Kursus pedalangan yang didirikan pada tahun 1925 dengan nama *Habiranda* mengalami kemacetan pula dengan datangnya aksi militer II. Selama pendudukan ini kursus tersebut terhenti. Baru setelah Yogyakarta kembali, maka kursus dimulai lagi dengan mengambil tempat di Prabeya (dapur Sri Sultan). Karena murid-murid terus belajar, dan muridnya semakin banyak, sedang gurunya tidak ada, maka Pengurus Habiranda menunjuk Riya Soedibjapramana untuk memberi pelajaran. Berhubung semakin bertambahnya siswa yang ingin belajar, maka pada tahun 1951 sekolah dipindahkan dari Prabeya ke Komendaman. Jumlah dalang makin tersebar di seluruh wilayah Kabupaten di Yogyakarta yaitu di Bantul, Kulon Progo, Sleman, Kotamadya dan juga di Gunung Kidul.

5. A g a m a

a. Agama Islam

Sesuai dengan dasar Negara kita Pancasila, Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya, dan menjamin pelaksanaan peribadatan dari masing-masing agama atau kepercayaan menurut yang diajarkannya. Pemerintah membimbing masyarakat agar dapat menuju masyarakat yang harmonis, ma-

syarakat yang aman damai. Kecuali itu Pemerintah membina semangat beragama dari kalangan orang-orang agama itu sendiri. Bantuan Pemerintah ini terwujud antara lain dengan pendirian tempat beribadat. Juga perlindungan bagi amannya masing-masing beribadat menurut agamanya masing-masing.

Pendidikan agama pun mendapat perhatian Pemerintah, baik yang formal melalui sekolah-sekolah maupun pendidikan agama yang non formal.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perlakuan dan perlindungan yang serupa. Masyarakat di daerah ini mendapat bantuan dan perlindungan dari pemerintah seperti dapat dilihat dari banyaknya mesjid, langgar, madrasah bagi umat Islam, dan juga adanya gereja bagi agama Katolik dan Kristen serta bangun ibadah bagi pemeluk agama-agama lain yang diakui.

Di bawah ini terdapat berbagai kenyataan dan merupakan bukti adanya perkembangan agama Islam di Daerah Yogyakarta yang tercatat pada tahun 1951 dan 1952 seperti tercantum dalam buku tentang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁸⁾

Keterangan / Keadaan	Tahun 1951	Tahun 1952
1. Masjid	482 buah	496 buah
2. Langgar	3015 buah	3015 buah
3. Madrasah Rendah	147 buah	138 buah
— Muridnya	19680 buah	14599 orang
— Gurunya	618 orang	535 orang
4. Madrasah Menengah	31 buah	21 buah
— Muridnya	3282 orang	2130 orang
— Gurunya	102 orang	169 orang
5. Sekolah Dasar Islam	buah	20 buah
— Muridnya	orang	3644 orang
— Gurunya	orang	73 orang
6. Sekolah Menengah Islam	buah	7 buah

1	2	3
– Muridnya	orang	995 orang
– Gurunya	orang	62 orang
7. Sekolah Guru Islam	2 buah	8 buah
– Muridnya	332 orang	1225 orang
– Gurunya	24 orang	107 orang
8. S.D. Negeri yang diajar agama Islam	47 buah	99 buah
– Murid yang mengikuti	10718 orang	59056 orang
– Guru yang mengajar	25 orang	52 orang
9. Penajian biasa	2889 tempat	3193 tempat
– Muridnya ada	49976 orang	69925 orang
10. Peringatan Nuzulul Qur'an	703 tempat	471 orang
– Hadir	134365 orang	116573 orang
11. Peringatan Isra' Mi'radj	997 tempat	727 tempat
– Hadir	429454 orang	230520 orang
12. Peringatan Maulid Nabi	652 tempat	tempat
– Hadir	75255 orang	orang
13. Idul Fitri	722 tempat	656 tempat
– Hadir	200064 orang	142855 orang
14. Idul Adha	591 tempat	514 tempat
– Hadir	79166 orang	92665 orang
15. Fithrah beras sebanyak	64757,75 kg	70377,80 kg
– Berujud uang	Rp 5.863,43	Rp 154 86,—
– Dibagikan kepada	48576 orang	72745 orang
16. Qurban berupa lembur	32 ekor	31 ekor

Qurban berupa		
kambing	977 ekor	1197 ekor
– Dibagikan kepada	33690 orang	34281 orang
17. Nikah	37540 orang	25952 orang
18. Talak	15507 orang	12070 orang
– Talak gratis	13 orang	5 orang
19. Rujuk	609 orang	495 orang
– Rujuk gratis	3 orang	4 orang
20. Zakat padi	belum terdaftar	142,19 kwt
– Dibagikan kepada	idem.	9133 orang

b. Agama Kristen

Perkembangan agama Kristen di samping melalui pelajaran di gereja, juga melalui pendidikan yaitu ditangani oleh BOP-KRI (Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia). Badan ini banyak mendirikan sekolah, mulai dari S.D. sampai S.M.A. Pada bulan Oktober 1951 tercatat 30 buah sekolah dengan 7.168 orang murid.⁴⁹⁾ Setiap tahun sekolah lanjutan yang berada di Yogyakarta senantiasa dibanjiri anak-anak calon murid.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta hubungan antar umat beragama berjalan baik dan rukun.

Sebagai gambaran di sini dilampirkan statistik gereja Kristen seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti berikut :

STATISTIK AKHIR TAHUN 1951

No. Urt	Aliran	Tempat Kebaktian		Pengantar Agama				Penganut
		Gereja	Rumah	Pend.	Guru	Lain2	Jumlah	
1.	Gereformeerd	27	15	10	27	108	145	3680
2.	Kerasulan	8	4	2	11	16	29	611
3.	Tionghoa	1	—	1	1	9	11	514
4.	Protestan	1	1	—	1	5	6	300
5.	Advent	1	—	—	1	8	9	52
6.	H.K.B.P.	1	—	—	—	9	9	158
7.	Pantekosta	2	1	1	2	—	3	401
8.	Effantha	1	—	2	1	4	7	111
	8 Aliran	43	21	16	44	159	219	5827

c. Gereja Roma Katholik

Keadaan serta perkembangan agama katolik yang perlu diketahui ialah adanya gereja-gereja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdirinya sekolah-sekolah serta tambahnya umat pemeluknya. Salah satu gereja pertama di Daerah Yogyakarta yang terletak di sebelah timur Kantor Pos Yogyakarta. Kemudian disusul berdirinya gereja Kotabaru, gereja Bintaran, Pugeran, lalu Kemetiran. Kesemuanya ini berada di dalam kota. Sedangkan di luar kota adanya gereja Ganjuran (daerah Bantul), Boro dan Nanggulan (Kulon Progo Utara), Wates, Kakasan, Medari dan Somoitan di Sleman Utara, sehingga pada tahun 1952 berjumlah 21. Selain ada beberapa rumah di pelosok yang dipergunakan sebagai gereja sebanyak 26 tempat tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah orang Katolik sebagai berikut :

Pada tahun 1915 baru ada 300 orang

Pada tahun 1925 1000 orang

Pada tahun 1950 ada 20000 orang

Melihat daftar angka-angka ini dapat dikatakan, bahwa perkembangan agama Katolik sejak tahun 1925—1952 kurang lan-

car apabila dibanding dengan antara tahun 1915–1925 karena setelah bangsa Indonesia terbelenggu oleh penjajah Jepang banyak pastoor Jawa dan Belanda ditangkapi dan diinternir, karena itu berkuranglah tenaga pembimbing dan pemimpin dalam agama itu. Gedung sekolah, kediaman broeder dan biara, suster diduduki tentara Jepang dengan tidak mendapat gantinya.

Baru sesudah Indonesia merdeka secara berangsur gedung-gedung tersebut diserahkan kembali kepada pihak gereja. Saat itu pula, pembangunan mulai mendapat pemikiran. Sedikit demi sedikit perbaikan diselenggarakan, baik gereja, asrama, biara maupun sekolah. Pelajar agama maupun sekolah berjalan sebagaimana mestinya.

Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta ada :

Pastoor	69
Zuster	96
Broeder	26
Guru agama	6
Umat Katolik	20405
Gereja	21
Kapel	26

Sekolah-sekolah :

Sekolah Dasar	36
Menengah Pertama	6
Menengah Atas	2
Guru Buwuh	2
Froebel R.K.	2
S.K.K.P.	1

Y a y a s a n :

Rumah sakit	3
Rumah Yatim	2

Perkumpulan-perkumpulan :

- a. Partai Katholik
- b. Katholik Wandawa
- c. Wanita Katholik

- d. Muda Katholik
- e. P.G.K. (Pers Guru Katholik)
- f. Prangukti – Laya
- g. Kepanduan.

g. *Gerakan Aliran Kebatinan*

Kecuali agama-agama resmi yang diakui oleh Pemerintah. di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai aliran Kebatinan. Gerakan Aliran Kebatinan itu sudah lama ada bahkan ketika masih dijajah Belanda Aliran Kebatinan ini sudah ada. Memang dalam hal ini bagi orang-orang kita gemar sekali merundingkan, mengadakan orientasi, sarasehan yang mengenai kebatinan.

Bentuk dan sifat aliran kebatinan ini di berbagai tempat telah menjadi kebiasaan bagi para pemimpin dan guru dalam menyampaikan wejangannya dengan sistem rahasia misalnya diberikan dalam kamar gelap hanya di bawah empat mata saja, dan diajarkan pada tempat yang sunyi sekali. pada jam 2 malam di halaman rumah yang harus sudah sunyi benar-benar.

Juga ditetapkan syarat-syarat yang serba tersendiri setelah diberikan wejangan dalam tempat yang sunyi, serta dengan syarat-syarat yang khusus.

Pemerintah membina dan membimbing perkembangan aliran kebatinan supaya berjalan dengan semestinya.

Salah satu di antara berbagai aliran kebatinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta disingkat dengan PKN, Perkumpulan Budi Murni (P.B.M.), Adam Ma'rifat, Aliran Sumarah, Mardi Nalimi, Tekad Manunggal (di Srandakan) dan sebagainya.

6. *Pers*

Sejak masa revolusi kemerdekaan Yogyakarta mempunyai peranan penting dalam bidang Pers.

Dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta, kantor Antara turut pinah pula.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menyerbu Yogyakarta. Maka untuk melancarkan segala sesuatunya dipertimbangkan, bahwa kantor Antara perlu dipindahkan lagi ke Jakarta. Tetapi dengan penyerangan Belanda untuk kedua kalinya tanggal 19 Desember 1948 kantor Antara Jakarta diduduki dan disegel. *Antara Jakarta* tidak berdaya lagi. Karyawan dan wartawannya berusaha mencari hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka berusaha agar tidak ditangkap oleh Belanda.

Dengan didudukinya kantor Antara Jakarta di Pegangsaan Timur 56 itu, maka kantor Antara dipusatkan di Yogyakarta. Sebelum Antara Pusat Jakarta pindah ke Yogya, terlebih dahulu Antara Yogya berhasil mendapatkan gedung baru, yakni bekas tempat kantor *Sinar Matahari*, di jalan Tugu 58. Hal tersebut dapat terlaksana berkat bantuan dari Ir. S. Dipokoesoemo yang pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga serta mendapat kepercayaan dari Sri Sultan untuk mengawasi semua gedung yang bekas ditempati Jepang.

Setelah menghadapi Sri Sultan dan diadakan pembicaraan seperlunya akan segala sesuatunya untuk perpindahan kantor Antara itu, kemudian dipersiapkan tempat penampungan orang-orang dari Jakarta. Atas bantuan Andjar Soebiyanto, bekas wartawan *Domei* bagian Indonesia cabang Semarang sebuah ruang rumah makan "Oen" di Jalan Tugu Kidul (kini Jalan Pangeran Mangkubumi) yang kosong diminta dan diizinkan untuk dipergunakan oleh Antara.

Kedua belah pihak merasa senang dan puas, sebab tiap kali ada sidang redaksi, maka rapat itu selalu diadakan di rumah makan "Oen" tersebut. Juga tamu-tamu Antara selalu dijamu di toko "Oen".

Gedung Jalan Tugu 58 dijadikan asrama bagi rekan-rekan yang datang dari Jakarta. Di antara mereka ada yang sudah berkeluarga, dan ada pula yang masih bujangan. Karena jumlah

penghuninya ternyata lebih banyak daripada jumlah ruangan, maka terpaksa gedung itu dibagi-bagi dengan dibatasi dinding bambu. Dan mereka pun terpaksa tidur di atas bale-bale dengan tikar.

Kehidupan mereka tidak ubahnya sebagaimana kaum pengungsi lainnya. Mereka menggunakan kamar mandi bersama, kamar kecil bersama, dan air leding yang keluarnya tidak teratur. Hal yang demikian itu mereka hayati dan diterima dengan tabah dan sabar.

Pada waktu itu Direksi, Redaksi dan Tata Usaha semuanya berkumpul dalam satu ruang; bahkan bagian telkom bekerja di bagian belakang ruang itu juga. Kantor yang ada di Toko "Oen" ternyata tidak mampu lagi menampung tambahan jumlah tenaga dan jumlah pekerjaan Antara yang harus dilakukannya.

Waktu itu jumlah tenaga kira-kira 160 orang; belum lagi dihitung yang ada di cabang Bandung (Garut, Tasikmalaya), Surabaya (Kediri, Mojokerto dan Malang), Semarang (Purwodadi, Grobogan, Pati dan sekitarnya) dan juga cabang Jakarta. Jumlah tenaga seluruhnya di Jawa ada kira-kira 500 orang.⁵³⁾

Dalam usaha mencari gedung baru, didapatkan bekas gedung *Societeit De Harmonie* Mataram yang rusak terkena bom Inggris, bulan Nopember 1945. Tetapi dengan bantuan seorang dermawan yang kebetulan menjadi pemborong, maka bagian belakangnya diperbaiki, dan kemudian gedung itu siap ditempati.

Suatu kegoncangan pernternah terjadi akibat terdengarnya kabar, bahwa suatu Kementerian juga akan menempati gedung tersebut. Berita tersebut tersiar luas sehingga Bung Tomo bekas wartawan Antara juga turun tangan, dengan ancaman bahwa barangsiapa yang menempati gedung yang dipergunakan Antara di Jalan Ngabean 4 itu, akan diserbu pula. Namun kasus ini terdengar Presiden, maka kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Kementerian tersebut atas nasehat Presiden mengurung-

kan niatnya itu.⁵⁴⁾

Penyerbuan Belanda ke Yogyakarta, pada hari Minggu dan kantor-kantor pada waktu itu tutup. Juga kantor berita Antara Yogyakarta yang waktu itu setiap harinya memang hanya terbit dengan satu kali edisi, dan enam kali penerbitan tiap minggunya. Namun dalam situasi perang itu para wartawan Antara Pusat siap di tempat tanpa menunggu perintah. Mereka datang ke kantor dan kemudian berusaha mencari berita serta keterangan tentang peristiwa yang sedang terjadi itu. Ada yang pergi ke Gedung Agung, ada pula yang pergi ke kantor Komando Militer Kota, ada pula yang menghubungi para pembesar dan sebagainya.

Sewaktu pesawat terbang pada hari Minggu itu dengan ganasnya melemparkan bom-bomnya di depan Istana, Direksi dan Redaksi serta kaum wartawan Antara dan sejumlah tenaga juru ketik masih sibuk menyusun berita. Padahal letak gedung Antara tidak ada seratus meter dari Gedung Agung. Baru setelah serangannya itu bertambah gencar, maka pekerjaan terpaksa dihentikan. Mereka mencari tempat perlindungan di dekat gedung CHTH (kamar bola Cina). karena mereka semua mengetahui, bahwa di bawah gedung Antara sendiri sedang dipasang sebuah bom, dengan maksud apabila Belanda betul-betul mengadakan agresinya maka gedung Antara itu akan dibumi hanguskan. Sebelum persiapan itu matang, Belanda ternyata melancarkan serangannya.

Maka setelah Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, pada hari itu juga kantor Pusat Antara segera diduduki. Segala apa yang ada di situ disita termasuk tidak kurang dari 17 karung barang isi dokumen foto, kumpulan berita, dan surat kabar yang kemudian diangkut ke Semarang. Begitu juga pemancar, pesawat penerima, mesin tulis, mesin roneo, alat foto, motor generator, juga mereka angkut.

Dalam menghadapi musuh itu kaum wartawan Antara bersikap non kooperatif. Sejumlah wartawan muda seperti Moham-

mad Sayuti Abdurachman dan Sjuuib masing-masing adalah wartawan foto dan redaksi kawat pergi meninggalkan Yogyakarta, menuju ke Jawa Barat. Syuaib, membantu Kepala Kepolisian Jenderal Mohammad untuk memonitor berita yang kemudian juga disebar-luaskan ke daerah gerilya. Demikian juga Zein Effendi ikut bergerilya dengan Corps Pelajar, kemudian ditangkap dan disekap di Ambarawa. Ia baru dilepaskan setelah ada Konferensi Meja Bundar (K.M.B.), Agustus 1949.

Abdulwahab Saleh (kepala bagian foto) membuka perusahaan foto di bagian depan asrama Tugu Kidul 58, sedang di bagian belakang masih tetap dipergunakan untuk memonitor berita yang kemudian dilipat gandakan dan dikirimkan kepada para gerilyawan. Di sini dapat dibuktikan bahwa selama pendudukan Belanda Pers di Yogyakarta giat melakukan tugasnya yang berat itu.

Situasi peperangan yang membuat cabang-cabang Antara porak-poranda, uang tiada, peralatan pun kosong, maka setelah dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag 1949, mulai bersiap-siap diri untuk bangun kembali.

Antara Semarang sudah mulai bekerja kembali tepat pada waktu pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Mintardjo dan Soegeng sudah ada di pos masing-masing.

Dalam pada itu Antara Yogya yang semula pernah menjadi kantor pusat, dengan adanya pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia, dibuka kembali. Ketika kantor di Jalan Ngabean (K.H.A. Dahlan) dibuka, ternyata barang yang ditinggalkan pasukan Belanda hanya berupa meja tulis, kursi, bangku panjang, almari, rak dan satu stel kursi tamu. Lain-lain barang sudah tidak ada lagi. Sedangkan kantor Antara di Jalan Tugu 22 dipergunakan sendiri oleh pemiliknya.

Sementara itu barang yang dapat diselamatkan tujuh bulan yang lalu ialah 1 transmitter 200 watt, 1 receiver halycrofter dalam keadaan sedikit rusak, 3 mesin ketik, 3 mesin roneo dalam keadaan rusak.

Sampai dibukanya kembali Antara, Kementerian Penerangan memberi bantuan uang untuk bulan Mei dan Juni 1949 bagi mereka yang tidak meninggalkan Antara Rp 935.—, sebagai tunjangan mula-mula Rp 5,— kemudian Rp 7,50 tiap keluarga. Setelah Pemerintah kembali ke Yogyakarta pada permulaan Juli, masing-masing pegawai yang masih ada di daerah penduduk diberi uang hadiah sebulan gaji, dan untuk seluruh pegawai berjumlah Rp 11.325.— Seterusnya mereka mendapat uang tambahan sebagai dana permulaan Rp 1.000,— dan sejumlah alat tulis-menulis berupa kertas doorslag, pita mesin, kertas ketik dan kertas stensil. Dari DAMRI diberi pinjaman satu kendaraan merk Austin.

Dengan bermodalkan dana dan tenaga yang ada, dimulailah pekerjaan lagi. Dari pegawai 140 orang sewaktu sebelum perang kolonial, yang dapat bekerja di pusat ialah 40 sampai 50 orang saja, terdiri dari tenaga pimpinan (5), redaksi (12), bagian foto (2), radio (6), dokumentasi (2) administrasi (5), opos, loper dan lain-lain (6).

Berita dari luar yang diambil adalah dari *Reuters*, *United Press*, *AP*, *Aneta* dan *Tass*. Itupun hanya dilakukan antara jam 18.00 sampai 00.00 saja, sebab kekurangan alat penerimaan dan tenaga radio telegrafis.

Dengan pemindahan kantor Pusat Antara ke Jakarta kembali dan Yogyakarta sebagai cabangnya, maka sedikit demi sedikit tenaga antara yang ada di daerah lalu pindah ke Jakarta.

Setelah mengikuti uraian di muka, maka dapat dikatakan bahwa Pers di Yogyakarta baik dalam masa revolusi dimulai maupun setelah K.M.B. sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting.

7. *Kepemudaan*

Selama aksi militer II, pemuda Indonesia bersatu memanggil senjata untuk membela tanah air dan bangsa terhadap serangan penjajah. Pemuda Indonesia kembali bahu-membahu

bertempur mengusir imperialis, sampai kembalinya Republik Indonesia di ibu kota Yogyakarta.

Pada tahun 1949 di mana rakyat dan pemuda bersatu dalam pertempuran gerilya, di lereng gunung, di hutan dan di kota. Belanda yang memperhitungkan bahwa Republik Indonesia telah hancur, disambut dengan serangan di siang hari bolong oleh T.N.I. dan masyarakat termasuk pemudanya yang terkenal dengan serangan 6 jam di Yogyakarta.

Serangan ini telah membuka dunia, bahwa Republik yang dikatakan oleh Belanda hancur itu, masih hidup dan mengadakan perlawanan. Kenyataan yang demikian itulah telah mendorong mundurnya Belanda dari Republik Indonesia dan disusul dengan adanya Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus – 2 Nopember 1949.

Dalam situasi seperti itu, para pemuda berusaha menyusun kembali organisasinya masing-masing. Pada saat itu di Jawa terdapat 100 organisasi pemuda lokal, belum termasuk organisasi pemuda yang berpusat di Yogyakarta.

Untuk mengadakan peninjauan dan penyusunan kembali organisasi-organisasi pemuda, maka atas inisiatif Pemuda Indonesia mengadakan Konperensi Pemuda Seluruh Indonesia tanggal 14 – 19 Agustus 1949 di ibu kota Yogyakarta.

Konperensi Pemuda Seluruh Indonesia diadakan di dalam keadaan di mana negara Republik Indonesia belum sepenuhnya sembuh kembali dari luka-luka akibat perang kolonial, dan pertentangan-pertentangan politik dalam tubuh Republik Indonesia, sedangkan di lain pihak pasukan Belanda masih menduduki bagian-bagian wilayah Indonesia, di mana kekangan terhadap hak-hak demokrasi menimbulkan suasana takut dan tegang.⁵⁵⁾

Di/dalam daerah merdeka Republik Indonesia, sisa-sisa ketegangan dan curiga mencurigai akibat pertentangan politik dengan puncaknya Pemberontakan PKI di Madiun, tidak membantu untuk menciptakan suasana yang tenang bagi penyelenggaraan suatu konperensi yang tujuan utamanya peninjauan

dan penyusunan kembali, pengorganisasian gerakan pemuda yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Persatuan dan perjuangan anti penjajahan dari pemuda dan rakyat Indonesia yang telah tercermin di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, banyak mengilhami jalannya konferensi Pemuda Seluruh Indonesia ke arah menanggulangi pertentangan yang timbul selama konferensi itu.

Gagasan dan pemikiran yang berjiwa Revolusi Agustus 1945 yang dicetuskan oleh wakil-wakil pemuda Republik Indonesia, merupakan bahan yang terbukti besar manfaat dan pengaruhnya terhadap perjuangan rakyat dan pemuda Indonesia di negara-negara federal untuk kemerdekaan politik yang penuh ke arah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam konferensi itu masih terjadi pertentangan di antara pemuda sendiri, sehingga berbagai gagasan dan pandangan masih dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi politiknya masing-masing. Namun pada akhirnya knperensi Pemuda Seluruh Indonesia dapat mengatasi semua hambatan dan persatuan serta kesatuan tetap terjaga.

Sejalan dengan tingkat-tingkat perjuangan yang dihadapi seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu, maka sejumlah 28 organisasi pemuda dari seluruh Indonesia menyusun pembahasan di seluruh Indonesia dengan pedoman :

1. Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Tujuan kesempurnaan negara Republik Indonesia yang satu Merdeka dan berdaulat ke luar dan ke dalam, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia (termasuk Irian) dan berdasarkan Pancasila.
3. Semboyan Perjuangan :
Satu Bangsa – Bangsa Indonesia
Satu Bahasa – Bahasa Indonesia
Satu Tanah Air – Tanah Air Indonesia
Satu Negara – Negara Indonesia.

4. Lambang Kebangsaan :

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Bendera Negara ialah Sang Merah Putih.

Sebagai hasil konkrit konperensi, maka sekretariat Pemuda Indonesia didirikan, yang sifatnya adalah sebagai penghubung. Salah satu program usaha adalah penyelenggaraan suatu Kongres Pemuda Seluruh Indonesia yang lebih luas dengan tujuan pertama-tama menyusun kembali pergerakan dan organisasi pemuda Indonesia.⁵⁶⁾

Apabila sebelum terlaksananya K.M.B. dari golongan pemuda menunjukkan semangat kesatuannya seperti diadakannya Konperensi Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 14 — 19 Agustus 1949, maka dengan adanya fatisal dari hasil persetujuan K.M.B. yang kurang mendapatkan sambutan dari sebagian rakyat, ternyata berpengaruh pula pada pemuda. Hal ini seperti tercermin dari gerakan-gerakan pada pemuda, yakni menunjukkan kemunduran persatuan di dalam gerakan pemuda, dan timbulnya gejala umum yang mementingkan kedudukan golongan, klik, atau perseorangan daripada kepentingan revolusi; serta timbulnya gerakan yang menyalahgunakan sentimen kesukuan dan kedaerahan yang kemudian menjadi gerakan separatis.⁵⁷⁾

Perlu diketahui pula bahwa pada tahun 1950 dan 1951 di Yogyakarta terdapat berbagai macam organisasi pemuda yang menempatkan kantor pusatnya di Yogyakarta ialah: APPI (Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia); G.P.I.I. (Gerakan Pemuda Islam Indonesia); I.P.P.I. (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia); M.K.I. (Muda Katholik Indonesia); Pemuda Demokrasi Indonesia; P.P.I. (Pemuda Putri Indonesia); PPKI (Persatuan Pemuda Kristen Indonesia); Pemuda Tani Indonesia; PII (Pelajar Islam Indonesia); PPTS (Persatuan Pemuda Taman Siswa); dan PERSIM (Pemuda Islam Indonesia Maluku).⁵⁸⁾

Adanya sejumlah organisasi Pemuda dan Pelajar yang menempatkan kantor pusatnya di Yogyakarta itu, maka dapat di-

katakan bahwa Pemuda di Yogyakarta penuh dengan dinamika dan tinggi mobilitasnya, serta peka sekali menghadapi persoalan kenegaraan, di antaranya hasil-hasil yang dicapai KMB tahun 1950.

Di samping kelompok organisasi pelajar, dan pemuda, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dalam gagasan untuk membentuk organisasi kepanduan nasional. Menteri P.P. dan K. dan Ki Hadjar Dewantara menyampaikan saran agar didirikan kembali organisasi kepanduan. Pada tanggal 28 Desember 1945 atas kata sepakat dan mufakat dari utusan-utusan Kwartir Besar dan Markas Besar berbagai organisasi kepanduan yang sedang non aktif dan oleh karena didorong oleh rasa jiwa Proklamasi dan semangat persatuan dan kesatuan berdirilah satu organisasi kepanduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia disingkat *Pandu Rakyat*.⁵⁹⁾

Saran yang pernah disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara tentang kepanduan tersebut antara lain :

"Kepanduan itu cara pendidikan yang telah bersifat internasional dan tersebar di seluruh dunia. Tetapi oleh karena asalnya dari Eropa dan yang membawa kemari bangsa Belanda .. hendaknyalah senantiasa ingat, awas dan waspada, jangan menjiplak dan mengcopiter tetapi hendaknyalah disaring lebih dahulu dengan teliti dan seksama isi kepanduan ala Barat dengan saringan Kebangsaan. Kita sesudah menjadi bangsa yang merdeka harus berani dan dapat mengadakan tali perhubungan sendiri dengan dunia Internasional tetapi dalam mengadakan hubungan dengan dunia luar itu bangsa kita harus tegak berdiri dan tegak berpendirian kebangsaannya sendiri bahkan apabila dapat senantiasa siap sedia menyumbangkan kebudayaan kebangsaannya untuk kemuliaan hidup kemanusiaan seluruh Dunia Raya ... jangan sampai bangsa kita datang sebagai datangnya tukang minta-minta (kere), yang hanya dapat minta saja dengan tidak mampu memberi.⁶⁰⁾

Pandu Rakyat yang sejak berdirinya terus berusaha untuk menyempurnakan organisasinya tetapi selalu terhambat oleh keadaan. Terutama oleh aksi militer I pemberontak PKI di Madiun dan aksi militer II yang merupakan sebab segala usaha perbaikan selalu terhenti di tengah jalan.

Pada tanggal 4 Desember 1949 diadakan pertemuan di antara P.B. dengan wakil bekas organisasi kepanduan, yang telah dilebur menjadi Pandu Rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang ikut bertanggung jawab akan baik buruknya organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Tetapi dalam pembicaraan pada pertemuan itu memberikan kesan bahwa dalam kalangan kita sendiri timbul aliran-aliran baru, yang pada tahun 1945 tidak nampak. Timbul aliran-aliran ini karena adanya perasaan kurang puas dari beberapa golongan yang merasa bahwa kepentingannya tidak atau kurang mendapat perhatian atau tidak diberi kesempatan untuk berkembang.

Pada pertengahanbulan Januari (20, 21 dan 22 Januari 1950) diadakan Konggres Pandu Rakyat Indonesia ke II di Yogyakarta yang dikunjungi oleh anggota-anggota dari berbagai aliran, telah diputuskan dengan suara bulat bahwa Pandu Rakyat Indonesia berbentuk kesatuan yang memperhatikan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada golongan-golongan khusus untuk menyelenggarakan kebutuhan masing-masing.

Dalam membicarakan gerakan kepanduan ini, tidak boleh terlupakan juga adanya golongan pandu puteri yang tidak pernah terlepas sama sekali dari ikatan organisasi kepanduan kita pada umumnya. Sejak golongan Pandu Puteri dibentuk, pada jaman KBI bagian ini (Puteri) diurus oleh puteri sendiri. Demikian juga Pandu Rakyat Indonesia. Untuk mengurus soal-soal yang mengenal pandu puteri, dibentuklah Kwartir Besar Puteri yang sejajar dan sederajat dengan Kwartir Besar Putera.

8. *Wanita*

Pada waktu Belanda menyerbu Ibu kota Republik Indonesia

di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, kaum wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta, merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi-organisasi wanita mengambil peranan dalam usaha dapur umum dan Palang Merah. Ada pula yang berada di garis depan dalam barisan laskar wanita dan badan perjuangan lainnya. Tugasnya meliputi kegiatan dalam pertempuran, melakukan kegiatan intel, menjadi kurir, menyediakan, dan mengirimkan makanan ke garis depan, membantu kaum prngunsi, memberi penerangan dan lain-lain.

Setelah berakhirnya perang, banyak prasarana yang hancur, dan keadaan sosial ekonomi sangat buruk. Timbul pula gangguan keamanan di beberapa daerah oleh gerombolan bersenjata yang bekerja sama dengan subversi asing.

Dalam suasana demikian Wanita Indonesia menganggap perlu untuk mengadakan konsolidasi diri guna menghadapi tugas dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Untuk hal ini dirasakan perlu menciptakan suatu badan yang dapat menghubungkan organisasi-organisasi Wanita Indonesia untuk kerja sama.

Badan Kontak yang berkedudukan di Jakarta bersama dengan KOWANI mengadakan Konggres Wanita Indonesia ke VIII di Jakarta pada tanggal 24 – 28 Nopember 1950. Pada Konggres tadi Badan Kontak dan KOWANI menggabungkan diri dengan nama *Konggres Wanita Indonesia*, nama tersebut tidak boleh disingkat. Konggres merupakan kekuasaan yang tertinggi, membawahi suatu Majelis Permusyawaratan yang terdiri dari wakil-wakil pusat organisasi anggota. Untuk melaksanakan keputusan dan Majelis Permusyawaratan dibentuk suatu Sekretaris, sedangkan di tempat-tempat yang dipandang perlu diangkat seorang konsul yang dipilih oleh organisasi-organisasi di tempat itu.

Setiap ada kegiatan apa pun, lebih-lebih yang bersangkutan paut dengan masalah perjuangan, maka wanita-wanita di Yogyakarta selalu memberi andil yang besar, misalnya ketika di-

adakan permusyawaratan wanita di Yogyakarta yang dihadiri kurang lebih 82 organisasi wanita dari Sabang sampai Merauke pada 26 Agustus sampai 2 September 1949.⁶¹⁾ Pada kesempatan itu nama Aisiyah sebagai organisasi wanita Muhammadiyah yang tumbuh sejak masa penjajahan dan organisasi lainnya yang ada tidak pernah absen dalam perjuangan.

Sebagai bukti lain bahwa Yogyakarta merupakan tempat yang memberi harapan akan pertumbuhan dan semangat perjuangan, wanita, ialah dengan dibentuknya Polisi Wanita untuk pertama kalinya pada tahun 1948. Gagasan ini mendapat dukungan penuh dari KOWANI. Pada tahun 1948 dalam Perang Kemerdekaan II Polisi Wanita di samping tugasnya sebagai petugas keamanan, juga menjadi alat perjuangan bangsa yang mempertahankan kemerdekaan. Sedang pada tahun 1950 Polisi Wanita dilatih kembali di Sukabumi. Polisi Wanita juga mempunyai tugas khusus untuk mencegah serta memberantas segala kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap anak-anak remaja dan wanita.

Mengingat tugasnya yang penting ini, maka baik organisasi-organisasi wanita yang ada di Yogyakarta maupun di luar daerah memandang perlu agar Polisi Wanita ditingkatkan lagi. Dalam perkembangan, selanjutnya KOWANI ikut memperjuangkan dibukanya pendidikan Polisi Wanita.

9. *Organisasi Profesional*

Setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan di daerah Yogyakarta dibentuk Perkumpulan Palang Merah, dan Persatuan Dokter. Koperasi Palang Merah diselenggarakan di Yogyakarta dengan mengambil tempat di dalam Purbayan.⁶²⁾

Adapun organisasi yang lain pada waktu itu belum tampak jelas. Karena adanya sistem multi partai waktu itu, maka tiap orang yang memiliki kecakapan khusus biasanya telah bergabung dalam organisasi-organisasi yang merupakan bagian dari partai.

E. REAKSI DAN PELAKSANAAN K.M.B DI DAERAH

Setelah persidangan KMB selesai, maka Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Moh Hatta tiba di Yogyakarta pada tanggal 14 Nopember 1949. Sebagai pertanggung jawaban, kemudian delegasi melaporkan kepada Kabinet yang dengan suara bulat menerima hasil-hasil KMB.

Meskipun Kabinet telah menyatakan perasaan lega dengan hasil-hasil yang dapat dicapai dari sidang KMB namun di lain pihak ada juga yang merasa tidak puas. Berbagai kritik dilontarkan kepada laporan yang diberikan oleh Delegasi yang bernada suara pro, kontra maupun abstain.

Mereka berpendapat, bahwa dengan adanya KMB berbagai sektor perekonomian masih di tangan asing, maka bagi bangsa kita sekdor dapat berbuat lebih baik lagi dalam masalah ekonomi.

Persetujuan KMB menetapkan bahwa Irian Barat tidak akan termasuk dalam "penyerahan kedaulatan". Kedudukan Irian Barat masih akan ditentukan setahun kemudian. Dengan adanya fatsal ini berarti Belanda akan tetap merupakan ancaman yang membahayakan bagi Negara Republi Indonesia.

Hasil keputusan KMB telah mengundang berbagai tanggapan baik yang bersifat positif maupun yang bernada kurang menerima. Di bawah ini dapat diketahui bagaimana tiap-tiap golongan maupun secara instansional memberikan tanggapan akan KMB.tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 1949 sidang Pleno KNIP dengan suara 226 pro, 63 anti menerima, hasil KMB yang menyolok mata ialah bahwa hampir seluruh Fraksi Partai Sosialis Indonesia menolak hasil itu. Banyak orang berpendapat Partai Sosialis Indonesia menolak hasil itu. Banyak orang berpendapat Partai Sosialis Indonesia menolak karena bukan Sjahrir yang melaksanakan KMB dengan sukses.⁶³⁾ Namun ada pula suatu pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh Partai Sosialis Indonesia di Yogyakarta bernama Dayino bahwa persetujuan

KMB itu ada juga banyak manfaatnya karena pada waktu itu dunia Internasional berada di pihak Republik Indonesia.⁶⁴) Sebetulnya Belanda tidak sanggup lagi mengklasifisir seluruh daerah Republik, dan akhirnya Belanda dipaksa untuk mengadakan perundingan. Memang perundinganpun tidak dapat terlepas dari persetujuan Pemerintah Darurat yang berada di Sumatra. Selanjutnya dikatakan oleh Dayino bahwa mengapa Partai Sosialis Indonesia menolak prinsip-prinsip persetujuan KMB, karena intinya terutama mengenai ekonomi yang berdasarkan keputusan KMB itu kunci-kuncinya dikuasai oleh modal-modal asing. Dengan demikian sangat sulitlah untuk mengembangkan kehidupan perekonomian rakyat kita. Prinsip-prinsip dan struktur ekonomi hasil KMB masih sama dengan perekonomian sebelumnya seperti pada zaman kolonial. Dilihat dari segi itu maka dapat dikatakan, bahwa kemerdekaan yang kita capai dengan hasil KMB itu masih melestarikan struktur ekonomi penjajah. Tetapi hal ini kurang disadari orang karena adanya perang secara terus menerus telah membuat orang untuk berfikir yang lebih jauh lagi. Tenaga dan fikiran rakyat sudah lelah dengan adanya peperangan sedang hatinya ingin merasakan ketenangan.

2. Pendapat PSII

Dalam pernyataannya mengenai hasil KMB antara lain ditekankan bahwa berakhirnya KMB berarti bagi rakyat Indonesia menghadapi titik permulaan baru dalam perjuangan kemerdekaan menuju terbentuknya RIS yang merdeka dan berdaulat. Segala soal kenegaraan harus ditinjau dan diperhitungkan untung ruginya oleh segala aliran masyarakat. Dalam hal ini PSSI berpendapat, bahwa Pekerja dan KNIP "tidak representatif". Ratifikasi hasil KMB hanya dapat dilakukan secara volwardig parlementair. PSII menuntut supaya pembaharuan BP dan KNIP dapat terlaksana adail dan memuaskan. Apabila tuntutan di atas tidak mendapat perhatian yang berwajib, maka PSII akan terpaksa mengusahakan terbentuknya suatu Konggres Rakyat

Indonesia dalam mana segala aliran masyarakat dapat menentukan nasib negara dan bangsa.⁶⁵⁾

3. Dewan Partai, Partai Buruh Indonesia (PBI)

Pernyataan yang dimuat dalam *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta tertanggal 7 Nopember 1949 dan berdasarkan rapatnya paa tanggal 6 Nopember 1949 memutuskan sebagai berikut :

- a. Ratifikasi dari hasil-hasil KMB harus dilakukan oleh Komite Nasional Pusat Pleno yang diperbaharui, hingga merupakan cermin daripada masyarakat.
- b. Menuntut pada Pemerintah, supaya naskah persetujuan Konperensi Meja Bundar selengkapny a disampaikan kepada partai-partai dan organisasi-organisasi massa.
- c. Untuk dapat merundingkan dan mempertimbangkan naskah Persetujuan Konperensi Meja Bundar tersebut seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya dengan Rakyat, maka PBI menuntut supaya pembatasan hak demokrasi rakyat dihapuskan.
- d. Pernyataan Mr. Samsuddin (Masyumi)
"Lepas dari soal Irian, maka bagi saya sebagai seorang Masyumi, hasil KMB boleh saya terima. Apa yang kita capai itu lebih mendekati konsepsi Republik daripada konsepsi Belanda. Memang harus diakui bahwa hasil itu tidaklah 100% tidak bersyarat. Dalam soal Irian, Belanda menghadap backing dari negara-negara besar yang lain, antaranya Amerika Inggris dan Perancis. Putusan mengenai Irian itu tidak merupakan konsesi Belanda, tetapi usul tengah Gochran dan di bantu wakil Australia".
- e. Mr. Tambunan (Parkindo)
Kedaulatan Rakyat Yogyakarta dalam edisinya tanggal 3-11-1949 menyatakan: "Tidak puas dengan sikap Republik di KMB dan tidak menyetujui beleid delegasi Republik mengenai soal Irian.
- f. Sultan Hamengku Buwono IX

"Hasil KMB memberi banyak kemungkinan kepada bangsa Indonesia seluruhnya untuk mencapai cita-cita kebangsaan. Besar kecilnya faedah hasil-hasil KMB itu tergantung pada bangsa Indonesia sendiri, terutama pada mereka yang akan memegang pimpinan RIS nanti".

- g. Presiden Soekarno dalam pidato tanggal 17 Agustus 1949.
"Republik telah memasuki fase baru, yakni perundingan KMB atas dua sebab: pertama, untuk mencapai penyelesaian seluruh masalah pertikaian Indonesia Belanda; kedua, untuk menerima penyerahan yang tidak bersyarat dan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Penyelesaian seluruh pertikaian berdasar dua sebab ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertikaian dan mengakhiri kekacauan".⁶⁶⁾
- h. Panglima Besar Sudirman

TNI tidak mengambil sikap terhadap KMB tetapi menyerahkan kepada politik pemerintah, asal saja penyerahan kedaulatan benar-benar terlaksana, sedang tuntutan minimumnya haruslah berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.

Kesatuan-kesatuan Republik di Jawa dan Sumatra mempunyai sikap yang sama terhadap tingkat persoalan Indonesia Belanda. Bagi mereka yang menjadi soal apakah perundingan di KMB dapat mendatangkan perbaikan bagi rakyat dan tentara".

Demikianlah di antara berbagai pernyataan para tokoh di Daerah, maupun mass-media sebagai ungkapan partai politik maupun masyarakat. Meskipun dalam kenyataan ada perbedaan pendapat dan pandangan, namun pelaksanaan keputusan hasil-hasil KMB bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan program serta pernyataan pimpinan pusat.

BAB VI *PENUTUP*

Dari apa yang telah diuraikan di muka dapat diketahui, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia dalam masa revolusi kemerdekaan (revolusi fisik) itu mempunyai peranan yang besar dan penting, sehingga mendapat predikat sebagai "Kota Perjuangan" / "Pergerakan", "Kota Revolusi".¹⁾ Dikatakan demikian karena pada periode itu Yogyakarta menjadi ibukota negara Republik Indonesia untuk sementara waktu, berhubungan dengan keadaan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia tidak aman dan membahayakan keselamatan jiwa para pemimpinnya. Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, tentu banyak peristiwa penting terjadi di Yogyakarta. Dalam suasana revolusi, segala komando perjuangan sebagai pelaksanaan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda dilancarkan dari Yogyakarta. Bahkan pada waktu terjadi pemulihan kedaulatan yang berlangsung pada tanggal 30 Juni 1949, dimana pasukan Belanda ditarik mundur dan secara berangsur meninggalkan bumi Indonesia juga dimulai dari Yogyakarta.²⁾

Sebelum Yogyakarta berperan sebagai ibukota negara Republik Indonesia, pada awal revolusi kemerdekaan itu situasi di daerah Yogyakarta sudah dilanda oleh geloranya revolusi. Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

mengobarkan perjuangan rakyat di daerah Yogyakarta. Dimana mana terjadi perebutan kekuasaan dan perlucutan senjata dari tangan Jepang. Kesemuanya itu sudah menjadi tekad bersama yang bulat, bersatu dan utuh antara rakyat dan pimpinan untuk ikut mewujudkan dan menegakkan negara Republik Indonesia di daerahnya masing-masing. Fakta-fakta historis menunjukkan bahwa dalam masa revolusi kemerdekaan itu antara rakyat dan pimpinan daerah Yogyakarta terjalin suatu kerja sama yang kompak, sehingga merupakan modal yang berharga dalam menempuh perjuangan. Berkat kerjasama itu pula, maka revolusi di daerah Yogyakarta dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Suasana revolusi di daerah Yogyakarta makin semarak dan hangat setelah dipindahkannya ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta karena segala aktivitas politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan berpusat di Yogyakarta. Tepat sekali apabila Yogyakarta dikenal sebagai "Pusat Perjuangan Republik Indonesia." 3)

Yogyakarta juga dikenal sebagai "Kota Budaya" dan "Kota Pendidikan", karena disamping merupakan pusat kegiatan budaya seperti seni tari, musik, gamelan, drama, wayang orang, wayang kulit, seni ukir, seni patung, dan seni lukis juga banyak memiliki peninggalan bersejarah yang merupakan warisan budaya. Peninggalan bersejarah juga merupakan kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata antara lain candi Prambanan, candi Kalasan, candi Banguniba, kompleks makam Imogiri dan Kota Gede Keraton Yogyakarta, Taman Sari dan sebagainya.

Sedangkan Yogyakarta sebagai "kota pendidikan" dapat ditunjukkan adanya sekolah yang lengkap, mulai dari SD, SMTP SMTA sampai Universitas atau Perguruan Tinggi. Juga banyak terdapat sekolah kejuruan, misalnya jurusan ekonomi, koperasi perkebunan, perindustrian, teknologi, pertukangan dan pertanian. Terdapat pula Sekolah Tinggi Agama (Islam, Kristen, Katholik) bermacam-macam Akademi dan kursus-kursus

misalnya: kursus sungging, tatah dan ukir. Pendidikan dan sekolah yang di daerah Yogyakarta ditunjang dengan berbagai fasilitas, sehingga Yogyakarta benar-benar menjadi pusat kegiatan pendidikan. Tidak mengherankan apabila Yogyakarta mempunyai daya penarik yang besar dan menjadi pusat perhatian bagi para pelajar dari luar daerah yang ingin melanjutkan studinya.

Yogyakarta dikenal, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak hanya karena kebudayaan dan pendidikannya saja, tetapi terutama karena sejarah perjuangannya.

DAFTAR CATATAN

BAB I Pendahuluan.

- 1) Soedomo Banjaransasi, *Tjeng Tik Kie, Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Yogyakarta*, 1756 – 1956, hal. 7.
- 2) Drs. Tashadi dkk. *Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta*, tahun 1977 – 1978, diktat.
- 3) Lihat U.U. 18/1965 pasal 11 dan 12.
- 4) Dr. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, Proklamasi, Angkasa, Bandung, cetakan ke 2, tahun 1977, hal. 207.
- 5) Buku II, *Bahan Penataran Undang-Undang Dasar 1945*, edisi pertama, 1978, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia hal. 9.
- 6) Lihat, buku *Pola Penelitian, Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen P dan K, 1979/1980 hal. 3 diktat.

BAB II Keadaan di Daerah pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942 – 1945).

- 1) Dr. A.H. Nasution, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata* Jakarta, 1966, hal. 39.

- 2) Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1975 hal. 12.*
- 3) *Ibid*, hal. 5.
- 4) The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, hal. 28.
- 5) KRT Poerwokusumo, SH, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, hal. 12.
- 6) Kementerian Penerangan Republik Indonesia D.I.Y.
- 7) KRT. Poerwokusumo SH, *op. cit.*, hal. 13.
- 8) Panitia Pekan Raya, *Kenang-Kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan R.I. di Yogyakarta*, 6 Juli 1961 – 24 Agustus 1961, hal. 118.
- 9) BPH Soeryodiningrat, "Kebudayaan dan Pengaruhnya," dalam majalah *Hikmat Siap Menang*, hal. 22.
- 10) Oemar Sanusi, (Noji Shorei Kyoku Tyo). "Pertanian di Yogyakarta Syu" dalam majalah *Hikmat Siap Menang*, hal. 44.
- 11) Mohamad Dimyati, *Sejarah Perjuangan Indonesia* hal. 65.
- 12) Hardjito, *Risalah Gerakan Pemuda*, hal. 21
- 13) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* hal. 160.
- 14) *Ibid*, hal. 166.
- 15) Bapak Asrar dan Bapak Hudara, *Wawancara* tanggal 21 – 8 – 1979.
- 16) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 24.
- 17) A.H. Nasution *op. cit.*, hal. 20.
- 18) *Ibid* hal. 50
- 19) Sartono Kartodirdjo *op. cit.* hal. 20
- 20) Hardjito, *op. cit.* hal. 24.
- 21) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* hal. 29
- 22) Himodigdoyo, *wawancara*, tanggal 25 – 10 – 1979.
- 23) *Ibid*.

- 24) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 15
- 25) Bp. Asrar. Bp. Hudara. *wawancara*, tanggal 12 – 10 – 1979.
- 26) Soebagijo IN. *Lima Windu Antara*, hal. 45.
- 27) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* hal. 178.

BAB III Keadaan di Daerah Sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

- 1) Soebekti. *Sketsa Revolusi Indonesia 1940 – 1945*. Cetakan pertama 1966, penerbit Grip. Surabaya, hal. 55.
- 2) DR. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, Proklamasi. Angkasa. Bandung, cetakan ke 2, 1977 hal. 186 – 187 .
- 3) Sebab ternyata bahwa baru tanggal 15 September 1945 kapal perang Inggris Cumberland dengan Laksamana kelas tiga Patterson berlabuh di Tanjung Priok untuk memberikan perintah kepada Jendral Nagano, Panglima Besar Jepang di Jawa. Sedangkan Panglima Besar Christison baru pada akhir September 1945 datang dengan kolone pendudukannya yang pertama. Dengan demikian di ibukota Jakarta pada waktu itu terjadi vakum satu setengah bulan dan untuk kota-kota lainnya terjadi vakum berbulan-bulan lamanya. Bahkan di Yogyakarta tentara Sekutu tidak berhasil datang.
- 4) Lihat, Osman Raliby, *Documenta Historica*, Jakarta, 1952 hal. 13 – 14.
- 5) Adam Malik Dari Kantor Berita "Domei" Proklamasi 17 Agustus 1945 disiarkan dalam majalah *Penelitian Sejarah*, No. Tahun ke III Maret 1962, hal. 2 – 3.
- 6) *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kementerian Penerangan, 1953, hal. 35.

- 7) Menurut keterangan dan catatan dari Bp. KRT. Probosuprodjo, tanggal 11 Oktober 1979, Wirobrajan Ng. 6/60.A Yogyakarta.
- 8) *Ibid, loc. cit.*
Lihat pula, *Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta*, DPRD DIY, 1971 – 1977, hal. 3.
- 9) Menurut pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasan resminya bahwa dalam prinsipnya kedudukan Swapraja atau Zelfbesturende Landschappen (+ 250 buah) itu sebenarnya mendapatkan jaminan konstitusional yang kuat, karena bisa menjelma sebagai daerah istimewa. Tetapi nyatanya dari sekitar banyak Swapraja itu, dewasa ini yang dapat mempertahankan diri sebagai daerah Istimewa hanyalah satu ialah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10) Kedua plakat amanat ini dokumen otentiknya sekarang disimpan di Museum Kirti Griya, Taman Siswa.
- 11) Dr. A.H. Nasution *op.cit.* hal. 250.
- 12) *Ibid*, hal. 258.
- 13) Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang Peraturan-Peraturan, Penetapan-penetapan, Pemerintah R.I. 1945*, penerbit S.K. Seno, Jakarta 1951, hal. 128.
- 14) Menurut keterangan Bp. Sudomo, Jl. Patuk, Yogyakarta, juga Bp. N.H. Sudirdjo, Gg. Angrek I/17 Yogyakarta.
- 15) Lihat "KR. Koran Pejoang Pertama Sejak Proklamasi", dalam *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 26 September 1979, hal. 8.
- 16) Pertemuan dan reuni para tokoh pelaku Pertempuran Kota Baru, Yogyakarta yang diselenggarakan di SMA Negeri III Yogyakarta pada tanggal

7 Oktober 1979. Lihat juga, harian *Kedaulatan Rakyat* Sabtu, 6 Oktober 1979, hal. 4.

- 17) Menurut keterangan dari Bp. Mahmud, wawancara, tanggal 16 Oktober 1979 di Gg. Anggrek I/17 Yogyakarta.
- 18) Menurut keterangan dari Bp. Dayino, wawancara tanggal 5-11-1979 di Universitas Janabadra, Jl. K.H. Dahlan, Yogyakarta. Menurut Bp. Dayino, pemuda yang ikut mengibarkan bendera di Gedung Agung itu antara lain ialah Rusli, Munir, Umiyah.
- 19) Lihat, Harian *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 6 Oktober 1979, hal. 4.
- 20) Osman Raliby, *op. cit.* hal. 14.
Lihat juga Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 113.
- 21) Tentang nama-nama departemen dan para menteri-nya dapat dibaca dalam *Mohammad Hatta Memoir*, penerbit Tintamas, Jakarta 1978, hal. 463 - 464. Lihat juga, Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 87 - 88.
- 22) Tentang nama-nama daerah wilayah propinsi R.I. beserta Gubernur-nya. lihat Mohammad Hatta Memoir, *ibid*, hal. 463, 464. Lihat juga Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 87 - 88.
- 23) Koesnodiprodjo, *ibid*, hal. 117.
- 24) Osman Railiby *op.cit.* hal. 20.
- 25) *Ibid*, hal. 22 - 23.
- 26) Menurut keterangan Bp. Asrar dan Bp. Hudara, wawancara tanggal 20 - 9 - 1979 di Jl. A.M. Sangaji, Yogyakarta. Juga mendapat keterangan dari Bp. KPH. Mr. Sudarisman Poerwokoesoemo wawancara tanggal 11-10-1979 di Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- 27) Buku Kenang-kenangan *Peringatan 200 Tahun kota Yogyakarta 1756' - 1956*, hal. 25 - 26.

- 28) *Wawancara* dengan Bp. Asrar dan Bp. Hudoro, 24 – 9 – 1979 di Jl. A.M. Sangaji, Yogyakarta. Lihat juga: KRT. S. Poerwokoesoemo, SH. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, diktat.
- 29) Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 58.
- 30) *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kementerian Penerangan, 1953, hal. 43.
- 31) *Ibid, loc. cit.* Lihat juga: KRT. Soedarsiman Poerwokoesoemo SH. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, hal. 19.
- 32) KRT. Soedarisman Poerwokoesoemo SH. *op. cit.* hal. 28.
- 33) Dr. A.H. Nasution *op.cit.* hal. 286.
- 34) Soebekti, *op. cit.* hal. 69.
- 35) Isi lengkap amanat itu dapat dibaca pada bagian di muka.
- 36) *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, *op. cit.* hal. 41.
- 37) *Ibid.*
38. K.R. Koran Perjuangan Pertama Sejak Proklamasi, *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 26 September 1979, hal. 8.
- 39) *Ibid.*
- 40) Selebaran ini dokumen otentiknya tersimpan di Musium Kirti Griya Taman Siswa, Yogyakarta.
- 41) Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku*, diktat. hal. 5.
- 42) Selebaran kilat ini pada waktu itu tersebar dan beredar di Yogyakarta dan sekarang merupakan dokumen yang tersimpan di Musium Kirti Griya Taman Siswa, Yogyakarta.
- 43) *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, *op. cit.* hal. 39.
- 44) *Ibid*, hal. 40.
- 45) Purnawan Tjondronegoro, *op.cit.* hal. 6.

Lihat juga, Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI—AD Kodam VII/Diponegoro, Semarang*, Yakso Katon Gapuraning Ratu, Yayasan penerbit Diponegoro. Semarang. 1968. hal. 30. Tetapi menurut RP. Soedarsono dalam tulisannya di *Majalah Penelitian Sejarah*, 1 Maret 1961 No. 2 Tahun II, *Revolusi Yogya dan Sekitarnya*, mengatakan bahwa pada tanggal 6–10–1945 mulai jam 19.00 hingga jam 03.00 RP Soedarsono bersama-sama dengan Moh. Saleh (Ketua KNI) dan pengurus B.K.R. Sdr. Sundjono, Umardjoy dan Sukardi berunding dengan Sihota Cihanbuto dan Asoka Butaico untuk minta senjata dari Butai Kota Baru.

- 46) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Ibid*, hal. 32.
- 47) RP. Soedarsono, *Revolusi Yogyakarta dan Sekitarnya*, hal. 32.
- 48) Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 118, 119, 120.
- 49) Kol. A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Cetakan ke II, NV. Ganaco, Bandung Jakarta, 1963, hal. 98, 99.
- 50) Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta 1756 – 1956, *op. cit.* hal. 25.
- 51) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 249.
- 52) Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 54.
- 53) A.H. Nasution TNI, *op. cit.* hal. 123.
- 54) Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 267.
- 55) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 251.
- 56) Lihat, Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 76.
- 57) *Ibid*, hal. 280 – 283.
- 58) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 257.

- 59) Tentang isi lengkap Maklumat dapat dibaca dalam Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *ibid*, hal. 257, 258, 259.
- 60) W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hal.137.
- 61) *Buku Pegangan dan Pedoman Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta*, hal. 198.
- 62) Osman Raliby, *op. cit.*, hal. 36.
- 63) KPH. Soedarsiman Poerwokoesoemo SH, wawancara tanggal 12-11-1979.
- 64) Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *op. cit.* hal. 44.
- 65) *Ibid*, hal. 44, 45.
- 66) *Ibid*, hal. 45.
- 67) *Ibid*, hal. 45
- 68) Kempen, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *op. cit.* hal. 130.

BAB IV Perjuangan di Daerah.

- 1) A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* jilid 5, Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, Bandung, 1979 hal. 3.
- 2) *Ibid*, *loc. cit.*
- 3) *Ibid* hal. 4.
- 4) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI AD Kodam VII/Diponegoro*, Yayasan Penerbit Diponegoro, Semarang 1968, hal. 81.
- 5) *Ibid*, *loc. cit.*
- 6) *Ibid*, hal 82
- 7) *Ibid*, hal. 82 – 83.
- 8) *Ibid*, hal. 83.
- 9) *Ibid*, *loc. cit.*
- 10) A.H. Nasution, *op. cit.* hal. 6.
- 11) Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku* hal. 19.

- 12) *Ibid, loc. cit.*
13. Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 83.
- 14) Purnawan Tjondronegoro, *op. cit.* hal. 20.
- 15) *Ibid, loc cit.*
- 16) *Ibid, loc. cit.*
- 17) *Ibid, loc. cit.*
- 18) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 84
- 19) *Ibid*, hal. 84 – 85.
- 20) *Ibid*, hal. 85.
- 21) *Ibid*, hal. 85
- 22) A.H. Nasution, *op. cit.* hal. 99.
- 23) *Ibid, loc. cit.*
- 24) *Ibid, hal. 58 – 59*
- 25) *Ibid*, hal. 79 – 80.
- 26) *Ibid*, hal. 137.
- 27) *Ibid, loc. cit.*
- 28) *Ibid*, hal. 138.
- 29) *Ibid, loc. cit.*
- 30) *Ibid, loc. cit.*
- 31) *Ibid* hal. 126 – 127.
- 32) *Ibid*, hal. 127
- 33) *Ibid, loc. cit.*
- 34) *Ibid, loc. cit.*
- 35) *Ibid*, hal. 127 – 128.
- 36) *Ibid*, hal. 128
- 37) Purnawan Tjondronegoro, *op. cit.* hal. 23.
- 38) A.H. Nasution, *op. cit.* hal. 107 – 108.
- 39) *Ibid*, hal. 108.
- 40) *Ibid*, hal. 108 – 109.
- 41) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pernerangan. 1953, hal. 233 – 235.
- 42) *Ibid.* hal. 235 – 236.
- 43) *Ibid* hal. 236 – 237.

- 44) A.H. Nasution *op. cit.* hal. 238.
- 45) Bermawi Sa'id, *Tinjauan Revolusi Indonesia*, Pustaka Rakyat NV. Djakarta, 1950. hal. 30.
- 46) *Ibid*, hal. 31.
- 47) *Ibid*, *loc. cit.*
- 48) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 238
- 49) *Ibid*, *loc. cit.*
- 50) *Ibid*, *loc. cit.*
- 51) A.H. Nasution. *op. cit.* hal. 221
- 52) *Ibid*, hal. 219.
- 53) *Ibid*, hal. 220.
- 54) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 49.
- 55) *Ibid* hal. 49 – 50.
- 56) Soegijono. *Kisah Djatukaja Ibu Kota Republik Indonesia Yogyakarta*, Badan Penerbit Nusantara Yogyakarta, 1953, hal. 2.
- 57) *Ibid*, hal. 3.
- 58) *Ibid*, hal. 3 – 4.
- 59) *Ibid*, hal. 4 – 5.
- 60) *Ibid*, hal. 5.
- 61) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 294.
- 62) *Ibid*, hal. 294 – 295
- 63) Soegijono, *op. cit.* hal. 6 – 7.
- 64) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 295.
- 65) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 154.
- 66) *Ibid*, hal. 155.
- 67) Soegijono, *op. cit.* hal. 21 – 22.
- 68) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.* hal. 155.
- 69) Daerah Istimewa Yogyakarta hal. 296 – 297.
- 70) *Ibid*, hal. 297
71. Soegijono, *op. cit.* hal. 26.
- 72) *Ibid*, *loc. cit.*

- 73) *Ibid, loc. cit.*
- 74) *Ibid*, hal. 26 – 27
- 75) *Ibid*, hal. 28
- 76) *Ibid*, hal. 28 – 29.
- 77) *Ibid*, hal. 30 – 31.
- 78) *Ibid*, hal. 31.
- 79) *Ibid*, hal. 33 – 34 33 – 34.
- 80) *Ibid*, hal. 34 – 35.
- 81) Buku Gerilja Wehrkreise III, hal. 11.
- 82) *Ibid, loc. cit.*
- 83) *Ibid*, hal. 12.
- 84) *Ibid*, hal. 206.
- 85) Soegijono, *op. cit.* hal. 42 – 43.
- 86) Koesnodiprodjo, Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah R.I. 1945, Penerbit SK. Seno, Jakarta, 1951, hal. 58.
- 87) *Ibid*, hal. 59.
- 88) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 43.
- 89) *Ibid*, hal. 43 – 44.
- 90) Sartono Kartodirdjo dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, Hal. 34 – 35
- 91) *Ibid*, hal. 38.
- 92) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 135.
- 93) *Ibid, loc. cit.*
- 94) O.G. Roeder, *Anak Desa*, Gunung Agung, Jakarta, 1977, hal. 188.
- 95) Sartono Kartodirdjo dkk, *op. cit.* hal. 39.
- 96) O.G. Roeder, *op. cit.* hal. 189.
- 97) *Ibid, loc. cit.*
- 98) *Ibid, loc. cit.*
- 99) *Ibid*, hal. 189 – 190.
- 100) *Ibid*, hal. 190.
- 101) Sartono Kartodirdjo dkk. *op. cit.* hal. 43.
- 102) *Ibid, loc. cit.*

- 103) *Ibid, loc. cit.*
- 104) *Ibid*, hal. 43 – 44.
- 105) *Ibid*, hal. 44.
- 106) *Ibid*, hal. 44 – 45.
- 107) R. Pitono dkk. *Sejarah Indonesia*, Djilid III, Penerbit Utama, Malang, 1970, hal. 73.
- 108) *Ibid, loc. cit.*
- 109) *Ibid*, hal. 73 – 74.
- 110) *Ibid*, hal. 110.
- 111) Bermawi Sa'id, *op. cit.* hal. 35.
- 112) Sartono Kartodirdjo dkk, *op. cit.* hal. 54.
- 113) *Ibid, loc. cit.*
- 114) *Ibid, loc. cit.*
- 115) *Ibid, loc. cit.*
- 116) *Ibid*, hal. 56
- 117) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 278 – 279.
- 118) Sartono Kartodirdjo dkk. *op. cit.* hal. 57.
- 119) *Ibid*, hal. 57 – 58.
- 120) Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia* PT. Pembangunan, Jakarta hal. 15.
- 121) *Ibid, loc. cit.*
- 122) *Ibid, loc. cit.*
- 123) *Ibid, loc. cit.*
- 124) *Ibid*, hal. 16
- 125) *Ibid, loc. cit.*
- 126) *Ibid, loc. cit.*
- 127) R. Pitono dkk. *op. cit.* hal. 75 – 76.
- 128) Koesnodiprodjo, *op. cit.* hal. 156 – 158.
- 129) Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 407 – 415.
- 130) *Ibid*, hal. 794 – 799.
- 131) *Ibid*, hal. 727 – 732.
- 132) *Ibid*, hal. 833.
- 133) *Ibid*, hal. 86 – 90.
- 134) Biro Pemuda Dep. P.D. dan K. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, 1965, hal.

- 162 – 167.
- 135) *Ibid*, hal. 176 – 177.
- 136) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, PN. Balai Pustaka 1978, hal. 71 – 72.
- 137) *Ibid*, hal. 73.
- 138) *Ibid*, hal. 79 – 80.
- 139) *Ibid*, hal. 84 – 85.

- BAB V Keadaan di daerah DIY menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).
- 1) TB. Simatupang, *Laporan Dari Banaran*, Pembangunan Yogyakarta, 1960, hal. 108.
 - 2) *Ibid*.
 - 3) *Ibid*, hal. 110 – 114.
 - 4) *Ibid*, hal. 114.
 - 5) *Ibid*, hal. 114 – 115.
 - 6) *Wawancara*, dengan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo di Kantor Universitas Jana Badra, 12 Oktober 1979.
 - 7) *Ibid*.
 - 8) T.B. Simatupang, *op.cit.* hal. 118.
 - 9) Hasil *wawancara* dengan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.
 - 10) *Ibid*.
 - 11) Kementerian Penerangan RI. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta, 1972, hal. 311.
 - 12) *Ibid*.
 - 13) *Ibid*.
 - 14) *Ibid*, hal. 313.
 - 15) *Sama dengan No. 6.*
 - 16) *Ibid*.
 - 17) *Ibid*.
 - 18) *Ibid*.
 19. Panitia Penyusun Biro Pemudi Departemen

- P.D. & K. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*.
P.N. Balai Pustaka, Djakarta 1965, hal. 210.
- 20) Kementerian Penerangan RI. *op. cit.* hal. 525.
- 21) *Ibid*
- 22) Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta,
Kota Yogyakarta 200 tahun, Sub Panitia Pener-
bit, Yogyakarta, 1955, hal. 102.
- 23) *Ibid.*
- 24) Kementerian Penerangan Republik Indonesia,
op. cit. hal. 732 – 733.
- 25) *Ibid*
- 26) *Ibid.*
- 27) *Ibid*, hal. 733.
- 28) Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta
op. cit. hal. 106.
- 29) Kementerian Penerangan Republik Indonesia,
loc. cit.
- 30) *Ibid.*
- 31) Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta,
op. cit. hal. 106 – 107.
- 32) *Ibid* hal. 108.
- 33) Sama dengan atas No. 31, hal. 111.
- 34) *Ibid*, hal. 78
- 35) *Ibid*, hal. 80.
- 36) *Ibid.*
- 37) *Ibid*, hal. 86
- 38) *Ibid.*
- 39) Kementerian Penerangan Republik Indonesia,
hal. 813.
- 40) *Ibid*, hal. 770.
- 41) Sama dengan no. 31 hal. 120.
- 42) *Ibid.*
- 43) *Ibid*, hal. 146.
- 44) *Ibid.*

- 45) Sama dengan atas no. 39, hal. 924.
- 46) *Ibid.*
- 47) *Ibid.*, 726.
- 48) *Ibid.*, 669
- 49) *Ibid.*, 671
- 50) *Ibid.*, 674.
- 51) *Ibid.*
- 52) *Ibid.*, 675
- 53) Soebagijo W. *Lima Windu "Antara" (Sejarah dan Perjuangan L.K.B.N. Antara*, Yogyakarta 1978, hal. 70.
- 54) *Ibid.*
- 55) Panitia Penyusun Biro Pemudi Departemen P.D. & K. *op. cit.* hal. 211 – 212.
- 56) *Ibid.*, hal. 123 – 214.
- 57) *Ibid.*, hal. 225.
- 58) *Ibid.*, hal. 227 – 228.
- 59) Suwadi, *Bahan Ceramah* tentang Gerakan Kepanduan - Pramukaan Yogyakarta, 1979/80 hal. 7.
- 60) *Ibid.* hal. 4
- 61) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1978, hal. 97.
- 62) *Wawancara*, dengan Mr. Soedarisman Poerwo-koesoemo.
- 63) Mohammad Hatta *Memoir*, Tintamas, Jakarta, 1978, hal. 556.
- 64) *Wawancara*, dengan Bp. Dayino, Purnawirawan, di Kantor Universitas Jana Badra, Oktober 1979.
- 65) Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Perjuangan di Konperensi Medja Bundar* (Penyelesaian Pertikaian Indonesia Belanda), 1949 hal. 141.
- 66) *Ibid.*, hal. 158.

BAB VI P E N U T U P.

- 1) *Peringatan Tri Pancawarsa Kotapraja Yogyakarta*
7 Juni 1947 – 7 Juni 1962, hal. 9.
- 2) *Kenang-kenangan Peringatan 200 tahun Kota*
Yogyakarta 1756 – 1956, hal. 91.
- 3) *Peringatan Tri Pancawarsa Kotapraja Yogyakarta*
ta, 7 Juni 1947 – 7 Juni 1962, *op. cit.* hal. 7.

DAFTAR KATA (GLOSARIUM)

B.F.O.	:	Bijeenkomst voor Federal Overleg.
B.K.R.	:	Badan Keamanan Rakyat.
Boeigiyugun	:	Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat PETA.
B.P.K.K.P.	:	Badan Penolong Keluarga Korban Perang
B.P.K.N.I.P.	:	Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
B.O.P.K.R.I.	:	Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia
B.P.R.I.	:	Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia.
B.P.U.	:	Barisan Penjagaan Umum.
B.U.	:	Departemen Bagian.
Bundanco	:	Komandan regu.
Busydo	:	Ksatria.
Cudan	:	Kompi pada tentara Peta.
Cuo Sangi In	:	Badan Pertimbangan Pusat.
Daidan	:	Batalyon.
Daidanco	:	Komandan Batalyon.
Dokuritsu Jumbi	:	Badan Untuk Menyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Cosakai	:	
Dokuritsu Jumbi	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat P.P.K.I.
Jinkai	:	

Domei	:	Kantor Berita pemerintah Jepang.
F.D.R.	:	Front Demokrasi Rakyat.
Fujinkai	:	Organisasi wanita.
G u n	:	Kawedanan.
Gunco	:	Wedana.
Gunsei	:	Pemerintah militer.
Gunseibu	:	Pemerintah militer.
Hakko Iciu	:	Kemakmuran bersama Asia Timur Raya.
Heiho	:	Pembangu prajurit.
Hooko kai	:	Himpunan kebaktian.
Hosokyoku	:	Jawatan Radio.
Kaigun	:	Angkatan Laut
Kan Po	:	Lembaran negara.
K.B.W.	:	Krida Beksa Wirama.
Keibodan	:	Barisan bantu Polisi.
Keinin bunka Syodoso	:	Pusat Kebudayaan.
K e n	:	Kabupaten.
Kenpeitai	:	Polisi Militer
K.M.B.	:	Konperensi Meja Bundar.
K.M.K.	:	Komando Militer Kota.
K.N.I.	:	Komite Nasional Indonesia.
K.N.I.P.	:	Komite Nasional Indonesia Pusat.
Koci	:	Daerah kerajaan.
K.P.B.B.I.	:	Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Indonesia.
K.T.N.	:	Komisi Tiga Negara.
Ku	:	Desa.
M.B.K.D.	:	Markas Besar Komando Jawa.
N.I.T.	:	Negara Indonesia Timur.
Samu Serei	:	Undang-undang Osamu yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke enam belas
P.B.I.	:	Partai Buruh Indonesia.
P.D.R.I.	:	Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
P.E.K.I.K.	:	Pemuda Kita Kasultanan.
P.I.R.I.	:	Perguruan Islam Republik Indonesia.

P.S.I.I.	:	Partai Serikat Islam Indonesia.
Putera	:	Pusat Tenaga Rakyat.
Rikugun	:	Angkatan Darat.
R.I.S.	:	Republik Indonesia Serikat.
Romusya	:	Kerja Paksa.
Saiko Syikikan	:	Panglima Tentara Ke-enam belas.
Seinendan	:	Organisasi pemuda.
Seinen Kurensyo	:	Pusat latihan pemuda.
S.M.T.	:	Sekolah Menengah Tinggi.
Sendenbu	:	Departemen Propaganda.
Somubuco	:	Kepala Departemen Urusan Umum.
Son	:	Kecamatan.
Syodanco	:	Komandan Peleton.
Syu	:	Wilayah Karesidenan.
Syucokon	:	Residen/Gubernur.
T.K.R.	:	Tentara Keamanan Rakyat.
T.K.R.	:	Tentara Keselamatan Rakyat.
T.N.I.	:	Tentara Nasional Indonesia.
Tokubetsu si	:	Kota Istimewa
Tonarigumi	:	Rukun Tetangga.
T.R.I.	:	Tentara Republik Indonesia.
T.R.M.	:	Tentara Rakyat Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Wijaya Jakarta 1962.
2. Dari Kantor Berita Domei Proklamasi 17 Agustus 1945 Disiarkan dalam majalah *Penelitian Sejarah*, No. 1 Tahun ke III Maret 1962.
3. Banjaransari, Sudomo, *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*, Penerangan Kotapraja, Yogyakarta.
4. Bernawi Said, *Tinjauan Revolusi Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V. Jakarta 1950.
5. Biro Pemuda Departemen P.D. & K. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, 1965.
6. Buku Gerilya Wahrkreise III.
7. Buku II, Bahan Penataran Undang-Undang Dasar 1945, edisi I, 1978, team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.
8. Buku Pola Penelitian, Kerangka Laporan dan Petunjuk Pe-

laksanaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Departemen P dan K, 1979/1980.

9. Darmosugito, *Kota Yogyakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956, Yogyakarta 1956.*
10. Harjito, *Risalah Gerakan Pemuda, Pustaka Antara, Jakarta 1952.*
11. Hatta, Mohammad, *Mohammad Hatta Memoir. PT. Tintamas, Jakarta, 1978.*
12. Jawatan Penerangan DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1958.
13. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta 1953.*
14. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia, 1945 – 1949.*
15. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Perjuangan di Konperensi Meja Bundar (Penyelesaian Pertikaian Indonesia – Belanda) 1949.*
16. Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah RI. 1945, SK. Seno, Jakarta, 1951.*
17. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, PN. Balai Pustaka 1978.*
18. Muhammad Dimiyati, *Sejarah Perjuangan Indonesia, Jakarta, 1951.*

19. Nasution, Kol. A.H. *Tentara Nasional Indonesia*, jilid I, cetakan ke II, N.V. Ganaco, Bandung, Jakarta 1963.
20. Nasution, A.H. (Jenderal TNI) *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Jakarta, 1966.
21. Nasution A.H. Dr. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I s/d IX, Penerbit Angkasa, Bandung 1977 – 1979.
22. Oemar Sanusi, (Noji Shorei Kyoku Tyo), *Pertanian di Yogyakarta Syu, Hikmat Siap Menang*.
23. Osman Raliby, *Documenta Historica*, Jakarta, 1952.
24. Panitia Pekan Raya Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan R.I. Tahun 1961, di Yogyakarta, 6 Juli – 24 Agustus 1961.
25. Panitia Peringatan Tri Panca Warsa Kotapraja Yogyakarta, 7 Juni 1947 – 7 Juni 1962.
26. Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta, Sub Panitia Penerbitan.
27. *Panji Pustaka*, No. 226, 15 Agustus 2603 (1943), tahun XXI
28. Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa Yogyakarta, D.P.R.D. D.I.Y. 1971 – 1977.
29. Pitono R. dkk. *Sejarah Indonesia*, jilid III, Penerbit Utama, Malang. 1970.
30. Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1952.

31. Prodjosugardo, R.W. *Buku Pegangan Pamong Praja DIY*, Jawatan Praja D.I.Y. 1950.
32. Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku*, diktat, 1979.
33. Roeder, O.G. *Anak Desa Biografi Presiden Soeharto*, Gunung Agung, Jakarta 1977.
34. Samawi, 25 Tahun Merdeka, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta 1978.
35. Sartono Kartodirdjo dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta 1977.
36. Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro, Simaning Yakso Katon Gapura-ning Ratu*, Penerbit Diponegoro, Semarang 1968.
37. Simatupang T.B. *Laporan Dari Banaran*, Pembangunan, Yogyakarta, 1960.
38. Sitorus, IM. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta.
39. Soebagij I.N. *Lima Windu Antara (Sejarah dan Perjuangan)* L.K.B.N. Antara, Yogyakarta, 1978.
40. Soebekti, *Sketsa Revolusi Indonesia 1940 – 1945*. cetakan I, penerbit Grip. Surabaya, 1966.
41. Soedarisman Poerwokoesoemo, KRT. Mr. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, diktat.
42. Soedarsono, R.P. "Revolusi Yogya dan Sekitarnya" dalam majalah *Penelitiarn Sejarah*, 1 Maret 1961 No. 2, Tahun ke II.

43. Soegijono, *Kisah Jatuhnya Ibu Kota Republik Indonesia* Yogyakarta, 1953.
44. Soemantoro, "Yogyakarta Indah" dalam majalah *Hikmat Siap Menang*.
45. Soepardi Prawirodipura (Syumusha Yogyakarta – Kogyo – Sodantyo "Kerajinan Rakyat di Belakang Garis Peperangan" dalam majalah *Hikmat, Siap Menang*.
46. Soeryodiningrat B.P.H. "Kebudayaan dan Pengaruhnya dalam masyarakat. *Hikmat, Siap, Menang*.
47. Sosrodirharjo, Sujito, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa*, Yogyakarta, 1972.
48. Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, P.T. Pembangunan, Jakarta.
49. Suwadi, *Sejarah Gerakan Kepanduan Kepramukaan di Indonesia*, diklat.
50. Tauchid, Moch. *Ki Hajar Dewantara (Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional)*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta.
51. The Liang Gie *Pertembuhan Pemerintah Daerah di Negara RI*. jilid I, Jakarta, 1967.

DAFTAR INFORMAN

No.	N a m a	Alamat	Keterangan
1.	Amin, M	Krasak IIB, Yogyakarta.	aktif dalam gerakan plakat gelap.
2.	Asror Wirjowinoto, Moh.	C. Simanjuntak 40, Yogyakarta.	Anggota KNI DIY, 67 th.
3.	Bachri, Agoes	Kuncen Kt. I RT. 102 No. 20. Yogyakarta.	Pelaku pertempuran Kota Baru.
4.	Dayino	Ngadiwinatan, Yogyakarta.	Staf Intel Brigade IV, Jendral Mayor RP. Soedarsono.
5.	Himodigdoyo	Pujowinatan, Yogyakarta.	Anggota KNI DIY.
6.	Hudara	A.M. Sangaji 45 Yogyakarta.	Anggota KNI DIY, 64 tahun.
7.	Marsudi, Kol. Purn.	Cikini Raya No. 6 Jakarta.	Pelaku Serangan Umum 1 Maret.
8.	Mawardi	Suronatan, Yogyakarta.	Anggota KNI DIY.
9.	Mayahetna	Blok Patuk G 2, Yogyakarta.	Pelaku Serangan Umum 1 Maret

1	2	3	4
10.	Oni Sastraat- madja	Pajeksan. Yogyakarta	Bekas Komandan KOMPI Polisi Isti- mewa.
11.	Probosuprodjo,	Wirobrajan Ng.6/60A Yogyakarta.	Bekas Ketua PE- KIK (Pemuda Ki- ta Kasultanan)
12.	Purbaya. BPH.	Polowijan, Yogyakarta.	Anggota KNI DIY.
13.	Samawi	Direktur Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Jl. Mangkubumi, Yogyakarta.	Tokoh pejuang pers.
14.	Samhudi, R.M.	Surokarsan 9, Yogyakarta.	Staf Markas Ter- tinggi TKR.
15.	Sjaifudin	Gampingan KTI/ 168 B RT.84 Yogyakarta.	Anggota Barisan Istimewa.
16.	Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH., SH.	Cik Di Tiro 17A Yogyakarta.	Bekas Walikota Yogyakarta, ang- gota KNI DIY la- hir 22-10-1913.
17.	Sudarsono, RP.	Jl. Merdeka Barat Jakarta.	Komandan Briga- de IV, dengan pangkat Mayor Jenderal.
18.	Sudarto, Mayjen Purn. Ir.	Jl. Mesjid I, No. 26, 26, Mampang Prapat- an, Jakarta Selatan.	Pemimpin BPU.
19.	Sudirdjo, N.H.	Suryoputran N.I/17 Yogyakarta	Pelaku Serangan Umum 1 Maret.
20.	Sudomo BA	Jl. Patuh No. 25, Yogyakarta.	Pelaku Serangan Umum 1 Maret.
21.	Sukisno	Tugu Kidul 105, Yogyakarta.	Pelaku pertem- an Kota Baru.

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 22. Sutono | Kauman GM. IV/72,
Yogyakarta. | Bekas BKR. |
| 23. Tirtadiningrat,
KRT. | Jl. Ungaran, Yogya-
karta. | Bekas Bupati
Bantul. |
| 24. Wimbo Handaka
Mahmud. | Jl. Lely IV/197.
Perumnas Con-
dong Catur, Yogya-
karta. | Pelaku pertem-
puran.
Kota Baru. |
| 25. Wonohito | Jl. Juadi, Yogyakarta | Tokoh pejuang
pers. |

Perpus
Jende